RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2019-2024

LOMBOK BARAT
PATUT PATUH PATJU

BUPATI
LOMBOK BARAT

WAKIL BUPATI
LOMBOK BARAT

BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 282 ayat (1) huruf c, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
7. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang–undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang–undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 106);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT
dan
BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019 -2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lombok Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas dan fungsi kooordinasi dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025 yang selanjutnya disebutkan sebagai RPJP Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Lombok Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 – 2024, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan Pembangunan Daerah.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
14. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran Pembangunan Daerah.
15. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu Perencanaan Pembangunan Daerah.
16. Sasaran adalah rumusan secara terukur dalam rangka tercapainya tujuan rencana Pembangunan Daerah.
17. Strategi adalah langkah-langkah yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai Sasaran dan Tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
19. Kegiatan adalah suatu aktivitas yang menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa, untuk pencapaian hasil (outcome) dari suatu program.
20. Indikator adalah alat ukur dari suatu Kegiatan, Program, atau Sasaran dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), atau dampak (impact).
21. Kinerja adalah hasil kerja atau tingkat keberhasilan dari suatu Kegiatan, Program, atau Sasaran.
22. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam upaya

mencapai visi dan misi Gubernur dan Bupati/Walikota serta target pembangunan nasional.

23. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
24. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat dengan IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional.
25. Indikator kinerja kunci yang selanjutnya disingkat dengan IKK atau yang lebih dikenal dengan key performance indicators (KPI) atau dikenal juga sebagai key success indicators (KSI) membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi.
26. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
27. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
28. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
29. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Sustainable Development Goals disingkat dengan SDGs adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi .

Pasal 2

(1) RPJMD sebagai sebuah dokumen perencanaan disusun berdasarkan asas :
   a. transparan;
   b. responsif;
   c. efisien;
   d. efektif;
   e. akuntabel;
   f. partisipatif;
   g. terukur;
   h. berkeadilan ; dan
   i. berwawasan lingkungan.

(2) RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh.

(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada RPJPD, RPJMD Provinsi dan RPJMN.

Pasal 3

RPJMD bertujuan untuk :

a. Menjabarkan Visi, Misi Kepala Daerah sesuai dengan tujuan, sasaran pembangunan dan program prioritas Daerah;

b. mengintegrasikan, mensinkronisasikan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi, serta mensinergikan dokumen perencanaan antar perangkat daerah;

c. menjadi acuan penyusunan rencana strategis perangkat daerah; dan

d. menjadi bahan evaluasi kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah.

BAB II

DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

TAHUN 2019 – 2024

Pasal 4

(1) RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan;

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;

BAB III Gambaran Keuangan Daerah;

BAB IV Permasalahan dan Isue Strategis Daerah;

BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;

BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;

BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

BAB IX Penutup.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJMD berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, pengukuran dan pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, serta dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

(1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup daerah kabupaten, mencakup kebijakan perencanaan strategis perangkat daerah dan RPJMD.

(2) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis perangkat daerah lingkup daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra Perangkat Daerah ditetapkan.

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah, telah berpedoman pada RPJMD Kabupaten serta melaksanakan KLHS.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Evaluasi Renstra Perangkat Daerah

Pasal 7

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah.

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

(3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA.

Pasal 8

(1) Kepala BAPPEDA melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis perangkat daerah kabupaten.

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPPEDA menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.

(3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala BAPPEDA.

Bagian Ketiga

Pengendalian dan Evaluasi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pasal 9

(1) Kepala BAPPEDA melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup daerah.

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

(3) Kepala BAPPEDA melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Bupati.

(4) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan Evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan Evaluasi.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Penyusunan RPJMD mempedomani Peraturan Daerah tentang RPJPD, Peraturan Daerah tentang RTRW dan Peraturan Daerah tentang Struktur Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah lainnya yang terkait dengan rencana pembangunan daerah.

Pasal 11

(1) Penyusunan RKPD Tahun 2020 berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Lombok Barat 2005-2025 dan mengacu pada Rancangan Awal RPJMD tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional yang berlaku.

(2) Bupati pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama pemerintahan Bupati berikutnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung

Pada tanggal 07 Oktober 2019

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung

Pada tanggal 07 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H.MOH. TAUFIQ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019 - 2024

I. UMUM

RPJMD Kabupaten Lombok Barat merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Lombok Barat untuk periode lima tahun perencanaan yaitu tahun 2020-2024 sebagai dasar pengukuran kinerja tahun 2020-2024. RPJMD Kabupaten Lombok Barat tahun 2019-2024 disusun berdasarkan Visi Misi Bupati, hasil Evaluasi, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan penelaahan terhadap RTRW Kabupaten.

Penyusunan RPJMD ini dilakukan dengan memperhatikan RPJM Nasional yang masih berlaku, RPJPD Kabupaten, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan RTRW Kabupaten/Kota lainnya. RPJMD digunakan sebagai pedoman pengendalian dan evaluasi serta penetapan Renstra PD dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan sekaligus sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah pada setiap tahunnya.

Berdasarkan periodesasi RPJPD Kabupaten Lombok Barat tahun 2005-2025, dimana periode RPJMD yang lalu sudah berakhir pada tahun 2019, dan Kepala Daerah bersama Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan umum kepala daerah sudah dilantik pada bulan April 2019. Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat periode masa jabatan tahun 2019-2024 belum memiliki dokumen RPJMD yang dijadikan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya, dalam upaya mewujudkan Visi Misi yang telah disampaikan pada sidang Paripurna DPRD.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 – 2024.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “Transparan” adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

huruf b

Yang dimaksud dengan “Responsif” adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi d daerah

huruf c

Yang dimaksud dengan ”Efisien” merupakan pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

huruf d

Yang dimaksud dengan “Efektif” merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.

huruf e

Yang dimaksud dengan “Akuntabel” adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf f

Yang dimaksud dengan “Partisipatif”, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

huruf g

Yang dimaksud dengan “Terukur”, adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

huruf h

Yang dimaksud dengan “Berkeadilan”, adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

huruf i

Yang dimaksud dengan “Berwawasan Lingkungan”, yaitu mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019 NOMOR 169

PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 dapat diselesaikan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan bagian tahapan pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025. RPJMD merumuskan tantangan serta strategi kebijakan dan target yang akan ditempuh untuk menjawab permasalahan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 dimaksudkan untuk memberikan petunjuk awal penyusunan dokumen rencana tahunan, sehingga dapat menghasilkan dokumen yang tersusun dengan alur logika yang strategis dan konsisten. Dengan demikian, dokumen perencanaan akan lebih mudah untuk dipahami serta siap untuk dievaluasi capaiannya. Arah kebijakan dan strategi pembangunan yang terukur kinerjanya akan lebih menjamin keberhasilan pencapaiannya.

Dokumen RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati yang bersinergi dengan Visi dan Misi Nasional, Visi dan Misi Provinsi NTB serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dengan tetap memperhatikan dinamika kondisi daerah. Secara umum materi dokumen RPJMD berisi tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Kepala Daerah. Adapun aspek pembangunan yang dijabarkan meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.

Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah bersama-sama menyusun dokumen RPJMD melalui berbagai tahapan penyempurnaan; Konsultasi Publik, Musrenbang RPJMD, Konsultasi Teknis dengan Pemerintah Provinsi NTB, *Public Hearing* bersama Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Lombok Barat dan mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Barat menjadi Peraturan Daerah sebagaimana mestinya.

Akhirnya kami berharap seluruh masyarakat Lombok Barat dapat membantu dalam implementasi dan pengawasannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Gerung, Oktober 2019
Bupati Lombok Barat

Ttd

H. FAUZAN KHALID

DAFTAR ISI

PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **vi**
DAFTAR GAMBAR ..... **x**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 3
1.3. Hubungan Antar Dokumen 6
1.4. Maksud dan Tujuan 8
1.5. Sistematika Penulisan 9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH **11**
2.1. Aspek Geografi dan Demografi 11
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah 11
2.1.2. Penggunaan Lahan 21
2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah 40
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 42
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 42
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial 49
2.3. Aspek Pelayanan Umum 51
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 52
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 83
2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan 104
2.3.4. Fokus Layanan Fungsi Penunjang dan Administrasi Pemerintahan 111
2.4. Aspek Daya Saing Daerah 116
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 116
2.4.2. Fokus Iklim Berinvestasi 119
2.4.3. Fokus Sumberdaya Manusia 121
2.5. Analisa SWOT 127
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH **129**
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu 129

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD 129
3.1.2. Neraca Daerah 132
3.1.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 137
3.1.4. Proporsi Penggunaan Anggaran 137
3.1.5. Analisis Pembiayaan 138
3.2. Kerangka Pendanaan 138
3.2.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja 138
3.2.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan 141
3.3. Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya 143
3.3.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 143
3.3.2. Obligasi 144
3.3.3. Pinjaman Daerah 144
3.3.4. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) 147
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH 150
4.1. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan 150
4.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar 150
4.1.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 152
4.1.3. Urusan Pilihan 154
4.1.4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 154
4.2. Isu Strategis 156
4.2.1. Analisis Isu Strategis Internasional 156
4.2.2. Analisis Isu Strategis Nasional 162
4.2.3. Analisis Isu Strategis Regional 162
4.2.4. Analisis Isu Strategis Lokal 163
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 166
5. 1. Visi 166
5. 2. Misi 166
5. 3. Tujuan dan Sasaran 167
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 174
6.1. RPJMD Kabupaten Lombok Barat ke-4 (2019 – 2024) 180
6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan 181
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH 258
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH .. 310
8.1. Indikator Kinerja Daerah 310

8.2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) 320
8.2.1. Pendidikan 320
8.2.2. Kesehatan..... 323
8.2.3. Pekerjaan umum 324
8.2.4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman 325
8.2.5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Sub Bidang Urusan Bencana Daerah 325
8.2.6. Sosial..... 326
BAB IX PENUTUP 300
9.1. Pedoman Transisi 328
9.2. Kaidah Pelaksanaan 328

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas Wilayah dan Persentase menurut Kecamatan Kabupaten Lombok Barat.....11
Tabel 2. 2 Temperatur, Kelembaban Udara, Kecepatan Angin, Jumlah Hari Hujan, Curah Hujan dan Lama Penyinaran di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2018.....15
Tabel 2. 3 Nama-nama Sungai dan Panjangnya di Kabupaten Lombok Barat 17
Tabel 2. 4 Daerah Aliran Sungai di Lombok Barat 18
Tabel 2. 5 Ketersediaan Air Permukaan dari Sungai Utama 19
Tabel 2. 6 Daftar Nama Mata Air di Lombok Barat.....19
Tabel 2. 7 Jumlah Mata air yang tertangani 20
Tabel 2. 8 Luas Lahan Pertanian di Lombok Barat Tahun 2015.....27
Tabel 2. 9 Bencana yang Terjadi di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 33
Tabel 2. 10 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2017 41
Tabel 2. 11 Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017.....42
Tabel 2. 12 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Lombok Barat 43
Tabel 2. 13 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013-2017 atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lombok Barat.....44
Tabel 2. 14 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Lombok Barat.....45
Tabel 2. 15 Perkembangan PDRB Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012-2017 Atas Dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku Dirinci Per Kecamatan.....46
Tabel 2. 16 Laju Inflasi Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 - 201847
Tabel 2. 17 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 – 2018 48
Tabel 2. 18 Komponen Pembentuk IPM Lombok Barat Tahun 2014-2018 50
Tabel 2. 19 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 - 2018 53
Tabel 2. 20 Ketersediaan Sekolah Dan Penduduk Usia Sekolah.....54
Tabel 2. 21 Rasio Guru - Murid Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2018 55
Tabel 2. 22 Capaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2018 56
Tabel 2. 23 Capaian SPM Bidang Kesehatan Kab. Lombok Barat Tahun 2014 - 2018 67
Tabel 2. 24 Panjang Jalan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014–2018 69

Tabel 2. 25 Cakupan Layanan Air Minum perpipaan Tahun 2014 – 2017 Dan Layanan Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan Tahun 2018 71
Tabel 2. 26 Daerah Irigasi Yang Menjadi Kewenangan Kab. Lombok Barat Tahun 2017.....72
Tabel 2. 27 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kab. Lombok Barat Tahun 2017 72
Tabel 2. 28 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2014 – 2018 76
Tabel 2. 29 Rumah Layak Huni Tahun 2014 – 2018 77
Tabel 2. 30 Persentase Kawasan Kumuh di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 – 2018 78
Tabel 2. 31 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 – 2018 79
Tabel 2. 32 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2014 -2018 81
Tabel 2. 33 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Tahun 2014 – 201881
Tabel 2. 34 Penanganan PMKS.....82
Tabel 2. 35 Capaian SPM Bidang Sosial Kab. Lombok Barat Tahun 2017 82
Tabel 2. 36 Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2017 84
Tabel 2. 37 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016-2018.....85
Tabel 2. 38 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Tahun 2016 - 2017 Kabupaten Lombok Barat.....86
Tabel 2. 39 Capaian Bidang Urusan Pangan Kab. Lombok Barat Tahun 2015 – 2018 87
Tabel 2. 40 Capaian Kinerja Bidang Lingkungan Hidup Kab. Lombok Barat Tahun 2015 – 2018 88
Tabel 2. 41 Capaian Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Barat Tahun 2015 – 2018 90
Tabel 2. 42 Cakupan Peserta KB Aktif Tahun 2014-2018 91
Tabel 2. 43 Capaian Indikator Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2014 – 2018 92
Tabel 2. 44 Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2018 93
Tabel 2. 45 Trayek dan Jumlah Kendaraan Yang Beroperasi Tahun 2016 – 2018.....94
Tabel 2. 46 Jumlah Blank Spot Area dan BTS di Kab. Lombok Barat Tahun 2016 – 2018 96
Tabel 2. 47 Perkembangan Koperasi Aktif di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 – 2018 97
Tabel 2. 48 Jumlah UKM di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 – 2018 97
Tabel 2. 49 Nilai Investasi PMDN/PMA di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2018 98
Tabel 2. 50 Target dan Realisasi Nilai Investasi Tahun 2018.....99

Tabel 2. 51 Sarana Olah Raga di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 100
Tabel 2. 52 Perkembangan SIPD Kab. Lombok Barat Tahun 2016-2018 101
Tabel 2. 53 Cagar Budaya Dalam Kondisi Baik di Kab. Lombok Barat Tahun 2016-2018 102
Tabel 2. 54 Capaian Kinerja Pelayanan Perpustakaan Kab. Lombok Barat Tahun 2016-2018.....103
Tabel 2. 55 Capaian Pengelolaan Kearsipan Kab. Lombok Barat Tahun 2016-2018 104
Tabel 2. 56 Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap di Kab. Lombok Barat Tahun 2014 – 2018 106
Tabel 2. 57 Kunjungan Wisatawan Tahun 2014-2018 107
Tabel 2. 58 Luas tanam padi, dan palawija di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 108
Tabel 2. 59 Cakupan Pasar Bersih di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016-2018 109
Tabel 2. 60 Capaian Indikator Urusan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 – 2018 110
Tabel 2. 61 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kab. Lombok Barat Tahun 2015-2017.....110
Tabel 2. 62 Capaian Indikator Bidang Urusan Perindustrian Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 – 2018 110
Tabel 2. 63 Jumlah Penempatan Transmigrasi di Kab. Lombok Barat Tahun 2016-2018 111
Tabel 2. 64 Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 – 2018 112
Tabel 2. 65 Hasil Verifikasi Aksi PPK Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 - 2017 113
Tabel 2. 66 Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD Tahun 2017 – 2019 113
Tabel 2. 67 Persentase SILPA Tahun 2016 – 2018 114
Tabel 2. 68 Persentase Belanja Tidak Langsung Tahun 2016 – 2018 114
Tabel 2. 69 Persentase Belanja Langsung Tahun 2016 – 2018.....115
Tabel 2. 70 Tingkat Kompetensi ASN di Kab. Lombok Barat Tahun 2016 – 2018.....115
Tabel 2. 71 Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan di Kab. Lombok Barat Tahun 2016 – 2018 116
Tabel 2. 72 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan dan Pola Konsumsi Penduduk Desa dan Kota di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2018.....116
Tabel 2. 73 NTP Provinsi NTB Januari 2015 – Mei 2018 (2012=100) .118
Tabel 2. 74 Nilai Tukar Petani Provinsi Nusa Tenggara Barat Per Subsektor Mei 2018 (2012=100).....119
Tabel 2. 75 Angka Kriminalitas Menurut Kasus di Kab. Lombok Barat Tahun 2014 - 2018 120

Tabel 2. 76 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013-2017 121
Tabel 2. 77 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 - 2017 122
Tabel 2. 78 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian inerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat.....122
Tabel 3. 1 Realisasi APBD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2018 130
Tabel 3. 2 Perkembangan Neraca Daerah Tahun 2014– 2018.....134
Tabel 3. 3 Perkembangan Proporsi Belanja Aparatur terhadap Total belanja Tahun 2014– 2018.....137
Tabel 3. 4 Perkembangan Defisit Riil Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014– 2018.....138
Tabel 3. 5 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020– 2024 139
Tabel 3. 6 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat Untuk Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020– 2024 141
Tabel 3. 7 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020– 2024 143
Tabel 4. 1 Capaian Indikator TPB Kabupaten Lombok Barat Terhadap Target Nasional 158
Tabel 4. 2 Capaian Jumlah Indikator TPB Terhadap Target Nasional 159
Tabel 4. 3 Indikator TPB Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 - 2024 161
Tabel 5. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Lombok Barat 169
Tabel 6. 1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 – 2024 175
Tabel 6. 2 Arah Kebijakan Tahunan 181
Tabel 6. 3 Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Lombok Barat 183
Tabel 7. 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Lombok Barat.....258
Tabel 7. 2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Lombok Barat 260
Tabel 8. 1 Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah.....310
Tabel 8. 2 Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah.....312
Tabel 8. 3 Indikator SPM Pendidikan.....320
Tabel 8. 4 Indikator SPM Kesehatan.....324
Tabel 8. 5 Indikator SPM Pekerjaan Umum 324
Tabel 8. 6 Indikator SPM Perumahan dan Permukiman.....325
Tabel 8. 7 Indikator SPM Sosial.....327

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Wilayah Kab. Lombok Barat. 11
Gambar 2. 2 Peta Topografi Kabupaten Lombok Barat 14
Gambar 2. 3 Peta Curah Hujan Kabupaten Lombok Barat 16
Gambar 2. 4 Peta Hidrologi Kabupaten Lombok Barat 21
Gambar 2. 5 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Lombok Barat.....23
Gambar 2. 6 Titik-titik yang berpotensi terjadinya bencana banjir dan tanah longsor Tahun 2019 30
Gambar 2. 7 Grafik curah hujan di Desa Jembatan Gantung pada tahun 2019.....31
Gambar 2. 8 Curah hujan di Desa Batulayar tahun 2019. 31
Gambar 2. 9 Curah hujan di Desa Sekotong Tengah tahun 2019. 32
Gambar 2. 10 Curah hujan di wilayah Sekotong Tengah pada tahun 2019 32
Gambar 2. 11 Grafik curah hujan di Kecamatan Lembar pada tahun 2019. 33
Gambar 2. 12 PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) 47
Gambar 2. 13 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin (%) Kab. Lombok Barat, Tahun 2012 - 2018 48
Gambar 2. 14 Perkembangan Indeks Gini Kab. Lombok Barat dan Provinsi NTB Taun 2013-2017 49
Gambar 2. 15 IPM Lombok Barat Tahun 2014– 2018.....50
Gambar 2. 16 Rata Lama Sekolah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 – 2018.....51
Gambar 2. 17 Angka Putus Sekolah (APS) Kab. Lombok Barat Tahun 2014 – 2018 54
Gambar 2. 18 Capaian Indikator Bidang Kesehatan Kab. Lombok Barat Tahun 2014-2018.....64
Gambar 2. 19 Persentase Rumah Tangga Dengan Sanitasi Layak 70
Gambar 2. 20 Penggunaan Lahan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 75
Gambar 2. 21 Trend Indeks Risiko Bencana Lombok Barat.....79
Gambar 2. 22 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2018.....85
Gambar 2. 23 Persentase Wilayah Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi 95
Gambar 4. 1 Skema Pohon Masalah Kabupaten Lombok Barat 156
Gambar 4. 2 Jumlah Indikator TPB Berdasarkan Kewenangan 157

BAB I

PENDAHULUAN

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019 - 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari Visi Misi Kepala Daerah yang baru saja dilantik berdasarkan hasil Pemilukada serentak tahun 2018, yang juga mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah periode ke empat atau 5 (lima) Tahun yang terakhir. Selanjutnya sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52 – 659 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Bupati Lombok Barat dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.52 – 660 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Wakil Bupati Lombok Barat, dinyatakan bahwa masa jabatan H. Fauzan Khalid, S. Ag, M. Si sebagai Bupati dan Hj. Sumiatun sebagai Wakil Bupati Lombok Barat adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan pada Tanggal 23 April Tahun 2019 sampai dengan Tanggal 23 April Tahun 2024.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mengacu pada RPJMD Provinsi dan RPJMN. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini telah melalui tahapan penyempurnaan melalui konsultasi publik, pembahasan dengan DPRD, konsultasi teknis dengan provinsi dan musrenbang RPJMD, serta menindaklanjuti rekomendasi Gubernur Provinsi NTB yang dituangkan dalam Keputusan Nomor 660/099/PPLDLHK/2019 Perihal Validasi KLHS RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangaka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RPJMD mencakup agenda pembangunan periode Tahun 2019 – 2024 dengan mempertimbangkan arah kebijakan RPJPD Tahun 2005 – 2025, hasil evaluasi RPJMD periode 2014 – 2019, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan masukan dari pemangku kepentingan termasuk akademisi dan masyarakat. Perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan juga mempertimbangkan dinamika geostrategis dan analisa atas berbagai tantangan utama yang akan dihadapi tahun 2019 – 2024.

Sebagai upaya mendukung pembangunan nasional yang termuat dalam RPJMN Tahun 2015 – 2019 yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017, maka Pemerintah Kabupaten Lombok Barat secara eksplisit memuat dukungan tersebut dalam dokumen RPJMD dengan memastikan pengintegrasian skenario pembangunan daerah dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan serta keberlangsungan lingkungan hidup sebagai hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

RPJPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005 – 2025 dilaksanakan dalam empat tahapan RPJMD yang pada setiap tahapannya telah memuat rumusan dan arahan prioritas kebijakan seperti yang digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. 1 Tahapan Pembangunan dan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005 – 2025

Berdasarkan gambar di atas dijelaskan bahwa untuk dokumen RPJMD tahun 2019 – 2024 masuk pada tahapan ke IV atau tahapan terakhir periode RPJPD Kabupaten Lombok Barat. Melihat periodesasi tahun RPJPD, maka periode terakhir RPJMD Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 201, dijelaskan bahwa Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023. Namun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52-659 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nomor 132.52-660 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, dinyatakan bahwa Periode Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat adalah Tahun 2019-2024, sehingga RPJMD Kabupaten Lombok Barat mengikuti periode masa jabatan yaitu tahun 2019-2024.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
7. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang–undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang–undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusat Tenggara Barat Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 106);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Hubungan antar dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 – 2024 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Hubungan RPJMD Kabupaten Lombok Barat dengan RPJM Nasional, dan RPJMD Provinsi NTB

   Hierarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJM Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2019 – 2024 merupakan bagian yang terintegrasi, satu kesatuan dengan perencanaan pembangunan nasional dengan mengacu kepada RPJM Nasional, RPJMD Provinsi NTB yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Dengan demikian, RPJM Daerah harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

2. Hubungan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Lombok Barat

   Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Lombok Barat tahun 2005 - 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai amanat UUD 1945. RPJPD Tahun 2005 – 2025 selanjutnya digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD Tahun 2019 – 2024 untuk periode 5 (lima) tahun. Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Lombok Barat tahun 2019 – 2024 merupakan periode ke-4 atau periode terakhir yang mengacu pada RPJPD Kabupaten Lombok Barat tahun 2005 - 2025.

3. Hubungan RPJMD dengan RTRW

   Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 – 2031 sebagai dasar untuk

menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Lombok Barat.

4. Hubungan RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

   Salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan RPJMD adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang merupakan rangkaian analisis sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan rencana dan/atau program. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

5. Hubungan RPJMD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra – PD)

   RPJM Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 – 2024 digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra PD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun oleh PD merupakan dokumen penjabaran teknis dari RPJMD.

6. Hubungan RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

   RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD. Pasal 12 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN disebutkan “RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, prioritas pembangunan

daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun anggaran dalam periodesasi 2019 – 2024.

Gambar 1. 2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

1.4. Maksud dan Tujuan

RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 – 2024 disusun dengan maksud mengarahkan penyelenggaraan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita – cita dan tujuan pembangunan nasional, provinsi, pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2019 – 2024 untuk selanjutnya sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan lainnya. Sedangkan tujuan disusunnya RPJMD ini adalah :

1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah;
2. Menetapkan pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) PD dan perencanaan penganggaran.
3. Menjamin terwujudnya keterpaduan antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan Kabupaten Lombok Barat.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 – 2024 mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menguraikan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Menguraikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah yang mencakup kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan guna menyongsong pembangunan tahun berikutnya.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Menguraikan beragam permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Kabupaten Lombok Barat.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, tujuan pembangunan beserta sasaran yang ingin dicapai di akhir tahun RPJMD.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Menguraikan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah menuju tercapainya visi dan misi pembangunan.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Menyajikan penetapan indikator kinerja daerah untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Selatan : Samudera Hindia
b. Sebelah Barat : Selat Lombok dan Kota Mataram
c. Sebelah Timur : Kabupaten Lombok Tengah
d. Sebelah Utara : Kabupaten Lombok Utara

Untuk lebih jelasnya batas administrasi Kabupaten Lombok Barat seperti yang terlihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Wilayah Kab. Lombok Barat.

Sumber : Bappeda Kab. Lombok Barat, 2018

Secara rinci nama kecamatan dan luas wilayahnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Luas Wilayah dan Persentase menurut Kecamatan Kabupaten Lombok Barat

Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Persentase (%)
Sekotong	529.38	50.23
Lembar	62.66	5.95

Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Persentase (%)
Gerung	62.30	5.91
Labuapi	28.33	2.69
Kediri	21.64	2.05
Kuripan	21.56	2.05
Narmada	107.62	10.21
Lingsar	96.58	9.16
Gunungsari	89.74	8.51
Batu Layar	34.11	3.24
Jumlah	**1053.92**	**100.00**

Sumber : BPS Kab. Lombok Barat, 2018

Secara administratif, Kabupaten Lombok Barat terbagi atas 10 (sepuluh) Kecamatan, yaitu: Kecamatan Sekotong memiliki luas 529,38 km^2 dan 9 (Sembilan) desa, Kecamatan Lembar memiliki luas 62,66 km^2 dan 10 (sepuluh) desa, Kecamatan Gerung memiliki luas 62,3 km^2 dan 11 (sebelas) desa 3 kelurahan, Kecamatan Labuapi memiliki luas 28,33 km^2 dan 12 (dua belas) desa, Kecamatan Kediri memiliki luas 21,64 km^2 dan 10 (sepuluh) desa, Kecamatan Kuripan memiliki luas 21,56 km^2 dan 6 (enam) desa, Kecamatan Narmada memiliki luas 107,62 km^2 dan 21 (dua puluh satu) desa, Kecamatan Lingsar memiliki luas 96,58 km^2 dan 15 (lima belas) desa, Kecamatan Gunungsari memiliki luas 89,74 km^2 dan 16 (enam belas) desa, dan Kecamatan Batulayar memiliki luas 34,11 km^2 dan 9 (sembilan) desa. Kecamatan Gerung merupakan ibu kota kabupaten sekaligus sebagai pusat pemerintahan.

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Ditinjau dari keadaan geografisnya, Kabupaten Lombok Barat dibagi menjadi:

- Daerah Pegunungan, yaitu gugusan pengunungan yang membentang dari Kecamatan Lingsar sampai Kecamatan Narmada. Gugusan pegunungan ini merupakan sumber air sungai yang mengalir ke wilayah bagian tengah dan bermuara di pantai barat.
- Daerah Berbukit-bukit, yang terdapat di bagian selatan meliputi Kecamatan Sekotong dan Lembar di bagian selatan.
- Daerah Dataran Rendah, yang terdapat di bagian tengah yang membentang dari perbatasan ujung timur dengan ujung barat.

Secara geografis letak Kabupaten Lombok Barat berada pada posisi sebagai berikut :

a. Sebelah Selatan : 8˚55'.19'‘LS – 116˚0’5”BT
b. Sebelah Barat : 8º45‘.11,15'‘LS – 115º49,12’.04”BT
c. Sebelah Timur Selatan : 8˚52’22.29”LS- 116˚6’33.7”BT
d. Sebelah Timur Utara : 8˚24‘.33.82”LS- 116˚20’15.62”BT

Kabupaten Lombok Barat memiliki gugusan pulau-pulau (gili), baik yang berpenghuni maupun tidak berpenghuni, diantaranya adalah Gili Kedis, Gili Sudak, Gili Tangkong (Desa Tawun), Gili Poh, Gili Genting, Gili Lontar, Gili Gede, Gili Ringgit, Gili Layar, Gili Asahan, Gili Goleng (Desa Pelangan), Gili Kao, Gili Kere, Gili Geneng-geneng, Gili Anak Ewo, Gili Sarang, Gili Wayang, Gili Pulau Tiga, Gili Tepong, Gili Batu Nyangkong, Gili Malang dan Gili Sepatang (Desa Sepi). Gili Sepatang (Pulau Sophialouisa) merupakan salah satu pulau kecil terluar Indonesia yang terletak di Samudera Hindia dan merupakan wilayah paling selatan dari provinsi NTB, dan masih terdapat banyak pulau yang sampai saat ini belum mempunyai nama. Berdasarkan hasil pengamatan Citra Satelit tahun 2016, terdapat 100 pulau baru di NTB yang tidak berpenghuni, belum mempunyai nama, dan sebagian besar berada di Kabupaten Lombok Barat, yaitu di Kecamatan Sekotong sebanyak 90 pulau.

2.1.1.3. Topografi

Berdasarkan kondisi topografinya, wilayah Kabupaten Lombok Barat dikategorikan sebagai berikut : a) ketinggian 0 - 100 meter di atas permukaan laut, memiliki luas sebesar 34.800 Ha atau 40,80% dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat; b) ketinggian 100-500 meter, memiliki luas wilayah sebesar 40.966 Ha atau 48% dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat; c) ketinggian 500-1000 meter memiliki luas wilayah 8.650 Ha atau 10,1% dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat; dan d) ketinggian 1000 meter ke atas seluas 885 Ha atau 1,0% dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat.

Sedangkan tingkat kemiringan lahan di Kabupaten Lombok Barat sangat bervariasi dan diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kelas kemiringan sebagai berikut : 1) Tingkat kemiringan 0-2 %

merupakan tingkat kemiringan yang paling luas mencapai sekitar 31.841 Ha atau 37,3 % dari luas Kabupaten Lombok Barat; 2) Tingkat kemiringan 2-15 % mencapai seluas 10.657 Ha atau 12,5 % dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat; 3) Tingkat kemiringan 15-40 % seluas 25.920 Ha atau 30,3 % dari luas Kabupaten Lombok Barat; dan 4) Tingkat kemiringan lahan 40 % keatas seluas 16.883 Ha atau 19,8 % dari luas Kabupaten Lombok Barat dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat.

Tingkat kemiringan 0-2% dengan kategori datar sangat berpotensi untuk pengembangan pertanian tanaman pangan (padi). Sedangkan kondisi topografi yang tinggi dengan kemiringan yang curam (40%) ke atas, sangat berpotensi terjadinya erosi dan pergerakan tanah atau bencana tanah longsor. Sehingga untuk setiap peruntukan lahan sangat diperlukan analisis kesesuaian lahan. Sedangkan pada dataran yang sangat rendah perlu penataan pemukiman di sekitar muara sungai, karena berpotensi terjadinya genangan dan banjir.

Gambar 2. 2 Peta Topografi Kabupaten Lombok Barat

Sumber : Bappeda Kab. Lombok Barat, 2018

2.1.1.4. Klimatologi

Kabupaten Lombok Barat beriklim tropis dengan karakteristik musim penghujan pada bulan Oktober hingga Maret dan musim kemarau pada bulan April hingga September. Suhu udara rata-rata di Kabupaten Lombok Barat selama lima tahun terakhir (2014-

2018) bisa dikatakan relatif sejuk dengan suhu minimum rata-rata 19,7°C dan suhu maksimum rata-rata 33,6°C, dengan kelembaban udara rata-rata terendah 77,2 persen, kelembaban udara rata-rata tertinggi 88,4 persen. Kecepatan angin rata-rata terendah sebesar 3,9 knots dan rata-rata kecepatan angin maksimum sebesar 19,4 knots. Jumlah hari hujan rata-rata terendah sebanyak 2,8 hari hujan dan hari hujan rata-rata tertinggi sebanyak 22,8. Curah hujan bulanan rata-rata terendah sebesar 9,8 mm dan curah hujan rata-rata tertinggi sebesar 390,8 mm dengan lama penyinaran rata-rata terendah sebesar 47,6 persen dan lama penyinaran rata-rata tertinggi sebesar 86,8 persen.

Curah hujan lebat (sangat tinggi) yang biasanya terjadi pada bulan November sangat perlu diwaspadai akan terjadinya pergerakan tanah (tanah longsor). Secara alami curah hujan merupakan pemicu longsor (pergerakan tanah), karena tak ada longsor tanpa adanya hujan, namun curah hujan bukanlah satu-satunya penyebab tanah longsor, sangat tergantung pada kondisi daya dukung lingkungan. Curah hujan dengan klasifikasi sedang terjadi pada bulan januari, februari, april dan desember. Sedangkan curah hujan bulanan tergolong ringan terjadi pada bulan maret, mei, juni, juli, agustus, September, dan oktober.

Tabel 2. 2 Temperatur, Kelembaban Udara, Kecepatan Angin, Jumlah Hari Hujan, Curah Hujan dan Lama Penyinaran di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2018

Tahun	Temperatur (°C)		Kelembaban Udara (Persen)		Rata-rata Kecepatan Angin	Kec. Angin Maks	Hari Hujan		Curah hujan bulanan (mm)		Lama Penyinaran (%)	
	Min	Maks	Terendah	Tertinggi	Knots	Knots	Terendah	Tertinggi	Terendah	Tertinggi	Terendah	Tertinggi
2014	1	35,0	78,0	87,0	3,1	38,0	1,0	22,0	0	383,	49,0	91,0
2015	1	33,9	74,0	95,0	6,0	13,0	1,0	20,0	1,0	272,	59,0	91,0
2016	2	33,1	80,0	88,0	3,5	12,0	7,0	25,0	38,0	504,	45,0	82,0
2017	1	34,0	77,0	86,0	3,7	24,0	5,0	23,0	10,0	305,	42,0	81,0
2018	2	32,0	77,0	86,0	3,3	10,0	0	24,0	0	490,	43,0	89,0
Rata-	1	33,6	77,2	88,4	3,9	19,4	2,8	22,8	9,8	390,	47,6	86,8

Sumber : BPS Kabupaten Lombok Barat

Gambar 2. 3 Peta Curah Hujan Kabupaten Lombok Barat

Sumber : Bappeda Kab. Lombok Barat, 2018

2.1.1.5. Geologi

Keadaan geologis Lombok Barat didominasi oleh batuan gunung api serta alluvium (resent). Batuan tertua berumur tersier sedangkan yang termuda berumur kuarter. Batuan tersier terdiri dari perselingan batu pasir kuarsa, batu lempung, breksi, lava, tufa dengan lensa-lensa batu gamping. Sedangkan batuan kuarter terdiri dari perselingan breksi gampingan dan lava, breksi, lava, tufa, batu apung, dan breksi lahar.

Berdasarkan kajian Pusat Sumberdaya Geologi tahun 2015, secara geologi wilayah Lombok Barat, khususnya Sekotong, sangat berpotensi untuk terbentuknya endapan logam seperti emas dan logam dasar. Pengamatan lapangan banyak dijumpai adanya indikasi mineralisasi (alterasi) yang berkembang cukup baik, tersebar cukup baik dan merata terutama di blok timur, didominasi oleh batuan andesit, breksi vulkanik, tufa (breksi tufa) dan intrusi mikro diorite. Alterasi dan mineralisasi terjadi pada batuan vulkanik dalam bentuk propilit, argilik, dan silisik dimana di beberapa tempat disertai dengan piritisasi dan struktur stockwork.

Hasil analisis laboratorium kimia pada sampel sedimen sungai menunjukkan kadar logam mulia Au (Aurum) atau emas di wilayah ini tidak tinggi, nilai tertinggi hanya 54 ppb Au terdapat di blok barat, dan rata-rata kadar Au <15 ppb. Logam dasar nilai tertinggi

Zn 460 ppm, Pb 63 ppm, Cu 57 ppm, Ag 8,1 ppm, As 20 ppm, Sb 10 ppm, Hg 0,79 ppm.

Sedangkan hasil analisis kimia pada sampel batuan menunjukkan kadar logam mulia di wilayah ini memiliki nilai tertinggi hanya 41 ppb Au, dengan kadar rata-rata < 10 ppb Au. Logam dasar nilai tertinggi hanya mencapai 174 ppm Zn, 74 ppm Pb, 495 ppm Cu, 3,7 ppm Ag, 28 ppm As, 6 ppm Sb, 886 ppb Hg atau 0,088 ppm.

Hasil analisis XRD mineral alterasi yang muncul kaolinit–illit–quartz, sebagian quartz-albit-monmorilonit. Hasil analisis petrografi batuan penyusun terdiri dari trakitik andesit, mikrodiorit, aplitic granit, batugamping, batulempung. Hasil analisis mineragrafi menunjukkan asosiasi mineral mineralisasi adalah pirit-kalkopirit-hidrous oxide, dan pirit-kovelit-hidrous oxide. Hasil analisis mineralogy, mineral dominan magnetit (>90%), amfibol (14%), piroksen (rata-rata 5%, beberapa lokasi mencapai 15%), sementara kuarsa (<1%) dan zircon (trace).

Selanjutnya Lombok Barat memiliki kawasan lindung geologi berupa kawasan cagar alam geologi meliputi : a) kawasan lindung geologi terdapat di Desa Kuranji Kecamatan Labuapi dengan luas sekitar 2 ha; dan b) kawasan lindung geologi terdapat di Dusun Pengawisan Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong dengan luas sekitar 1 ha.

2.1.1.6. Hidrologi

Salah satu sumberdaya air di Kabupaten Lombok Barat adalah air permukaan seperti sungai dan mata air. Air permukaan dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia seperti mengairi sawah, keperluan peternakan, keperluan perikanan air tawar, keperluan industri, perumahan, dan juga sebagai tempat rekreasi. Berikut nama sungai utama dan panjang sungai di Kabupaten Lombok Barat.

Tabel 2. 3 Nama-nama Sungai dan Panjangnya di Kabupaten Lombok Barat

No	Sungai	Panjang (km)	Kecamatan yang Dilewati Sungai
1	Ancar	16,728	Lingsar
2	Babak	54,892	Labuapi

No	Sungai	Panjang (km)	Kecamatan yang Dilewati Sungai
3	Dalem/Batu Kumbung	10,312	Kuripan
4	Dodokan	23,373	Gerung
5	Jangkok	48,890	Narmada, Lingsar
6	Jelateng	12,732	Lembar
7	Kelep	18,486	Sekotong
8	Meninting	40,835	Gunungsari, Batu Layar
9	Midang	9,548	Gunungsari, Lingsar
10	Paku Keling	6,904	Kediri
11	Pelangan	18,428	Sekotong
12	Sulin / Lendang Lekong	7,492	Kuripan
Jumlah		268,62	

Sumber : Dinas PU Kab. Lobar, Bappeda Kab. Lobar 2018

Kabupaten Lombok Barat dilalui oleh 12 sungai utama dengan panjang keseluruhan 268,62 km, berfungsi untuk berbagai keperluan seperti air baku airminum, pertanian, peternakan, dan perikanan. Sungai utama terpanjang yang melewati Lombok Barat adalah Sungai Babak sepanjang 54,892 km yang melewati Kecamatan Labuapi. Kemudian sungai utama terpanjang kedua adalah Sungai Jangkok dengan panjang 48,890 km yang melewati Kecamatan Narmada dan Lingsar. Sedangkan sungai utama yang paling pendek adalah Sungai Paku Keling sepanjang 6,904 km melewati Kecamatan Kediri.

Lombok Barat juga dilalui oleh sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdiri dari 9 DAS dengan total luas ± 1.237,8 km^2,yang konsentrasi cukup besaradapada DAS Dodokan (± 46,44%), DAS Babak 20,88%, DAS Jangkok 13,63%, DAS Meninting 9,28%.

Tabel 2. 4 Daerah Aliran Sungai di Lombok Barat

No	Nama DAS (Sungai Utama)	Luas Das (km2)	Persentase Luas (%)
1	Dodokan	574,79	46,44
2	Jangkok	168,73	13,63
3	Meninting	114,92	9,28
4	Babak	258,41	20,88
5	Senggigi	4,28	0,35
6	Krandangan	5,01	0,40
7	Batulayar	5,71	0,46

No	Nama DAS (Sungai Utama)	Luas Das (km2)	Persentase Luas (%)
8	Pelangan	67,28	5,44
9	Jelateng	38,67	3,12
Jumlah		1.237,8	100

Sumber : BWS NT1, 2014

Keberadaan sungai-sungai yang melewati Kabupaten Lombok Barat merupakan karunia Ilahi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang mengalir sepanjang tahun. Ketersediaan air permukaan dari sungai utama tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 5 Ketersediaan Air Permukaan dari Sungai Utama

No	Sungai	Debit (m3/dt)		Rasio Qmax/Qmin
		Maksimal	Minimal	
1	Meninting	13,01	0,12	108,42
2	Jangkok	39,8	1,97	20,20
3	Babak	18,05	4,9	3,68
4	Dodokan	31,4	2,35	13,36

Sumber : Dinas PU Kab. Lombok Barat 2018

Berdasarkan jumlah debit air, dan perbandingan antara debit air maksimal dengan debit air minimal, sungai-sungai yang melewati Lombok Barat dapat digolongkan sebagai Daerah Aliran Sungai yang kurang baik (kurang sehat) yaitu pada Sungai Meninting dengan nilai rasio Qmak/Qmin lebih dari 100, sedangkan Sungai Jangkok, Sungai Babak dan Sungai Dodokan tergolong Sungai dengan kondisi sangat baik yang ditunjukkan dengan nilai ratio Qmaks/Qmin kurang dari 50.

Selain air permukaan yang berasal dari sungai, di Lombok Barat juga terdapat banyak mata air yang merupakan sumber air baku untuk kebutuhan air minum, industri, dan sebagainya. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat (2018), terdapat 516 mata air yang tersebar di 10 kecamatan, dan beberapa diantaranya disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2. 6 Daftar Nama Mata Air di Lombok Barat

No	Nama Mata Air	Lokasi		Debit Air (Liter/Detik)
		Desa	Kecamatan	
1	Sarasute	Lingsar	Lingsar	80
2	Saraswake	Lingsar	Lingsar	80
3	Lingkuk Mas	Lingsar	Lingsar	20
4	Jero Langkir	Batu Mekar	Lingsar	3
5	Perapi	Batu Mekar	Lingsar	25
6	Pesisuk	Batu Mekar	Lingsar	10

No	Nama Mata Air	Lokasi		Debit Air (Liter/Detik)
		Desa	Kecamatan	
7	Kelebutan	Lingsar Timur	Lingsar	0
8	Manggong	Batu Kumbung	Lingsar	10
9	Semotoh	Sesaot	Narmada	5
10	Bentoyang	Sesaot	Narmada	40
11	Aik Nyet I	Sesaot	Narmada	200
12	Aik Nyet II	Sesaot	Narmada	10
13	Jerangkak	Sesaot	Narmada	30
14	Pengkukur	Sesaot	Narmada	10
15	Sesaot I	Sesaot	Narmada	15
16	Sesaot II	Sesaot	Narmada	20

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lombok Barat, 2018

Telah terjadi penurunan debit air beberapa mata air yang ada di Kabupaten Lombok Barat, yang mengindikasikan telah terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Dari 20 mata air sampel yang dianalisa (tahun 2008), telah terjadi penurunan debit mata air pada 17 mata air atau 85% mengalami penurunan bahkan sudah mati sama sekali sebanyak 5 (lima) mata air, dan hanya 3 (tiga) atau 15% mata air yang mengalami peningkatan debit air.

Berdasarkan kondisi mata air tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat telah melakukan konservasi mata air melalui program PERMATA (Perlindungan Mata Air), sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2. 7 Jumlah Mata air yang tertangani

No	Kecamatan	Total Jumlah Mata Air yang terdata	Kegiatan PERMATA					
			Sampai 2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah sampai akhir tahun 2018
1	Sekotong	42	10	6	-	3	-	19
2	Lembar	11	5	-	3	3	-	11
3	Gerung	23	5	-	4	3	-	12
4	Labuapi	8	1	-	1	2	-	4
5	Kediri	4	2	-		1	-	3
6	Kuripan	8	2	2	1		9	14
7	Narmada	170	9	7	4	7	5	32
8	Lingsar	190	16	1	3	8	-	28
9	Gunungsari	39	3	6	2	3	-	14
10	Batulayar	10	2	1	2	5	3	13
Jumlah		**516**	**55**	**23**	**20**	**35**	**17**	**150**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Lombok Barat, 2019

Sumber air permukaan lainnya yang ada di Kabupaten Lombok Barat adalah bendungan atau DAM, yang merupakan sumber air irigasi pertanian dengan luas baku 16.418 ha dan luas irigasi 12.997 ha (dikelola oleh APBN, APBD I, APBD II). DAM yang dikelola Kabupaten Lombok Barat (APBD II) dengan luas baku 6.181 ha, dan luas irigasi 4.756 ha. DAM yang masuk dalam wilayah pengamat Gunungsari (Sandik, Medas, Gegutu, dll) dengan luas baku 3.118 ha dan luas irigasi 2.065 ha; DAM yang masuk dalam wilayah pengamat Narmada (DAM Nyurbaya, Keru, dll) dengan luas baku 4.334 ha dan luas irigasi 3.117 ha; dan DAM yang masuk wilayah pengamat Kediri (DAM Buntopeng, Pelangan, dll) dengan luas baku 8.336 dan luas irigasi 7.227 ha.

Lombok Barat juga memiliki sumber air yang berasal dari Cekungan Air Tanah sebagaimana disajikan pada Gambar berikut.

Gambar 2. 4 Peta Hidrologi Kabupaten Lombok Barat

Sumber : Bappeda Kab Lombok Barat, 2018

2.1.2. Penggunaan Lahan

Sesuai dengan peruntukannya Rencana Pola Ruang di Kabupaten Lombok Barat dibagi menjadi dua bagian yakni, Rencana Pola Ruang untuk Kawasan Lindung dan Rencana Pola Ruang untuk Kawasan Budidaya.

Sejalan dengan hal itu bentang alam Kabupaten Lombok Barat terbagi atas wilayah pegunungan, wilayah dataran, dan wilayah pesisir pantai. Wilayah pegunungan dan perbukitan membentang di bagian utara yang mencakup sebagian wilayah kecamatan Batu

Layar, Gunungsari, Lingsar dan Narmada. Wilayah ini didominasi oleh fungsi hutan lindung. Wilayah ini memiliki peran dan fungsinya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan pembangunan Lombok Barat kedepan.

Di bagian selatan tepatnya di Kecamatan Sekotong terdapat pula wilayah pegunungan dan perbukitan, namun kondisi alamnya jauh berbeda dengan yang berada di bagian utara. Wilayah pegunungan dan perbukitan yang ada di bagian selatan kondisinya jauh lebih kering dibanding di bagian utara. Disamping dipergunakan untuk fungsi hutan lindung, potensial secara fisik alamiah untuk pengembangan pertanian lahan kering.

Potensi penggunaan lahan sangat dipengaruhi oleh karakter fisik alamiah yang ada, kecenderungan perkembangan penduduk, kecenderungan pemanfaatan lahan, sedangkan fasilitas-fasilitas dan infrastruktur wilayah lainnya akan mendukung potensi penggunaan ke depan.

Penggunaan lahan secara umum dibagi dua yakni kawasan budidaya dan kawasan lindung. Potret bentang alam dan substansi karakter fisik yang ada memperlihatkan kawasan lindung berada di bagian utara melingkari kawasan Gunung Rinjani yang meliputi wilayah kecamatan Batu Layar, Gunungsari, Lingsar dan Narmada, sedangkan di bagian selatan yakni Kecamatan Sekotong potensial untuk pengembangan hutan lindung mutlak sampai kepada hutan lindung terbatas. Sedangkan untuk kawasan budidaya yang terdiri dari berbagai macam penggunaan mulai dari pertanian, pariwisata, permukiman dan sebagainya dapat didelinasi pada lahan datar berkisar antara 0 – 15% dan ada toleransi untuk kawasan yang berada pada kemiringan 15 – 20%.

Potensi penggunaan lahan kawasan lindung di bagian utara potensial untuk pengembangan hutan lindung, hutan lindung terbatas dengan pengembangan sebagai hutan wisata. Sedangkan kawasan lindung di bagian selatan potensial untuk pengembangan hutan lindung maupun hutan produksi yang mengembangkan tanaman-tanaman lahan kering.

Gambar 2. 5 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Lombok Barat

Sumber : Bappeda Kab Lombok Barat, 2018

2.1.2.1. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung di Kabupaten Lombok Barat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) bagian diantaranya: 1) Kawasan Hutan Lindung; 2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; 3) Kawasan perlindungan setempat; 4) Kawasan pelestarian alam, dan cagar budaya; 5) Kawasan rawan bencana alam; 6) kawasan lindung geologi; dan 7) Kawasan lindung lainnya.

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud terdiri atas :

1. Luas kawasan hutan lindung di Lombok Barat adalah seluas 25.078,94 Ha meliputi: Kawasan hutan lindung yang persebarannya terletak pada sebagian Kelompok Hutan Gunung Rinjani (Register Tanah Kehutanan/RTK.1) seluas 17.038,41 Ha, Kelompok Hutan Gunung Sasak (RTK 3) seluas 492 ha, Kelompok Hutan Ranget (RTK.6) seluas 2,70 Ha, Kelompok Hutan Pelangan (RTK 7) seluas 5.671,83 Ha dan Kelompok Hutan Mareje Bonga (RTK 13) seluas 1.874,00 Ha.
2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berlokasi di : Kawasan resapan air di Kecamatan Gunungsari, Narmada, Lingsar, Gerung, Lembar, dan Sekotong.
3. Kawasan perlindungan setempat meliputi :
   a. kawasan sempadan sungai dilakukan pengelolaan sungai terdiri dari :

1) kegiatan pinggir sungai mampu melindungi dan memperkuat serta pengaturan aliran air, dengan tanaman keras dan krib (pengarah arus) pengendali saluran air;
2) sempadan sungai besar sekitar 30-100 meter sesuai letak, bentuk dan kondisi sungainya yaitu pada Satuan Wilayah Sungai (SWS) : Jelateng dan Dodokan; dan
3) sempadan sungai kecil 10-30 meter yang berada di luar permukiman; dan
4) untuk sungai di kawasan permukaan berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 15 meter.

b. kawasan mata air tersebar di tiap kecamatan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keperluan pemenuhan air minum dan irigasi;
c. kawasan sempadan pantai ditetapkan di wilayah kabupaten berlokasi disemua wilayah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan jarak minimal 30-250 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat; dan
d. kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan luas seluruhnya kurang lebih 9.568,10 ha meliputi Ibukota Kecamatan Sekotong seluas kurang lebih 6.283,53 ha, Ibukota Kecamatan Lembar seluas kurang lebih 904,79 ha, Ibukota Kecamatan Gerung seluas kurang lebih 210,35 ha, Ibukota Kecamatan Labuapi seluas kurang lebih 60,68 ha, Ibukota Kecamatan Kediri seluas kurang lebih 283,39 ha, Ibukota Kecamatan Kuripan seluas kurang lebih 408,68 ha, Ibukota Kecamatan Narmada seluas kurang lebih 198,33 ha, Ibukota Kecamatan Lingsar seluas kurang lebih 518,32 ha, Ibukota Kecamatan Gunungsari seluas kurang lebih 197,13 ha, dan Ibukota Kecamatan Batulayar seluas kurang lebih 502,90 ha.

4. Kawasan Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya berlokasi di : a) Kawasan Pantai Hutan Bakau yang meliputi : Kecamatan Lembar dan Sekotong seluas 307,17 Ha; b) Taman Wisata Alam (TWA.) yang meliputi : TWA Bangko Bangko seluas 2.610,17 ha berada di Kecamatan Sekotong; TWA Kerandangan seluas

396,10 ha berada di Kecamatan Batulayar; TWA. Mekaki seluas ± 344,00 ha berada di Kecamatan Sekotong; TWA. Suranadi seluas 52 ha berada di Kecamatan Narmada; TAHURA seluas 3.155 ha berada di Kecamatan Narmada.

5. Kawasan Rawan Bencana Alam meliputi : a) kawasan rawan bencana tanah longsor di kawasan sekitar Kecamatan Gunungsari, Narmada, Lembar, dan Sekotong; b) kawasan rawan banjir di Kecamatan Batulayar, Gunungsari, Labuapi, Lembar, dan Sekotong; c) kawasan rawan tsunami di kawasan pesisir bagian selatan; d) kawasan rawan angin topan di Kecamatan Sekotong, Narmada, dan Labuapi; e) kawasan rawan gelombang pasang di sepanjang pesisir Kabupaten Lombok Barat; dan f) kawasan rawan kekeringan di Kecamatan Lembar, dan Sekotong.
6. Kawasan lindung geologi meliputi : a) kawasan lindung geologi terdapat di Desa Kuranji Kecamatan Labuapi dengan luas sekitar 2 ha; dan b) kawasan lindung geologi terdapat di Dusun Pengawisan Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong dengan luas sekitar 1 ha.
7. Kawasan lindung lainnya meliputi : berupa Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di Gili Tangkong, Gili Sudak, Gili Nanggu, dan Gili Rengit.

2.1.2.2. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya menurut Keppres 32/1990 dan Kepmendagri 57/1989, adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya meliputi kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, perkebunan, kawasan permukiman, kawasan pemerintahan, perdagangan, kawasan pendidikan, pariwisata, kawasan pertahanan, keamanan, dan infrastruktur.

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud terdiri atas :

1. Kawasan peruntukan hutan produksi yang berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 kewenangannya berada di provinsi. Kawasan hutan produksi terbatas berada pada Kelompok Hutan Pelangan (RTK.7) di Kecamatan Sekotong dengan luas kurang lebih 10.041,00 Ha dan hutan produksi tetap sebagaimana

dimaksud: Kelompok Hutan Mareje Bonga (RTK.13) Kecamatan Gerung dengan luas kurang lebih 304,69 Ha.

2. Kawasan peruntukan hutan rakyat dengan luasan kurang lebih 800 Ha, berada di beberapa kecamatan di wilayah kabupaten meliputi : Kecamatan Gunungsari, Narmada, Gerung, Lembar, dan Sekotong.
3. Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud meliputi:
   a. Kawasan budidaya pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud seluas kurang lebih 16.754 ha yang berada di Kecamatan Batulayar seluas kurang lebih 328 ha, Gunungsari seluas kurang lebih 905 ha, Lingsar kurang lebih 1.849 ha, Narmada kurang lebih 2.242 ha, Kuripan kurang lebih 1.072 ha, Kediri kurang lebih 1.455 ha, Labuapi kurang lebih 1.450 ha, Gerung kurang lebih 2.622 ha, Lembar kurang lebih 1.791 ha, dan Sekotong kurang lebih 3.040 ha.
   b. Kawasan budidaya pertanian hortikultura diseluruh kecamatan di kabupaten terutama pada areal yang berpotensi untuk pengembangan hortikultura.
   c. Kawasan budidaya perkebunan dikembangkan di Kecamatan Gunungsari, Narmada, Gerung, Lembar, dan Sekotong dengan komoditi kelapa dengan luas kurang lebih 11.082,55 Ha; Kecamatan Narmada dan Lingsar dengan komoditi kopi dengan luas kurang lebih 578,02 Ha; Kecamatan Lembar dan Sekotong dengan komoditi jambu mete dengan luas kurang lebih 8.789,01 Ha.
   d. Kawasan budidaya peternakan dikembangkan di Kecamatan Gerung, Lembar dan Sekotong.

Data luas lahan pertanian berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Lombok Barat tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel 2. 8 Luas Lahan Pertanian di Lombok Barat Tahun 2015

NO	KEC	SAWAH IRIGASI TEKNIS	SAWAH IRIGASI NON TEKNIS	SAWAH TADAH HUJAN	TEGALAN	LADANG	KEBUN	TAMBAK/KOLAM/EMPANG	PADANG PENGGEMBALAAN	LAHAN SEMENTARA TIDAK DIUSAHAKAN	TOTAL
1	Narmada	1.613,25	418,35	-	-	-	2.272,04	13,12	-	0,46	4.317,22
2	Batu Layar	211,00	-	-	-	-	1.798,71	-	-	-	2.009,71
3	Kuripan	1.120,03	102,74	30,05	-	-	208,13	5,40	-	-	1.466,35
4	Kediri	1.348,75	49,83	-	-	-	245,00	24,00	-	1,02	1.668,60
5	Gerung	2.549,98	37,63	451,00	4,27	5,79	369,15	38,70	-	-	3.456,52
6	Labuapi	1.551,62	-	-	-	-	33,89	1,11	-	-	1.586,62
7	Lingsar	1.180,56	281,58	10,00	-	-	3.320,08	44,68	-	6,89	4.843,79
8	Lembar	672,89	533,62	1.368,33	1.269,53	546,16	978,50	103,59	-	12,69	5.485,31
9	Gunungsari	613,19	131,46	10,14	2,41	10,78	1.954,71	270,78	-	0,75	2.994,22
10	Sekotong	-	706,73	2.333,49	4.317,42	4.071,56	631,65	468,24	576,87	1.530,04	14.636,00
Total		10.861,27	2.261,94	4.203,01	5.593,63	4.634,29	11.811,86	969,62	576,87	1.551,85	42.464,34

Sumber : Bappeda Lombok Barat, 2015

4. Kawasan peruntukkan perikanan di Kabupaten Lombok Barat meliputi: perikanan tangkap; perikanan budi daya; dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Perikanan tangkap terdiri atas kawasan perikanan tangkap laut di Kecamatan Sekotong; perikanan budidaya air tawar dikembangkan di Kecamatan Kuripan, Narmada, Lingsar, Gerung, Labuapi dengan luas kurang lebih 2.938 ha; perikanan budidaya air payau dikembangkan di Kecamatan Gerung, Lembar dan Sekotong dengan luas kurang lebih 873 ha; perikanan budidaya air laut dikembangkan di Kecamatan Gerung, Lembar dan Sekotong dengan luas kurang lebih 8.100 ha.
5. Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud meliputi:
   a. kawasan pertambangan mineral logam emas, perak, tembaga, timah hitam, dan mangan tersebar di Kecamatan Lembar dan Sekotong; dan
   b. kawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan tersebar di seluruh kecamatan.
      1) Pengelolaan pertambangan mineral logam dan bukan logam sebagaimana dimaksud : dilaksanakan setelah ditetapkannya Wilayah Pertambangan (WP) berdasarkan usulan penetapan WP.

2) Ijin pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam yang telah diterbitkan dan masih berlaku, tetap diakui sampai masa berlakunya habis dan perpanjangannya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku.
3) Tata cara dan mekanisme usulan penetapan WP sebagaimana dimaksud : mengacu pada peraturan yang berlaku.

6. Kawasan Peruntukan Industri

   Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Lombok Barat meliputi: peruntukan industri besar, sedang, dan industri rumah tangga. Kawasan peruntukan industri besar dan sedang diarahkan di kawasan pesisir barat Kecamatan Labuapi, Lembar, dan Sekotong. Kawasan peruntukan industri rumah tangga diarahkan pada sentra-sentra produksi dengan mengedepankan produk-produk unggulan. Pengelolaan kawasan peruntukan industri mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
7. Kawasan peruntukan pariwisata meliputi :
   a. kawasan wisata alam di Pantai Senggigi dan sekitarnya, Kawasan pantai Sekotong dan sekitarnya, Kawasan Gili Kedis, Gili Sudaq, Gili Tangkong, Gili Nanggu, Gili Poh, Gili Genting, Gili Lontar, ***Gili Gede,*** Gili Rengit, Gili Layar, Gili Asahan, Gili Goleng, Gili Kao, Gili Kere, Gili Sepatang/ Sophialouisa, Gili Geneng-Geneng, Gili Anak Ewok, Gili Sarang, Gili Wayang, Gili Pulau Tiga, Gili Tepong, Gili Batu Nyangkong, dan Gili Malang, Pantai Induk, Pantai Cemare, Pantai Kuranji, Gunung Pengsong, Kawasan Suranadi, dan Kawasan Wisata Sesaot;
   b. kawasan wisata budaya pada Kawasan Taman Narmada, Kawasan Taman Lingsar, Kawasan Kerajinan Gerabah Banyumulek di Kecamatan Kediri;
8. Kawasan peruntukan permukiman dikembangkan di daerah yang datar sampai bergelombang dengan kelerengan lahan 0% – 25%, bukan lahan irigasi teknis, bukan kawasan lindung, bukan kawasan rawan bencana, aksesibilitas baik, tersedia air bersih yang cukup, drainase baik sampai sedang dan tidak

berada di wilayah sempadan sungai/pantai/mata air/saluran pengairan/daerah aman penerbangan; dan tidak terletak pada kawasan budi daya pertanian.

Kawasan permukiman yang tersebar di seluruh kecamatan sebagaimana dimaksud : terdiri atas :

a. permukiman perkotaan dengan kepadatan sedang sampai tinggi yang dilengkapi diantaranya dengan sistem transportasi masal pada perkotaan Kecamatan Gerung, Kuripan, Kediri, Batulayar, Gunungsari, Labuapi; dan
b. permukiman perdesaan dengan kepadatan rendah sampai menengah yang dilengkapi diantaranya dengan sarana dan prasarana produksi serta pengolahan di kawasan sekitar pusat pelayanan lingkungan (PPL) meliputi Kedaro, Sekotong Barat, Batu Putih, Buwun Mas, Sekotong Timur, Mareje, Kebon Ayu, Tempos, Banyumulek, Karangbongkot, Bengkel, Dasan Tereng, Keru, Lebah Sempage, Batukumbung, Sigerongan, Duman, Penimbung dan Mambalan.

9. Kawasan peruntukan lainnya terdiri atas:
   a. Kawasan peruntukan perdagangan, jasa dan penunjang pariwisata sebagaimana dimaksud : dikembangkan di Kecamatan Batulayar, Gunungsari, Narmada, Labuapi dan Gerung.
   b. Kawasan peruntukan pusat pemerintahan sebagaimana dimaksud : terletak pada Kecamatan Gerung.
   c. Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud : meliputi kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara di wilayah darat dan laut terletak di Pulau Sepatang/*Sophialouisa*.
   d. Kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil sebagaimana dimaksud : meliputi Gili Kedis, Gili Sudak, Gili Tangkong, Gili Nanggu, Gili Poh, Gili Genting, Gili Lontar, Gili Gede, Gili Rengit, Gili Layar, Gili Asahan, Gili Goleng, Gili Kao, Gili Kere, Gili Sepatang/ Sophialouisa, Gili Geneng-Geneng, Gili Anak Ewok, Gili Sarang, Gili Wayang, Gili Pulau Tiga, Gili Tepong, Gili Batu Nyangkong, dan Gili Malang.

2.1.2.3. Kawasan Rawan Bencana

Berdasarkan data series iklim 30 tahun terakhir, telah dilakukan permodelan untuk mendapatkan prediksi kejadian bencana terkait dengan iklim yang dilakukan oleh Pusat Study Pembangunan NTB kerjasama dengan Institut Teknologi Bandung (2018-2022). Beberapa potensi bencana terkait dengan iklim di Lombok Barat meliputi : banjir, longsor, kekeringan, penyakit manusia, dan hama tanaman. Jenis-jenis bencana iklim ini diperkirakan akan menyebabkan kerusakan tanaman pertanian dan juga masyarakat secara langsung.

1. Potensi Banjir dan Tanah Longsor

   Kabupaten Lombok Barat cukup rentan terkena banjir dan tanah longsor. Topografi di wilayah tengah cenderung lebih rata yang cenderung sering terjadi bencana banjir. Sementara itu, topografi di wilayah utara dan selatan cenderung berbukit-bukit sehingga lebih cenderung terkena bencana longsor.

   Ada dua kecamatan yang berpotensi terjadinya banjir yaitu Kecamatan Gunungsari dan Kecamatan Lembar. Di Gunungsari, curah hujan tinggi terjadi pada dasarian pertama bulan januari, ketiga bulan februari, ketiga bulan april, pertama bulan oktober dan ketiga bulan desember 2019. Pada dasarian ini, curah hujan terlihat meningkat, sehingga masyarakat perlu mewaspadai potensi kejadian banjir. Sementara di Lembar masyarakat perlu mewaspadai potensi terjadinya bencana banjir dari januari dasarian pertama hingga mei dasarian kedua.

Gambar 2. 6 Titik-titik yang berpotensi terjadinya bencana banjir dan tanah longsor Tahun 2019

Lingkaran merah menandakan dasarian yang berpotensi terjadi bencana longsor. Bencana tanah longsor di Gunungsari berpotensi terjadi pada bulan Januari, Februari, April, Oktober dan Desember tahun 2019.

Gambar 2. 7 Grafik curah hujan di Desa Jembatan Gantung pada tahun 2019.

Lingkaran merah menandakan dasarian yang berpotensi terjadi bencana longsor. Bencana tanah longsor di Desa Jembatan Gantung dan sekitarnya (Kecamatan Lembar) berpotensi terjadi pada bulan Januari, Februari, Maret dan Desember tahun 2019.

2. Potensi Kekeringan

Dua kecamatan yang memiliki rekaman bencana kekeringan pada tahun-tahun sebelumnya adalah Batu Layar dan Sekotong. Kedua kecamatan ini memiliki pola hujan yang hampir serupa. Curah hujan rendah panjang terjadi dari bulan mei hingga awal November. Tidak hanya di dua kecamatan ini, tetapi seluruh desa di Kabupaten Lombok Barat memiliki curah hujan rendah panjang, sehingga diperlukan persiapan untuk menjaga ketersediaan air selama musim kemarau panjang.

Gambar 2. 8 Curah hujan di Desa Batulayar tahun 2019.

Garis merah menandakan batas curah hujan rendah. Semakin lama garis biru berada dibawah garis merah, semakin besar potensi terjadinya kekeringan. Potensi kekeringan terjadi

pada bulan Agustus sampai Oktober 2019, yang perlu diwaspadai.

Gambar 2. 9 Curah hujan di Desa Sekotong Tengah tahun 2019.

Garis merah menandakan batas curah hujan rendah. Semakin lama garis biru berada dibawah garis merah, semakin besar potensi terjadinya kekeringan. Potensi kekeringan terjadi pada bulan Juni sampai November 2019.

3. Potensi Persebaran Hama

Hama tanaman sering muncul saat transisi dari musim hujan menuju musim kemarau, pada fase-fase pertumbuhan tanaman. Berdasarkan prediksi cuaca, di wilayah Sekotong Tengah hama berpotensi menyerang empat kali yaitu pada bulan februari dasarian ketiga, April dasarian ketiga, Juni dasarian ketiga dan desember dasarian pertama.

Gambar 2. 10 Curah hujan di wilayah Sekotong Tengah pada tahun 2019

Keterangan: Kotak merah menandakan dasarian yang berpotensi terkena serangan hama tanaman.

4. Potensi Persebaran Penyakit Manusia

Berdasarkan hasil prediksi curah hujan dasarian, dapat diprediksi perkembangan penyakit. Persebaran penyakit yang berkaitan erat dengan curah hujan sebagai berikut : penyakit malaria, demam berdarah, dan fillaria. Korelasi antara curah hujan dan munculnya penyakit malaria (Iriani, 2012) sebagai berikut : korelasi mulai terjadi satu bulan sebelum puncak

curah hujan; meningkat saat puncak curah hujan; dan mulai menurun satu bulan sesudahnya. Kecamatan Lembar merupakan salah satu wilayah yang berpotensi terkena serangan penyakit DBD dan malaria. Pada tahun 2019, serangan penyakit tersebut berpotensi terjadi pada bulan Januari, Maret, dan Mei. Karena pada bulan tersebut, curah hujan mulai menurun dan musim mulai beralih ke musim kemarau.

Gambar 2. 11 Grafik curah hujan di Kecamatan Lembar pada tahun

2019.

Keterangan: Kotak merah menandakan potensi serangan penyakit DBD, malaria, dan filarial

Tabel 2. 9 Bencana yang Terjadi di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018

No	TGL	KEJADIAN	LOKASI	TINDAKAN	DAMPAK KORBAN
1	1 Januari 2018	Banjir, Longsor	Desa Bug-Bug Kecamatan Lingsar	Sudah di kerjakan	Merusak jalan Desa
2	12 Januari 2018	(Mohon Bantuan Tandon)	Desa Gontoran Kecamatan Lingsar	Di Inventarisir untuk di berikan bantuan Tandon	Sulit mendapatkan air bersih/ tidak adanya penampungan air bersih
3	30 Januari 2018	Angin Kencang, Gelombang Pasang	Desa Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi	Memberikan bantuan Sembako	Mengganggu aktifitas Nelayan, tidak bisa melaut sebagaimana mestinya karena kondisi cuaca tidak bersahabat.
4	31 Januari 2018	Angin Kencang, Gelombang Pasang	Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong	Memberikan bantuan Sembako	Mengakibatkan Abrasi Pantai, tergenangnya pemukiman penduduk dan terganggunya aktifitas masyarakat nelayan.
5	15 Januari 2028	Angin Puting Beliung	Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung	Di berikan bantuan bahan bangunan/ Semen dan Seng	Robohnya 2 (dua) rumah warga

No	TGL	KEJADIAN	LOKASI	TINDAKAN	DAMPAK KORBAN
6	11 Januari 2018	Angin Puting Beliung, Banjir	Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong	Di koordinasikan dengan Dinas terkait	Satu buah rumah tertimpa pohon jati, terjadi abrasi akibat hujan deras pada tembok bagunan Pondok Pesantern AHLUSSUNAH WALJAMAAH NW Berambang
7	16 Januari 2018	Banjir	Desa Sekotong Timur (Dusun Jelateng Timur, Dusun Jelateng Sedenggang, Dusun Telage Lindung, Dusun Kambeng Timur, Dusun Kambeng Barat dan Dusun Kambeng Utara)	Melakukan gotong-royong, memberikan bantuan Sembako dan berkoordinasi dengan Dinas terkait	Tergenangnya rumah penduduk, rusaknya talud dan tanggul kali di 3 Dusun, merusak tanaman padi dan kebun masyarakat.
8	18 Januari 2018	Banjir	Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung	Di koordinasikan dengan Dinas terkait untuk perbaikan, di usulkan ke BPBD Provinsi/BNPB	Terjadinya Abrasi yang mengakibatkan jebolnya tanggul jembatan pada jalan poros Desa (Jembatan penghubung antara Dusun Rincung dengan Dusun Kesume) sepanjang 7 M dan tinggi 7 M.
9	23 Januari 2018	Banjir	Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Tengah	Di koordinasikan dengan Dinas terkait, di usulkan untuk perbaikan	Rusaknya tembok halaman SDN 1 Cendi Manik sepanjang 30 M di Dusun Sayong Baru, robohnya tembok halaman rumah penduduk di Dusun Sayong Segerning, terendamnya tambak-tambak serta beberapa rumah dan fasilitas umum lainnya.
10	24 Januari 2018	Banjir	Desa Sekotong Timur Kecamatan Lembar	Di koordinasikan dengan Dinas terkait, di usulkan ke BNPB	Tanggul Kali jebol yang mengakibatkan tanaman petani rusak karena tergerus air banjir
11	27 Januari 2018	Banjir	Desa Sekotong Timur Kecamatan Lembar	Di usulkan ke BPBD Provinsi NTB/BNPB, di koordinasikan dengan Dinas terkait	Tanggul Kali rusak,terendamnya rumah warga,Poskesdes, Jembatan Penyeberangan Anak Sekolah dan rusaknya Sayap Jembatan Penyeberangan.
12	29 Januari 2018	Banjir	Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong	Di koordinasikan dengan Dinas terkait untuk pembuatan Gorong-Gorong, memberikan	Terjadinya genangan air di beberapa titik banjir (Dusun Sekotong II, Sekotong I, Mekarsari, Suredadi, Telage Lebur Dese, Loang Balok dan Dusun Telage Lebur Kebon

No	TGL	KEJADIAN	LOKASI	TINDAKAN	DAMPAK KORBAN
				bantuan Sembako	
13	30 Januari 2018	Banjir	Desa Jembatan Gantung Kecamatan Lembar	Memberikan bantuan Sembako dan melakukan gotong-royong	Menggenangi pekarangan seluas 1 Ha dan merendam 4 buah rumah warga di Dusun Nyiur Lembang
14	1 Februari 2018	Banjir	Desa Labuan Tereng Kecamatan Lembar	Di koordinasikan dengan Dinas terkait, di usulkan untuk perbaikan	Jebolnya tanggul sungai dan merendam 4 Dusun (Dusun Kebon Talo, Songkang, Tibu dan Dusun Labuan Tereng)
15	1 Februari 2018	Banjir	Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung	Di koordinasikn dengan Dinas terkait	Rusaknya lahan pertanian
16	2 Februari 2018	Banjir	Desa Eyat Mayang Kecamatan Lembar	Di koordinasikan dengan Dinas terkait, di usulkan untuk perbaikan	Jebolnya tanggul drainase dan menyebabkan rumah warga terendam, akses Jalan Desa rusak dan jalan raya tertimbun tanah dan pasir.
17	2 Februari 2018	Banjir	Desa Mekarsari Kecamatan Gunungsari	Di koordinasikan dengan Dinas terkait, di usulkan untuk perbaikan	Rusaknya sarana prasarana umum seperti Jembatan, Talud Badan Jalan dan Jalan Beton Desa Mekarsari
18	2 Februari 2018	Banjir	Dusun Rincung Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung	Di koordinasikan dengan Dinas terkait	Terjadinya Abrasi dan jebolnya lereng di sekitar pemukiman warga
19	5 Februari 2018	Banjir	Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari	Di koordinasikan dengan Dinas terkait	Merendam pemukiman warga
20	9 Februari 2018	Banjir	Dusun Petak dan Dusun Bakong Dasan Desa Lembar Kecamatan Lembar	Di koordinasikan dengan Dinas terkait	Merendam lahan pertanian/tanaman padi sekitar ± 50 Ha
21	13 Februari 2018	Banjir	Desa Gapuk Kecamatan Gerung	Di koordinasikan dengan Dinas terkait	Merendam lahan pertanian
22	23 Maret 2018	Banjir	Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Tengah		Rusaknya jembatan penghubung antar Dusun
23	29 Januari 2018	Banjir	Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Tengah	Di koordinasikan dengan Dinas terkait, di usulkan	Rusaknya tembok halaman SDN 1 Cendi Manik sepanjang 30 M di Dusun Sayong Baru, robohnya tembok halaman rumah penduduk di Dusun

No	TGL	KEJADIAN	LOKASI	TINDAKAN	DAMPAK KORBAN
				perbaikan ke BNPB	Sayong Segerning, tergerusnya Kali Empol, Kali Madak Beleq, rusaknya Jembatan Madak Beleq, tergerusnya Kali Pendem dan terendamnya tambak-tambak serta beberapa rumah dan fasilitas umum lainnya.
24	12 Januari 2018	Banjir	Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Tengah	Di koordinasikan dengan Dinas terkait, di usulkan untuk perbaikan	Putusnya jalan penghubung Dusun Madak Belek, rusaknya saluran Drainase di Dusun Bertong, terendamnya tambak-tambak serta beberapa rumah penduduk dan fasilitas umum (Gedung PAUD).
25	12 Januari 2018	Banjir (Mohon Bantuan Plat Dekker)	Dusun Mekar Sari Desa Sekotong Tengah	Di koordinasikan dengan Dinas terkait	Mengganggu transportasi pengguna jalan
26	14 Januari 2018	Banjir, Longsor	Desa Giri Tembesi Kecamatan Gerung	Di koordinasikan dengan Dinas terkait untuk perbaikan	Rusaknya badan jalan di 3 titik (Dusun Celuk Gedang)
27	15 Januari 2018	Banjir, Longsor	Desa Bug-Bug Kecamatan Lingsar dan Desa Golong Kecamatan Narmada	Sudah di kerjakan menggunakan Anggaran Tidak Terduga, Desa Bug-Bug Rp.98.700.000 dan Desa Golong Rp.97.500.000	Merusak jalan Desa
28	24 Januari 2018	Banjir, Longsor	Desa Eyat Mayang Kecamatan Lembar	Di koordinasikan dengan Dinas terkait, di usulkan untuk perbaikan	Rusaknya infrastruktur dan fasilitas umum lainnya
29	27 Januari 2018	Banjir, Longsor	Desa Labuan Tereng Kecamatan Lembar	Di koordinasikan dengan Dinas terkait, melakukan gotong-royong, di usulkan ke BNPB untuk perbaikan	Rusaknya rumah penduduk,lahan pertanian, fasilitas belajar mengajar, Jalan, Perkantoran dan lain-lain.
30	1 Februari 2018	Banjir, Longsor	Desa Giri Tembesi Kecamatan Gerung	Di koordinasikan dengan Dinas terkait	Rusaknya badan jalan di 3 titik (Dusun Celuk Gedang)

No	TGL	KEJADIAN	LOKASI	TINDAKAN	DAMPAK KORBAN
31	1 Februari 2018	Banjir, Longsor	Desa Midang Kecamatan Gunungsari	Di koordinasikan dengan Dinas terkait, di usulkan untuk perbaikan	Rusaknya Bronjong dan talud jalan, mengakibatkan terganggunya transportasi, aktifitas dan produktifitas masyarakat.
32	10 April 2018	Banjir, Longsor	Desa Dopang Kecamatan Gunungsari		Longsornya dinding pemukiman penduduk dan menyumbat saluran irigasi
33	29 Januari 2018	Banjir/ ROB	Desa Gili Gede Indah Kecamatan Sekotong	Memberikan bantuan Sembako	Masyarakat Nelayan tidak bisa melaut akibat angin kencang di sertai gelombang besar
34	2 Februari 2018	Cuaca Buruk	Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Tengah	Memberikan bantuan Sembako	Masyarakat Nelayan tidak bisa melaut akibat angin kencang di sertai gelombang besar
35	24 Juli 2018	Cuaca Buruk/Mohon Bantuan Sembako	Desa Batulayar Barat Kecamatan Batulayar		Masyarakat Nelayan tidak bisa melaut akibat angin kencang di sertai gelombang besar
36	1 Februari 2018	Cuaca Ekstrim/Gelombang Pasang	Desa Lembar Selatan Kecamatan	Memberikan bantuan Sembako	Mengakibatkan 487 Kepala Keluarga Masyarakat Nelayan tidak bisa melaut.
37	6 Februari 2018	Cuaca Ekstrim/Gelombang Pasang	Desa Batulayar Barat Kecamatan Batulayar	Memberikan bantuan Sembako	Masyarakat Nelayan tidak bisa melaut akibat angin kencang di sertai gelombang besar
38	26 Juli 2018	Gelombang Pasang/Rob	Dusun Taman Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung	Sudah di berikan bantuan Sembako	Tergenangnya pemukiman warga
39	5 Februari 2018	Hujan dan Angin Kencang	Kelurahan Dasan Geres Kecamatan Gerung	Memberikan bantuan Seng dan Semen	Ambruknya 1 (satu) buah rumah milik warga
40	13 Februari 2018	Kebakaran	Desa Labuan Tereng Kecamatan Lembar	Memberikan bantuan Seng dan Semen	Terbakarnya 1 (satu) unit rumah warga An. Sahram, kerugian di perkirakan ± Rp.65.000.000 (Enam puluh lima juta rupiah)
41	15 Juli 2018	Kekeringan / Mohon Bantuan Air Bersih	Dusun Gerebegan Desa Jembatan Gantung Kecamatan Lembar	Sudah melakukan Pendistribusian Air Bersih	Masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih
42	17 Juli 2018	Kekeringan / Mohon Bantuan Air Bersih	Dusun Lendang Sedi, Buntage dan Tanak Potek Desa Giri Sasak Kecamatan Kuripan	Sudah melakukan Pendistribusian Air Bersih	Masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih
43	17 Juli 2018	Kekeringan / Mohon Bantuan Air Bersih	Dusun Gumese Utara, Gumese Selatan dan Gumese Tengah	Sudah melakukan Pendistribusian Air Bersih	Masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih

No	TGL	KEJADIAN	LOKASI	TINDAKAN	DAMPAK KORBAN
			Desa Giri Tembesi Kecamatan Gerung		
44	18 Juli 2018	Kekeringan / Mohon Bantuan Air Bersih	Dusun Embung Kolah, Lendang Andus, Gerepek, Kesambik Rempek, Pelepok, Pancor Mas dan Tibu Lilin Desa Labuan Tereng	Sudah melakukan Pendistribusi an Air Bersih	Masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih
45	30 Juli 2018	Kekeringan / Mohon Bantuan Air Bersih	Dusun Batu Goleng, Dusun Ajok Jaya Desa Tempos Kecamatan Gerung		
46	17 Juli 2018	Kekeringan/ Mohon Bantuan Air Bersih dan Tandon	Desa Batulayar Barat Kecamatan Batulayar	Sudah di berikan bantuan Tandon	Masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih
47	18 Juli 2018	Kekeringan/ Mohon Bantuan Air Bersih dan Tandon	Desa Kuripan Selatan	Sudah melakukan Pendistribusi an Air Bersih	Masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih
48	18 Juli 2018	Kekeringan/ Mohon Bantuan Air Bersih dan Tandon	Desa Batulayar Kecamatan Batulayar		Masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih
49	16 Juli 2018	Kekeringan/ Permohonan Bantuan Tandon	Dusun Mulejati Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong	Sudah melakukan Pendistribusi an Air Bersih	Masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih
50	9 Mei 2018	Kekeringan/ Kurangnya Air Bersih	Dusun Duman Utara Desa Duman Kecamatan Lingsar		Warga kesulitan mendapatkan air bersih
51	2 Juli 2018	Kekeringan/ Kurangnya Air Bersih	Dusun Bantir, Bentenu, Kondak, Pesanggrahan dan Sambiratik Desa Banyu Urip	Sudah melakukan Pendistribusi an Air Bersih	Masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih
52	18 Maret 2018	Korban Nelayan Meninggal Dunia, Laporan TAGANA Kabupaten Lombok Barat	Selat Bali - Lombok		Korban meninggal A.N Lalu Rusin
53	2 Januari 2018	Longsor	Desa Guntur Macan Kecamatan Gunungsari	Memberikan bantuan Semen dan Seng serta di usulkan ke BNPB	Jatuhnya lempengan tebing dan bebatuan yang menimpa 1 (satu) buah rumah semi permanen, kerugian di perkirakan ± Rp. 15.000.000,-
54	15 Januari 2018	Longsor	Desa Tanak Beak Kecamatan Narmada	Di koordinasika n dengan Dinas terkait	Rusaknya saluran irigasi dan talud sepanjang 16 M

No	TGL	KEJADIAN	LOKASI	TINDAKAN	DAMPAK KORBAN
				untuk perbaikan	
55	17 Januari 2018	Longsor	Lingkungan Dodokan Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung	Di koordinasikan dengan Dinas terkait untuk perbaikan dan memberikan bantuan bahan bangunan	Longsornya bibir kali dan ambruknya 1 (satu) buah rumah warga
56	23 Januari 2018	Longsor	Dusun Ranjok Utara Desa Dopang Kecamatan Gunungsari	Di koordinasikan dengan Dinas terkait, di usulkan untuk perbaikan	Terjadinya pergeseran tanah sehingga menyumbat saluran irigasi areal persawahan ± 20 Ha
57	31 Januari 2018	Longsor	Dusun Orong Desa Batulayar Kecamatan Batulayar	Melakukan perbaikan/pemasangan Bronjong di 2 (dua) Titik menggunakan Dana Tidak Terduga sebesar Rp.500.000.000	Membahayakan penggua jalan
58	12 Februari 2018	Longsor	Desa Batulayar Barat Kecamatan Batulayar	Di koordinasikan dengan Dinas terkait, di usulkan untuk perbaikan	Longsornya talud, saluran drainase tersumbat dan meluapnya air kali
59	2 Maret 2018	Longsor	Desa Kediri Selatan Kecamatan Kediri		Terkikisnya tanah di bawah talud pada bantaran sungai
60	2 Mei 2018	Longsor	Desa Suranadi Kecamatan Narmada		Jebolnya Tanggul Irigasi di Wilayah Subak Suranadi Timur
61	17 Mei 2018	Longsor	Dusun Penimbung Timur Desa Penimbung Kecamatan Gunungsari		Tertimbunnya saluran irigasi tertier dan jebolnya tanggul irigasi
62	22 Juni 2018	Longsor	Dusun Longserang Barat Selatan - Dusun Longserang Barat Utara Desa Langko Kecamatan Lingsar		Terjadi erosi pada badan jalan
63	29 Juli 2018	Gempa Bumi 7 SR	Kecamatan Batulayar, Gunungsari, Lingsar, Narmada	Evakuasi, Tahap pendataan dan rekonstruksi	Sedang finalisasi pendataan
64	05 Agustus 2018	Gempa Bumi 6,9 SR	Kecamatan Batulayar,	Tahap Rehab Rekonstruksi	72.222 UNIT Rumah Rusak, 16 unit Puskesmas, 15 unit Pustu,

No	TGL	KEJADIAN	LOKASI	TINDAKAN	DAMPAK KORBAN
			Gunungsari, Lingsar, Narmada		124 unit SD dan 38 Unit SMP, korban meninggal dunia sebanyak 51 orang

Sumber: BPBD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017- 2018

2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah

2.1.3.1. Demografi

2.1.3.1.1. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan perspektif ekonomi, peningkatan jumlah penduduk khususnya kelahiran, memperburuk kondisi kemiskinan, karena pada umumnya kemiskinan diukur berdasarkan pendapatan per kapita, kelahiran seorang anak menyebabkan berkurangnya pendapatan per kapita rumah tangga, akibatnya rumah tangga rentan untuk masuk dalam kategori penduduk miskin. Pertumbuhan penduduk yang tinggi menimbulkan dampak negatif karena meningkatnya kebutuhan akan berbagai layanan sosial dan ekonomi, seperti besarnya permintaan terhadap fasilitas pendidikan bagi anak-anak usia sekolah, kesehatan, dan berbagai layanan sosial seperti pasar. Ketika memasuki usia kerja, kebutuhan akan kesempatan kerja juga meningkat. Jika tidak tersedia kesempatan kerja yang memadai, kelompok tersebut akan menjadi pengangguran yang pada gilirannya menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan sosial mereka. Selanjutnya jumlah penduduk yang meningkat juga berakibat pada peningkatan kebutuhan terhadap infrastruktur seperti jalan raya, untuk menunjang pergerakan orang dan barang.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi juga menyebabkan berkurangnya lahan petanian yang dapat diolah oleh setiap orang per keluarga yang bekerja pada sektor pertanian. Di Lombok Barat penguasaan lahan pertanian kurang dari 0,4 ha per rumah tangga, sementara berdasarkan hasil analisis luas lahan minimal yang dapat memberikan kehidupan yang layak adalah lebih dari 0,4 ha. Jumlah tersebut akan terus mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan alih fungsi lahan. Keterbatasan lahan berimplikasi pada berkurangnya kesempatan kerja di sektor pertanian sehingga memaksa penduduk desa untuk meninggalkan daerahnya dan mencari pekerjaan di kota.

Dampak negatif lain yang mungkin timbul adalah ancaman terhadap ketersediaan pangan. Hal ini terjadi akibat semakin banyaknya penduduk yang membutuhkan pangan, sedangkan lahan pertanian cenderung mengalami penyusutan karena berbagai alasan. Penyusutan lahan berakibat penurunan produksi bahan pangan, yang pada gilirannya memaksa suatu negara/daerah untuk impor. Dari sisi lingkungan, peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan kerusakan hutan dan penurunan kondisi lahan, yang selanjutnya akan berakibat pada kelaparan, mempersulit upaya untuk memperlambat perubahan iklim.

Sebaliknya, pertumbuhan penduduk merupakan salah satu modal penting dalam pembangunan. Penduduk yang besar dapat dimanfaatkan untuk proses pembangunan sesuai kemampuan yang dimiliki. Penduduk besar memungkinkan penggalian sumberdaya alam yang dimiliki, memacu pemerintah untuk menyediakan berbagai sarana dan prasarana sosial ekonomi, merupakan pasar potensial bagi berbagai produk.

Aspek demografi sangat penting untuk menggambarkan beban terhadap lingkungan karena semakin besar jumlah penduduk semakin besar pemanfaatan sumberdaya dan beban pencemaran yang dihasilkan. Dengan kata lain, semakin besar jumlah penduduk, beban terhadap lingkungan akan semakin besar.

Penduduk Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2020 diproyeksikan akan mencapai 704.586 jiwa, atau meningkat sebesar 9,3% dari tahun 2014. Jumlah penduduk terbanyak tahun 2017 terdapat di Kecamatan Narmada yaitu 93.099 jiwa, dan jumlah penduduk paling sedikit di Kecamatan Kuripan yaitu sejumlah 37.733 jiwa.

Tabel 2. 10 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2017

No	Kec	Distribusi Penduduk (Jiwa)				Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	
		2014	2015	2016	2017	2014 - 2017	2016 - 2017
1	Sekotong	60.42	61.447	68.451	70.410	16,53	2,86
2	Lembar	47.79	48.548	49.240	49.976	4,57	1,49
3	Gerung	80.00	81.223	81.522	82.596	3,23	1,32
4	Labuapi	65.37	66.393	65.331	65.978	0,93	0,99
5	Kediri	58.25	59.233	57.315	57.723	(0,91)	0,71
6	Kuripan	36.58	37.176	37.252	37.733	3,13	1,29
7	Narmada	94.58	96.052	92.512	93.099	(1,57)	0,63
8	Lingsar	68.23	69.292	68.459	69.182	1,39	1,06

No	Kec	Distribusi Penduduk (Jiwa)				Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	
		2014	2015	2016	2017	2014 - 2017	2016 - 2017
9	Gunungsari	84.52	85.929	91.037	93.060	10,09	2,22
10	Batulayar	48.80	49.599	54.013	55.466	13,66	2,69
	Total	644.5	654.892	665.132	675.223	4,75	1,52

Sumber : BPS Lombok Barat, 2018

Sementara itu, gambaran tentang kepadatan penduduk menjadi penting untuk diketahui mengingat data ini mencerminkan besarnya tekanan penduduk terhadap lingkungan. Kepadatan penduduk per kecamatan di Kabupaten Lombok Barat menunjukkan bahwa kepadatan penduduk tidak merata. Di 2 (dua) kecamatan, kepadatan penduduk sudah mencapai di atas 2.000 jiwa/km^2 , yaitu Kecamatan Kediri dan Kecamatan Labuapi. Kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Sekotong dengan jumlah 133 jiwa per km^2. Tingkat kepadatan penduduk diLombok Barat tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 11 Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa / Km^2)	Persentase Pendduduk
1	Sekotong	133	10,43
2	Lembar	798	7,40
3	Gerung	1.326	12,23
4	Labuapi	2.329	9,77
5	Kediri	2.667	8,55
6	Kuripan	1.750	5,59
7	Narmada	865	13,79
8	Lingsar	716	10,25
9	Gunungsari	1.037	13,78
10	Batulayar	1.626	8,21
Rata-rata		641	

Sumber : BPS Lombok Barat tahun 2018

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Nilai PDRB Lombok Barat atas dasar harga konstan 2010, mengalami kenaikan, dari 8,23 triliun rupiah pada tahun 2013 menjadi 10,44 Triliun rupiah pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan selama 5 tahun Lombok Barat mengalami kenaikan PDRB sebesar 2,20 triliun rupiah. Kenaikan PDRB ini murni

disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

Perekonomian Lombok Barat didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha yaitu : pertanian (secara umum), Perdagangan, Kontruksi, Transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi makanan dan minuman. Besarnya kontribusi kelima sektor tersebut menunjukkan besarnya ketergantungan Lombok Barat terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Lapangan usaha Pertanian (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) memberikan peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Lombok Barat yaitu mencapai 20,43 persen tahun 2017 (meskipun mengalami penurunan dari 21,53 persen di tahun 2013). Selanjutnya lapangan usaha perdagangan sebesar 13,18 persen, disusul oleh lapangan usaha kontruksi sebesar 12,67 persen. Selanjutnya terdapat dua lapangan usaha yang identik dengan sektor Pariwisata yaitu : (1) Lapangan usaha transportasi dan pergundangan sebesar 9,74 persen dan (2) lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,74 persen., sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 12 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Lombok Barat

Lapangan Usaha		2013		2014		2015		2016		2017	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
A	Pertanian , Kehutanan, Perikanan	1.826.032,5	22,2	1.861.905,6	21,4	1.981.102,1	21,4	2.033.480,2	20,8	2.145.485,4	20,55
B	Pertambangan dan Penggalian	552.011,1	6,7	589.082,2	6,8	631.917,0	6,8	675.210,7	6,9	708.123,6	6,78
c	Industri Pengolahan	427.079,1	5,2	444.760,6	5,1	466.321,6	5,0	496.739,7	5,1	524.971,4	5,03
D	Pengadaan Listrik Dan Gas	6.443,7	0,1	9.000,3	0,1	9.400,7	0,1	10.330,4	0,1	10.767,7	0,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.302,9	0,1	9.947,6	0,1	10.409,4	0,1	11.225,7	0,1	11.516,8	0,11
F	Kontruksi	1.085.528,4	13,2	1.170.633,8	13,4	1.257.848,0	13,6	1.358.265,1	13,9	1.450.273,6	13,89
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	1.035.143,8	12,6	1.107.297,0	12,7	1.169.026,9	12,6	1.259.069,0	12,9	1.355.082,1	12,98
H	Transfortasi dan Pergudangan	791.241,5	9,6	855.769,6	9,8	920.291,0	9,9	934.763,2	9,5	1.030.659,3	9,87
I	Penyediaan Akomodasi dan Makanan dan Minuman	537.950,0	6,5	575.948,9	6,6	599.675,9	6,5	658.531,9	6,7	702.052,20	6,72
J	Informasi dan Komunikasi	194.219,8	2,4	210.425,0	2,4	228.275,4	2,5	250.315,0	2,6	270.347,9	2,59
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	218.816,2	2,7	234.463,0	2,7	254.642,6	2,7	284.048,3	2,9	320.745,6	3,07
L	Real Estat	266.973,7	3,2	279.040,9	3,2	297.875,1	3,2	318.881,0	3,3	344.245,4	3,30
M	Jasa Perusahaan	9.004,1	0,1	9.731,6	0,1	10.280,3	0,1	10.808,7	0,1	11.351,5	0,11
O	Adminstrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	509.636,8	6,2	535.169,1	6,1	553.415,2	6,0	569.695,6	5,8	576.779,3	5,52
P	Jasa Pendidikan	395.978,7	4,8	420.054,3	4,8	452.372,9	4,9	477.807,0	4,9	504.311,8	4,83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	164.416,5	2,0	174.314,4	2,0	186.569,7	2,0	195.953,2	2,0	207.446,7	1,99
R	Jasa Lainnya	208.918,4	2,5	220.764,1	2,5	234.948,9	2,5	250.414,2	2,6	266.343,0	2,55
Produk Domestik Regional Bruto		8.238.697,6	100,0	8.708.308,1	100,0	9.264.354,7	100,0	9.795.538,8	100,0	10.440.539,4	100,0

Sumber : BPS Lombok Barat

Selanjutnya nilai dan kontribusi sektor berdasarkan harga berlaku (dipengaruhi oleh inflasi) disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 13 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013-2017 atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lombok Barat

Lapangan Usaha		2013		2014		2015		2016		2017	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
A	Pertanian , Kehutanan, Perikanan	1.935.009,6	21,5	2.086.399,3	20,59	2.389.766,6	20,88	2.616.404,3	20,70	2.852.397,5	20,43
B	Pertambangan dan Penggalian	592.236,2	6,6	635.061,3	6,45	730.223,7	6,38	810.374,5	6,41	896.536,7	6,42
c	Industri Pengolahan	434.625,5	4,8	457.007,5	4,51	499.777,0	4,37	559.728,8	4,43	609.025,3	4,36
D	Pengadaan Listrik Dan Gas	5.030,9	0,1	7.086,3	0,07	8.448,4	0,07	10.171,2	0,08	13.592,0	0,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.117,4	0,1	12.630,5	0,12	13.753,1	0,12	15.460,2	0,12	16.302,5	0,12
F	Kontruksi	1.100.379,7	12,2	1.252.869,1	12,37	1.435.314,6	12,54	1.602.132,8	12,68	1.768.552,1	12,67
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	1.146.230,4	12,8	1.310.858,1	12,94	1.455.762,4	12,72	1.645.564,1	13,02	1.840.651,6	13,18
H	Transfortasi dan Pergudangan	832.985,2	9,3	979.747,8	9,67	1.133.076,8	9,90	1.183.627,3	9,36	1.360.319,5	9,74
I	Penyediaan Akomodasi dan Makanan dan Minuman	684.502,2	7,6	850.468,3	8,39	959.178,3	8,38	1.095.602,6	8,67	1.220.829,3	8,74
J	Informasi dan Komunikasi	193.869,4	2,2	212.534,2	2,10	228.548,4	2,00	254.091,3	2,01	284.236,6	2,04
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	254.276,5	2,8	286.582,9	2,83	321.118,4	2,81	371.654,2	2,94	436.274,9	3,12
L	Real Estat	315.047,1	3,5	356.387,6	3,52	397.071,1	3,47	440.599,4	3,49	487.298,9	3,49
M	Jasa Perusahaan	9.739,1	0,1	11.402,0	0,11	12.555,5	0,11	12.768,4	0,11	14.925,4	0,11
N	Adminstrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	613.355,0	6,8	721.063,3	7,12	810.351,8	7,08	856.337,1	6,78	886.030,9	6,35
O	Jasa Pendidikan	465.663,0	5,2	503.541,5	4,97	569.578,2	4,98	637.026,3	5,04	696.484,7	4,99
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	174.213,7	1,9	192.749,6	1,90	215.780,4	1,88	233.463,4	1,85	252.494,0	1,81
Q	Jasa Lainnya	218.970,6	2,4	236.879,2	2,34	267.340,6	2,34	293.308,9	2,32	325.965,2	2,33
Produk Domestik Regional Bruto		8.987.251,7	100,0	10.131.268,5	100,0	11.447.645,4	100,0	12.639.314,9	100,0	13.961.917,1	100,0

Sumber : BPS Lombok Barat

Berdasarkan harga konstan 2010 dan harga berlaku, nilai PDRB Lombok Barat tahun 2013 – 2017 mengalami pertumbuhan/ peningkatan. Pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas Dasar Harga Konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya, dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada menunjukkan pertumbuhan yang positif . Pada akhir tahun 2017, pertumbuhan kontribusi sektor dalam PDRB tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi yaitu sebesar 12,92 persen. Salah satu penyebabnya adalah naiknya aktifitas perbankan di Lombok Barat.

Dari 17 lapangan usaha yang ada, delapan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif sebesar lima hingga sepuluh persen, antara lain: lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan peternakan sebesar 5,51 persen, lapangan industry pengolahan sebesar 5,68 persen, konstruksi sebesar 6,77 persen, perdagangan 7,63 persen, transportasi dan pergudangan 10,26 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum 6,61 persen, informasi dan komunikasi 8,00 persen, real estate 7,95 persen, jasa perusahaan 5,02 persen, jasa pendidikan 5,55 persen, jasa

kesehatan dan kegiatan sosial 5,87 persen, dan jasa lainnya 6,36 persen. Terdapat empat lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari 5 (lima) persen yaitu pertambangan dan penggalian (4,87 persen), pengadaan listrik dan gas (4,23 persen), pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang (2,59 persen), dan lapangan usaha administrasi pemerintaha, pertanahan, dan jaminan sosial wajib (1,24 persen).

Tabel 2. 14 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Lombok Barat

Lapangan Usaha		2013		2014		2015		2016		2017	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
A	Pertanian , Kehutanan, Perikanan	5,5	3,5	7,8	1,96	14,5	6,40	9,5	2,64	9,0	5,51
B	Pertambangan dan Penggalian	4,3	2,9	7,2	6,72	15,0	7,27	11,0	6,85	10,6	4,87
c	Industri Pengolahan	3,7	3,3	5,1	4,14	9,4	4.85	12,0	6,52	8,8	5,68
D	Pengadaan Listrik Dan Gas	(11,0)	5,3	40,9	39,68	19,2	4,45	20,4	9,89	33,6	4,23
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,3	4,5	13,6	6,93	8,9	4,64	12,4	7,84	5,4	2,59
F	Kontruksi	6,6	6,1	13,9	7,84	14,6	7,45	11,6	7,98	10,4	6,77
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	8,6	7,0	14,4	6,97	11,1	5,57	13,0	7,70	11,9	7,63
H	Transfortasi dan Pergudangan	7,0	4,5	17,6	8,16	15,6	7,54	4,5	1,57	14,9	10,26
I	Penyediaan Akomodasi dan Makanan dan Minuman	19,4	8,5	24,2	7,06	12,8	4,12	14,2	9,82	11,4	6,61
J	Informasi dan Komunikasi	8,1	8,2	9,6	8,34	7,5	8,48	11,2	9,65	11,9	8,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	12,8	8,6	12,7	7,15	12,1	8,61	15,7	11,55	17,4	12,92
L	Real Estat	12,5	6,9	13,1	4,52	11,4	6,75	11,0	7,05	10,6	7,95
M	Jasa Perusahaan	9,7	5,4	17,1	8,08	10,1	5,64	1,7	5,14	16,9	5,02
N	Adminstrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	7,4	3,0	17,6	5,01	12,4	3,41	5,7	2,94	3,5	1,24
O	Jasa Pendidikan	9,8	6,1	8,1	6,08	13,1	7,69	11,8	5,62	9,3	5,55
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,6	7,6	10,6	6,02	11,9	7,03	8,2	5,03	8,2	5,87
Q	Jasa Lainnya	9,2	7,6	8,2	5,67	12,9	6,43	9,7	6,58	11,1	6,36
Produk Domestik Regional Bruto		7,94	5,26	12,73	5,70	12,99	6,39	10,41	5,73	10,46	6,58

Sumber : BPS Lombok Barat
Keterangan : Hb = Harga Berlaku Hk = Harga Konstan

Perkembangan PDRB masing-masing kecamatan bernilai positif yang berarti mengalami peningkatan, namun cukup bervariasi atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tertinggi Kecamatan Batulayar sebesar 12,52 persen (Hb) dan 8,05 (Hk) pada tahun 2016 (tahun 2017 tidak dihitung BPS Lombok Barat), sedangkan perkembangan

PDRB terendah adalah Kecamatan Lembar (6,56 Hb dan 2,71 Hk). Kecamatan Batulayar merupakan sentra lapangan usaha yang terkait dengan sektor pariwisata (lapangan usaha penyedia akomodasi, rumah makan dan restoran, transportasi dan pergudangan), sehingga pertumbuhan PDRB tertinggi.

Tabel 2. 15 Perkembangan PDRB Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012-2017 Atas Dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku Dirinci Per Kecamatan

No	Kecamatan	2013		2014		2015		2016		2017	
		Hb	**Hk**	**Hb**	**Hk**	**Hb**	**Hk**	**Hb**	**Hk**	**Hb**	**Hk**
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Sekotong	5,33	3,52	9,31	4,37	11,12	5,23	10,30	3,46	-	-
2	Lembar	7,27	4,86	15,01	6,22	15,00	7,02	6,56	2,71	-	-
3	Gerung	7,67	5,17	12,36	5,92	13,31	6,88	10,50	6,15	-	-
4	Labuapi	7,63	5,49	11,59	5,95	12,67	6,83	11,26	6,64	-	-
5	Kediri	7,17	5,03	10,91	5,43	12,86	6,80	11,08	6,11	-	-
6	Kuripan	7,03	4,96	10,90	5,22	12,67	6,81	10,67	5,57	-	-
7	Narmada	7,54	4,40	11,26	5,56	13,60	7,12	10,84	5,75	-	-
8	Lingsar	7,32	5,18	11,12	5,33	13,29	6,72	10,85	5,72	-	-
9	Gunungsari	7,65	5,57	11,28	5,72	12,80	5,79	10,48	5,99	-	-
10	Batulayar	12,29	6,57	17,74	6,68	12,89	5,70	12,52	8,05	-	-
Kab. Lombok Barat		7,94	5,26	12,73	5,70	12,99	6,39	10,67	5,73	10,50	6,58
Provinsi NTB :											
- Dengan tambang		6,66	5,16	10,87	5,17	27,25	21,76	11,92	5,82	6,35	0,11
- Tanpa tambang		8,43	5,42	13,50	6,28	13,15	6,49	10,94	5,97	10,55	7,10

Sumber : BPS Lombok Barat

2.2.1.2. Laju Inflasi

Kabupaten Lombok Barat tidak termasuk daerah sampel penghitungan inflasi nasional. Karena kondisi geografis Kabupaten Lombok Barat yang berbatasan langsung dengan Kota Mataram, menyebabkan aktivitas ekonomi hampir seluruhnya bergabung dengan Kota Mataram, sehingga dalam mengambil kebijakan berkiblat pada inflasi Kota Mataram yang masuk dalam sampel nasional.

Inflasi Kabupaten Lombok Barat pada periode tahun 2014-2018 cenderung berfluktuasi seperti halnya inflasi di tingkat provinsi NTB dan inflasi nasional. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 7,18% sedangkan inflasi terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 2,47%. Rata-rata inflasi Kabupaten Lombok Barat selama 5 tahun terakhir adalah yang terendah dibandingkan Provinsi NTB, hal ini menunjukkan adanya gairah perekonomian yang positif terjadi di Kabupaten Lombok Barat, seperti semakin

meningkatnya investasi, meningkatnya produksi dan secara tidak langsung meningkatkan pendapatan masyarakat.

Perkembangan inflasi Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 16 Laju Inflasi Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 - 2018

Uraian		2014	2015	2016	2017	2018
Kab. Lombok Barat	%	7.18	3.25	2.47	3,59	3,15
Prov NTB	%	7.23	3.41	2,61	3.70	3.16
Nasional	%	6.42	6.38	3.53	3.61	3.13

Sumber data : BPS Kab. Lombok Barat Tahun 2019

Pemerintah selama tiga tahun terakhir berhasil mengendalikan inflasi dibawah lima persen. Pengendalian inflasi ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat sehingga kondisi ekonomi cenderung stabil.

2.2.1.3. PDRB Perkapita

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai indikator digunakan untuk memberikan gambaran mengenai lajunya perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat dan perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat, baik indikator moneter maupun non moneter. PDRB perkapita sebagai indikator moneter yang menunjukkan besarnya kegiatan ekonomi yang dihasilkan oleh masing-masing penduduk di Lombok Barat terus mengalami peningkatan, yang mengindikasikan baiknya perekonomian masyarakat. Pada tahun 2013 PDRB per kapita (adhk) sebesar Rp 12,99 juta dan pada tahun 2017 mencapai Rp. 15,46 juta.

Gambar 2. 12 PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)

Sumber : BPS Lombok Barat, 2018

2.2.1.4. Kemiskinan

Kemiskinan masih merupakan permasalahan mendasar yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lombok Barat selama 5 (lima) tahun terakhir (periode 2014 – 2018) mengalami fluktuasi. Untuk data tahun terakhir yakni pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lombok Barat mencapai 15,20% atau sebanyak 103.770 jiwa.

Gambar 2. 13 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin (%) Kab. Lombok Barat, Tahun 2012 - 2018

Sumber : BPS Kabupaten Lombok Barat tahun 2018

Tabel 2. 17 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 – 2018

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	%
1	2	3	4	5
1	2013	620.412	111.000	17,43
2	2014	644.586	110.700	17,11
3	2015	654.892	113.300	17,38
4	2016	665.132	110.850	16,73
5	2017	675.222	110.692	16,46
6	2018	685.161	103.770	15,20

Sumber : BPS Lombok Barat, 2018

Sedangkan Gini Rasio Kabupaten Lombok Barat meningkat menjadi 0,324 namun masih berada pada ketimpangan rendah. Dengan perkembangan Gini Ratio sejak tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Gambar 2. 14 Perkembangan Indeks Gini Kab. Lombok Barat dan Provinsi NTB Taun 2013-2017

Sumber : BPS Lombok Barat, 2018

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indikator yang dapat digunakan dalam menilai kualitas sumber daya manusia penduduk Lombok Barat salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indeks (HDI)*. IPM menggambarkan empat komponen yaitu (1) Angka Harapan Hidup yang mewakili bidang kesehatan, (2) Angka Rata-Rata Lama Sekolah, (3) Harapan Lama Sekolah, yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan, dan yang terakhir (4) kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan, yang bertujuan untuk mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak sebagai ukuran kualitas hidup.

Perkembangan IPM Kabupaten Lombok Barat dari tahun 2014-2018 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dari 63,52 pada tahun 2014 meningkat menjadi 67,18 pada tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat Lombok Barat dapat dikatakan masih lebih baik dari 6 (enam) kabupaten di Nusa Tenggara Barat. Nilai IPM Lombok Barat disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 2. 15 IPM Lombok Barat Tahun 2014– 2018

Sumber : BPS, Bappeda (diolah), 2019

Pada periode 2014-2018, seluruh komponen pembentuk IPM mengalami peningkatan di Lombok Barat, sebagai berikut :

a. Angka harapan hidup (AHH) mencapai 67,16 tahun di tahun 2018, meningkat 1,66 Tahun (19,92 Bulan) dibandingkan tahun 2014 sebesar 64,50 tahun.
b. Anak-anak usia 7 tahun memiliki harapan untuk bersekolah selama 13,36 tahun (setara kuliah semester III atau tamat D1) di tahun 2018, meningkat 1,27 tahun (15,24 bulan) dibandingkan tahun 2014 sebesar 12,09 tahun.
c. Penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 6,16 tahun (setara kelas VII SMP semester I) di tahun 2018, meningkat 0,53 tahun dibandingkan tahun 2014 selama 5,63 tahun (belum tamat SD).
d. Pengeluaran per kapita masyarakat yang disesuaikan telah mencapai Rp.11.367.000,- pada tahun 2018, meningkat sebesar Rp.897,13,- dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp.10.469.870,-

Perkembangan komponen IPM Kabupaten Lombok Barat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. 18 Komponen Pembentuk IPM Lombok Barat Tahun 2014-2018

Tahun	Komponen Pembentuk IPM			
	AHH (Angka Harapan Hidup)	EYS (Harapan lama sekolah)	MYS (Rata-rata lama sekolah)	Pengeluaran per Tahun (Rp) x 1.000
2014	64.50	12.09	5.63	10.469,87
2015	65.10	12.66	5.69	10.588,07
2016	65.44	12.8	5.93	10.924,00
2017	65.78	13.04	6.15	11.048,00
2018	66.16	13.36	6.16	11.367,00

Sumber : BPS Lombok Barat 2019

2.2.2.2. Rata – Rata Sekolah

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang digunakan penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.

Gambar 2. 16 Rata Lama Sekolah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 – 2018

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lombok Barat, 2019

Pada tahun 2014, rata – rata lama sekolah penduduk Kabupaten Lombok Barat yang berusia 25 tahun ke atas menjalani pendidikan formal selama 5 tahun atau setara kelas 5 SD atau belum menamatkan pendidikan Sekolah Dasar. Sedangkan pada tahun 2018, rata – rata lama sekolah penduduk Kabupaten Lombok Barat yang berusia 25 tahun ke atas menjalani pendidikan formal selama 6 tahun atau setara tamat kelas 6 SD.

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Lombok Barat selama kurun waktu tahun 2014 - 2018 menunjukkan *trend* peningkatan. Namun peningkatan yang ditunjukkan masih belum dapat memenuhi target RLS yang telah ditentukan pada periode RPJMD sebelumnya dan terkategori masih jauh dari wajib belajar 9 tahun yang menjadi program nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi pelayanan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi jangkauan pelayanan dari Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Capaian pelayanan umum juga merupakan tolok ukur penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen/kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Pada aspek pelayanan umum mencakup fokus pelayanan urusan wajib dan fokus pelayanan urusan pilihan. Kondisi pelayanan wajib dapat dilihat dari pelayanan umum pada berbagai bidang utama pembangunan seperti bidang pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana umum, penataan ruang dan perhubungan, dan sebagainya yang merupakan pelayanan wajib oleh pemerintah daerah dalam pembangunan. Sedangkan kondisi pelayanan pilihan dapat diketahui dari beberapa bidang yakni pertanian, pariwisata, industri, perdagangan, energi dan sumberdaya mineral, dan sebagainya yang menyangkut pelayanan pilihan oleh pemerintah daerah.

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.1.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena dengan meningkatnya pendidikan maka seseorang dapat lebih mudah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan menyerap kemajuan teknologi. Untuk memenuhi sumber daya manusia yang berkualitas, pembangunan bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra pendidikan. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah berusaha secara maksimal untuk meningkatkan pendidikan dengan mengelola potensi yang ada pada urusan pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan kejuruan, pendidikan non formal dan informal.

Capaian penyelenggaraan urusan pendidikan dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator yakni pencapaian Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Putus Sekolah, Angka Melanjutkan Sekolah, Angka Kelulusan dan Ketersediaan Sekolah serta Rasio Guru/Murid.

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi

penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Tabel 2. 19 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					Rata2
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	**Angka Partisipasi Murni (APM)**							
	- SD/MI/sederajat	%	99,08	99,41	100	100	99,88	99,67
	- SMP/MTs/sederajat	%	84,50	85.41	95.48	97.86	98,16	92,28
2	**Angka Partisipasi Kasar (APK)**							
	- TK/PAUD	%	72,32	75,41	75,5	76,00	86,88	77,22
	- SD/MI/sederajat	%	102,56	103,16	100	100	108,18	102,78
	- SMP/MTs/sederajat	%	111,56	105,6	100	100	104,74	104,38

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lombok Barat, 2018

Angka partisipasi sekolah baik APM maupun APK pada tiap tingkatan mengalami tren meningkat selama kurun waktu 2014-2018. Rata – Rata angka partisipasi murni SD/MI/Sederajat di Lombok Barat adalah 99,67 persen. Sedangkan rata – rata APM SMP/MTs/Sederajat adalah 92,28 persen. Untuk Angka Partisipasi Kasar, tingkat TK/PAUD rata – rata 77,22 persen. Rata – rata APK SD/MI/Sederajat 102,78 persen dan rata – rata APK SMP/MTs/Sederajat 104,38 persen. Hal ini menunjukkan bahwa akses penduduk terutama penduduk usia sekolah pada fasilitas pendidikan telah terjamin oleh pemerintah, dengan demikian tujuan pembelajaran yang relevan dan efektif pun dapat tercapai dengan baik.

2. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah untuk jenjang SD/MI secara umum mengalami penurunan, akan tetapi sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2017. Pada tahun 2011 APS Kabupaten Lombok Barat adalah sebesar 0,19%dan pada tahun 2017 mencapai 0,20%. Angka Putus Sekolah pada jenjang SMP/MTs pada tahun 2011sebesar 0.45% mengalami penurun yang cukup signifikan pada tahun 2017 menjadi 0,03%.

Gambar 2. 17 Angka Putus Sekolah (APS) Kab. Lombok Barat Tahun 2014 – 2018

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lombok Barat, 2019

3. Rasio Ketersediaan Sekolah/penduduk usia sekolah

Ketersediaan sekolah di Kabupaten Lombok Barat selama tahun 2014-2018 mengalami peningkatan demikian halnya dengan jumlah penduduk baik usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun mengalami peningkatan jumlah, dengan demikian berpengaruh terhadap rasio ketersediaan sekolah.

Rasio ketersediaan sekolah untuk usia 7-12 tahun atau jenjang sekolah dasar (SD) pada tahun 2018 mencapai 1:171, hal ini menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini berarti pada tahun 2017 terdapat 1 sekolah yang dapat menampung 215 siswa, sementara pada tahun 2018 siswa yang dapat tertampung pada 1 sekolah sebanyak 171. Hal ini disebabkan terdapat peningkatan jumlah sekolah sementara jumlah siswa yang meningkat tidak terlalu signifikan. Demikian halnya rasio ketersediaan sekolah untuk usia 13-15 tahun atau jenjang sekolah menengah pertama (SMP) pada tahun 2017 mencapai 1:453 sementara pada tahun 2018 mencapai 1:407 atau rasionya membaik, hal ini berarti kemampuan sekolah dalam memberikan pelayanan pendidikan semakin efektif.

Tabel 2. 20 Ketersediaan Sekolah Dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Lombok Barat selama Tahun 2014 – 2018

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
I	**SD**					
1	Jumlah Gedung Sekolah	353	354	357	357	452
2	Jumlah Penduduk Kelompok	76.298	75.502	76.629	76.803	77.433

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
	Usia 7-12 tahun					
3	Rasio	1:216	1:213	1:215	1:215	1:171
II	**SMP**					
1	Jumlah Gedung Sekolah	59	64	67	84	95
2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 tahun	37.117	37.926	38.319	38.046	38.046
3	Rasio	1:629	1:593	1:572	1:453	1:407

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lombok Barat, 2018

4. Rasio Guru/Murid

Rasio guru terhadap murid adalah perbandingan jumlah guru terhadap jumlah murid. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar, disamping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai efektifitas dan mutu pembelajaran.

Tabel 2. 21 Rasio Guru - Murid Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2018

TAHUN	SD			SMP		
	JUMLAH SISWA	JUMLAH GURU	RASIO	JUMLAH SISWA	JUMLAH GURU	RASIO
2014	65.708	2.398	1:27	17.242	727	1:24
2015	63.298	2.435	1:26	16.910	735	1:23
2016	64.257	2.510	1:26	19.283	998	1:19
2017	64.193	2.469	1:26	19.120	956	1:20
2018	64.907	2.581	1:25	17.870	904	1:20

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lombok Barat, 2019

Untuk jenjang pendidikan SD/MI rasio guru terhadap murid pada tahun 2018 mencapai 1:25, yang berarti 1 orang guru mengajar 25 orang murid. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs, rasio guru terhadap murid pada tahun 2018 mencapai 1:20. Capaian rasio tersebut menunjukkan tingkat efektifitas proses belajar di Kabupaten Lombok Barat telah berjalan dengan baik dan efektif, dimana semakin rendah rasio maka semakin efektif sistem pembelajaran serta semakin meningkatnya mutu dari pembelajaran bagi murid

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan pada tahun 2014 – 2018 selengkapnya terlihat di Tabel berikut ini.

Tabel 2. 22 Capaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2018

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Lainnya	Realisasi Capaian Tahun ke				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah SD/MI yang telah memenuhi kebutuhan meja, kursi, dan papan tulis untuk setiap rombel	SPM Dikdas	42,3	45,07	50	54,5	60
2	Jumlah SMP/MTs yang semua rombongan belajarnya tidak melebihi 36 orang	SPM Dikdas	83,5	86,90	90	95,5	98
3	Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas, meja/kursi, dan papan tulis untuk setiap rombel	SPM Dikdas	43,9	35,71	50	55,4	60,5
4	Jumlah SMP/MTs yang memiliki ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk 36 peserta didik	SPM Dikdas	3,7	4,76	10	25	45
5	Jumlah SMP/MTs yang memiliki satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik	SPM Dikdas	1,8	2,38	5	10	20
6	Jumlah SD/MI yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah/madrasah dan staf kependidikan lainnya	SPM Dikdas	11,7	20,85	23,5	25	35,4
7	Jumlah SMP/MTs yang memiliki satu	SPM Dikdas	3,7	2,38	5	10	15

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Lainnya	Realisasi Capaian Tahun ke				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	2	4	5	6	7	8	9
	ruang guru dan dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru dan staf kependidikan lainnya						
8	Jumlah SMP/MTs yang memiliki ruang kepala sekolah/madrasah yang terpisah dari ruang guru dan dilengkapi meja dan kursi	SPM Dikdas	62,8	53,57	65	70	75,5
9	Jumlah SD/MI yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik	SPM Dikdas	96,4	99,78	99,8	99,9	99,95
10	Jumlah SD/MI yang memiliki 6 (enam) orang guru atau 4 (empat) orang guru untuk daerah khusus	SPM Dikdas	97,1	99,78	99,8	99,9	99,95
11	Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran atau untuk daerah khusus 1 (satu) guru untuk setiap rumpun mata pelajaran	SPM Dikdas	12,8	16,67	20	25,5	30
12	Jumlah SD/MI yang memiliki 2 orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV	SPM Dikdas	98,1	99,78	99,8	99,9	99,95
13	Jumlah SD/MI yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	SPM Dikdas	91,1	90,58	94,5	96	98,5
14	Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi S1 atau D-IV ≥ 70% (untuk daerah khusus ≥ 40%)	SPM Dikdas	93,3	92,86	95	97,5	98,6

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Lainnya	Realisasi Capaian Tahun ke				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	2	4	5	6	7	8	9
15	Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik ≥ 35% (untuk daerah khusus ≥ 20%)	SPM Dikdas	45,7	48,81	50	53,4	60
16	Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik, masing-masing 1 (satu) orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan PKn	SPM Dikdas	14,6	13,69	15,4	18,5	20
17	Jumlah kepala SD/MI yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan memiliki sertifikat pendidik	SPM Dikdas	80,4	82,06	85	90,5	95
18	Jumlah Kepala SMP/MTs yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	SPM Dikdas	67,1	69,64	72,5	75	85
19	Persentase Pengawas/ Madrasah berkualifikasi akademik S1 – D IV dan Memiliki Sertifkat Pendidik	SPM Dikdas	97,8	98,4	98,7	99,5	99,4
20	Skor Pemerintah Kabupaten / Kota dalam Kepemilikan rencana dan pelaksanaan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan	SPM Dikdas	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Lainnya	Realisasi Capaian Tahun ke				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	2	4	5	6	7	8	9
	proses pembelajaran						
21	Jumlah SD/MI yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama ≥ 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	SPM Dikdas	17,5	34,08	45	50,5	60,5
22	Jumlah SMP/MTs yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama ≥ 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	SPM Dikdas	33,5	47,62	50	57,5	65
23	Jumlah set buku teks mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan PKn) yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah yang disediakan oleh sekolah	SPM Dikdas	48,7	68,22	75,5	80	90
24	Jumlah SD/MI yang telah memenuhi IP-15.1, Sekolah	SPM Dikdas	6,7	16,37	20	26	30,5
25	Jumlah set buku teks mata pelajaran yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah yang disediakan oleh sekolah	SPM Dikdas	22,9	7,12	25,5	30	40
26	Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi IP-16.1 Sekolah	SPM Dikdas	2,4	1,19	3	10,5	20
27	Jumlah SD/MI yang memiliki set peraga dan bahan IPA - secara lengkap	SPM Dikdas	21,8	26,01	35,5	45	55,5

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Lainnya	Realisasi Capaian Tahun ke				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	2	4	5	6	7	8	9
28	Jumlah SD/MI yang telah memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi	SPM Dikdas	36,1	41,70	45	55	75
29	Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi	SPM Dikdas	9,8	18,45	25,5	35	45
30	Jumlah SD/MI yang telah memenuhi IP-19.1	SPM Dikdas	33,5	46,86	50	55	60
31	Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi IP-19.1	SPM Dikdas	13,4	14,88	20	25,5	30
32	Satuan Pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan pembelajaran per minggu sebagai berikut : kelas 1-2 18 Jam , kelas 3 24 Jam , Kelas IV-VI 27 Jam dan kelas VII – IX 27 Jam Jumlah rombongan belajar yang memenuhi standar	SPM Dikdas	59	99,28	99,4	99,6	99,8
33	Jumlah SD/MI yang menyelenggarakan proses pembelajaran di sekolah selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran kelas I-II 18 jam per minggu, kelas III 24 jam per minggu, dan kelas IV-VI 27 jam per minggu	SPM Dikdas	22,2	96,19	97	98,5	99
34	Jumlah SMP/MTs yang menyelenggarakan proses pembelajaran di sekolah selama 34 minggu per tahun	SPM Dikdas	66,5	70,83	75	80,5	85

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Lainnya	Realisasi Capaian Tahun ke				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	2	4	5	6	7	8	9
	dengan kegiatan pembelajaran kelas VII-IX selama 27 jam per minggu						
35	Jumlah SD/MI yang menerapkan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	SPM Dikdas	95,2	99,33	99,5	99,7	99,85
36	Jumlah SMP/MTs yang menerapkan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	SPM Dikdas	96,3	98,81	99	99,2	99,5
37	Jumlah guru yang menerapkan RPP berdasarkan silabus untuk mata pelajaran yang diampunya Jenjang SD/ MI	SPM Dikdas	83,4	92,31	95,3	97,5	98,9
38	Jumlah SD/MI yang telah memenuhi IP-22.1	SPM Dikdas	71,5	77,35	80	87,5	95
39	Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi IP-22.1	SPM Dikdas	54,9	59,52	64	72,4	80
40	Jumlah guru yang mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	SPM Dikdas	82,2	88,86	90,4	95	98,7
41	Jumlah SD/MI yang telah memenuhi IP-23.1	SPM Dikdas	68,2	73,77	78	85,4	90,5
42	Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi IP-23.1	SPM Dikdas	57,9	61,31	65	75,35	80
43	Jumlah SD/MI yang kepala sekolahnya melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	SPM Dikdas	58,1	65,70	70,3	75	80,6

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Lainnya	Realisasi Capaian Tahun ke				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	2	4	5	6	7	8	9
44	Jumlah SMP/MTs yang kepala sekolahnya melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	SPM Dikdas	34,1	41,67	46,4	55,7	60
45	Jumlah guru yang menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester SD/MI	SPM Dikdas	86,4	92,88	95	97,3	99,4
46	Jumlah SD/MI yang telah memenuhi IP-25.1	SPM Dikdas	72,7	78,48	84,2	90	96,4
47	Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi IP-25.1	SPM Dikdas	62,8	66,07	74	80,5	87
48	Jumlah satuan pendidikan yang menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik	SPM Dikdas	88	99,33	99,45	99,7	99,85
49	Jumlah SD/MI yang menyampaikan rekapitulasi hasil tes tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan atau Kantor Kemenag kabupaten/kota pada setiap akhir semester	SPM Dikdas	79,9	99,33	99,45	99,7	99,9
50	Jumlah SMP/MTs yang menyampaikan	SPM Dikdas	57,3	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Lainnya	Realisasi Capaian Tahun ke				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	2	4	5	6	7	8	9
	rekapitulasi hasil tes tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan atau Kantor Kemenag kabupaten/kota pada setiap akhir semester						
51	Jumlah satuan pendidikan yang memiliki rencana kerja tahunan	SPM Dikdas	90,2	98,21	98,35	98,7	99,4
52	Jumlah satuan pendidikan yang memiliki laporan tahunan SD/MI	SPM Dikdas	82	95,07	97,8	98,5	99
53	Jumlah satuan pendidikan yang memiliki komite sekolah yang berfungsi baik SD/MI	SPM Dikdas	81,6	93,05	96	98,4	99

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lombok Barat, 2019

Capaian kinerja SPM bidang pendidikan Kabupaten Lombok Barat sampai dengan tahun 2018 masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk memperbaiki pencapaian pada indikator Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (SPM-Dikdas) tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat menyusun Roadmap Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (SPM-DIkdas) dengan maksud untuk memberikan arah pelaksanaan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (SPM-Dikdas) jenjang SD/MI, SMP/MTs di Kabupaten Lombok Barat agar berjalan efektif, efesien, terukur, konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan.

2.3.1.2. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu modal utama dari sumber daya manusia dalam melaksanakan aktivitas untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Kesehatan juga menjadi pra syarat mutlak

bagi penduduk untuk melaksanakan segala program perencanaan pembangunan terkait pendidikan, ketenagakerjaan, perekonomian, bahkan kesehatan itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan bidang kesehatan akan memiliki *multiplier effect* pada program-program pembangunan ke depannya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kondisi umum urusan kesehatan dapat tercermin dari pencapaian beberapa indikator yakni Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), Jumlah Kasus Stunting, Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap, Jumlah kasus TBC, dan Jumlah kasus HIV/AIDS.

Gambar 2. 18 Capaian Indikator Bidang Kesehatan Kab. Lombok Barat Tahun 2014-2018

No	INDIKATOR KESEHATAN	2014	2015	2016	2017	2018
1	AKB	4,21	3,03	2,75	0,65	1,74
2	AKI	49,13	36,11	36,25	36,37	36,43
3	Stunting	37,85	42,17	33,02	33,6	28,96
	Balita Kurang Gizi	3,54	3,43	3,31	3,2	6
4	Cakupan IDM	94,37	100,52	98,15	96,54	98,1
5	Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	62,17	64,25	62,71	64,39	70,1
6	Jumlah Kasus TBC (TB BTA)	560	560	540	604	685
	- Sasaran penjaringan suspek	5715	7058	4179	7971	6077
	- Jumlah semua kasus TB	777	825	763	913	948
	- Kasus TB anak	16	21	26	44	48
	- CNR total kasus per 100.000	121,94	125,97	114,71	135,21	138,36
	- Angka kesembuhan	74,86	89,52	87,61	90,33	87,80
	- Angka keberhasilan pengobatan (Sucses rate)	83,66	92,46	91,50	93,91	89,70
	- Sakit TB dan Meninggal per 100.000	5.49	3.66	4.81	3.11	5.00
7	Jumlah Kasus Baru HIV/AIDS					
	- HIV	11	6	15	14	33
	- AIDS	16	1	19	3	8

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Lombok Barat, 2019

1. **Angka Kematian Bayi (AKB)**

Angka kematian bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi di bawah satu tahun untuk setiap 1.000 kelahiran hidup. Capaian AKB selama tahun 2014-2018 mengalami trend penurunan. Tahun 2014 capaian sebesar 4,21%. Pada tahun 2015, menurunt menjadi 3,03%, menurun pada tahun 2016 menjadi 2,75%, mengalami penurunan kembali pada tahun 2017 menjadi 0,65% dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 1,74%.

2. **Angka Kematian Ibu (AKI)**

Angka Kematian Ibu (*Maternal Mortality Rate*) adalah Jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Angka pengukuran risiko kematian wanita yang berkaitan dengan peristiwa kehamilan.

Capaian AKI di Kabupaten Lombok Barat selama tahun 2014-2018 mengalami trend yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2014, capaian AKI sebesar 49,13%, tahun 2015 sebesar 36,11%, tahun 2016 sebesar 36,25%, dan pada tahun 2017 serta 2018 AKI mengalami peningkatan masing – masing menjadi 36,37% dan 36,43%.

3. **Jumlah Kasus Stunting dan Balita Kurang Gizi**

Stunting merupakan kondisi tinggi badan seseorang lebih pendek dibandingkan tinggi badan orang seusianya, yang disebabkan kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal anak lahir yang mulai nampak setelah anak berusia 2 tahun. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat tahun 2014, angka stunting mencapai 37,85% meningkat pada tahun 2016 menjadi 42,17. Capaian ini menurun pada tahun 2017 menjadi 33,02, kembali naik pada tahun 2018 menjadi 33,6 dan turun menjadi 28,96 pada tahun 2018. Angka Balita Kurang Gizi mengalami penurunan dari tahun 2014-2017 yaitu masing masing 3,54 dan 3,2, dan kembali meningkat menjadi 6 pada tahun 2018. Fluktuasi dan masih cukup tingginya angka stunting di Lombok Barat mengindikasikan bahwa masih perlu adanya perhatian dan penanganan serius terhadap Stunting, sebab lambatnya

penanganan akan berdampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia di masa depan.

4. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap

Cakupan imunisasi dasar lengkap didefinisikan sebagai suatu upaya untuk memberikan imunitas pada bayi yang berusia 0-12 bulan agar terhindar dari berbagai penyakit. Imunisasi dasar lengkap meliputi Polio, HB, DPT, BCG dan Campak. Capaian cakupan imunisasi lengkap selama kurun 2014-2018 menunjukkan hasil yang baik dimana pada tahun 2014 cakupan IDM mencapai 94,37. Tahun 2015 mencapai 100,52%, tahun 2016 mencapai 98,15%, dan pada tahun 2017 dan tahun 2018 berturut – turut capaian sebesar 96,54% dan 98,10%.

5. Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pada tahun 2019 target nasional adalah *Universal Health Coverage,* yang artinya pada tahun 2019 seharusnya seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan. Namun dari capaian peserta jaminan kesehatan nasional di Lobar pada tahun 2018 baru mencapai 70,1%. Meskipun meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dengan capaian 62,17% pada tahun 2014, 64,25% pada tahun 2015, 62,71% pada tahun 2016 dan 64,39% pada tahun 2017 namun peningkatan kondisi ini masih belum memenuhi target *UHC*. Perlu upaya lebih untuk pemenuhan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat di Lombok Barat.

6. Jumlah Kasus TBC (TB-BTA)

Tuberculose menjadi isu strategis nasional di tahun 2018, sehingga muncul upaya mendorong masyarakat agar mau mengobati dirinya sampai sembuh agar tidak menyebarkan penyakit TB kepada individu lainnya. Upaya tersebut dikenal dengan sebutan TOS TB (Temukan dan Obati Sampai Sembuh Tuberculose), hanya saja karena kurang menarik perhatian dan minimnya kampanye TB, maka banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya. Jumlah kasus baru TBC (BTA) sebanyak 560 kasus pada tahun 2014 dan 2015, menurun sebesar 10 kasus menjadi 540 kasus tahun 2016, dan kembali meningkat menjadi

604 kasus tahun 2017 dan 685 kasus tahun 2018. Kasus TB anak selama lima tahun terakhir (2014-2018) terus mengalami peningkatan, yaitu 16 kasus (2014), 21 kasus (2015), 26 kasus (2016), 44 kasus (2017) dan tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebanyak 48 kasus. Secara keseluruhan jumlah semua kasus TB mengalami peningkatan yaitu sebanyak 777 kasus (2014), 825 kasus (2015), dan sempat mengalami penurunan menjadi 763 kasus (2016), dan kembali meningkat menjadi 913 kasus (2017) dan tertinggi pada tahun 2018 sebanyak 948 kasus. Diperlukan aksi yang lebih nyata untuk mengatasi masalah TB ini, sehingga Angka kesembuhan dan Angka keberhasilan pengobatan (sucses rate) dapat ditingkatkan.

7. HIV / AIDS

Jumlah kasus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) – AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*) di Lombok Barat bagaikan fenomena gunung es yang tampak diidentifikasi sedikit, namun dalam kenyataannya di masyarakat terdapat banyak kasus yang belum terdeteksi. Kasus baru HIV tahun 2018 meningkat 300% dari empat tahun sebelumnya yaitu sebanyak 11 kasus pada tahun 2014, menjadi 33 kasus tahun 2018. Kasus baru AIDS yang teridentifikasi selama tahun 2014-2018 mengalami trend yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2014, kasus AIDS teridentifikasi sebesar 16 kasus, tahun 2015 sebesar 1 kasus, tahun 2016 meningkat tajam sebesar 19 kasus, dan menurun pada tahun 2017 sebanyak 3 kasus, serta tahun 2018 sebanyak 8 kasus.

Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang kesehatan tahun 2014 – 2018 seperti yang terdapat pada tabel sebagai berikut;

Tabel 2. 23 Capaian SPM Bidang Kesehatan Kab. Lombok Barat Tahun 2014 - 2018

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator		2014	2015	2016	2017	2018	Kondisi Yang di Harapkan
1	Pelayanan Kesehatan Dasar	1	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	90,21	93,92	94,39	47.25	95,20	95
		2	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	99,99	131,4	100	62.12	89,30	90
		3	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90,42	94,43	95,02	47.95	95,50	90
		4	Cakupan pelayanan ibu nifas	89,01	93,27	94,1	46.75	94,60	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator		2014	2015	2016	2017	2018	Kondisi Yang di Harapkan
		5	Cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani	99,99	101,38	85,5	42.02	63,20	80
		6	Cakupan kunjungan bayi	92,08	96,56	97,58	40.61	99	90
		7	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	98,36	100	100	66.39	100	100
		8	Cakupan Pelayanan Anak Balita	93,42	90,03	99,71	46.57	88,3	90
		9	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	0	0	0	10.11	0	100
		10	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100
		11	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	91,48	97,43	98,48	96.44	97,90	100
		12	Cakupan peserta KB aktif	76,71	75,02	77,44	76.73	77,40	80
		13	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	-	-	-	-	-	-
			a. Penemuan penderita AFP	3,09	0,52	1,54	1.54	1,50	
			b. Penemuan penderita pneumonia balita	85,12	135,87	0	46.81	56,73	100
			c. Penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif				23.93	31,10	100
			d. Penemuan dan penanganan penderita DBD	100	100	100	100	100	100
			e. Penanganan penderita diare	-	-	-	31.78	31.78	
		14	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	-	-	-	26.68	26.68	100
2	Pelayanan Kesehatan Rujukan	1	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	-	-	-	3.76	3.76	100
		2	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten	-	-	-	100	100	100
3	Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB	1	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	-	-	-	100	100	100
4	Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	1	Cakupan desa siaga aktif	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, 2019

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator adalah keterbatasan sumberdaya manusia, anggaran, serta kurangnya pemahaman unit kerja terkait tentang SPM tersebut.

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Kondisi Jaringan Jalan

Kinerja jaringan jalan merupakan capaian dari pengelolaan yang berdasarkan indikator-indikator makro yakni

kemantapan, kondisi dan aspek pemanfaatan. Kondisi jaringan jalan di Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 24 Panjang Jalan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014–2018

Uraian		2014		2015		2016		2017		2018	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Jenis Permukaan / *Surface Type*											
-	Hotmix/ *Hotmix*	340.930	76.36	361.320	71.57	427.406	74.78	452.596	79.18	456.059	79.79
-	Aspal/ *Asphalted*	44.620	9.99	85.800	16.99	43.262	7.57	35.782	6.26	38.713	6.77
-	Kerikil/ *Gravel*	19.950	4.47	20.550	4.07	33.319	5.83	24.609	4.31	19.875	3.48
-	Tanah/ *Dirt*	40.980	9.18	37.200	7.37	67.597	11.83	58.597	10.25	56.937	9.96
Jumlah / Total		446.480	100	504.870	100	571.584	100	571.584	100	571.584	100
Kondisi / *Condition*											
-	Baik/ *Good*	232.940	52.17	248.200	49.16	266.239	46.58	247.494	43.30	237.879	41.62
-	Sedang/ *Fair*	13.880	3.11	13.430	2.66	78.383	13.71	110.008	19.25	121.426	21.24
-	Rusak/ *Poor*	127.100	28.47	148.410	29.40	47.984	8.39	71.194	12.46	87.100	15.24
-	Rusak Berat/ *Very poor*	72.560	16.25	94.830	18.78	178.978	31.31	142.888	25.00	125.179	21.90
Jumlah / Total		446.480	100	504.870	100	571.584	100	571.584	100	571.584	100
Kemantapan Jalan											
-	Mantap (Baik + Sedang)	246.820	55.28	261.630	51.82	344.622	60.29	357.502	62.55	359.305	62.86
-	Tidak Mantap (Rusak)	127.100	28.47	148.410	29.40	47.984	8.39	71.194	12.46	87.100	15.24
-	Kritis (Rusak Berat)	72.560	16.25	94.830	18.78	178.978	31.31	142.888	25.00	125.179	21.90
Jumlah / Total		446.480	100	504.870	100	571.584	100	571.584	100	571.584	100

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Lombok Barat, 2018

Jaringan jalan di Kabupaten Lombok Barat berdasarkan kondisi jalan terdiri dari jenis permukaan, kondisi dan kemantapan jalan. Pada tahun 2018 berdasarkan jenis permukaan jaringan jalan yang telah Hotmix telah mencapai 79,79%, mengalami peningkatan dibandingkan dari tahun 2014, sedangkan kondisi jalan dengan dengan kondisi baik pada tahun 2018 mencapai 41,62% dan jalan dengan kondisi rusak masih sebesar 21,90%. Sementara jalan dengan kondisi mantap mencapai 62,68% dengan menyisakan 21,90%. jaringan jalan dengan kondisi kritis (rusak berat).

2. Sanitasi

Untuk memenuhi target akses universal yaitu tercapainya Gerakan 100-0-100 sesuai dengan gerakan yang dicanangkan pemerintah pusat, terkait akses sanitasi layak, berikut adalah capaian di Kabupaten Lombok Barat.

Gambar 2. 19 Persentase Rumah Tangga Dengan Sanitasi Layak

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Lombok Barat, 2018

Berdasarkan data diatas, capaian target pemenuhan akses sanitasi layak bagi masyarakat Kabupaten Lombok Barat selalu terpenuhi setiap tahunnya. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Lombok Barat belum dapat memenuhi target 100% sebagaimana ditargetkan pemerintah pusat pada tahun 2019.

Dari data yang ditampilkan, terdapat perbedaan angka yang signifikan di tahun 2014 – 2016. Data ini terkoreksi di tahun 2017 pada perubahan RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 setelah dilakukan pemutakhiran data oleh OPD terkait.

3. Cakupan Perpipaan/Akses Air Bersih

Air bersih merupakan komponen penting bagi kehidupan manusia. Peningkatan jumlah penduduk ini kemudian menuntut sarana prasarana pendukung, salah satunya terkait ketersediaan sarana air minum layak. Ketersediaan air minum di Kabupaten Lombok Barat tentunya belum mencukupi untuk masyarakatnya yang setiap tahun bertambah. Pelayanan air bersih, khususnya air minum perpipaan, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Mengingat jumlah penduduk yang selalu bertambah setiap tahunnya, dalam menjalankan tugas penyediaan air minum perpipaan ini masih belum mencapai target pelayanan secara keseluruhan.

Cakupan layanan air minum perpipaan di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 sebesar 78,65% . Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dibanding capaian tahun – tahun sebelumnya. Hal ini sebagai akibat dari pemutakhiran data setelah dilakukan penyesuaian komponen penghitungan indikator ini sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal. Secara lengkap cakupan air minum perpipaan di Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 25 Cakupan Layanan Air Minum perpipaan Tahun 2014 – 2017 Dan Layanan Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan Tahun 2018

No.	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4
1	2014	8,48	38,34
2	2015	54,81	56,48
3	2016	56,11	57,35
4	2017	82,00	76,65
5	2018	84,00	78,65

Sumber : DPUTR Kabupaten Lombok Barat, 2018

Dikarenakan pemutkahiran komponen penghitungan indikator ini, yang semula hanya menghitung Cakupan Layanan Air Minum Perpipaan pada tahun 2014 – 2016, sejak tahun 2017 disesuaikan dengan SPM dan dilengkapi menjadi persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi, maka penetapan target untuk indikator ini mengalami penurunan dibandingkan target pada periode sebelumnya. Selain terkait penambahan komponen pengukur indikator, penurunan target ini didasarkan atas pertimbangan semakin kritis sumber air permukaan yang dapat dijadikan sumber air minum dan kebutuhan pembiayaan semakin tinggi untuk mencari sumber-sumber air alternatif seperti air tanah, air PDAM dan pembangunan embung, bendung dan lain-lain.

4. Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi adalah membandingkan panjang saluran irigasi dengan luas budidaya yang dapat diairi dengan adanya bangunan fisik di bidang sumber daya air. Daerah irigasi

(DI) yang menjadi kewenangan Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 26 Daerah Irigasi Yang Menjadi Kewenangan Kab. Lombok Barat Tahun 2017

No	TAHUN	LUAS BAKU (Ha)	LUAS POTENSIAL (Ha)	PANJANG SALURAN (m)	KONDISI (m)		
					BAIK	RR	RB
1	2014	6.181	475.600	93.418	30.509	23.406	39.503
2	2015	6.181	475.600	93.418	31.661	42.727	19.031
3	2016	6.181	475.600	93.418	50.421	30.025	12.972
4	2017	6.181	475.600	93.418	51.595	30.992	10.832
5	2018	6.181	475.600	93.418	52.468	30.119	10.832

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Lombok Barat, 2018

Daerah irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Kabupaten Lombok Barat sebanyak 20 DI dengan 3 lokasi pengamat yang terletak di Gunungsari, Narmada, dan Kediri. Panjang saluran mencapai 93.418 dengan kondisi Baik pada tahun 2014 sebesar 30.509 m dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 52.468 m. Sedangkan saluran dalam kondisi rusak berat pada tahun 2014 sepanjang 39.503 m, kondisi ini membaik pada tahun 2018 dengan berkurangnya saluran dalam kondisi rusak berat menjadi 10.832 m.

Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang Pekerjaan Umum seperti yang terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2. 27 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kab. Lombok Barat Tahun 2017

No	Jenis Pelayanan Dasar			Standar Pelayanan Minimal		Target Nasional	Realisasi				
				Indikator		Nilai	2014	2015	2016	2017	2018
I	Sumber Daya Air	Prioritas Utama penyediaan Air untuk kebutuhan masyarakat		1	Persentase ersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.	100%	86,95	86,95	64,45	67,76	61,53
				2	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	70%	80,88	54,34	88,10	88,32	88,38
II	Jalan	Jaringan	Mobilitas	3	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/	60%	55,28	51,82	60,29	62,55	62,86

No	Jenis Pelayanan Dasar			Standar Pelayanan Minimal		Target Nasional	Realisasi				
				Indikator		Nilai	2014	2015	2016	2017	2018
					kota baik dan sedang						
			Akses bilitas	4	Persentase Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.	100%	70,05	70,05	90,10	109,18	111,68
III	Air minum	Cluster Pelayanan		8	Persentase Penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman		38,43	56,48	57,35	76,65	78,65
		Sangat buruk				40%					
		Buruk				50%					
		Sedang				70%					
		Baik				80%					
		Sangat Baik				100%					
IV	Air Limbah Permukiman			9	TPersentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Tersedianya akses sanitasi	60%	0,97	1,39	1,73	71,8	85,93
V	Jasa Konstruksi	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)		17	Persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap	100%	100	100	100	100	100
		Sistem Informasi Jasa Konstruksi		18	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	100%	42,86	42,86	42,86	46,66	49,23
VI	Penataan Ruang	Informasi Penataan Ruang		19.1	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR)	100%	100	100	25	100	100
						100%	50	50	100	100	0

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal		Target Nasional	Realisasi				
			Indikator		Nilai	2014	2015	2016	2017	2018
				wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog	100%	100	0	0	0	0
			19.2	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta Digital	100%	100	100	0	0	0
					100%	100	0	0	0	0
					100%	0	0	0	0	0
		Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	23	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.	25%	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Lombok Barat, 2018

Capaian kinerja SPM bidang pekerjaan umum Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 secara umum rata-rata mencapai 73,67% pada semua indikator. Indikator yang melampaui target adalah indikator aksesibilitas terkait Persentase Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota dengan capaian 111,68%.

5. Pemanfaatan Luas Lahan

Alih fungsi lahan adalah perubahan fungsi seluruh atau sebagian kawasan lahan dari fungsinya semula menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan pertanian merupakan konsekuensi dari perkembangan wilayah. Seiring berkembangnya sistem perekonomian serta meningkatnya jumlah penduduk, maka kebutuhan lahan untuk kepentingan dalam bidang selain pertanian semakin meningkat pula.

Kondisi luas lahan yang dimanfaatkan pada tahun 2017 di Kabupaten Lombok Barat mencapai 168,99 Ha dari total luas lahan sebesar 17.326,22 Ha. Masih banyaknya alih fungsi lahan yang terjadi berdampak pada ketidaklayakan dalam menopang kehidupan seperti ketersediaan pangan, keseimbangan

ekosistem hingga berdampak pada berkurangnya buruh tani dan mahalnya harga pangan. Berikut adalah mosaik citra SPOT6/7 Tahun 2017 terkait informasi spasial penutup/penggunaan lahan.

Gambar 2. 20 Penggunaan Lahan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017

6. Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Aspek-aspek Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi pengaturan tata ruang, pembinaan tata ruang, pelaksanaan tata ruang dan pengawasan tata ruang. Dari keempat aspek penyelenggaraan penataan ruang ini keluarannya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu terkait dengan dokumen perencanaan (pengaturan) dan terkait dengan perwujudan rencana tata ruang atau pemanfaatan ruang. Dokumen perencanaan tata ruang, meliputi: rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR) atau rencana teknis ruang (RTR), dan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL). Berapa banyak dokumen perencanaan tata ruang yang harus diwujudkan (RTRW, RDTR/RTR, dan RTBL) perlu dilakukan identifikasi

berdasarkan karakteristik wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. Sedangkan perwujudan rencana tata ruang atau pemanfaatan ruang berupa program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha, dan/atau masyarakat.

Keterwujudan rencana tata ruang atau pemanfaatan ruang dihitung dengan cara mengevaluasi struktur ruang dan pola ruang. Seberapa besar (prosentase) program-program yang telah dilakukan dalam mewujudkan rencana struktur ruang dan mengevaluasi pola ruang eksisting dengan bantuan interpretasi foto citra dibandingkan dengan rencana pola ruang. Hasil evaluasi dari struktur ruang dan pola ruang ini kemudian dirata-rata menghasilkan capaian keterwujudan rencana tata ruang atau kesesuaian pemanfaatan ruang.

Keterwujudan rencana tata ruang atau kesesuaian pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 28 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2014 – 2018

No	Jenis Rencana Tata Ruang	Kesesuaian Tata Ruang				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Struktur Ruang	-	-	100.00	100.00	100.00
2	Pola Ruang	-	-	95.83	96.97	98.12
3	Rata-rata struktur ruang dan pola ruang	83,11	86,44	97.92	98.49	99,06

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Lombok Barat, 2019

Cakupan layanan dengan indikator Kesesuaian RTRW pada tahun 2018 sebesar 99,06% dengan variabel perhitungan rata – rata struktur ruang dan pola ruang. Selanjutnya pada tahun 2018 dilakukan juga pemutakhiran metode penghitungan indikator kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan aspek : (1). Kualitas tata ruang, (2). Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan (3). Pelaksanaan pemanfaatan ruang. Capaian kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2018 dengan metode penghitungan yang baru adalah 50,22%. Hal ini berdampak pada penetapan target capaian pada periode perencanaan selanjutnya.

2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kriteria rumah tidak layak huni adalah rumah tempat tinggal yang memenuhi kriteria indikator sebagai berikut : 1) jenis lantai

bangunan tempat tinggal terluas (60% lebih) terbuat dari tanah/bambu/kayu kualitas rendah, 2) jenis dinding bangunan tempat tinggal terluas (60% lebih) terbuat dari bambu/kayu kualitas rendah. Jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Lombok Barat seperti yang ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 29 Rumah Layak Huni Tahun 2014 – 2018

NO	Uraian	Sat	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah rumah layak huni	unit	171,179	172,257	173,791	176,284	178,606
2	Jumlah rumah tidak layak huni	unit	43,683	42,605	41,071	39,739	38,508
3	Jumlah seluruh rumah	unit	214,862	214,862	214,862	221.711	222.732
Rumah Layak Huni		**%**	**79.67**	**80.17**	**80.88**	**79.51**	**80.19**

Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Lombok Barat, 2018

Berdasarkan pendataan rumah kurang/tidak layak huni tahun 2018 masih terdapat 38.508 unit rumah yang masuk kategori rumah tidak layak huni dari masyarakat penghasilan rendah yang tersebar di 122 desa dan kelurahan di Kabupaten Lombok Barat atau masih terdapat 9,81% rumah tidak layak huni. Sementara rumah layak huni pada tahun 2018 telah mencapai 80,19%, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 79,51% yang artinya adanya peningkatan jumlah rumah dan rumah layak huni sementara jumlah rumah tidak layak huni mengalami penurunan.

Padatnya jumlah penduduk menjadikan kebutuhan tempat tinggal menjadi tinggi namun tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan yang cukup, akhirnya banyak ruang terbuka yang dijadikan bangunan. Pemanfaatan lahan yang tidak tepat disertai kurang baiknya infrastruktur pendukung perumahan menyebabkan permasalahan semakin sulit untuk diatasi.

Tabel 2. 30 Persentase Kawasan Kumuh di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 – 2018

No	Uraian	Tahun					Ket
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Luas Kawasan (ha)	-	-	-	42.464,34	42.464,34	
2	Luas Kawasan Permukiman Kumuh (ha)	221,42	177,14	132,85	132,75	132,50	
3	Persentase (%)	-	-	-	0,474	0,474	

Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Lombok Barat, 2019

Luas kawasan kumuh di Kabupaten Lombok Barat mencapai 201,47 ha, yang artinya masih terdapat 0,474% kawasan kumuh dari luas kawasan di Kabupaten Lombok Barat.

2.3.1.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Ketentraman dan ketertiban merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, dan merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama. Upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban dilakukan dengan meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan, peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat.

Perda dan Perbup dalam rangka menciptakan kesadaran masyarakat untuk mentaati undang-undang juga sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Terciptanya keamanan dan ketertiban dapat menciptakan kondisi yang aman, tertib dan sadar hukum di masyarakat sehingga dapat mendukung pelaksanaan pembangunan.

Capaian RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 pada indikator penegakan Perda mencapai 100% sedangkan penanganan konflik SARA pada tahun 2018 mencapai 100%. Hal ini menunjukkan kemampuan daerah dalam menjalankan ketenteraman dan ketertiban umum dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat telah optimal. Akan tetapi potensi dalam konflik terkait SARA masih dapat terjadi, selain itu masih perlu ditingkatkan pengawasan dalam hal penegakan Perda agar terwujud masyarakat yang memiliki kesadaran dalam ketertiban dan keteraturan

Sedangkan dalam rangka mewujudkan kabupaten/kota tangguh untuk menghadapi bencana dalam rangka meningkatkan

kemampuan menahan, menyerap, beradaptasi dengan dan memulihkan diri dari akibat bencana secara tepat waktu dan efisien, sambil tetap mempertahankan struktur- struktur dan fungsi – fungsi dasarnya, serta mampu menahan guncangan dan tekanan – tekanan dari ancaman bencana alam maupun ancaman terkait iklim, maka Kabupaten Lombok Barat berkomitmen menjadikan pengurangan risiko bencana dan ketangguhan bencana sebagai prioritas pembangunan.

Berikut adalah trend Indeks Kapasitas Daerah dan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Lombok Barat.

Tabel 2. 31 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 – 2018

Tahun	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	Pengkajian dan Perencanaan Terpadu	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	IKD	Kelas
2013 - 2016	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,2	RENDAH
2016	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,2	RENDAH
2017	0,63	0,80	0,40	0,28	0,20	0,40	0,34	0,37	RENDAH
2018	0,66	0,80	0,76	0,55	0,29	0,57	1,00	0,6	SEDANG

Sumber : BPBD Kabupaten Lombok Barat, 2019

Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2018 terkategori sedang. Masih diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas daerah menuju Kabupaten Lombok Barat Tangguh Bencana.

Gambar 2. 21 Trend Indeks Risiko Bencana Lombok Barat

Tahun	:	2013/2015	2016	2017	2018	2019
Indeks Risiko	:	200,4	200,4	193,9	158,3	158,3
Kelas	:	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI

Sumber : BPBD Kabupaten Lombok Barat, 2019

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Lombok Barat sampai dengan tahun 2019 masih dalam kategori tinggi. Berdasarkan data

dan informasi bencana, Kabupaten Lombok Barat merupakan daerah rawan bencana yang meliputi banjir, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, cuaca ekstrim, tanah longsor, kebakaran hutan dan tsunami. Untuk itu sangat diperlukan upayan penurunan indeks risiko bencana dengan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di daerah dengan Indeks Ketahanan Daerah (IKD).

2.3.1.6. Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui program perlindungan sosial dan program pemberdayaan sosial. Program perlindungan sosial dilaksanakan melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial serta pemberian bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS. Sementara itu, pemberdayaan sosial dilaksanakan dengan memberikan bimbingan sosial, motivasi, dan bimbingan usaha disertai dengan pemberian modal usaha untuk penumbuhan dan pengembangan pada kelompok usaha bersama (KUBE) atau bentuk pemberdayaan lainnya. Pelayanan umum yang berkaitan dengan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dilakukan melalui peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti Orsos, PSM, Karang Taruna, dunia usaha serta potensi lainnya sehingga mampu menjadi mitra pemerintah dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lombok Barat.

Berdasarkan pemutakhiran data PMKS yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat, pada tahun 2018 jumlah penyandang dari berbagai jenis PMKS sebesar 147.323, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 761.856. Jumlah PMKS pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingan tahun 2017 yang hanya berjumlah 74.164, hal ini menunjukkan masih kurang intensifnya penanganan PMKS di Kabupaten Lombok Barat, terlebih lagi adanya bencana gempa bumi yang terjadi dapat menjadi sebab meningkatnya kemiskinan yang merupakan salah satu jenis PMKS.

Perkembangan jumlah PMKS selama tahun 2014-2018 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 32 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2014 -2018

No	Jenis PMKS	2014	2015	2016	2017	2018
1	Anak Balita Terlantar					5
2	Anak Terlantar	1.542	1.548	1.550	1.690	1.702
3	Anak Nakal/ Anak Berhadapan Degan Hukum	61	60	60	61	164
4	Lanjut Usia Terlantar	1.486	1.490	1.520	1.546	1.546
5	Anak Jalanan	49	0	0	49	49
6	Anak Menjadi Korban Kekerasan(AMPK)	0	0	0	190	230
7	Penyandang disabilitas	141	142	849	905	2.425
8	Korban Penyalahgunaan Napza	5	10	10	30	10
9	Gelandangan Pengemis	441	469	196	121	237
10	Bekas Narapidana	845	910	831	141	882
11	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	200	215	195	156	170
12	Pekerja Migran	-	-	-	167	317
13	Wanita Korban Tindak Kekerasan	60	55	77	35	226
14	Korban Trafiking	10	40	35	10	15
15	HIV/AIDS	2	20	20	20	20
16	Korban Bencana Alam	18	91	17	1.826	72.222
JUMLAH		**4.860**	**5.050**	**5.360**	**6.947**	**80.220**

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat, 2019

Tabel 2. 33 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Tahun 2014 – 2018

No	Jenis PSKS	2014	2015	2016	2017	2018
1	WKSBM	171	192	289	379	425
2	PSM	178	254	263	276	281
3	KARANG TARUNA	49	56	75	87	94
4	LKS/ORSOS	30	31	34	34	205
JUMLAH		**428**	**533**	**661**	**776**	**1.005**

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat, 2019

Capaian Kinerja Penanganan PMKS/PPKS sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 34 Penanganan PMKS

No	Jenis PMKS	Jumlah PMKS	PMKS Yang sudah tertangani	Sisa	%
1	Anak Balita Terlantar	5	-	5	0
2	Anak Terlantar	1.702	80	1.622	4,70
3	Anak Nakal/ Anak Berhadapan Degan Hukum	164	29	135	17,68
4	Lanjut Usia Terlantar	1.546	119	1.427	7,70
5	Anak Jalanan	49	-	49	0,00
6	Anak Menjadi Korban Kekerasan(AMPK)	230	-	230	0,00
7	Penyandang disabilitas	2.425	1.013	1.412	41,77
8	Korban Penyalahgunaan Napza	10	-	10	0,00
9	Gelandangan Pengemis	237	70	167	29,54
10	Bekas Narapidana	882	263	619	29,82
11	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	170	10	160	5,88
12	Pekerja Migran	317	142	175	44,79
13	Wanita Korban Tindak Kekerasan	226	140	86	61,95
14	Korban Trafiking	15	-	15	0,00
15	HIV/AIDS	20	-	20	0,00
16	Korban Bencana Alam	72.222	45.681	26.541	63,25
JUMLAH		**80.220**	**47.547**	**32.673**	**59,27**

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat, 2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 80/HUK/2010, dapat dijabarkan capaian kinerja SPM Bidang Sosial sebagai berikut :

Tabel 2. 35 Capaian SPM Bidang Sosial Kab. Lombok Barat Tahun 2017

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Kondisi Capaian SPM	Kondisi Yang di Harapkan
1	Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	42,51%	80%
2	Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala kabupaten	Persentase PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	0,00%	80%
3	Pelayanan dasar untuk penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kabupaten	Persentase panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	87,50%	80%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Kondisi Capaian SPM	Kondisi Yang di Harapkan
4	Pelayanan dasar untuk penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti sosial skala kabupaten	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	66.67%	60%
5	Pelayanan dasar bantuan sosial bagi korban bencana skala kabupaten	Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	80%
6	Pelayanan dasar untuk evakuasi korban bencana skala kabupaten dengan indikator	Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100%	80%
7	Pelayanan dasar untuk Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kabupaten/Kota	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	53,74%	60%

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat, 2018

Capaian SPM bidang sosial pada tahun 2017 rata-rata melampaui target nasional yang ditetapkan. Masih terdapat 2 indikator yang belum mencapai target bahkan masih mencapai 0% dari target 80% yakni indikator Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala kabupaten. Sementara untuk indikator-indikator lainnya telah melampauai dari target yang ditetapkan.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.2.1. Tenaga Kerja

Masalah pokok ketenagakerjaan adalah produktivitas tenaga kerja yang masih rendah dengan melihat Rasio Orang Bekerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT menggambarkan perbandingan jumlah penduduk usia kerja yang menganggur dengan banyaknya angkatan kerja, sedangkan rasio orang bekerja menggambarkan perbandingan jumlah penduduk yang bekerja pada angkatan kerja.

Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Lombok Barat sejak tahun 2014 hingga tahun 2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 36 Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2017

No	Uraian	2014	2015	2016	2017
1	Penduduk yang Bekerja	279.325	309.811	309.811	316.827
2	Angkatan Kerja	454.826	463.615	463.615	480.959
3	Rasio Penduduk yang Bekerja (%)	61,41	66,83	66,83	65,87

Sumber : BPS Kabupaten Lombok Barat, 2018

Rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2014 sebesar 61,41% dari angkatan kerja yang memperoleh pekerjaan, atau dengan kata lain terdapat 38,69% angkatan kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Pada tahun 2017 rasio penduduk yang bekerja sebesar 65,87% sedikit mengalami peningkatan sebesar 4,46% dari tahun 2014, dengan kata lain masih terdapat 34,13% angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan.

Rasio penduduk yang bekerja tersebut menunjukkan dari 100 orang terdapat 65-66 orang yang bekerja, menganggur dan sedang bekerja. Akan tetapi peningkatan jumlah penduduk berimplikasi pada peningkatan jumlah angkatan kerja, yang berarti semakin rendahnya kesempatan kerja yang memadai. Dengan demikian terdapat 34,13% yang akan menjadi pengangguran dan berdampak buruk bagi lingkungan sosial, serta menimbulkan beban penyediaan layanan sosial dan ekonomi, oleh karena itu Pemerintah Daerah dituntut untuk menyediakan lebih banyak peluang usaha baru yang menciptakan kesempatan kerja, diantaranya dengan meningkatkan peran industri kreatif yang ada.

Jumlah Angkatan kerja di Kabupaten Lombok Barat mencapai 480.959 orang, penduduk bekerja sebanyak 316.827 orang, sementara jumlah pengangguran sebanyak 10.749 orang, artinya masih terdapat 153.383 angkatan kerja (31,89%) yang bekerja namun tergolong setengah menganggur atau sebagai pengangguran terselubung. Perkembangan TPT Kabupaten Lombok Barat terus mengalami penurunan dari 5,75% pada tahun 2014 menurun menjadi 3,34% pada tahun 2018. Secara rinci perkembangan TPT Kabupaten Lombok Barat disajikan pada gambar berikut :

Gambar 2. 22 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2018

Sumber : BPS NTB, TPT 2019

2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah dan persentase perempuan yang menempati posisi Eselon I – IV.

Gambaran terhadap perkembangan partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah di Kabupaten Lombok Barat sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 37 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016-2018

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	1	2	2
2	Pekerja perempuan di pemerintah	3455	3116	3056
3	Persentase perempuan di lembaga legislatif	15,56%	15,56%	15,56%
4	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	0.4%	0.4%	0.4%

Sumber : DP2KBP3A, 2019

Pada tahun 2018 jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II ada 2 atau masih sama dengan tahun sebelumnya. Sementara itu jumlah pekerja perempuan di pemerintah selama tahun 2016-2018 mengalami penurunan, pada tahun 2018 sebanyak 3.056, sedangkan pada tahun 2017 sebesar 3116. Persentase perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah hanya sebesar 0,4% pada tahun 2018, jumlah ini

masih sama dibandingkan tahun 2016 dan 2017. Demikian halnya partisipasi perempuan di lembaga legislative selama kurun waktu 2016-2018 masih sebesar 15,56%. Hal ini berarti masih belum cukup signifikan menunjukkan peran atau partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun lembaga legislatif.

b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Rasio KDRT adalah jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per jumlah rumah tangga. Gambaran terhadap perkembangan Rasio KDRT di Kabupaten Lombok Barat sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 38 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Tahun 2016 - 2017 Kabupaten Lombok Barat

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Jumlah KDRT	89	84
2	Jumlah Rumah Tangga	186.777	189.610
3	Rasio KDRT	0,048	0,044

Sumber : DP2KBP3A, 2019

Jumlah KDRT di Kabupaten Lombok Barat mengalami penurunan, dari 89 pada tahun 2016 menjadi 84 pada tahun 2017. Rasio KDRT pada tahun 2017 mencapai 0,048, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 0,044. Peningkatan ini disebabkan meningkatnya jumlah rumah tangga dari 186.777 di tahun 2016 menjadi 189.610 di tahun 2017.

2.3.2.3. Pangan

Program dan kegiatan dalam urusan pangan dilaksanakan dalam rangka penguatan cadangan pangan, aksesibilitas pangan

dan ketersediaan informasi dan peningkatan mutu konsumsi pangan.

Kinerja urusan pangan diukur dengan indikator-indikator pelayanan dasar, yaitu Ketersediaan dan cadangan pangan; dan Penganekaragaman dan keamanan pangan. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan pangan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 39 Capaian Bidang Urusan Pangan Kab. Lombok Barat Tahun 2015 – 2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Persen	69,54	70,91	72,70	74,90	79,00
2	Stok Cadangan Pangan	Ton	20,00	20,00	20,00	18,20	13,00

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Lombok Barat, 2019

Skor PPH tahun 2018 mencapai 79% hal ini menggambarkan situasi konsumsi pangan yakni menggambarkan akses masyarakat terhadap pangan, status gizi dan kesejahteraan sudah cukup tinggi dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Skor PPH tersebut menunjukkan bahwa kualitas konsumsi pangan penduduk sudah mendekati ideal, dimana skor PPH ideal adalah 100%. Sementara stok cadangan pangan, sesuai target SPM ditetapkan 60 ton stok yang tersedia. Namun pada tahun 2017 dan 2018, karena keterbatasan fiskal daerah, maka stok cadangan pangan hanya dapat dikeluarkan sebesar masing – masing 18,20 ton pada tahun 2017 dan 13 ton pada tahun 2018.

2.3.2.4. Pertanahan

Urusan pertanahan menitikberatkan pada penertiban administrasi pertanahan dan penataan serta penguasaan dan pemilikan tanah serta fasilitasi permasalahan pertanahan. Dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Lombok Barat yaitu 12,623,884.03 m2, baru 4,426,296 m2 tanah yang telah bersertifikat pada tahun 2018 atau sekitar 35,06%. Selama kurun waktu tahun 2014-2019 total luas lahan bersertifikat mencapai 48% dari target dalam Rencana Strategis sebesar 50% atau 96% tercapai. Pencapaian ini termasuk baik jika mengingat luasan lahan Pemerintah Daerah yang belum bersertifikat yakni sebesar 8,197,587.84 m2.

Tingginya pencapaian lahan bersertifikat sangat terbantu oleh Program Pemerintah Pusat yakni PTSL sehingga biaya yang dibutuhkan untuk melakukan legalisasi lahan tidak besar. Akan tetapi lahan yang belum bersertifikat patut menjadi perhatian di masa yang akan datang jika menilik dari dampak yang diakibatkan. Permasalahan bidang pertanahan dari tahun ke tahun selalu menjadi perhatian baik permasalahan antara masyarakat dengan pemerintah desa maupun dengan pemerintah daerah dan juga antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi yang menyangkut tanah hak milik masyarakat, tanah kas desa maupun tanah aset pemerintah daerah yang seharusnya segera diselesaikan.

2.3.2.5. Lingkungan Hidup

Seiring dengan adanya berbagai pembangunan proyek strategis di Kabupaten Lombok Barat, berbagai kegiatan pembangunan tersebut membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat, sekaligus mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup digunakan sebagai parameter bidang urusan lingkungan hidup. Capaian IKLH dan komponen pembentuk IKLH di Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 40 Capaian Kinerja Bidang Lingkungan Hidup Kab. Lombok Barat Tahun 2015 – 2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Persentase Pengelolaan Sampah	Persen	49,42	49,42	49,42	60,79	60,83
2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	-	-	-	-	91,045
3	Persentase Kualitas Air Sungai (Metode penghitungan lama : Jumlah Sungai tercemar)	Persen	81,81	81,81	81,81	72,73	72,73
	Indeks Kualitas Air (dengan 11 parameter	Indeks	-	-	-	-	22,75

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
	PH, COD, DO, TSS, Fe, Mn, Tds, DHL dan Suhu, e-coli dan BOD5)						
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	-	-	-	-	51,328
	IKLH	Indeks	-	-	-	-	54,67

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lombok Barat, 2019

Dari tahun ke tahun, capaian indikator bidang urusan lingkungan hidup mengalami peningkatan. Untuk pemeriksaan kualitas air sungai sampai tahun 2018 dilakukan pemeriksaan kualitas fisika dan kualitas kimia. Sedangkan parameter Biologi belum bisa diukur karena keterbatasan alat dan SDM. Untuk kualitas fisika diukur 4 parameter yaitu parameter temperatur, DHL, kekeruhan dan residu terlarut. Dari hasil pengukuran keempat parameter tersebut dari 22 titik di 11 sungai kondisinya baik. Untuk kualitas kimia, diukur 6 parameter yaitu parameter Ph, DO, COD, BOD, Fe, dan parameter Mn. Hasil pengukuran 6 parameter tersebut menunjukkan nilai indeks pencemaran 3 sungai kondisi cemar ringan dan 8 sungai kondisi baik dari total 11 sungai yang diukur atau sekitar 72,73% sungai dalam kondisi baik.

Sedangkan untuk kualitas bakteriologi air sungai, berdasarkan sifat biologi digunakan dua parameter yaitu total Coli dan E Coli. Sampai tahun 2018 parameter biologi belum dapat diperiksa karena keterbatasan tenaga dan sarana yang ada di laboratorium lingkungan hidup Kabupaten Lombok Barat sehingga berpengaruh terhadap persentase kualitas air sungai secara keseluruhan.

2.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian urusan kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 adalah dengan melihat indikator-indikator sebagai berikut:

Tabel 2. 41 Capaian Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Barat Tahun 2015 – 2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	Persen	100	100	100	100	100
2	Cakupan Penerbitan KTP eL	Persen	71,57	71,57	78,92	84,80	89,02
3	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran (anak usia 0 - 18 tahun)	Persen	28,44	28,44	49,17	92,13	94,46
4	Cakupan Penerbitan Akta Kematian	Persen	1,99	1,99	13,58	24,93	42,20

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Lombok Barat, 2019

Berdasarkan data yang ada, kepemilikan kartu keluarga selalu memenuhi target sejak tahun 2014. Pada tahun 2014 tercatat jumlah KK 241.117, tahun 2016 sejumlah 266.061 KK, tahun 2017 sejumlah 251.578 dan tahun 2018 sejumlah 220.994 KK. Demikian halnya cakupan kepemilikan KTP dan Akta kelahiran juga menunjukkan capaian yang tinggi.

Capaian terhadap penerbitan akta kematian yang masih perlu mendapat perhatian, karena meskipun setiap tahun jumlah penerbitan akta kematian terhadap kematian yang tercatat sudah meningkat, namun jumlahnya masih dibawah 50 persen.

2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat.

Keberhasilan indikator pemberdayaan masyarakat dan desa dapat terlihat dari kemampuan daerah dalam memberdayakan desa menjadi desa mandiri. Pada tahun 2016-2018 belum terdapat desa mandiri di Kabupaten Lombok Barat, akan tetapi kondisi pemberdayaan desa telah mencapai pada tahapan desa berkembang dan cepat berkembang. Pada tahun 2018 dari 119 desa di Kabupaten Lombok Barat, terdapat 65 desa berkembang dan 54

desa cepat berkembang atau persentasenya masih mencapai 46,27% dari target yang ditentukan yakni sebesar 55%.

Desa mandiri adalah desa yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa tergantung dari bantuan pemerintah. Beberapa faktor yang akan mempengaruhi suatu desa menuju desa mandiri adalah : potensi sumber daya manusia, potensi sumber daya alam, potensi pembeli (pasar) serta kelembagaan dan budaya lokalnya.

Belum tersedianya desa mandiri di Kabupaten Lombok Barat menjadi permasalahan, ketidaktersediaan desa mandiri menunjukkan bahwa belum optimalnya good governance. Adanya desa mandiri juga dapat berpengaruh bagi perekonomian daerah yang khususnya pertumbuhan ekonomi dari bawah yang menitikberatkan pada tumbuh dan berkembangnya sektor usaha dan industri lokal, yang mempunyai basis produksi bertumpu pada sumberdaya lokal.

2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program kependudukan dan keluarga berencana adalah dalam rangka untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kualitas penduduk melalui upaya peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga melalui perencanaan keluarga yang sehat dan sejahtera baik dari segi kualitas kehidupan sosial maupun ekonomi. Program-program tersebut dilaksanakan dengan konsentrasi pada pemantapan aspek program, peningkataan kualitas SDM dan pelayanan KB, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Rincian cakupan peserta KB Aktif per Kecamatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 42 Cakupan Peserta KB Aktif Tahun 2014-2018

No.	KECAMATAN	PESERTA KB AKTIF				
		2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1	BATU LAYAR	7,048	7,598	7,766	8,090	8,830
2	GUNUNGSARI	12,318	13,640	14,222	14,232	14,512
3	LINGSAR	11,768	13,081	13,912	13,165	11,879
4	NARMADA	14,236	15,044	15,209	15,633	15,300
5	LABUAPI	10,770	11,318	12,125	11,219	12,456
6	KEDIRI	8,033	9,166	10,276	9,280	8,727
7	KURIPAN	5,322	5,546	5,982	6,371	5,549

No.	KECAMATAN	PESERTA KB AKTIF				
		2015	2015	2016	2017	2018
8	GERUNG	13,567	15,057	14,569	15,829	16,739
9	LEMBAR	8,631	9,897	10,170	10,572	11,186
10	SEKOTONG	10,765	9,845	9,890	10,223	10,330
JUMLAH		**102,458**	**110,192**	**114,121**	**114,614**	**115,508**

Sumber : DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat, 2019

Keberhasilan program keluarga berencana ditunjukkan melalui tingginya jumlah peserta KB Aktif. Jumlah peserta KB aktif Kabupaten Lombok Barat tahun 2018 menunjukkan perkembangan positif dimana sarana prasarana dan fasilitas keluarga berencana berusaha ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini terlihat Pada tahun 2018 jumlah peserta KB aktif mencapai 115.508 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 114.614. peningkatan jumlah peserta KB aktif ini perlu menjadi perhatian, selain meningkatkan jumlahnya, pengawasan dan sosialisasi terhadap keluarga baru dan yang belum mengikuti program KB juga perlu ditingkatkan dalam rangka menekan pertumbuhan penduduk sehingga memperkecil peluang peningkatan kemiskinan.

Tabel 2. 43 Capaian Indikator Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2014 – 2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	4	5	6	7
1	Persentase laju pertumbuhan penduduk	Persen	1,49	1,57	1,56	1,56	1,49
2	Rasio Akseptor KB	Persen	70,30	75,02	77,44	77,31	77,47

Sumber : DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat, 2019

Pelaksanaan bidang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat diukur dari persentase laju pertumbuhan penduduk dan rasio akseptor KB. Laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2015 mengalami penurunan. Artinya, upaya menekan laju pertumbuhan penduduk melalui program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh DP2KBP3A telah tepat sasaran. Pada tahun 2015 laju pertumbuhan penduduk adalah 1,57 persen, menurun menjadi 1,56 persen pada tahun 2016. Laju ini stagnan untuk tahun 2017, tetap pada angka 1,56 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 1,49 persen.

Capaian rasio akseptor KB juga menunjukkan hal serupa. Kecenderungan peningkatan rasio akseptor KB ini harus tetap menjadi perhatian untuk dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan jumlahnya

2.3.2.9. Perhubungan

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat dan perkembangan wilayah baik itu daerah perdesaan maupun daerah yang lainnya.

Perkembangan jumlah kendaraan bermotor wajib uji di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 44 Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2018

NO	JENIS KENDARAAN	TAHUN					KET
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	MOBIL BARANG	3276	3724	4621	4911	5476	
2	MOBIL BUS	50	58	64	64	68	
3	MOBIL PENUMPANG	312	384	423	410	422	
JUMLAH		3638	4166	5108	5385	5966	

Sumber : Dishub Kab. Lombok Barat, 2019

Pelayanan moda transportasi umum dimaksudkan untuk melayani mobilitas penduduk dan sumberdaya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi. Interaksi antar wilayah tercermin pada keadaan fasilitas transportasi serta aliran orang, barang, maupun jasa. Kondisi pelayanan transportasi belum optimal dan cenderung stagnan, disebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, menurunnya jumlah penumpang angkutan umum dan kinerja angkutan umum yang rendah.

Kinerja pelayanan kendaraan umum sebagai bagian dari sarana dan prasarana dalam melayani masyarakat ditunjukkan dengan jumlah trayek dan kendaraan yang beroperasi. Pelayanan angkutan umum di Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 45 Trayek dan Jumlah Kendaraan Yang Beroperasi Tahun 2016 – 2018

NO	KODE TRAYEK	JARINGAN TRAYEK	PANJANG JALUR TRAYEK (Km)	JUMLAH MODA TRANSPORTASI				
				2014	2015	2016	2017	2018
1	U.01	GUNUNGSARI – MAMBELAN – LILIR – KEKERI – SEGERONGAN – TEREP – PETELUAN INDAH – SELAGALAS – MANDALIKA, PP.	12,1				4	4
2	U.02	GUNUNGSARI – MONTONG – MANGSIT – AMPENAN, PP.	7				1	1
3	U.03	KERANDANGAN – SENGGIGI – GUNUNGSARI – AMPENAN, PP.	20,5	70	70	70	72	72
4	U.04	SENGGIGI – MONTONG – MANGSIT – AMPENAN, PP.	8,8	12	12	12	15	15
5	U.05	SIDEMEN – GUNUNGSARI – REMBIGA – AMPENAN, PP.	11	46	46	46	63	63
6	U.06	GUNUNGSARI - LILIR - KEKERI - SAYANG-SAYANG - SINDU, PP.	12,2				12	12
7	U.07	GUNUNGSARI - LILIR - SAYANG-SAYANG - MANDALIKA, PP.	12,2				43	43
8	T.01	KERU – NARMADA – MANDALIKA , PP.	11,3	75	75	75	75	75
9	T.02	SESAOT – NARMADA – MANDALIKA, PP.	21	43	43	43	52	52
10	T.03	NARMADA – LINGSAR – MANDALIKA, PP.	13,9	40	40	40	40	40
11	T.04	NARMADA – TANAK BEAK – KUMBUNG – KURIPAN – GERUNG, PP.	15,5					
12	T.05	NARMADA – DASAN TERENG – MEREMBU – BENGKEL – MANDALIKA, PP.	11				2	2
13	T.06	NARMADA – BATU KUMBUNG – KARANG BAYAN – SEGERONGAN – KEKERI – GN. SARI,PP	10,3					
14	T.07	KERU – SEDAU – SESAOT – NARMADA, PP.	25	21	21	21	25	25
15	S.01	LEMBAR - GERUNG - KEDIRI - BENGKEL - MANDALIKA, PP.	21,59	54	54	54	55	55
16	S.02	LEMBAR - SEKOTONG - PELANGAN - LABUAN POH. PP.	47,7	35	35	35	35	35
17	S.03	LEMBAR - SEKOTONG - BLONGAS - PENGANTAP, PP.	40,6	5	5	5	5	5
18	S.04	LABUAN POH - PELANGAN - LEMBAR - MANDALIKA, PP.	68,2				1	1
19	S.05	GERUNG - PENARUKAN - KEBON AYU - KURANJI - PRAMPUAN - LABUAPI, PP	13,5				2	2
20	S.06	GERUNG – KEDIRI – RUMAK – BANYUMULEK – GAPUK, PP.	16,1					
21	S.07	GERUNG – KURIPAN – KEDIRI – MANDALIKA, PP.	15,4	16	16	16	16	16
22	S.08	GERUNG – RUMAK – GUNUNG PENGSONG – PRAMPUAN – BAJUR – PAGUTAN, PP.	17,2					
23	S.09	GERUNG – RUMAK – LABUAPI – BENGKEL – MANDALIKA -, PP.	8,5	5	5	5		
24	S.10	GERUNG – GAPUK – BANYUMULEK – RUMAK – LABUAPI – BENGKEL – MANDALIKA,PP.	22,4	5	5	5	5	5

NO	KODE TRAYEK	JARINGAN TRAYEK	PANJANG JALUR TRAYEK (Km)	JUMLAH MODA TRANSPORTASI				
				2014	2015	2016	2017	2018
25	S.11	PRAMPUAN – JERNENG – LABUAPI – BENGKEL – MANDALIKA, PP.	8,4					
26	S.12	PRAMPUAN – BAJUR – BENGKEL – MANDALIKA, PP.	12,1					
27	S.13	KEDIRI – BAGEKPOLAK – JERNENG - PRAMPUAN, PP.	8,1					
28	S.14	GERUNG – TEMPOS – AIK AMPAT – DASAN GERES – GERUNG, PP.	6,5					
29	S.15	GERUNG – MENANG – AIKAMPAT – DASAN GERES – RUMAK – LABUAPI, PP	12,3				1	1
30	S.16	GERUNG-BANYU URIP-AIK AMPAT-GERUNG,PP	15,5					
31	S.17	GERUNG-RUMAK-BANYU MULEK-SUKA MAKMUR-MESANGGOK-GERUNG,PP	15,1					
JUMLAH			***540,99***	***427***	***427***	***427***	***524***	***524***

Sumber : Dishub Kab. Lombok Barat, 2018

Jumlah trayek yang tersedia di Kabupaten Lombok Barat sebanyak 31 dimana jumlah kendaraan yang dilalui mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 jumlah kendaraan yang dilalui trayek sebanyak 21, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 yang hanya mencapai 13. Hal ini mengindikasikan bahwa antusias masyarakat dalam menggunakan angkutan pelayanan umum semakin baik, seiring meningkatnya sarana dan prasarana yang telah disediakan bagi masyarakat.

Gambar 2. 23 Persentase Wilayah Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi

Sumber : Dishub Kab. Lombok Barat, 2018

2.3.2.10. Komunikasi dan Informatika

Bidang Urusan komunikasi dan informatika fokus pada tata kelola informasi dan komunikasi publik, *e-government* dan aplikasi serta jaringan

internet. Pencapaian target dilakukan antara lain melalui penetapan kebijakan dan regulasi, pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas, mendorong pemanfaatan konten internet yang produktif, sehat dan aman, diseminasi informasi publik, pengelolaan keterbukaan informasi publik serta penelitian dan pengembangan SDM unggul di bidang komunikasi dan informatika.

Terkait pengelolaan keterbukaan informasi publik yang merupakan amanat Undang – Undang No, 14 Tahun 2008, Kabupaten Lombok Barat telah menunjukkan komitmennya dengan membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Implementasi Perda tersebut salah satunya diwujudkan dengan pembentukan organisasi pengelola, yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Keterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan tuntutan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Melalui pelayanan komunikasi yang terintegrasi memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan memudahkan bagi aparat dalam menyajikan informasi yang diinginkan oleh masyarakat. Keterbukaan informasi publik memberikan dampak bagi pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan yang didambakan masyarakat. Peningkatan dan evaluasi serta monitoring PPID terus dilaksanakan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dan berprestasi.

Lombok barat mengukir prestasi terkait keterbukaan informasi publik sebagai tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. 46 Prestasi Keterbukaan Informasi Publik

No	Tahun	Peringkat Keterbukaan Informasi Publik	KET
1	2014	Juara I	
2	2015	Juara II	
3	2017	Juara I	
4	2018	Juara I	

Sumber : Diskominfo Kab. Lombok Barat, 2019

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2018 terdapat 5 blank spot dengan menara sebanyak 229 dan BTS sebanyak 351 yang terbangun di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Peningkatan jumlah Menara dan BTS berdampak pada semakin sedikitnya

jumlah blank spot, peningkatan ini diharapkan meningkatkan keterjangkauan seluru informasi baik dalam hal berkomunikasi melalui perangkat telepon maupun jarinan internet.

2.3.2.11. Koperasi dan UKM

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badanhukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Tabel 2. 47 Perkembangan Koperasi Aktif di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2015	2016	2017	2018
1	Jumlah koperasi	unit	495	502	502	503
2	Jumlah koperasi aktif	unit	278	290	295	301
3	Persentase	%	56,16	57,77	58,76	59,84

Sumber : Dinas Koperasi UKM Kab. Lombok Barat

Definisi koperasi aktif adalah sudah melaksanakan RAT 2 kali berturut-turut, masih ada kegiatan usaha dan administrasi yang dilaksanakan serta pengurus dan anggota masih memenuhi kewajibannya sesuai AD/ART. Pada tahun 2018 jumlah koperasi aktif di Kabupaten Lombok Barat sebesar 59,84% atau 301 unit koperasi dari total koperasi sebanyak 503 unit. Capaian ini mengalami peningkatan sebesar 1,08% atau sebanyak 6 koperasi aktif dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil.

Keberadaan UKM terbukti mewujudkan pelaku usaha yang mandiri, kukuh dan fleksibel, dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun. Bahkan tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa UKM merupakan leader perekonomian daerah bahkan nasional, Pengembangan UKM merupakan prioritas dan menjadi sangat urgen dan vital, oleh karena itu upaya untuk memberdayakan UKM harus terencana, sistematis dan menyeluruh baik pada tataran makro maupun mikro. Perkembangan jumlah UKM di Kabupaten Lombok Barat adalah sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 48 Jumlah UKM di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2016	2017	2018
1	Jumlah usaha mikro	unit	945	1758	2079
2	Jumla usaha kecil	unit	326	414	500
3	Jumlah usaha menengah	unit	0	475	-
Jumlah			1271	2647	2579

Sumber : DiskopUKM Kab. Lombok Barat, 2019

Selama kurun waktu 2016-2018 jumlah UKM di Kabupaten Lombok Barat mengalami peningkatan signifikan. Pada periode tersebut peningkatannya mencapai 102.91%.. berdasarkan tabel diatas jenis UKM masih didominasi usaha mikro dan kecil, sementara UKM dengan usaha menengah masih belum cukup baik perkembangannya. Oleh karena itu diharapkan perhatian dan dukungan agar UKM baik yang mikro dan kecil dapat ditingkatkan menjadi usaha menengah.

2.3.2.12. Penanaman Modal

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan penggunaan modal dalam negeri yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Semakin besar penanaman modal yang dilakukan, semakin meningkat pula pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2. 49 Nilai Investasi PMDN/PMA di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1	Realisasi PMDN (Fasilitas dan Non Fasilitas) (Juta Rp.)	302.623,79	175.640,48	1.450.145,88	1.259.392,78	1.492.206,88
	Realisasi PMDN (Fasilitas) (Juta Rp.)	n/a	155.824,64	336.174,79	470.543,29	288.094,38
	Realisasi PMDN (Non Fasilitas)(Juta Rp.)	n/a	19.815,84	1.113.971,09	788.849,49	1.204.112,50
2	Realisasi PMA (US$)	57.113.002	342.565.165	52.728.886	65.290.196	108.545.983

Sumber : DPM-PTSP Kabupaten Lombok Barat, 2018

Secara umum realisasi penanaman modal yang terealisasi selama periode tahun 2014-2018 mengalami peningkatan yang positif, selama tahun 2018 jumlah PMDN yang terealisasi adalah sebesar Rp. 1.492.206.876.501 dengan rincian realisasi PMDN dengan Fasilitas sebesar Rp.288.094.375.109 dan realiasai PMDN Non Fasilitas sebesar Rp. 1.204.112.501.392. Sementara jumlah PMA yang terealisasi mencapai US$ 108.545.983. Capaian ini harus dipertahankan dan ditingkatkan kembali dalam rangka mendorong perekonomian yang bertujuan pada kesejahteraan masyarakat Lombok Barat.

Jumlah nilai investasi baik asing maupun dalam negeri PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan realisasi nilai proyek investasi berupa PMDN dan nilai proyek investasi PMA yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Semakin banyak jumlah investor yang masuk maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk masuk dan meningkatkan investasinya di daerah.

Tabel 2. 50 Target dan Realisasi Nilai Investasi Tahun 2018

Sektor Ekonomi		Target		Realliasi	
		Jumlah Proyek	Investasi	Jumlah Proyek	Investasi
1		2	3	4	5
I	**PMDN (Rp)**	**25**	**443.071.494.070**	44	288.094.375.109
-	Produksi			16	221,661,889,228
-	Konstruksi			5	66,332,485,881
-	Persiapan			23	100,000,000
II	**PMA (US $)**	**160**	**100.324.524**	**266**	**108.545.983**
-	Produksi			266	108.545.983
-	Konstruksi			62	35.659.045
-	Persiapan			121	8,290,462

Sumber data : DPM-PTSP Kabupaten Lombok Barat, 2018

Jumlah investasi yang masuk di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2018 yang berasal dari dalam negeri (PMDN) ditargetkan mencapai Rp. 7.897 trilliun, sementara yang berasal dari asing ditargetkan mencapati US$ 42,305 miliar lebih. Realisasi penanaman modal yang berasal dari dalam negeri hanya terealisasi sebesar 3,65% atau hanya 44 proyek, sementara untuk investasi asing investasi yang terealisasi sebesar 0,25% dengan proyek sebanyak 229.

2.3.2.13. Kepemudaan dan Olah Raga

Pemuda sebagai salah satu penerus bangsa memiliki peran strategis bagi kelanjutan pembangunan daerah dan negara. Peran serta kepemudaan dalam pembangunan ditunjukkan melalui prestasi pemuda dan olahraga dan geliat wirausaha muda dalam meningkatkan perekonomian daerah.

Pada bidang kepemudaan ditunjukkan dengan adanya prestasi kepemudaan dan olahraga, dimana pada tahun 2018 Kabupaten Lombok Barat memiliki prestasi yakni Pemuda Pelopor dengan capaian Pemuda Terbaik di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan serta Pemuda Terbaik di Bidang Literasi dan Pendidikan. Prestasi lain di bidang Kepemudaan adalah Jambore Pemuda Indonesia dengan capaian 2 orang yang mewakili Kabupaten Lombok Barat di Tingkat Nasional. Di bidang olahraga capaian Kabupaten Lombok Barat terlihat pada raihan medali pada cabang-cabang olahraga yakni pada 7 cabang olahraga dengan raihan 4 Emas, 2 Perak dan 1 Perunggu.

Capaian prestasi dibidang kepemudaan dan olahraga pada tahun 2018 adalah hal membanggakan terlebih dapat mewakili di tingkat Nasional, akan tetapi perlu dipertahankan dan ditingkatkan kembali agar dapat memperoleh hasil yang maksimal.

Tabel 2. 51 Sarana Olah Raga di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah Klub Olah Raga	Jumlah Gedung Olah Raga
1	2	5	6
1	Sekotong	3	-
2	Lembar	3	-
3	Gerung	6	10
4	Labuapi	6	-
5	Kediri	4	3
6	Kuripan	6	-
7	Narmada	4	3
8	Lingsar	7	-
9	Gunungsari	4	2
10	Batulayar	3	-
Jumlah		**46**	**18**

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab. Lombok Barat, 2018

Jumlah klub olah raga di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2018 mencapai 46, sementara itu untuk gedung gedung olahraga sebanyak 18 unit yang tersebar di Kecamatan Gerung sebanyak 10, Kecamatan Kediri sebanyak 3 unit, Kecamatan Narmada sebanyak

3 unit dan Kecamatan Gunungsari sebanyak 2 unit. Jumlah gedung olahraga belum cukup bila dilihat sebarannya karena baru terdapat di 4 Kecamatan sementara bila melihat jumlah klub olahraga, perkembangannya cukup meningkat

2.3.2.14. Statistik

Data statistik merupakan salah satu instrumen dalam perumusan kebijakan serta evaluasi pembangunan yang lebih tepat sasaran. Kunci pokok keberhasilan sebuah perencanaan terletak pada ketersediaan data dan informasi statistik yang andal dan terpercaya.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Data/informasi merupakan salah satu bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta bahan penentu/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah, karena pada saat ini data-data pembangunan dipandang belum lengkap sehingga diperlukan suatu upaya untuk melengkapi dan senantiasa untuk memperbaruinya dengan pengumpulan data secara bertahap dengan mekanisme merubah dari pola secara manual ke pola elektronik.

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah suatu Sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Perkembangan input SIPD atau e-database Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 52 Perkembangan SIPD Kab. Lombok Barat Tahun 2016-2018

No	Uraian	Satuan	Tahun			Ket
			2016	2017	2018	
1	Keterisian data SIPD	%	18,82	19,51	31,94	

Sumber data : Aplikasi SIPD Kab. Lombok Barat, 2019

2.3.2.15. Persandian

Program Persandian diselenggarakan dalam rangka peningkatan pengamanan informasi guna mendukung stabilitas kemananan Negara Kesatuan Republik Indonesian. Untuk itu diperlukan adanya pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi persandian, meningkatkan kualitas sumber daya manusia persandian, penataan persandian dan pemanfaatan tehnologi persandian.

Di Kabupaten Lombok Barat, urusan persandian belum dilaksanakan secara optimal, oleh karena itu dibutuhkan komitmen bagi daerah agar dapat melaksanakan program persandian dalam rangka mendukung pengamanan informasi baik di daerah maupun secara nasional seperti pengamanan LPSE, DIPA, e-budgetting, penerimaan e-CPNS dan sebagainya.

2.3.2.16. Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan pada hakekatnya diarahkan pada upaya untuk mewujudkan ketahanan budaya, mengingat pesatnya arus globalisasi akan membawa konsekuensi ekspansi seni dan budaya global yang dapat mempengaruhi kelestarian budaya daerah, yang pada akhirnya akan berimplikasi kepada budaya nasional.

Pemerintah daerah berperan signifikan dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat dengan membuat kebijakan–kebijakan yang mengarah pada upaya pelestarian daerah termasuk cagar budaya. Perkembangan cagar budaya di Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 53 Cagar Budaya Dalam Kondisi Baik di Kab. Lombok Barat Tahun 2016-2018

No	Uraian	Satuan	Tahun			Ket
			2016	2017	2018	
1	Persentase cagar budaya dalam kondisi baik	%	-	63,93	81,00	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lombok Barat, 2019

2.3.2.17. Perpustakaan

Pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan diarahkan pada meningkatnya kegemaran membaca masyarakat (reading habit society) menuju masyarakat belajar (learning society) yang

berujung pada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, perpustakaan harus menyediakan koleksi yang lengkap dan mudah serta murah.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengamanatkan standar perpustakaan yakni jumlah koleksi buku dan jumlah pengunjung perpustakaan yang mengukur minat baca masyarakat. Perkembangan capaian layanan perpustakaan di Kabupaten Lombok Barat sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 54 Capaian Kinerja Pelayanan Perpustakaan Kab. Lombok Barat Tahun 2016-2018

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2016	2017	2018
1	Jumlah Kunjungan Perpustakaan	Orang	43.893	47.042	46.495
2	Jumlah Populasi Terlayani	Orang	558.484	558.484	548.048
3	Cakupan Pelayanan Perpustakaan	%	7,86	8,42	8,48
4	Jumlah Perpustakaan	Unit	1	1	1

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Lombok Barat, 2019

Jumlah pengunjung perpustakaan selama tahun 2016-2018 mengalami peningkatan sebesar 5,93%. Meskipun jumlah populasi yang terlayani mengalami penurunan, namun cakupan pelayanan perpustakaan mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 mencapai 8,48% sementara pada tahun 2016 mencapai 7,86%.

Capaian ini masih belum sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang akan tetapi peningkatannya cukup baik. Namun tetap harus ditingkatkan kembali pelayanannya melalui penambahan jumlah buku dan fasilitasi serta mengunjungi pusat-pusat keramaian melalui perpustakaan keliling dalam rangka meningkatkan minat baca yang sekaligus dapat meningkatkan kualitas SDM dan IPM Kabupaten Lombok Barat.

2.3.2.18. Kearsipan

Pengelolaan arsip mencakup kegiatan yang dilakukan guna penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip dengan cara mengoptimalkan sarana dan prasarana kearsipan yang ada didalam pengelolaannya. Keberhasilan dalam pengelolaan arsip di OPD bergantung pada instansi pembina kearsipan dan juga unit kearsipan itu sendiri, dalam hal ini yang berperan adalah petugas kearsipan.

Pengelolaan kearsipan di lingkungan OPD Kabupaten Lombok Barat pada kurun waktu Tahun 2016 - 2018 sudah dilakukan secara baku sesuai dengan norma dan standar yang ada namun belum optimal. Perkembangan pengelolaan arsip daerah seperti pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 55 Capaian Pengelolaan Kearsipan Kab. Lombok Barat Tahun 2016-2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah PD	Unit	42	42	42	43	43
2	Jumlah PD yang mengelola arsip daerah secara baku	Unit	11	11	11	18	26
3	Cakupan Pengelolaan arsip secara baku	%	28	28	28	42	60

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Lombok Barat, 2019

Cakupan pengelolaan arsip secara baku sudah cukup tinggi yakni mencapai 60% di tahun 2018, dimana selama tahun 2016-2018 OPD yang telah mengelola arsip secara baku sebanyak 26. Dalam meningkatkan jumlah pengelolaan arsip secara baku, diperlukan sosialisasi yang lebih baik dan penyediaan sarana serta prasarana pengelolaan arsip.

2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

2.3.3.1. Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan di Kabupaten Lombok Barat meliputi produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap. Produksi perikanan budidaya baik air tawar, air payau dan air laut dikembangkan di Kabupaten Lombok Barat. Khususnya produksi budidaya air tawar untuk ikan konsumsi dilakukan dalam bentuk budidaya ikan di Kolam, Budidaya Ikan di Sawah, Mina Kangkung dan pemeliharaan ikan dalam Karamba. Kegiatan tersebut dilakukan pada lokasi – lokasi yang pengairannya cukup untuk kegiatan budidaya. Jenis ikan yang dominan dipelihara adalah dari jenis Nila, hal ini disebabkan karena benih cukup tersedia dengan harga yang terjangkau dan pemasaran hasil yang relatif mudah serta harganya yang memadai. Sedangkan jenis ikan lain yang banyak dipelihara adalah ikan Karper, Gurami, Bawal, Patin.

Produksi ikan air tawar dari berbagai jenis kegiatan pembesaran pada Tahun 2018 tercatat sebesar 9.913,01 ton. Produksi ini mengalami peningkatan produksi sebesar 326,33 Ton (3,4 %) dari tahun 2017 dengan produksi sebesar 9.586,68 ton.

Sedangkan lahan budidaya air tawar yang sudah dimanfaatkan tercatat seluas 1.478,91 Ha atau terjadi penurunan pemanfaatan areal sebanyak 49,06 Ha (3,21%) dari tahun 2017 dengan luas pemanfaatan sebesar 1.517,77 Ha. Penigkatan produksi perikanan air tawar ini lebih disebabkan oleh faktor iklim dan curah hujan serta meningkatnya kualitas aktivitas budidaya pada kegiatan budidaya ikan

Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Lombok Barat merupakan hasil penangkapan ikan di laut dan perairan umum. Statistiknya diharapkan terus meningkat seiring dengan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan di bidang ini. Secara umum Produksi perikanan tangkap ikan di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2018 sebanyak 11.498,6 Ton dengan nilai produksi Rp. 172.014.006.200, kalau dibandingkan dengan Produksi tahun 2017 sebesar 11.297,58 Ton dengan nilai Produksi sebesar Rp. 169.463.700.000, maka produksi perikanan tangkap tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 201,02 Ton dengan kata lain terjadi peningkatan produksi penangkapan ikan di perairan Lombok Barat sebesar 2% pada Tahun 2018.

Produksi penangkapan ikan yang tersebut di atas merupakan ikan –ikan yang didapatkan dari aktifitas penangkapan ikan oleh masyarakat nelayan di laut sebanyak 11.428,5 Ton dengan nilai produksi sebesar Rp.171.427.500.000, adapun areal *fishing ground* atau Wilayah Penangkapan Perikanan (WPP) berada di Wilayah 573 dan 713, Kosentrasi penyebaran nelayan di kabupaten meliputi Kecamatan Batu Layar, Kecamatan Labuapi, Kecamatan Gerung, Kecamatan Lembar dan Kecamatan Sekotong.

Disamping produksi penangkapan ikan di laut terdapat pula produksi penangkapan ikan di perairan umum, pada tahun 2018 produksi perikanan di perairan umum daerah sebesar, 70,10 Ton dengan nilai produksi sebesar Rp. 586.506.200. Produksi tersebut didapatkan dari beberapa Perairan Umum Daerah (Waduk, dan sungai) yang ada di beberapa kecamatan seperti di Kecamatan Narmada, Lingsar, Sekotong, Kuripan, Lingsar, Gerung, Labuapi. Potensi perikanan di perairan umum daerah di Kabupaten Lombok Barat sangat didukung oleh program pemerintah berupa kegiatan

Pengkayaan Sumber Daya Ikan di perairan umum sehingga potensi tersebut bisa optimal dimanfaatkan secara maksimal.

Selain itu, dengan potensi alam yang cukup mendukung yaitu potensi wilayah pesisir khususnya untuk garam di Kabupaten Lombok Barat, maka dilaksanakan pengembangan usaha garam rakyat melalui dukungan beberapa kebijakan Pemerintah Daerah, diantaranya pengaturan regulasi pendistribusian garam beryodium di lingkup Pemda Lombok Barat melalui Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 90 Tahun 2016 tentang Peredaran, Pengawasan dan Pengendalian Garam Beryodium, SE Bupati Lombok Barat Nomor 511.1/78/bappeda/2017 tentang Peredaran, Pengawasan dan Pengendalian Garam Beryodium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan SK Bupati Lombok Barat Nomor 144/27/bappeda/2017 tentang Penunjukan Pengelola Pengadaan dan Distributor Garam Beryodium di Kabupaten Lombok Barat. Selain itu Pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga memfasilitasi perijinan pemasaran garam beryodium bagi Koperasi Bina Laut sehingga telah diterbitkan SPPT-SNI Nomor 01/BPPI/ISPRO-BBIHP/i/2017 Tanggal 10 Januari 2017 untuk produksi garam konsumsi "Rajungan" dan sertifikat halal nomor 27200012391216.

Gambaran produksi perikanan, baik budidaya maupun penangkapan di Kabupaten Lombok Barat tersaji pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 56 Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap di Kab. Lombok Barat Tahun 2014 – 2018

No	Produksi	Volume	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Budidaya	Ton	85.337,87	87.851,71	88.874,67	89.957,85	91.106,83
	Air Tawar	Ton	12.346,83	12.756,91	9.361,94	9.586,68	9.913,01
	Air Payau	Ton	21.732,10	17.311,07	26.865,00	27.672,06	28.501,65
	Air Laut	Ton	51.258,94	57.783,73	52.692,73	52.699,11	52.692,17
2	Garam	Ton	9.445,55	5.047,76	3.641,39	613,15	304,34
3	Penangkapan	Ton	10.429,70	10.842,10	10.975,20	11.297,80	11.498,60

Sumber: Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Lombok Barat, 2019

2.3.3.2. Pariwisata

Pengembangan kepariwisataan yang handal harus didukung dengan ketersediaan akomodasi yang memadai juga. Ketersediaan akomodasi juga selain meningkatkan kunjungan wisatawan juga meningkatkan rata-rata lama tinggal wisatawan (length of stay).

Pembangunan sektor pariwisata di Lombok Barat selama ini memberikan hasil yang terus meningkat, yang terlihat dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang datang. Capaian Urusan Pariwisata sebagai berikut:

Tabel 2. 57 Kunjungan Wisatawan Tahun 2014-2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	378.147	468.149	571.650	732.475	391.282
2	Rata rata lama menginap	hari	-	-	-	2,36	2,30

Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Lombok Barat 2019

Pelaksanaan bidang urusan pariwisata diukur dengan indikator kunjungan wisatawan. Sepanjang tahun 2014 – 2018, kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara mengalamai fluktuasi. Jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2014 terus meningkat. Namun pada tahun 2018 kembali menurun. Salah satu penyebab penurunan jumlah kunjungan wisatawan ini adalah dampak dari terjadinya gempa di Pulau Lombok pada bulan agustus 2018. Banyak sarana prasarana pariwisata di destinasi wisata Lombok Barat rusak tedampak gempa. Kekhawatiran para wisatawan untuk berknjung ke Lombok akibat gempa sangat tergambar dari turun drastisnya kunjungan wisatan hampir 50 persen dari kunjungan tahun sebelumnya. Hal ini berimbas pada penurunan PAD sektor pariwisata.

2.3.3.3. Pertanian

Sektor pertanian secara umum (pertanian, peternakan, perikanan) di Kabupaten Lombok Barat memberikan dampak positif terhadap pendapatan daerah. Tercatat sektor pertanian mampu memberikan kontribusi sebesar 20,55 % terhdap PDRB pada tahun 2018. Dampak positif dari aktifitas sektor pertanian juga dibarengi dengan dampak negative bagi lingkungan. Dampak negative dari sektor pertanian disebabkan oleh aktifitas usaha tani yang menyebabkan kerusakan lahan secara fisik seperti pengkerasan lanah yang dapat merusak tekstur dan struktur tanah; kerusakan biologis seperti kehilangan unsur-unsur hara esensial serta

kerusakan kimiawi seperti berubahnya kemampuan dan kapasitas menahan air dari tanah yang bersangkutan. Berikut disajikan luas tanam padi, jagung dan palawija di Lombok Barat yang merupakan gambaran aktivitas masyarakat petani dalam mengelola lahan yang berpotensi menimbulkan pencemaran secara fisik, kimiawi (penggunaan pupuk dan pestisida), maupun biologis, jika tidak dikelola dengan baik.

Tabel 2. 58 Luas tanam padi, dan palawija di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018

No	Komoditi	Luas Tanam (Ha)		Ber +/- (%)
		ATAP 2017	ASEM 2018	
1	Padi	34,865.00	40,637.00	16.56
2	Jagung	9,408.04	10,198.10	8.40
3	Kedelai	407.45	1,337.90	228.36
4	Kacang Tanah	1,151.00	1,009.00	-12.34
5	Kacang Hijau	284.00	77.00	-72.89

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Lombok Barat, 2018

Kebutuhan lahan yang semakin pesat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pembangunan mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian menjadi tidak dapat dihindari. Meskipun kualitas sumberdaya lahan dapat ditingkatkan, namun kuantitasnya relatif tetap, dengan demikian kondisi tersebut membutuhkan peningkatan kebutuhan lahan untuk suatu kegiatan produksi. Konversi lahan pertanian tidak menguntungkan bagi pertumbuhan sektor pertanian dengan menurunkan kapasitas produksi dan daya serap tenaga kerja dan pendapatan per kapita keluarga tani serta mempercepat proses marjinalisasi usaha tani sehingga menggerogoti daya saing produk pertanian domestik.

Capaian pembangunan pertanian dengan melihat produktivitas luas areal tanaman padi dan Produktifitas padi seperti yang terlihat pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 2.1.
Produktivitas Padi di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016-2018

No	Uraian	Satuan	Tahun		Ket
			ATAP 2017	ASEM 2018	
1	Produksi tanaman padi	Kw	1,936,530.00	2,198,870.00	
2	Luas areal tanaman padi	ha	34,865.00	40,637.00	

No	Uraian	Satuan	Tahun		Ket
			ATAP 2017	ASEM 2018	
3	Produktivitas padi per hektar	Kw/Ha	55.54	54.11	

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Lombok Barat, 2019

Luas panen padi di Kabupaten Lombok Barat tahun 2018 mencapai 40.637 Ha. Produktivitas atau rata-rata produksi padi pada tahun 2018 sebesar 54,11 kw/ha.

2.3.3.4. Perdagangan

Peran urusan perdagangan bagi perekonomian baik secara kuantitas maupun kualitas adalah penting. Hal ini dapat dilihat pada kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran pada PDRB yang pada tahun 2017 menunjukkan angka 13,18% dimana. Sektor perdagangan di Kabupaten Lombok Barat lebih didominasi pada perdagangan eceran di pertokoan, warung dan eceran tradisional dengan komoditas utama hasil pertanian dan produk hasil usaha kecil dan menengah (UMKM). Sektor UKM sebagai pelaku industri kreatif merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekspor maupun pasar domestik.

Tabel 2. 59 Cakupan Pasar Bersih di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016-2018

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2016	2017	2018
1	Jumlah Pasar Tradisional	Unit	31	32	33
2	Jumlah Pasar Yang Representatif (Pasar Bersih)	Unit	-	-	-
3	Cakupan Pasar Bersih	%	-	-	-

Sumber : Dinas Perindag Kab. Lombok Barat, 2019

Jumlah pasar di Kabupaten Lombok Barat setiap tahun mengalami peningkatan, rata-rata setiap tahun terdapat penambahan 1 unit pasar. Pada tahun 2018 jumlah pasar sebanyak 33 meningkat dibandingkan tahun 2017 sebanyak 32. Akan tetapi belum terdapat pasar yang representatif/pasar bersih atau pasar yang memenuhi standar sebagai tempat jual – beli yang nyaman dan aman. Capaian indikator kinerja Urusan Perdagangan sebagai berikut :

Tabel 2. 60 Capaian Indikator Urusan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 – 2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun			
			2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nilai bersih ekspor perdagangan	Milyar	2,59	2,64	2,64	3,88

Sumber : Dinas Perindag Kab. Lombok Barat, 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari indikator kinerja yang telah ditetapkan telah dicapai dengan sangat baik. Nikai ekspor bersih perdagangan dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Tahun 2015 sebesar 2,59 M meningkat menjadi 3,88 M pada akhir tahun 2018.

2.3.3.5. Perindustrian

Kinerja pembangunan urusan perindustrian dapat tergambarkan dari capaian beberapa indikator, seperti kontribusi sektor industri terhadap PDRB; dan pertumbuhan industri.

Tabel 2. 61 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kab. Lombok Barat Tahun 2015-2017

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2015	2016	2017
1	PDRB Sektor Industri	Rp (juta)	499,777.00	559,728.80	609,025.30
2	PDRB	Rp (juta)	11,447,645.40	12,639,314.90	13,961,917.10
3	Persentase	%	4.37	4.43	4.36

Sumber : BPS Kab. Lombok Barat, 2019

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa kontribusi sektor industri khususnya industri pengolahan masih rendah yakni rata-rata sebesar 4,39% selama tahun 2015-2017. Capaian indikator kinerja Urusan Perindustrian tahun 2015-2018 sebagai berikut :

Tabel 2. 62 Capaian Indikator Bidang Urusan Perindustrian Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 – 2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun			
			2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pertumbuhan Industri	Persen	4,49	2,49	3,72	2,35

Sumber : Dinas Perindag Kab. Lombok Barat, 2019

Pertumbuhan industri sebagai salah satu sasaran pada bidang urusan perindustrian terealisasi fluktuatif sejak tahun 2015. Diawali dengan capaian 4,49%, angka ini menurun di tahun 2016 menjadi 2,49%. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 3,72% namun kembali mengalami penurunan menjadi 2,35%.

2.3.3.6. Transmigrasi

Program transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah. Penyelenggaraan transmigrasi diarahkan pada penataan persebaran penduduk, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Penyiapan calon transmigran agar memiliki keterampilan dan kesiapan di daerah tujuan adalah dengan memberikan pelatihan-pelatihan. Perkembangan transmigran yang telah dilatih adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 63 Jumlah Penempatan Transmigrasi di Kab. Lombok Barat Tahun 2016-2018

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2016	2017	2018
1	Jumlah Transmigran	Org	36	8	4
2	Jumlah Transmigran Yang Telah Dilatih	Org	36	8	4
3	Persentase	%	100	100	100

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab. Lombok Barat, 2019

2.3.4. Fokus Layanan Fungsi Penunjang dan Administrasi Pemerintahan

2.3.4.1. Adminsitrasi Pemerintahan

Usaha penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dilakukan antara lain melalui Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Beberapa tahun terakhir nilai AKIP Kabupaten menunjukkan progress peningkatan yang cukup baik. Dengan capaian C pada tahun 2015 menjadi capaian CC pada Tahun 2016. Tahun 2017 meningkat menjadi B dengan point 60,24 dan terakhir dengan capaian B dengan point 62,60 pada tahun 2018.

Upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam rangka mencapai target peringkat A untuk hasil evaluasi SAKIP ke depan nadalah :

- Fasilitasi/pendampingan untuk mereview dokumen RPJMD maupun Renstra OPD agar lebih berkualitas
- Memfasilitasi peningkatan kualitas pelaporan kinerja, perjanjian kinerja dan rencana kinerja tahunan
- Fasilitasi/pendampingan dalam penyusunan indikator kinerja, cascading dan rencana aksi
- Fasilitasi dalam pelaksanaan evaluasi AKIP secara internal.

Sedangkan Indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2015 sebesar 62,15 meningkat pada tahun 2017 menjadi 87,71 persen namun mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 79,02 persen. Upaya – upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat terus dilakukan. Pemenuhan terhadap kriteria pelayanan baik yang sudah ditetapkan Kementerian PAN – RB dan Ombudsman terus dilakukan. Demikian pula dengan peningkatan kualitas SDM pemberi layanan.

2.3.4.2. Pengawasan

Fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan early warning system apabila terdapat penyimpangan maupun sebagai fungsi pembinaan bagi satuan kerja di setiap unit pemerintahan. Auditor menerbitkan dokumen hasil pemeriksaan berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang harus ditindaklanjuti oleh auditi. Hasil pemeriksaan harus ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi auditor melalui Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).

Kewajiban menyelesaikan TLHP telah diatur dalam peraturan perundangan, yaitu dalam pasal 23E UUD 1945, pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 pada bab II, dan Surat Edaran Nomor: SE/02/M.PAN/01/2005. Untuk jangka waktu penyelesaian TLHP dilaksanakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya LHP. Dengan memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundangan, maka jelas bahwa pelaksanaan TLHP merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan.

Perkembangan penyelesaian TLHP di Kabupaten Lombok Barat selama kurun waktu tahun 2016-2018 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 64 Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2016	2017	2018
1	Persentase Rekomendasi TLHP Internal dan Eksternal	%	88	88	89	91,59	91,02

Sumber : Inspektorat Kab. Lombok Barat Tahun 2019

Rekomendasi hasil pemeriksaan dtindaklanjuti baik secara administrasi dan secara riil dalam rangka memperbaiki sistem pengendalian intern yang ada, serta mengurangi risiko terjadinya penyimpangan di masa mendatang.

Untuk hasil verifikasi Aksi PPK Kabupaten Lombok Barat tahun 2016 dan 2017 sudah menunjukkan hasil yang optimal.

Tabel 2. 65 Hasil Verifikasi Aksi PPK Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 - 2017

No	Aksi PPK	2015	2016 - 2017
1	Pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	80%	100%
2	Pembentukan dan Penguatan Tugas dan pokok Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Utama dan Pembantu	100%	100%
3	Transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa	100%	100%
4	Peningkatan Transparansi dan akuntabilitas akuntabilitas penyaluran serta penggunaan dana hibah dan bantuan sosial	100%	100%

Sumber : Inspektorat Kab. Lombok Barat, 2018

2.3.4.3. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan merupakan hal yang esensial. Pada era desentralisasi fiskal, tiap daerah memiliki diskresi untuk menyusun perencanaan dan penganggaran pembangunan karena merupakan hal yang saling berkaitan dan harus berjalan secara terintegrasi, sinkron dan konsisten. Perencanaan dan penganggaran perlu terintegrasi dengan baik supaya Pemerintah Daerah dapat melaksanakan komitmen yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, integrasi perencanaan dan penganggaran juga menjadi salah satu alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Tabel 2. 66 Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD Tahun 2017 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2017	2018	2019
1	Jumlah Program RKPD	Buah	-	425	449
2	Jumlah Program APBD	Buah	-	429	454
3	Persentase	%	-	99,07	98,89

Sumber : Bappeda Kab. Lombok Barat, 2019

2.3.4.4. Keuangan

Gambaran pengelolaan keuangan daerah mencakup gambaran kinerja dan pengelolaan keuangan daerah yang menunjukkan kemampuan anggaran daerah untuk membiayai belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Keberhasilan urusan keuangan dinilai dari beberapa indikator yang menunjukkan pengelolaan keuangan yang baik yakni persentase SILPA dan perbandingan antara belanja langsung dan tidak langsung

Tabel 2. 67 Persentase SILPA Tahun 2016 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2016	2017	2018
1	Total SILPA	Rp	65,537,652,522.42	26,122,694,459.37	21,203,533,589.11
2	Total APBD	Rp	1,583,449,143,885.51	1,757,211,201,824.83	1,720,664,243,910.15
3	Persentase	%	4.14	1.49	1.23

Sumber : BPKAD Kab. Lombok Barat, 2019

Persentase SILPA selama tahun 2016-2018 adalah positif dan mengalami tren penurunan yang artinya pemanfaatan pembiayaan telah efektif dilaksanakan dengan jumlah SILPA setiap tahunnya mengalami penurunan. Persentase SILPA pada tahun 2018 capaiannya sebesar 1,23% sementara pada tahun 2016 sebesar 4,14%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat penerimaan pembiayaan yang belum dimanfaatkan namun setiap tahunnya jumlahnya mengalami penurunan

Tabel 2. 68 Persentase Belanja Tidak Langsung Tahun 2016 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2016	2017	2018
1	Belanja Tidak Langsung	Rp	982,268,654,442.17	881,986,434,606.16	901,331,390,009.38
2	Total APBD	Rp	1,583,449,143,885.51	1,757,211,201,824.83	1,720,664,243,910.15
3	Persentase	%	62.03	50.19	52.38

Sumber : BPKAD Kab. Lombok Barat, 2019

Tabel 2. 69 Persentase Belanja Langsung Tahun 2016 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2016	2017	2018
1	Belanja Langsung	Rp	638,320,510,989.76	867,427,528,048.04	829,324,896,730.00
2	Total APBD	Rp	1,583,449,143,885.51	1,757,211,201,824.83	1,720,664,243,910.15
3	Persentase	%	40.31	49.36	48.20

Sumber : BPKAD Kab. Lombok Barat, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung mengalami fluktuasi dalam kurun waktu tahun 2016-2018. Perbandingan kedua jenis belanja tersebut menunjukkan bahwa daerah masih memiliki belanja tidak langsung lebih besar dibandingkan belanja langsung. Hal ini berarti kemandirian fiskal masih rendah karena sumber pendanaan belanja tidak langsung adalah bukan berasal dari PAD, dengan demikian belanja yang langsung kepada masyarakat menjadi lebih rendah.

2.3.4.5. Kepegawaian dan Diklat

Salah satu area reformasi birokrasi adalah aspek penataan sistem manajemen SDM yang difokuskan apda peningkatan profesionalisme dan kompetensi SDM aparatur. Peningkatan tersebut dilakukan antara lain melalui kegiatan pengadaan CPNS, tes kompetensi pejabat struktural, kenaikan pangkat, hasil promosi jabatan secara terbuka dan *talent scouting.*

Pengembangan kompetensi ASN adalah jawaban untuk menyiapkan ASN yang berkompeten. Pengembangan kompetensi adalah solusi menutupi jarak kompetensi yang dimiliki aparatur. Namun, selama ini pengembangan kompetensi ASN cenderung kurang mendapat perhatian oleh instansi pemerintah dan cenderung kurang tersistematis. Pengembangan kompetensi ASN sejauh ini sebagian besar cenderung dilakukan secara insidental.

Tabel 2. 70 Persentase ASN Yang Telah Mengikuti Diklat PIM di Kab. Lombok Barat Tahun 2018

No	Uraian	Satuan	Diklat PIM		
			Sudah	Total	Persen
1	Tingkat II	Orang	26	38	68,42
2	Tingkat III	Orang	113	181	62,43
3	Tingkat IV	Orang	468	671	69,75
	Total	Orang	607	890	68,20

Sumber : BKDPSDM Kab. Lombok Barat, 2019

2.3.4.6. Penelitian dan Pengembangan

Dalam menjalankan fungsi Penelitian dan Pengembangan, telah dilaksanakan kajian – kajian terkait permasalahan daerah bersama Dewan Riset Daerah Kabupaten Lombok Barat. Dari hasil kajian tersebut dapat dilihat persentase pemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan.

Tabel 2. 71 Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan di Kab. Lombok Barat Tahun 2016 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2016	2017	2018
1	Jumlah Kajian	Kajian	5	5	4
2	Hasil Kajian yang dimanfaatkan	Kajian	5	5	4
3	Persentase	%	100	100	100

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran umum tentang kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumberdaya manusia. Daya saing tersebut merupakan optimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah terutama sumber daya baik alam maupun manusianya. Hal tersebut akan menjadi salah satu faktor keberhasilan pembangunan ekonomi yang memiliki keterkaitan dengan tujuan pembangunan daerah sehingga akan tercapai tujuan pembangunan daerah.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (Pangan dan Non Pangan) Per Kapita

Pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga (makanan) dan bukan makanan pada dasarnya saling berkaitan. Dalam kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan akan didahulukan dan porsi pengeluaran untuk bukan makanan akan menurun. Pergeseran komposisi pengeluaran mengindikasikan perubahan tingkat kesejahteraan penduduk.

Tabel 2. 72 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan dan Pola Konsumsi Penduduk Desa dan Kota di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2018

Jenis Pengeluaran	Tahun	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan (Rp)			Pola Konsumsi		
		Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D
Makanan	2014	349.247,00	320.435,00	334.259,00	54,43	60,91	57,48
	2015	326.646,00	381.036,00	354.680,00	58,32	59,20	58,80

Jenis Pengeluaran	Tahun	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan (Rp)			Pola Konsumsi		
		Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D
	2016	458.141,00	437.124,00	447.907,00	54,92	59,68	57,30
	2017	458.141,00	437.124,00	447.907,00	54,92	59,68	57,30
	2018	523.952,42	469.692,16	498.499,06	57,32	58,80	58,06
Bukan Makanan	2014	292.401,00	205.665,00	247.282,00	45,57	39,09	42,52
	2015	233.349,00	262.647,00	248.497,00	41,68	40,80	41,20
	2016	376.055,00	295.333,00	336.746,00	45,08	40,32	42,70
	2017	376.055,00	295.333,00	336.746,00	45,08	40,32	42,70
	2018	390.126,21	329.136,48	361.516,07	42,68	41,20	41,94
Total	2014	641.648,00	526.100,00	581.541,00	100,00	100,00	100,00
	2015	559.995,00	643.683,00	603.177,00	100,00	100,00	100,00
	2016	834.196,00	732.457,00	784.653,00	100,00	100,00	100,00
	2017	834.196,00	732.457,00	784.653,00	100,00	100,00	100,00
	2018	914.078,63	798.828,64	860.015,13	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Lombok Barat

Pada tabel diatas, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di perkotaan dan di perdesaan digunakan lebih besar untuk konsumsi makanan. Pola konsumsi makanan penduduk di perdesaan terlihat lebih tinggi jika dibandingkan dengan di perkotaan. Hasil sensus bulan Maret (2018), pola konsumsi makanan penduduk perkotaan sebesar 57,32%, dan pola konsumsi penduduk perdesaan sebesar 58,80%. Sebaliknya pola konsumsi bukan makanan penduduk perkotaan pada tahun 2018 lebih besar dibandingkan dengan perdesaan, yaitu sebesar 42,68% (perkotaan) dan 41,20% (perdesaan). Keadaan ini menggambarkan pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh (sudah cukup), maka peningkatan pendapatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan, sisa pendapatan disimpan sebagai tabungan/ diinvestasikan.

2.4.1.2. Nilai Tukar Petani (NTP)

Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan pada 8 kabupaten di Provinsi NTB, termasuk di Kabupaten Lombok Barat, terjadi Nilai Tukar Petani (NTP) yang berfluktuasi setiap bulannya. Pada bulan Mei 2018 tercatat Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) sebesar 108,54; Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) 83,15; Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) 93,62; Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) 124,26 dan Nilai Tukar Petani Perikanan (NTNP) 106,19. Nilai Tukar Petani Perikanan

(NTNP) dirinci menjadi NTP Perikanan Tangkap (NTN) tercatat 114,59 dan NTP Perikanan Budidaya (NTPi) tercatat 92,61.

Pada periode ini, petani yang bergerak pada sub sektor hortikultura, perkebunan rakyat, dan perikanan budidaya tercatat NTPnya kurang dari 100, yang artinya mengalami defisit. Kenaikan harga produksi ketiga sub sektor tersebut relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun dan lebih kecil dari pengeluarannya, sehingga diperlukan perhatian yang lebih serius pada sub sektor tersebut.

Secara gabungan, Nilai Tukar Petani Provinsi NTB (termasuk Lombok Barat) sebesar 106,69 yang berarti NTP bulan Mei 2018 mengalami peningkatan 0,61 persen bila dibandingkan dengan bulan April 2018 dengan Nilai Tukar Petani sebesar 106,04 persen. NTP Provinsi Nusa Tenggara Barat berada di atas 100 (tercatat 106,69) yang berarti petani mengalami peningkatan daya beli, karena kenaikan harga produksi relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan harga input produksi dan kebutuhan konsumsi rumah tangganya.

Nilai Tukar Petani yang meliputi petani di Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak bulan Mei 2015 sampai dengan Mei 2018 disajikan pada gambar berikut.

Tabel 2. 73 NTP Provinsi NTB Januari 2015 – Mei 2018 (2012=100)

Sumber : BPS Provinsi NTB

NTP bulan Mei 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,61 persen bila dibandingkan dengan NTP April 2018 yaitu dari 106,04 menjadi 106,69. Hal ini disebabkan karena indeks harga yang

diterima petani (It) naik sebesar 0,75 persen dan indeks harga yang dibayar petani (Ib) juga naik 0,14 persen.

Tabel 2. 74 Nilai Tukar Petani Provinsi Nusa Tenggara Barat Per Subsektor Mei 2018 (2012=100)

No	Subsektor	Bulan		Persentase Perubahan
		Apr-18	Mei 2018	
1	Tanaman Pangan			
	a. Indeks yang Diterima (It)	141,61	142,73	0,79
	b. Indeks yang Dibayar (Ib)	131,32	131,5	0,14
	c. Nilai Tukar Petani (NTPP)	107,84	108,54	0,65
2	Hortikultura			
	a. Indeks yang Diterima (It)	110,91	109,8	(1,00)
	b. Indeks yang Dibayar (Ib)	131,84	132,06	0,17
	c. Nilai Tukar Petani (NTPH)	84,13	83,15	(1,16)
3	Tanaman Perkebunan Rakyat			
	a. Indeks yang Diterima (It)	123,44	124,46	0,83
	b. Indeks yang Dibayar (Ib)	132,85	132,93	0,06
	c. Nilai Tukar Petani (NTPR)	92,91	93,62	0,76
4	Peternakan			
	a. Indeks yang Diterima (It)	155,73	157,67	1,25
	b. Indeks yang Dibayar (Ib)	126,72	126,89	0,13
	c. Nilai Tukar Petani (NTPT)	122,89	124,26	1,11
5	Perikanan			
	a. Indeks yang Diterima (It)	130,8	132,2	1,07
	b. Indeks yang Dibayar (Ib)	124,11	124,49	0,31
	c. Nilai Tukar Petani (NTN)	105,38	106,19	0,77
5	a. Perikanan Tangkap			
	a. Indeks yang Diterima (It)	143,67	145,9	1,55
	b. Indeks yang Dibayar (Ib)	126,87	127,32	0,35
	c. Nilai Tukar Petani (NTN)	113,24	114,59	1,19
5	b. Perikanan Budidaya			
	a. Indeks yang Diterima (It)	111,15	111,29	0,13
	b. Indeks yang Dibayar (Ib)	119,9	120,17	0,23
	c. Nilai Tukar Petani (NTN)	92,7	92,61	(0,10)
6	Gabungan			
	a. Indeks yang Diterima (It)	138,07	139,11	0,75
	b. Indeks yang Dibayar (Ib)	130,21	130,38	0,13
	- Konsumsi Rumah Tangga	134,2	134,36	0,12
	- BPPBM	119,96	120,16	0,17
	c. Nilai Tukar Petani (NTP)	106,04	106,69	0,61

Sumber : BPS Provinsi NTB

2.4.2. Fokus Iklim Berinvestasi

Dalam rangka meningkatkan iklim investasi di daerah, hal penting yang harus diperhatikan adalah penciptaan iklimm kondusif yang mendukung investasi. Indikator yang berkaitan dengan iklim investasi, antara lain angka kriminalitas yang dilihat dari jumlah kejadian kejahatan dan jumlah demonstrasi.

2.4.2.1. Angka Kriminalitas

Faktor keamanan merupakan hal penting untuk diperhatikan dalam meningkatkan daya saing daerah selain peningkatan sarana dan prasarana di daerah. Penjaminan terhadap faktor keamanan di suatu daerah memiliki dampak yang luas, terutama di Kabupaten Lombok Barat dimana pemerintah daerah bersama bersama institusi berwenang dan pihak terkait lainnya secara berkesinambungan melakukan berbagai upaya dalam memelihara dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Perkembangan angka kriminalitas di Kabupaten Lombok Barat tahun 2014 – 2018 sebagai berikut:

Tabel 2. 75 Angka Kriminalitas Menurut Kasus di Kab. Lombok Barat Tahun 2014 - 2018

No.	Kasus	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembunuhan/ Penemuan Mayat	1	2	1/21	13	13
2	Perampokan / curas	4	34	38	28	95
3	Pencurian Barang / curat	24	17	68	65	193
4	Pencurian Hewan, pencurian ringan / biasa	-	-	20	35	52
5	Curanmor	13	32	67	49	205
6	Pemerkosaan/Pencabulan	2	3	8	4	7
7	Penganiayaan	-	-	138	92	133
8	Penipuan	3	-	120	105	139
9	Penggelapan	-	-	61	44	72
10	Kebakaran	5	8	12	15	9
11	Pemalsuan Dokumen	-	-	28	11	17
12	Senpi/Handak	-	-	3	-	-
13	Lainnya : Kekerasan terhadap anak	-	-	-	35	8
Jumlah		**52**	**96**	**585**	**496**	**943**

Sumber: Bakesbangpol Tahun 2019

Selama tahun 2014-2018 jumlah kejadian kriminali di Kabupaten Lombok Barat mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2018 mencapai 943 kasus, meningkat hampir 10x lipat dibandingkan tahun 2014. Hal ini patut menjadi perhatian untuk segera ditindaklanjuti mengingat faktor keamanan merupakan salah satu poin keharusan pada aspek daya saing daerah yang mendukung perekonomian daerah.

2.4.3. Fokus Sumberdaya Manusia

2.4.3.1. Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Tingkat pendidikan yang rendah dan ketidak-sesuaian keahlian dan ketrampilan yang dimiliki pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan memicu rendahnya penyerapan tenaga kerja. Jumlah lowongan kerja yang ada ternyata tidak dapat terisi oleh para pencari kerja. Hal ini dipicu oleh rendahnya tingkat pendidikan serta tidak sesuainya keahlian dan ketrampilan yang dimiliki pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Rasio lulusan S1-S3 Kabupaten Lombok Barat yang menggambarkan kualitas tenaga kerja tahun 2013-2017 menunjukkan peningkatan yaitu dari 0,02 pada tahun 2013 meningkat menjadi 0,04 pada tahun 2016 dan 2017.

Tabel 2. 76 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah lulusan S1	13.843	17.216	16.579	27.879	7.597
2	Jumlah lulusan S2-S3	397	515	892	1.816	19.810
3	Jumlah lulusan S1/S2/S3	14.240	17.732	17.471	29.695	27.407
4	Jumlah penduduk	620.412	644.586	654.892	665.132	675.222
5	Rasio lulusan S1/S2/S3 (3/4)	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04

Sumber : BPS Lombok Barat (diolah)

2.4.3.2. Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)

Berdasarkan struktur umur telah terjadi perubahan struktur penduduk yang menyebabkan struktur umur usia kerja 15-64 tahun semakin meningkat. Jumlah penduduk usia kerja pada tahun 2013 sebanyak 407.685 jiwa, meningkat menjadi 447.351 jiwa pada tahun 2017. Penduduk usia kerja meningkat akan menyebabkan kebutuhan akan kesempatan kerja juga meningkat. Jika tidak tersedia kesempatan kerja yang memadai, kelompok tersebut akan menjadi pengangguran yang pada gilirannya menimulkan dampak buruk bagi lingkungan sosial mereka. Sebaliknya, apabila penduduk usia kerja produktif tersebut dapat terserap atau mampu menciptakan lapangan pekerjaan, maka akan berdampak pada semakin membaiknya kinerja ekonomi daerah. Terlihat bahwa nilai dependency ratio di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2013 sebesar 52,18 turun menjadi 50,94 tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja

(dianggap produktif) di Lombok Barat, mempunyai tanggungan sebanyak 52 orang (tahun 2013) dan menurun menjadi 51 orang (tahun 2017). Hal ini mengindikasikan semakin banyak sumberdaya manusia yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi.

Tabel 2. 77 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 - 2017

No	Usia	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Usia < 15 Tahun	186.014	190.974	192.749	194.380	195.908
2	Usia 15-64 Tahun	407.685	424.627	432.223	439.847	447.351
3	Usia ≥ 65 Tahun	26.713	28.985	29.920	30.905	31.963
4	Usia < 15 Tahun + Usia ≥ 65 Tahun	212.727	219.959	222.669	225.285	227.871
5	Dependency Ratio	52,18	51,80	51,52	51,22	50,94

Sumber : BPS Lombok Barat

Tabel 2. 78 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian inerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat

NO	ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Nilai PDRB Perkapita (ADHK)	Juta Rupiah	13,51	14,15	14,73	15,46	**
2	Indeks Gini	Persen	0,290	0,320	0,273	0,317	**
3	Angka Kemiskinan	Persen	17,43	17,11	17,38	16,73	16,46
4	IPM	Persen	63,52	64,62	65,55	66,37	67,18
5	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,70	6,39	5,73	6,58	**
6	RLS	Tahun	5,63	5,63	5,69	5,93	6,15
7	HLS	Tahun	-	-	-	13,04	13,36
8	UHH	Tahun	66,84	67,20	67,56	67,92	68,18
9	Persentase Balita Gizi Buruk	Persen	-	15,99	15,99	0,00	0,05
10	TPT	Persen	-	4,19	3,35	3,28	3,34
11	IKM	Persen	-	62,15	63,05	87,71	79,20
13	OPINI BPK	Opini	-	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Nilai AKIP Daerah	Nilai	-	CC	B (60,24)	B (62,60)	**
ASPEK DAYA SAING DAERAH							
17	Kasus Konflik SARA	Kasus	0	0	0	0	0
ASPEK PELAYANAN UMUM							
Urusan Wajib Pelayanan Dasar							
Pendidikan							
18	APK						

NO	ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Angka Partisipasi Kasar TK/PAUD	Persen					
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Persen	104,4	103,16	100	100	**
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Persen	99,7	105,6	100	100	**
19	Angka Partisipasi Murni						
	Angka Partisipasi Murni TK/PAUD	Persen					
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Persen	99,20	99,41	100,00	100,00	**
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Persen	84,12	85,41	95,48	97,86	**
20	Angka Putus Sekolah						
	Angka Putus Sekolah SD	Persen	0,11	0,11	0,13	0,20	**
	Angka Putus Sekolah SMP	Persen	0,66	0,40	0,30	0,03	**
21	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar						
	SD	Rasio	1:216	1:213	1:215	1:215	1:171
	SMP	Rasio	1:629	1:539	1:572	1:453	1:407
Kesehatan							
22	Angka Kematian Bayi	Persen	-	-	3,05	2	0,95
23	Angka Kematian Ibu	Persen	-	36,31	39,98	32	15,86
24	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Kasus	-	-	-	964,9	109,85
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang							
25	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	Persen	55,28	51,82	60,29	62,55	62,86
26	Ketaatan Terhadap RTRW	Persen	-	-	97,92	98,49	50,22
27	Persentase Rumah Tangga Sanitasi Layak	Persen	-	1,39	1,73	71,80	85,93
28	Persentase Rumah Tangga dengan Akses air minum Layak	Persen	-	56,48	57,35	82,49	84,49

NO	ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Perumahan Permukiman							
29	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persen	79,67	80,17	80,88	79,51	80,19
30	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	Persen	-	-	-	0,474	0,474
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
31	Persentase Penegakan PERDA	Persen	100	100	100	100	100
Sosial							
32	Jumlah PMKS	Persen	-	761.856	120.158	74.164	147.323
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar							
Tenaga Kerja							
33	Rasio penduduk yang bekerja	persen	61,41	66,83	66,83	65,87	**
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
34	Perasentase perempuan di lembaga pemerintah	Persen	-	-	-	0,40	0,40
35	Rasio KDRT	Persen	-	-	-	0,044	0,048
Pangan							
36	Peningkatan skor PPH	skor	69,54	70,91	72,70	74,90	79,00
37	Ketersediaan cadangan pangan	ton	-	20	20	18,2	13
Pertanahan							
38	Persentase Luas Lahan Pemda Yang Bersertifikat	Sertifikat	n/a	n/a	30,06	30,70	35,06
Lingkungan Hidup							
39	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	-	-	-	-	54,67
40	Persentase Pengelolaan sampah	Persen	-	49,42	49,42	60,79	60,83
41	Indeks Kualitas Udara	Indeks	-	-	-	-	91,045
41	Indeks Kualitas Air						
	Persentase Kualitas Air Sungai	Persen	81,81	81,81	81,81	72,73	72,73
	Penghitungan dengan 11 parameter	Indeks	-	-	-	-	22,75
43	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	-	-	-	-	54,67

NO	ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
44	Cakupan kepemilikan KK	Persen	-	100	100	100	100
45	Cakupan Penerbitan KTP el	Persen	-	71,57	78,92	84,8	89,02
46	Persentase Penduduk Umur 0 - 18 tahun dalam kepemilikan akta kelahiran	Persen	-	28,44	49,17	92,13	94,46
47	Cakupan penerbitan akta kematian	Persen	-	1,99	13,58	24,93	42,2
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
48	Persentase Desa Dengan Kategori "Cepat Berkembang"	Desa	-	-	-	-	65
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
49	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	-	1,57	1,56	1,56	1,49
50	Rasio Akseptor KB	Persen	-	75,02	77,44	77,31	77,47
Perhubungan							
51	Persentase Wilayah Terhubung dengan Moda Transportasi	Persen	-	-	-	72,41	75,86
Komunikasi dan Informatika							
52	Blank Spot Area	Jumlah	-	-	7	5	5
Koperasi dan UKM							
53	Persentase koperasi yang aktif	Persen	-	56,16	57,77	58,76	59,84
52	Meningkatnya jumlah UKM/WUB	Jumlah	-	-	1271	2647	2579
Penanaman Modal							
53	Nilai Investasi (PMA dan PMDN)						
54	PMA	US $	57.113.002	342.216.150	52.728.886	62.205.789	108.545.983
55	PMDN (Total Fasilitas + Non Fasilitas)	Juta Rp.	302.623,79	175.640,48	1.450.145,88	1.259.392,78	1.492.206,88
	PMDN (Fasilitas)	Juta Rp.	n/a	155.824,64	336.174,79	470.543,29	288.094,38
	PMDN (Non Fasilitas)	Juta Rp.	n/a	19.815,84	1.113.971,09	788.849,49	1.204.112,50
Pemuda dan Olah Raga							
56	Jumlah presentasi Cabor yang dimenangkan	Persen	-	-	-	-	7

NO	ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Statistik							
57	Ketersediaan data penyelenggaraan pemerintah (Keterisian data SIPD)	Persen	-	-	18,82	19,51	31,94
Kebudayaan							
58	Cagar Budaya Kondisi Baik	Persen	-	-	-	63,93	81,00
Perpustakaan							
59	Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang			43.893	47.042	46.495
Kearsipan							
60	Persentase OPD Yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persen	-	-	28,00	42,00	60,00
Urusan Pilihan							
Pariwisata							
61	Jumlah kunjungan wiisatawan	Orang	-	468.149	571.650	732.475	391.282
62	Lama tinggal wisatawan	Hari	-	-	-	2	5
Pertanian							
63	Produktivitas Padi per hektar	kw/ha	-	-	-	55,54	54,11
Perdagangan							
64	Nilai bersih eksport perdagangan	Milyar	-	2,59	2,64	2,64	3,88
Perindustrian							
65	Meningkatnya pertumbuhan industri	Persen	-	4,49	2,49	3,72	2,35
Transmigrasi							
66	Persentase transmigran yang diberangkatkan	Persen	100	100	100	100	100
Kelautan dan Perikanan							
67	Produksi Perikanan	Ton	95.767,57	98.693,81	99.849,87	101.255,65	102.605,43
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							
Perencanaan Pembangunan							
68	Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	-	-	-	99,07	98,89
Keuangan							
69	Penetapan APBD Tepat Waktu	Status	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

NO	ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan							
70	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (Struktural+Fungsional)	Persen	39	40	41	42	43
71	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (eselon II)	Persen	10	10	13	15	20
Penelitian dan Pengembangan							
72	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan	Persen	100	100	100	100	100
Pengawasan							
73	Rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	Persen	-	88	89	92	91

2.5. Analisa SWOT

Terhadap kondisi geografi dan demografi, serta aspek kesejahteraan, pelayanan dan daya saing dapat dilakukan analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi Kabupaten Lombok Barat menggunakan metode SWOT dalam mendukung upaya pembangunan berkelanjutan. Aplikasi dari analisa ini adalah bagaimana kekuatan (*strenghts*) mampu mengambil keuntungan dari peluang (*opportunities*) yang ada. Selanjutnya bagaimana kekuatan (*strenghts*) mampu menghadapi ancaman (*threats*) dan bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang mampu membuat ancaman (*threats*) menjadi nyata atau menjadi sebuah ancaman baru.

1. Faktor Kekuatan (*Strenghts)*
   a. Potensi SDA yang cukup besar, didominasi sektor pertanian dan pariwisata terutama wisata alam

b. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB yang cukup tinggi
c. Potensi SDM dengan jumlah penduduk yang cukup besar
d. Kunjungan wisatawan yang cukup tinggi
e. Investasi yang terus meningkat
f. Suasana keamanan yang cukup kondusif

2. Faktor Kelemahan *(Weaknesses)*
   a. Pembangunan yang belum merata
   b. PAD belum optimal
   c. Wilayah yang berpotensi terjadi bencana
   d. Pengendalian lingkungan
   e. Angka kemiskinan yang cukup tinggi
   f. Pemanfaatan SDA yang belum optimal
   g. Kualitas SDM terbatas dan penyebaran penduduk tidak merata
   h. Lapangan pekerjaan terbatas
   i. Nilai tambah produk pertanian masih belum optimal karena belum dikembangkan menjadi produk olahan
   j. Kondisi kemantapan jalan yang belum optimal
   k. Pengelolaan sampah belum optimal dan kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah
   l. Kontribusi sektor pariwisata yang belum optimal meskipun tingat kunjungan wisatawan tinggi
3. Peluang *(Opportunities)*
   a. Salah satu daerah tujuan wisata
   b. Daerah yang menjadi salah satu tujuan invesatasi
   c. Potensi alam yang sangat baik untuk pengembangan pariwisata
   d. Menjadi salah satu kawasan penyangga kawasan KEK Mandalika
   e. Pasar Bebas yang membuka peluang bagi pengembangan pariwisata, pdouk lokal dan lain - lain
4. Ancaman *(Threats)*
   a. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk
   b. Bencana alam dan degradasi lahan
   c. Penduduk miskin yang terus meningkat
   d. Pasar bebas

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kondisi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2018 diwarnai perubahan sistem pemerintahan daerah sesuai Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Implementasi secara efektif terhadap kedua peraturan tersebut mulai dilaksanakan pada tahun 2017 yang ditindaklanjuti pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan penyesuaian kembali struktur organisasi perangkat daerah, penataan kembali sumberdaya, program dan kegiatan, urusan serta kewenangan melalui perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019. Kondisi Keuangan daerah Kabupaten Lombok Barat dari Tahun 2014-2017 cenderung meningkat sangat baik, namun pada pertengahan tahun 2018 kondisi keuangan Daerah merosot jauh akibat adanya bencana gempa bumi yang menyebabkan PAD menurun sangat drastis.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Analisis APBD Kabupaten Lombok Barat dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 – 2024 menggunakan data realisasi APBD tahun 2014 – 2018. Data series lima tahun lalu digunakan untuk menganalisis trend atau rata-rata pertumbuhan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sehingga memudahkan memproyeksikan pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada periode 5 tahun berikutnya. Melalui analisis keuangan tersebut, diharapkan proyeksi keuangan daerah akan semakin akurat sehingga perencanaan pembangunan daerah di masa mendatang lebih optimal dan tepat sasaran. Berikut adalah realisasi APBD Kabupaten Lombok Barat selama kurun waktuTahun 2014 – 2018.

Tabel 3. 1 Realisasi APBD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2018

No	U R A I A N	Tahun (Juta Rp.)					Rata- Rata Pertumbuhan (%)
		2014	2015	2016	2017	2018	
1.	**PENDAPATAN**	**1.142.644,08**	**1.325.444,36**	**1.473.782,18**	**1.699.564,34**	**1.651.626,72**	**8,91**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**169.108,92**	**171.132,72**	**200.570,63**	**290.993,58**	**217.074,80**	**5,67**
1.1.1.	Pajak Daerah	75.921,96	72.101,98	88.147,51	102.397,38	90.367,36	3,81
1.1.2.	Retribusi Daerah	27.485,94	20.655,96	13.785,42	15.588,95	17.818,35	-7,03
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	10.242,59	11.136,35	11.460,11	12.179,01	12.832,68	5,06
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	55.458,43	67.238,42	87.177,59	160.828,25	96.056,41	14,64
1.2.	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**790.134,68**	**866.349,31**	**1.109.706,37**	**1.139.364,53**	**1.108.259,62**	**8,05**
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak	34.102,79	29.157,05	77.241,11	68.144,07	51.558,35	10,24
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	685.318,84	716.888,89	784.744,36	770.958,92	771.028,05	2,50
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	70.713,05	120.303,37	247.720,90	300.261,54	285.673,21	60,80
1.3.	**Lain-lain Pendapatan yang sah**	**183.400,48**	**287.962,34**	**163.505,18**	**269.206,22**	**326.292,30**	**15,58**
1.3.1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	52.718,65	26.333,81	54.494,16	65.464,05	67.296,07	5,53
1.3.2.	Pendapatan Hibah	8.964,19	51.412,88	13.765,18	41.170,72	94.924,95	191,79
1.3.3.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	121.717,64	201.215,64	91.100,49	162.571,45	164.071,28	6,96
1.3.4.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	9.000,00	4.145,35	0,00	0,00	0,00
2.	**BELANJA**	**1.115.213,56**	**1.351.218,02**	**1.484.537,23**	**1.668.418,32**	**1.641.962,84**	**9,45**
2.1.	**Belanja Tidak Langsung**	**683.726,59**	**788.350,02**	**890.651,98**	**851.184,76**	**887.258,47**	**5,95**
2.1.1.	Pegawai	614.413,79	647.993,37	687.489,66	609.991,04	620.293,98	0,19

No	U R A I A N	Tahun (Juta Rp.)					Rata- Rata Pertumbuhan (%)
		2014	2015	2016	2017	2018	
2.1.2.	Bunga	0,00	0,00	3.486,34	3.987,47	2.185,13	
2.1.3.	Hibah	6.175,00	7.251,00	9.253,89	20.554,00	34.269,33	90,99
2.1.4.	Bantuan Sosial	10.028,90	5.398,90	2.499,70	14.991,20	7.187,70	-5,67
2.1.5.	Bagi Hasil	792,81	7.197,65	8.982,33	8.749,56	8.079,19	183,81
2.1.6.	Bantuan Keuangan	52.259,09	119.509,96	177.949,97	191.918,81	214.255,52	62,00
2.1.7.	Tidak Terduga	57,00	999,14	990,09	992,68	987,61	326,53
2.2.	**Belanja Langsung**	**431.486,97**	**562.868,00**	**593.885,25**	**817.233,55**	**754.704,37**	**14,98**
2.2.1.	Pegawai	33.862,90	34.769,36	45.978,24	50.189,72	47.746,96	8,20
2.2.2.	Barang Jasa	194.726,76	253.766,90	266.211,87	375.602,56	390.672,62	20,13
2.2.3.	Modal	202.897,31	274.331,74	281.695,14	391.441,28	316.284,79	11,18
	SURPLUS DEFISIT	**27.430,52**	**-25.773,66**	**-10.755,06**	**31.146,02**	**9.663,87**	**-12,95**
3.	**PEMBIAYAAN**	**32.183,73**	**91.066,56**	**37.265,88**	**-9.942,49**	**921,18**	**-19,43**
3.1.	**Penerimaan Pembiayaan**	**56.269,74**	**110.089,43**	**65.862,90**	**23.337,82**	**21.329,35**	**-12,42**
3.1.1.	SiLPA	55.518,46	59.614,25	65.537,65	23.202,47	21.193,35	-12,37
3.1.2.	Penerimaan Pinjaman	0,00	49.974,01	0,00	0,00	0,00	
3.1.3.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	751,28	501,16	325,25	135,35	136,00	-16,38
3.2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**24.086,01**	**19.022,87**	**28.597,02**	**33.280,31**	**20.408,17**	**-3,05**
3.2.1.	Penyertaan Modal	20.600,00	16.000,00	13.000,00	17.743,39	9.750,00	-10,53
3.2.2.	Pembayaran Pokok Utang	3.486,01	3.022,87	15.597,02	15.536,91	10.658,17	41,15

Sumber : BPKAD Kabupaten Lombok Barat 2018 (diolah)

Dari tabel 3.1 diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Daerah dari Tahun 2014 terus meningkat dari Rp. 1,142 Triliyun lebih meningkat menjadi Rp. 1,699 Triliyun lebih, dan menurun menjadi Rp. 1,651 Triliyun pada tahun 2018 atau menurun sebesar Rp. 48 Milyar. Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah dari tahun 2014-2018 sebesar 8,9%. Komponen pendapatan asli daerah dari tahun 2014 sebesar Rp. 169 Milyar lebih meningkat menjadi Rp. 217 Milyar lebih pada tahun 2018 dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 5,6%, Komponen Dana perimbangan dari Tahun 2014 sebesar Rp. 790 Milyar lebih meningkat menjadi Rp. 1.108 Milyar lebih dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,05%, dan komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang syah dari tahun 2014 sebesar Rp. 183 milyar lebih meningkat menjadi Rp. 326 Milyar lebih dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,5%.

Dari sisi Belanja, belanja Daerah pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.118 Milyar lebih, meningkat menjadi Rp. 1.641 Milyar lebih dengan rata-rata pertumbuhan belanja daerah sebesar 9,45%. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung dari tahun 2014 sebesar Rp. 683 Milyar lebih meningkat menjadi Rp. 887 Milyar lebih pada tahun 2018 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,95% dan Belanja langsung dari tahun 2014 sebesar Rp. 431 Milyar lebih meningkat menjadi Rp. 754 Milyar lebih dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 14,98%.

Dilihat dari rata-rata pertumbuhan pendapatan dan Belanja maka pertumbuhan pendapatan jauh lebih kecil dari pertumbuhan belanja, sehingga pemerintah Daerah memerlukan sumber penerimaan lain untuk menutup belanja yaitu dari pinjaman daerah, penjualan asset dan sebagainya sesuai meknisme yang telah diatur. Sedangkan dilihat dari rata-rata pertumbuhan belanja daerah, terlihat pertumbuhan belanja langsung semakin besar dan ini mencerminkan bahwa kinerja pengalokasian anggaran untuk pembangunan sudah semakin baik.

3.1.2. Neraca Daerah

Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Lombok Barat dari tahun 2014-2018 dapat mencerminkan tingkat likuiditas keuangan daerah, solvabilitas dan rasio aktivitas keuangan daerah. Total nilai

asset Daerah tahun 2014 sebesar Rp. 1.545 Milyar lebih meningkat menjadi Rp. 2.267 Milyar lebih pada tahun 2018, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,34%. Kondisi ini akibat adanya penambahan pada aset Tetap dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 16,40%, sedangkan Asset lancar menurun sebesar 6,06% dan asset lainnya justru menurun sebesar 5,72%.

Analisis Likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah Daerah dalam membayar seluruh hutang jangka pendeknya. Hal ini dapat dihitung dari nilai asset lancar dibanding total kewajiban jangka pendek. Tingkat likuiditas keuangan pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 sebesar 1.526% terus mengalami penurunan menjadi 252% pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah untuk membayar hutang jangka pendeknya masih baik, namun terus mengalami penurunan. Sedangkan analisis Solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membayar seluruh hutangnya dari total kekayaan yang dimilikinya. Jika dilihat dari tingkat solvabilitasnya dari tahun 2014 sebesar 19.514% menurun menjadi 6.671% pada tahun 2018. Kondisi ini juga menggambarkan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk melunasi seluruh kewajibannya masih dalam kondisi baik, walaupun cenderung menurun.

Dari analisis tersebut dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan Neraca Daerah cukup baik, dan potensi pemerintah Daerah untuk melakukan pinjaman daerah masih terbuka lebar. Berikut perkembangan Neraca Daerah dari tahun 2014-2018.

Tabel 3. 2 Perkembangan Neraca Daerah Tahun 2014– 2018

No.	U R A I A N	Tahun (Juta Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2014	2015	2016	2017	2018	
1.	**ASET**	**1.545.917,20**	**1.732.754,84**	**1.945.236,71**	**2.141.298,59**	**2.267.972,54**	**9,34**
1.1.	**ASET LANCAR**	**123.174,30**	**164.925,51**	**135.638,96**	**91.640,94**	**85.834,94**	**-6,06**
1.1.1.	Kas	60.178,51	67.195,52	28.416,56	21.876,34	14.203,37	-15,28
1.1.2.	Piutang	52.145,28	80.221,33	95.542,90	54.088,25	59.894,89	2,97
1.1.3.	Persediaan	10.850,51	17.508,65	11.679,49	15.676,35	11.736,68	1,63
1.2.	**ASET TETAP**	**1.054.388,95**	**1.297.643,61**	**1.530.507,71**	**1.711.528,13**	**1.919.107,35**	**16,4**
1.2.1.	Tanah	249.213,28	311.692,40	318.076,63	342.268,05	360.570,72	8,94
1.2.2.	Peralatan dan mesin	256.886,99	339.037,65	372.659,52	393.169,04	434.318,63	13,81
1.2.3.	Gedung dan Bangunan	598.516,61	681.582,32	765.904,21	761.785,57	840.895,76	8,1
1.2.4.	Jalan,Irigasi dan Jaringan	334.906,69	421.576,74	597.579,61	815.781,51	1.005.467,15	40,04
1.2.5.	Aset Tetap Lainnya	19.302,12	35.544,98	47.690,86	63.745,12	70.864,70	53,43
1.2.6.	Konstruksi dalam pengerjaan	1.108,79	9.649,20	13.647,46	1.024,59	4.500,86	61,19
1.2.7.	Penyusutan	-405.545,53	-501.439,66	-585.050,58	-666.245,75	-797.510,47	19,33
1.3.	**ASET LAINNYA**	**368.353,95**	**270.185,72**	**279.090,05**	**338.129,51**	**263.030,26**	**-5,72**
1.3.1.	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	Tagihan TGR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	Kemiteraan dengan Pihak Kedua	3.714,70	3.714,70	3.714,70	3.714,70	3.714,70	-

No.	U R A I A N	Tahun (Juta Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2014	2015	2016	2017	2018	
1.3.2.	Aset Tak Berwujud	160.127,45	45.040,67	40.647,39	48.818,13	48.522,35	-13,94
1.3.1.	Investasi JP Permanen	195.464,76	213.756,66	228.588,60	280.719,90	206.340,62	1,11
1.3.2.	Investasi JP Non Permanen	9.047,03	7.673,68	6.139,35	4.876,78	4.452,58	-10,16
	JUMLAH ASET DAERAH	**1.545.917,20**	**1.732.754,84**	**1.945.236,71**	**2.141.298,59**	**2.267.972,54**	**9,34**
2.	**KEWAJIBAN**	**8.070,90**	**64.162,98**	**42.938,04**	**22.925,66**	**33.993,55**	**64,24**
2.1.	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**8.070,90**	**29.188,97**	**22.964,02**	**12.951,64**	**33.993,55**	64,24
2.1.1.	Utang perhitungan Pihak Ketiga	39,75	190,43	277,00	672,81	724,44	344,53
2.1.2.	Utang Bunga	0,00	674,25	3.035,78	1.131,48	560,81	-4,21
2.1.3.	Bagian lancar utang jangka panjang	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	30.926,56	26,54
2.1.4.	Pendapatan diterima dimuka	395,37	452,10	647,28	1.147,36	1.781,73	70,13
2.1.5.	Utang jangka pendek lainnya	7.635,78	12.872,18	4.003,97	0,00	0,00	-20
2.2.	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	**0,00**	**34.974,01**	**19.974,01**	**9.974,01**	**0,00**	**-23,83**
3.	**EKUITAS DANA**	**1.537.846,29**	**1.703.565,88**	**1.922.272,69**	**2.128.346,94**	**2.233.979,00**	**9,05**
3.1.	**EKUITAS DANA LANCAR**	**115.103,40**	**135.736,54**	**112.674,93**	**78.689,30**	**51.841,39**	**-10,99**

No.	U R A I A N	Tahun (Juta Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2014	2015	2016	2017	2018	
3.1.1.	SiLPA	60.178,51	67.195,52	28.416,56	21.876,34	14.203,37	-15,28
3.1.2.	Cadangan Piutang	52.145,28	80.221,33	95.542,90	54.088,25	59.894,89	2,97
3.1.3.	Cadangan Persediaan	10.850,51	17.508,65	11.679,49	15.676,35	11.736,68	1,63
3.1.	**EKUITAS DANA INVESTASI**	**1.422.742,90**	**1.567.829,34**	**1.809.597,75**	**2.049.657,64**	**2.182.137,61**	**10,68**
3.1.1.	Diinvestasikan dalam aset tetap	1.054.388,95	1.297.643,61	1.530.507,71	1.711.528,13	1.919.107,35	16,4
3.1.2.	Diinvestasikan dalam aset lainnya	368.353,95	270.185,72	279.090,05	338.129,51	263.030,26	-5,72
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**1.545.917,20**	**1.767.728,86**	**1.965.210,72**	**2.151.272,60**	**2.267.972,54**	**9,34**

Sumber : BPKAD Kabupaten Lombok Barat (diolah)

3.1.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Dengan melihat struktur belanja dan pembiayaan pada tahun 2014 – tahun 2018, kebijakan pengelolaan keuangan untuk pembiayaan dipenuhi dengan melakukan pinjaman daerah. Pinjaman daerah dilakukan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi selama kurun waktu 2015-2019 yang diarahkan untuk pemenuhan infrastruktur jalan dan pembangunan pasar tradisional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

3.1.4. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi belanja aparatur dari tahun 2014-2018 tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 57,95% dan terus menurun menjadi 40,42% pada tahun 2018. Kondisi terbaik terjadi pada tahun 2017 dimana proporsi belanja aparatur hanya sebesar 39% dari total pengeluaran. Dilihat dari perkembangan proporsi belanja aparatur dari tahun 2014-2018, kondisinya sudah semakin membaik, dimana belanja untuk pembangunan terus dapat ditingkatkan. Berikut proporsi belanja aparatur dibanding total pengeluaran pada tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Perkembangan Proporsi Belanja Aparatur terhadap Total belanja Tahun 2014– 2018

No.	Tahun	Total Belanja untuk pemenuhan aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan	Persentase (%)
		(a)	(b)	(a)/(b)*100
1	2014	648,276,688,630.00	1,118,699,570,436.45	57.95
2	2015	682,762,734,165.16	1,354,240,893,416.42	50.42
3	2016	733,467,901,621.00	1,500,134,254,604.94	48.89
4	2017	660,180,757,269.00	1,683,955,229,760.61	39.20
5	2018	668,040,945,551.00	1,652,621,017,564.70	40.42

Sumber : BPKAD Kabupaten Lombok Barat (diolah)

3.1.5. Analisis Pembiayaan

Analisis Pembiayaan dilakukan untuk mengetahui defisit riil yang dialami oleh pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya untuk pembangunan. Semakin besar defisit, maka semakin besar pembiayaan yang harus digunakan untuk menutup defisit tersebut. Perkembangan Defisit riil Kabupaten Lombok Barat dari tahun 2014-2018, pada tahun 2014 Defisit Riil Kabupaten Lombok Barat mengalami surplus artinya tidak ada defisit riil yang disebabkan karena nilai pendapatan daerah masih lebih besar dari total belanja daerah ditambah pengeluaran pembiayaan. Tahun 2014 merupakan tahun pertama periode RPJMD tahun 2014-2019, yang mana pemerintah daerah masih berhati-hati merencanakan belanja. Selanjutnya pada tahun 2015, pemerintah Daerah melakukan pinjaman daerah yang disertai dengan pengalokasian belanja untuk mempercepat peningkatan infrastruktur daerah, sarana prasarana pelayanan dasar dan Pasar tradisional, sehingga defisit daerah mencapai angka Rp. 44 Milyar lebih, secara rinci defisit riil dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 4 Perkembangan Defisit Riil Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014– 2018

U R A I A N	Tahun (Rp.) Milyar				
	2014	2015	2016	2017	2018
Pendapatan Daerah	**1.142,64**	**1.325,44**	**1.473,78**	**1.699,56**	**1.651,63**
Belanja Daerah	**1.115,21**	**1.351,22**	**1.484,54**	**1.668,42**	**1.641,96**
Pengeluaran Pembiayaan	**24,09**	**19,02**	**28,60**	**33,28**	**20,41**
Defisit Rill	**3,34**	**-44,80**	**-39,35**	**-2,13**	**-10,74**

Sumber : BPKAD Kabupaten Lombok Barat (diolah)

3.2. Kerangka Pendanaan

3.2.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Berdasarkan hasil analisis Realisasi APBD lima tahun terakhir, yang dapat menggambarkan kinerja keuangan daerah di masa lalu, Baik dilihat dari sisi pendapatan, belanja, pembiayaan serta defisit riil yang dialami dari kinerja masa lalu, maka untuk membiayai pembangunan dimasa mendatang perlu dilakukan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk lima tahun mendatang, sehingga pengelolaan keuangan dimasa mendatang dapat lebih efektif dan berdayaguna. Berdasarkan rata-rata

pertumbuhan dari seluruh komponen APBD di masa lalu, maka dapat diproyeksikan kinerja keuangan lima tahun mendatang terhadap pendapatan dan belanja daerah sbb :

Tabel 3. 5 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020– 2024

No.	Uraian	Rata2 Pertum buhan (%)	Tahun (Juta Rp.)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	**PENDAPATAN**	**3,98**	**1.899,71**	**1.990,79**	**2.101,31**	**2.191,02**	**2.277,83**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**6,30**	**250,32**	**267,82**	**286,70**	**307,10**	**329,15**
1.1.1.	Pajak Daerah	4,31	115,88	121,67	127,75	134,14	140,85
1.1.2.	Retribusi Daerah	2,95	18,11	18,75	19,40	20,08	20,79
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	4,31	11,28	11,84	12,43	13,05	13,71
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	9,28	105,05	115,56	127,11	139,82	153,81
1.2.	**Dana Perimbangan**	**3,27**	**1.331,94**	**1.397,78**	**1.467,11**	**1.511,93**	**1.549,73**
1.2.1.	Dana Alokasi Umum	9,28	46,34	50,97	56,07	61,68	67,84
1.2.2.	Dana Bagi Hasil Pajak	2,29	796,74	828,61	861,75	878,99	887,77
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	4,31	488,87	518,20	549,29	571,26	594,11
1.3.	**Lain-lain Pendapatan yang sah**	**5,13**	**317,45**	**325,19**	**347,50**	**371,99**	**398,95**
1.3.2.	Pendapatan Hibah	2,51	67,39	69,41	71,49	73,64	75,85
1.3.1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	11,33	72,16	74,32	85,47	98,29	113,04
1.3.3.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	3,62	177,90	181,46	190,53	200,06	210,06
1.3.4.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**BELANJA**	**1,91**	**2.047,56**	**1.956,09**	**2.066,11**	**2.155,82**	**2.242,63**
2.1.	**Belanja Tidak Langsung**	**4,51**	**949,41**	**1.012,48**	**1.082,23**	**1.127,39**	**1.163,59**
2.1.1.	Belanja Pegawai	2,48	648,46	701,43	715,46	728,81	728,81
2.1.2.	Belanja Bunga	-	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2.1.3.	Belanja Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Belanja Hibah	5,47	28,46	29,89	31,38	32,95	36,24
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	5,81	12,35	12,35	16,78	16,78	15,94
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	4,13	13,40	14,04	14,72	15,42	16,16
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	9,33	243,73	246,16	295,40	324,94	357,43
2.1.8.	Belanja Tak Terduga	6,67	3,00	3,60	3,50	3,50	4,00
2.2.	**Belanja Langsung**	**-0,35**	**1.098,16**	**943,61**	**983,88**	**1.028,42**	**1.079,04**
3.	**PEMBIAYAAN**						
3.1.	**Penerimaan Pembiayaan**	**-19,83**	**151,30**	**1,30**	**1,30**	**1,30**	**1,30**
3.2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**191,59**	**3,45**	**36,00**	**36,50**	**36,50**	**36,50**

Sumber BPKAD Kabupaten Lombok Barat (diolah)

Secara umum pertumbuhan pendapatan Daerah dari tahun 2014-2018 rata-rata pertumbuhannya mencapai 8,91%, belanja daerah Kabupaten Lombok Barat periode tahun 2014-2018

memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 9,45% dan pembiayaan daerah sebesar -15,96%.

Dilihat dari sisi pendapatan daerah, maka persentase pertumbuhan tertinggi terjadi pada jenis lain-lain pendapatan daerah yang syah sebesar 15,58%, diikuti dengan Dana Perimbangan sebesar 8,05% dan terkecil adalah Pendapatan Asli Daerah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,67%. Sedangkan dari sisi Belanja maka pertumbuhan belanja Langsung mencapai rata-rata sebesar 14,98% dan belanja tidak langsung sebesar 5,95%. Sedangkan dari sisi pembiayaan Penerimaan pembiayaan turun sebesar 12,42% dan Pengeluaran pembiayaan juga turun sebesar 3,05%.

Dilihat dari rata-rata pertumbuhan APBD tahun 2014-2018 maka proyeksi APBD untuk periode tahun 2020 – 2024 selain melihat rata-rata pertumbuhan juga memperhitungkan faktor penyebab kenaikan dan penurunan komponen APBD, pertumbuhan ekonomi, laju inflasi serta tingkat kewajarannya sehingga hasil proyeksi benar-benar mendekati capaian realisasi yang akan direncanakan. Melihat perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana, dimana potensi PAD Kabupaten Lombok Barat yang belum pulih 100%, maka perlu dilakukan proyeksi PAD yang lebih rasional, sehingga pihak hotel dan restorant tidak merasa menanggung beban yang sangat berat akibat target pajak yang direncanakan tinggi. Pada tahun 2020-2024 PAD diproyeksikan meningkat sebesar 6,3% dari realisasi PAD Tahun 2018. Potensi pendapatan yang bersumber dari Hibah juga diproyeksikan menurun karena program PRIM sudah berakhir pada tahun 2019. Dana perimbangan diproyeksikan meningkat sebesar 3,24% dan lain – lain pendapatan daeah yang sah diproyeksikan meningkat sebesar 5,23% untuk rata-rata pertumbuhan dari tahun 2020-2024.

Dari sisi Belanja, Belanja Daerah diproyeksikan meningkat sebesar 4% pertahun, dengan rata-rata peningkatan belanja Tidak langsung sebesar 5% dan Belanja langsung sebesar 4%. Sedangkan untuk pembiayaan penerimaan pembiayaan di tahun pertama Pemda merencakan pinjaman daerah sebagai menutupi pembiayaan belanja untuk kesehatan dasar serta penataan

kawasan pariwisata dan pengeluaran pembiayaan dilakukan pada tahun kedua, ketiga dan keempat untuk membayar pokok hutang pinjaman. Belanja pegawai pada belanja tidak langsung akan ditingkatkan sehubungan dengan kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan tunjangan kinerja pegawai, yang dihemat dari belanja pegawai pada belanja langsung. Belanja bunga diproyeksikan selama tiga tahun periode RPJMD sebagai imbas dilakukannya pinjaman daerah pada tahun 2020. Belanja hibah disesuaikan dengan kebutuhan riil dan belanja bansos diupayakan selalu menurun setiap tahunnya. Belanja bagi hasil kepada pemerintah desa dialokasikan sebesar 10% dari total pajak dan retribusi tahun berkenaan. Belanja barang jasa dan belanja Modal pada belanja langsung diproyeksi meningkat sebesar 10% karena belanja ini menyentuh langsung kepada masyarakat yang diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lombok Barat.

Pada awal periode RPJMD, pemerintah daerah merencanakan melakukan pinjaman daerah sebagai salah satu upaya pemenuhan belanja modal yang diarahkan pada pembangunan ekonomi dalam segala bidang dalam rangka pemulihan pasca bencana yang terjadi pada tahun 2018.

3.2.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan suatu gambaran mengenai kapasitas riil daerah dalam mendanai kebutuhan pembangunan daerah di tahun - tahun berikutnya. Gambaran lengkap mengenai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 6 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat Untuk Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020– 2024

Uraian	Proyeksi Tahun ke (Rp.Milyar)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan	1.899,71	1.990,79	2.101,31	2.191,02	2.277,83
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Sisa lebih Riil Perhitungan Anggaran	151,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Total Penerimaan	2.051,01	1.992,09	2.102,61	2.192,32	2.279,13

Uraian	Proyeksi Tahun ke (Rp.Milyar)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Dikurangi :					
belanja Tidak Langsung	949,41	1.012,48	1.082,23	1.127,39	1.163,59
Pengeluaran Pembiayaan	3,45	36,00	36,50	36,50	36,50
Kapasitas Riil kemampuan keuangan	1.098,16	943,61	983,88	1.028,42	1.079,04

Sumber : BPKAD Kabupaten Lombok Barat 2019 (diolah)

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa kapasitas riil Pemerintah Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp. 1.098 Milyar lebih, yang berarti bahwa apabila ada rencana untuk belanja pembangunan melebihi dari kemampuan kapasitas riil maka harus dapat ditutupi dari penerimaan pembiayaan berupa pinjaman daerah. Namun apabila alokasi belanja tidak dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan perekonomian, maka kebijakan melakukan pinjaman daerah sebaiknya tidak dilakukan. Dari tahun 2020-2024 kemampuan kapasitas riil keuangan daerah diperkirakan semakin meningkat, dimana tahun 2020 sebesar Rp. 1.098 Milyar lebih, mengalami penurunan di tahun 2021 sebesar Rp. 154 Milyar atau sebesar 14,07% dikarenakan pada tahun 2020 adanya pinjaman daerah, lalu sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi Rp. 1.079,04 Milyar lebih, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,57% pertahun.

Melihat rata-rata pertumbuhan kapasitas fiskal riil sebesar 4,57% pertahun, maka kebijakan perencanaan belanja langsung sebaiknya tidak melampaui persentase pertumbuhan kapasitas riil karena akan menyebabkan defisit anggaran atau dilakukan rasionalisasi terhadap rencana belanja yang sudah direncanakan.

Dengan diproyeksikannya besaran kapastitas riil, maka alokasi belanja langsung harus diarahkan untuk membiayai prioritas pembangunan daerah yang sudah tertuang dalam rencana kerja pembangunan daerah tahun yang direncanakan. Berikut proyeksi penggunaan kapasitas riil untuk mendanai prioritas pembangunan selama kurun waktu 2020-2024 sesuai tabel berikut:

Tabel 3. 7 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020– 2024

Uraian	Proyeksi Tahun ke (Rp. Milyar)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	1.098,16	943,61	983,88	1.028,42	1.079,04
Prioritas I					
Peningkatan konektivitas infrastrukturantar wilayah dan akses infrastruktur dasar secara berkelanjutan	408,07	182,84	213,57	166,86	167,71
Prioritas II					
Pengurangan kemiskinan dan peningkatan ekonomi daerah	59,94	56,43	58,77	58,07	59,42
Prioritas III					
Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan sumber daya manusia	610,60	684,60	691,60	782,85	831,08
Prioritas IV					
Peningkatan pelestarian Lingkungan Hidup dan ketahanan daerah yang berkualitas dan berkelanjutan	19,55	19,74	19,95	20,64	20,83

Sumber : BPKAD Kabupaten Lombok Barat (diolah)

3.3. Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya

Dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur dasar antara lain Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah, Penerangan Jalan Umum, Pengelolaan Persampahan sebagai penunjang pelayanan dasar bagi masyarakat dan menjadi isu strategis daerah. Untuk memenuhi pembangunan infrastruktur tersebut Kabuoaten Lombok Barat membutuhkan pembiayaan yang cukup besar dan tidak memungkinkan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat akan memperkuat integrasi sumber pendanaan pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Obligasi, Pinjaman Daerah, dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

3.3.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembangunan di Kabupaten Lombok Barat selain bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Barat, juga memperoleh dukungan

pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola langsung oleh Perangkat Daerah.

3.3.2. Obligasi

Obligasi daerah merupakan alternatif kanal pembiayaan yang layak dipertimbangkan sebagai sumber pendanaan daerah, instrumen ini adalah efek berupa surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan tidak dijamin oleh pemerintah pusat, hanya untuk membiayai kegiatan investasi sarana prasarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD. Namun pada dasarnya penerbitan obligasi daerah sangat bergantung pada kapasitas daerah tersebut. Pembangunan sarana dan prasarana yang diajukan harus mempunyai nilai keuntungan secara ekonomis, keuntungan dari sarana prasarna tersebut digunkan untuk membayar pokok hutang beserta bunganya.

Kelebihan obligasi daerah sebagai alternatif pendanaan pembangunan antara lain mampu menarik minat pemilik dana atau masyarakat untuk berinvestasi dan mampu menyediakan dana dalam jumlah besar. Mekanisme penerbitan obligasi daerah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Obligasi Daerah.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat belum pernah menerbitkan obligasi daerah, namun Pemerintah Kabupaten Lombok Barat akan menjajaki bentuk dari pembiayaan jenis ini sebagai tujuan untuk membiayai pembangunan yang berhubungan kepentingan publik.

3.3.3. Pinjaman Daerah

Dalam pelaksanaan pembangunan, pinjaman daerah dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan pembangunan. Konsep dasar pinjaman daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah pada prinsipnya diturunkan dari UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam UU tersebut

disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai resiko seperti resiko kesinambungan fiskal, resiko tingkat bunga, resiko pembiayaan kembali, resiko kurs, dan resiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah.

Beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dari pinjaman daerah di antaranya adalah sebagai berikut :

a. Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah.
b. Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah.
c. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas.
d. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.
e. Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman pihak lain.
f. Pinjaman daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan Pemerintah Daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
g. Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah.
h. Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obilgasi Daerah.
i. Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman daerah dicantumkan dalam APBD.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah, diantaranya bersumber dari:

1. Pemerintah Pusat, berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan pinjaman dalam negeri, dan/atau penerusan pinjaman luar negeri;
2. Pemerintah Daerah lain;
3. Lemabaga Keuangan Bank, yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Masyarakat, berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

Pemerintah Daerah dapat menggunakan hasil dari Pinjaman Daerah sebagaimana jenis pinjamannya, yaitu:

1. Pinjaman Jangka Pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.
2. Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.
3. Pinjaman Jangka Panjang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang (i) menghasilkan penerimaan langsung, (ii) menghasilkan penerimaan tidak langsung, (iii) memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
4. Khusus pinjaman jangka panjang dalam bentuk obligasi daerah digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut.

Mempertimbangkan keterbatasan fiskal daerah, maka beberapa sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan tidak dapat dibiayai dalam periode 1 (satu) RPJMD, sehingga masih akan tetap berlanjut sampai periode RPJMD berikutnya. Pada RPJMD tahun 2019 - 2024 direncanakan pembangunan sarana

dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan akan dibiayai melalui pinjaman daerah.

3.3.4. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha.

Kerjasama pemerintah dengan badan usaha dilakukan dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Kerjasama tersebut mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para fihak.

Skema pendanaan KPBU dimaksudkan untuk pembangunan prasarana dasar yang tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kerjasama pemerintah dan badan usaha menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi.

Karateristik proyek KPBU meliputi:

1. Proyek KPBU merupakan proyek infastruktur yang penyediaannya dilakukan Pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha
2. Skema diwujudkan melalui ikatan perjanjian (kontrak) kerjasama yang melibatkan pemerintah sebagai PJPK dan suatu badan usaha.
3. Dalam perjanjian kerjasama proyek, pihak badan usaha dapat bertanggungjawab atas desain, kontribusi, pembiayaan dan operasi proyek KPBU.
4. Perjanjian kerjasama skema KPBU biasanya memiliki jangka waktu relatif panjang (lebih dari 15 tahun) untuk

memungkinkan pengembalian investasi bagi pihak badan usaha.

5. Basis dan perjanjian kerjasama proyek KPBU tersebut adalah pembagian alokasi risiko antara pemerintah melalui PJPK dan badan usaha.

Kriteria dan jenis infrastruktur prioritas yang dapat dibiayai melalui pendanaan KPBU terdiri:

1. Memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
2. Memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;
3. Memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
4. Memiliki peran strategic terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau
5. Membutuhkan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah, dalam penyediaan infrastruktur prioritas kerja sama pemerintah dan swasta.

Pendanaan Pembangunan melalui KPBU memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas proyek dengan pelibatan badan usaha yang memungkinkan adanya pembagian risiko dan menjamin ketepatan waktu dan anggaran (on schedule-on budget).
b. Menjamin kualitas pelayanan karena performance diperjanjikan dalam kontrak.
c. KPBU memiliki perlindungan hukum yang baik karena regulasinya jelas dan governance terjaga melalui mekanisme KPBU yang melibatkan pemangku kepentingan (Bappenas dalam pemilihan proyek, Kementerian Keuangan dalam pemberian fasilitas fiskal, LKPP dalam proses pengadaan, BKPM dalam menjajaki minat dan nilai pasar, Kementerian Dalam Negeri dalam pemberian rekomendasi Availability Payment/AP Daerah, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian dalam debottlenecking, dan PT. PII dalam

pemberian penjaminan Pemerintah), serta best practice KPBU sudah ada di berbagai negara dan berbagai sektor.

KPBU di Indonesia sudah dibuka untuk 19 sektor baik KPBU ekonomi maupun sosial yang mempunyai kelayakan finansial tinggi (full cost recovery) atau kelayakan marjinal, 19 jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha yaitu: 1) infrastruktur transportasi; 2) infrastruktur jalan; 3) infrastruktur sumber daya air dan irigasi; 4) infrastruktur air minum; 5) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat; 6) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat; 7) infrastruktur sistem pengelolaan persampahan; 8) infrastruktur telekomunikasi dan informatika; 9) infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, termasuk infrastruktur energi terbarukan; 10) infrastruktur konservasi energi; 11) infrastruktur ekonomi fasilitas perkotaan; 12) infrastruktur kawasan; 13) infrastruktur pariwisata, antara lain pusat informasi pariwisata (tourism information center); 14) infrastruktur fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan; 15) infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya; 16) infrastruktur kesehatan; 17) infrastruktur pemasyarakatan; 18) infrastruktur perumahan rakyat; 19) infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya.

Pengelompokan 19 (sembilan belas) jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha melaui skema pendanaan KPBU dikelompokan menjadi 3 (tiga) kelompok terdiri kelompok pertama 6 (enam) jenis infrastruktur konektivitas (tranportasi, jalan, ketenagalistrikan, migas dan energi baru terbarukan (EBT), konservasi energi, telekomunikasi dan informatika), kelompok kedua 7 (tujuh) jenis infrastruktur fasilitas perkotaan (air minum, pengelolaan limbah setempat, pengelolaan limbah terpusat, pengelolaan sampah, SDA dan irigasi, pasar tradisional, perumaha rakyat, dan kelompok ketiga 6 jenis infrastruktur fasilitas sosial (pariwisata, fasilitas pendidikan, Lembaga pemasyarakatan, sarana olah raga dan budaya, kawasan/technopark, kesehatan).

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS DAERAH

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh masyarakat Lombok Barat secara umum adalah bagaimana membangun masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan, bagaimana mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan pembangunan infrastruktur wilayah secara merata, mengurangi tingkat kemiskinan, melakukan reformasi birokrasi dan penegakan hukum, meningkatkan pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan daerah, menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

4.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

4.1.1.1. Pendidikan

Sektor pendidikan sebagai salah satu komponen pendukung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memegang peran sentral bersama-sama dengan sektor kesehatan dan ekonomi. Kondisi saat ini, masih relatif rendahnya rata-rata lama sekolah yang pada tahun 2018 berada pada angka 6,16 tahun, dan angka partisipasi murni yang belum mencapai 100% serta menurunnya ketersediaan sarana prasarana pelayanan dasar pendidikan akibat terjadinya gempa bumi tahun 2018.

4.1.1.2. Kesehatan

Dibidang kesehatan ada beberapa indikator yang menjadi prioritas penanganan yang menjadi permasalahan serius seperti angka kematian bayi tercatat 1,73% pada tahun 2018, angka kematian ibu 36,14 serta predikat provinsi NTB sebagai daerah peringkat ke 2 untuk tingkat stunting di Indonesia dengan kondisi di Lombok Barat 28,96%.

Masih rendahnya usia harapan hidup masyarakat walaupun *trend*-nya cenderung meningkat yakni pada tahun 2009 mencapai 60,40 tahun meningkat menjadi 66,16 tahun pada tahun 2018 serta belum tercapainya imunisasi dasar lengkap serta masih tingginya kasus TBC dan kasus HIV/AIDS.

4.1.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Konektivitas antar wilayah, yang disebabkan kualitas jalan mantap. Kesesuaian/ketaatan terhadap regulasi penataan ruang yang disebabkan masih kurangnya ketersediaan informasi penataan ruang (RDTR dan peraturan yang lebih rinci).

Terkait dengan tata ruang, pemanfaatan dokumen rencana tata ruang sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan belum optimal dilaksanakan serta tekanan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanian yang menimbulkan dampak terhadap kelestarian lingkungan. Akses terhadap sanitasi dan air minum layak belum mencapai 100%. Serta terbatasnya Ruang Terbuka Hijau

4.1.1.4. Urusan Perumahan dan Permukiman

- Akibat terjadinya bencana gempa bumi tahun 2018 ini, sejumlah 21.237 rumah terdata kondisi rusak berat, maka penanganan rumah tidak layak huni menjadi salah satu fokus pemerintah.
- Masih adanya kawasan kumuh yang belum tertangani.

4.1.1.5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

- Perlunya rencana terkait dengan pengurangan risiko bencana. Kondisi Kabupaten Lombok Barat memiliki kerawanan bencana alam geologi yang cukup tinggi, pemicu terjadinya bencana geologi diantaranya gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir bandang, tanah longsor dan lainnya; Dari 10 kecamatan yang ada, 9 kecamatan dinyatakan rawan longsor, dan rawan banjir di beberapa kecamatan serta Bencana Tsunami di Kecamatan Sekotong dan Lembar. Hal ini menyebabkan Kabupaten Lombok Barat perlu memiliki Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. Masih rendahnya pelayanan penanganan bencana dikarenakan jangkauan yang luas, kurangnya ketersediaan pos pembantu, armada dan SDM serta regulasi penanganan bencana yang belum optimal.
- Pemerintah Kabupaten Lombok Barat belum sepenuhnya dapat menerapkan produk hukum dalam bentuk perda dan

peraturan kepala daerah kabupaten dengan baik. Tahun 2016 tercatat 110 kasus terjadi dan telah diselesaikan 102 kasus, 8 kasus masih dalam proses. Selain itu angka kriminalitas dan penyalahgunaan narkoba masih cukup tinggi.

4.1.1.6. Urusan Urusan Sosial

Penanganan PMKS masih menjadi masalah di urusan sosial. Tahun 2018 baru tercatat sebesar 67,5 % tertangani. Salah satunya disebabkan kurangnya akurasi data PMKS maupun kemiskinan.

4.1.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

4.1.2.1. Urusan Tenaga Kerja

Belum sebandingnya antara jumlah angkatan kerja dengan kesempatan kerja. Hingga tahun 2018 tercatat tingkat pengangguran terbuka mencapai 3,34 persen.

4.1.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Belum terpenuhinya perlindungan dan pemenuhan hak – hak perempuan dan anak. Hal ini terkait juga ketersediaan dan akurasi terkait data perlindungan perempuan dan anak. Pembangunan manusia berbasis gender dan masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan juga menjadi masalah di Kabupaten Lombok Barat.

4.1.2.3. Urusan Pangan

Kurang optimalnya ketersediaan dan kualitas konsumsi terhadap keberagaman pangan yang disebabkan oleh kurangnya akses dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keberagaman pangan dan gizi bagi keluarga.

4.1.2.4. Urusan Pertanahan

Masih rendahnya lahan yang bersertifikat di Kabupaten Lombok Barat.

4.1.2.5. Urusan Lingkungan Hidup

- Masih luasnya lahan kritis yang belum tertangani ;
- Berkurangnya sumber mata air;
- Terjadinya konversi lahan hutan, illegal logging dan perambahan hutan;
- Masih terjadinya penambangan illegal

- Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah

4.1.2.6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

- Kepemilikan dokumen administrasi kependudukan belum mencapai 100%

4.1.2.7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Masih rendahnya jumlah desa mandiri
- Rendahnya persentase APBDes yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat
- Ketahanan dan kesejahteraan keluarga masih terbatas

4.1.2.8. Urusan pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk;
- Kesadaran penduduk untuk mengikuti program KB masih rendah
- Distribusi penduduk tidak merata;

4.1.2.9. Urusan Perhubungan

- Pelayanan moda transportasi umum masih terbatas;

4.1.2.10. Urusan Komunikasi dan Informatika

- Masih adanya daerah *blank spot.*

4.1.2.11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- Masih rendahnya koperasi yang aktif
- Terbatasnya akses UKM terhadap layanan keuangan
- Daya saing produk UKM masih rendah

4.1.2.12. Urusan Penanaman Modal

- Rendahnya realisasi investasi PMDN
- Masih rendahnya iklim investasi

4.1.2.13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

- Rendahnya prestasi pemuda dan olahraga
- Masih terbatasnya jumlah wirausaha muda

4.1.2.14. Urusan Statistik

- Penyediaan data statistik sektoral tidak tepat waktu

4.1.2.15. Urusan Persandian

- Belum dilaksanakannya urusan ini secara optimal

4.1.2.16. Urusan Kebudayaan

- Masih terbatasnya persentase cagar budaya dalam kondisi baik
- Rendahnya pengembangan seni budaya lokal

4.1.2.17. Urusan Perpustakaan

- Rendahnya minat baca masyarakat

4.1.2.18. Urusan Kearsipan

- Belum optimalnya tata kelola arsip daerah.

4.1.3. Urusan Pilihan

4.1.3.1. Kelautan dan Perikanan

- Produksi perikanan tangkap semakin menurun.

4.1.3.2. Urusan Pariwisata

- Masih rendahnya rata –rata lama tinggal wisatawan

4.1.3.3. Pertanian

- Semakin menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
- Alih fungsi lahan pertanian terus terjadi

4.1.3.4. Perdagangan

- Rendahnya perlindungan terhadap konsumen
- Belum tersedianya pasar yang representatif bagi masyarakat (belum ada pasar bersih)

4.1.3.5. Urusan Perindustrian

- Menurunnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB
- Daya saing produk industri masih rendah

4.1.3.6. Urusan Transmigrasi

- Terbatasnya penduduk yang bisa ditransmigrasikan

4.1.4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

4.1.4.1. Urusan Administrasi Pemerintahan

- Belum optimalnya tata kelola kelembagaan, tata laksana serta akuntabilitas kinerja
- Pengelolaan BUMD belum optimal
- Penanganan aksi HAM Daerah yang belum optimal.
- Terbatasnya kerjasama daerah, kemitraan, koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingah

4.1.4.2. Urusan Pengawasan

- Pelaksanaan review kebijakan perencanaan dan penganggaran masih terbatas
- Persentase penyelesaian TLHP belum 100%

4.1.4.3. Urusan Perencanaan Pembangunan

- Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran yang belum optimal
- Pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan belum optimal

4.1.4.4. Urusan Keuangan

- Kemandirian fiskal daerah masih rendah

4.1.4.5. Urusan Kepegawaian

- Terbatasnya SDM fungsional tertentu
- Rendahnya disiplin pegawai
- Kompetensi SDM masih terbatas

4.1.4.6. Urusan Penelitian dan Pengembangan

- Belum optimalnya pelaksanaan kelitbangan di Kabupaten Lombok Barat
- Masih rendahnya inovasi daerah dalam pembangunan

Berdasarkan permasalahan – permasalahan yang ada di masing-masing urusan, maka dilakukan analisa pohon masalah untuk memetakan sebab , masalah utama dan akibat sebagai upaya mencari akar permasalahan yang menjadi penyebab utama. Kelompok dari akar permasalahan tersebut selanjutnya akan menjadi isu strategis daerah.

Masalah utama di Kabupaten Lombok Barat yaitu Belum meratanya pembangunan di Kabupaten Lombok Barat, hal ini tercermin dari ketimpangan pertumbuhan antar kawasan, antar kecamatan. Beberapa indikator yang menunjukkan ketimpangan tersebut antara lain disparitas angka kemiskinan yang pada tahun 2018 masih tinggi yaitu sebesar 15,20%, ketimpangan pelayanan sosial dasar yang tersedia seperti pendidikan, kesehatan, akses informasi dan infrastruktur.

Gambar 4. 1 Skema Pohon Masalah Kabupaten Lombok Barat

4.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal selama kurun waktu lima tahun yang akan datang dapat teridentifikasi dengan baik, diharapkan Kabupaten Lombok Barat akan dapat mempertahankan prestasi-prestasi pembangunan yang telah dicapai bahkan mampu meningkatkan akselerasi pembangunan secara menyeluruh serta meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, dapat dirumuskan Isu-isu Strategis dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lombok Barat kurun waktu lima tahun kedepan yang diklasifikasikan dalam 3 aspek pembangunan, yaitu:

4.2.1. Analisis Isu Strategis Internasional

Indonesia menjadi salah satu dari tiga puluh negara yang menjadi anggota *Open Working* Group (OWG) on Sustainable Development Goals (SDG's)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) . Beberapa fokus dalam SDG's/TPB adalah bahwa : (i) Pembangunan manusia seperti kemiskinan, kelaparan kekurangan

gizi, pembangunan kesehatan, pendidikan dan kesetaraan gender; (ii) Pemenuhan akses masyarakat terhadap air dan sanitasi tetap menjadi isu penting dan akses terhadap energi terhadap energi merupakan fokus baru yang ditambahkan; (iii) Untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan isu baru yang akan difokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang terjaga dan inklusif, serta industrialisasi yang berkelanjutan dan pembangunan hunian dan kota berkelanjutan yang secara keseluruhan disertai dengan penerpan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan; (iv) Pembangunan lingkungan yang tercermin pada fokus mitigasi kepada perubahan iklim, konsevasi SDA dan perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hayati; dan terakhir adalah adanya rumusan cara pencapaian (mean of implementation).

Implementasi TPB di Indonesia dikembangkan kedalam 319 indikator dengan 169 target untuk pencapaian 17 tujuan secara nasional. Upaya pencapaian 219 indikator tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota sesuai pembagian kewenangan yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Indikator-indikator TPB dibagi dalam 4 (empat) kewenangan, sebagaimana pada grafik :

Gambar 4. 2 Jumlah Indikator TPB Berdasarkan Kewenangan

Sumber : Analisis indikator TPB berdasarkan UU 23 Tahun 2014

Selain kewenangan, beberapa faktor yang menentukan jumlah indikator yang menjadi kewajiban daerah adalah kekhususan indikator, kondisi geografis dan ketentuan indikator RPJMD. Tercatat bahwa dari 319 indikator TPB Indonesia, 21 indikator bersifat khusus untuk daerah tertentu, sedangkan 298 indikator

bersifat umum. Hal itulah yang menyebabkan setiap daerah memiliki jumlah indikator TPB yang berbeda.

Kabupaten Lombok Barat masih menghadapi tantangan yang panjang dalam pencapaian indikator TPB. Analisa yang dilakukan dalam dokumen ini adalah analisa TPB terhadap indikator yang sudah dilaksanakan di daerah terkait RPJMD, Renstra dan SPM. Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Barat telah melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan meliputi 14 tujuan dan 69 indikator dari total 220 indikator yang menjadi kewenangan kabupaten. Capaian indikator TPB Kabupaten Lombok adalah sebagai berikut

Tabel 4. 1 Capaian Indikator TPB Kabupaten Lombok Barat Terhadap Target Nasional

NO	Kriteria	Jumlah Indikator	Pesentase
1	Indikator TPB yang dilaksanakan	69	31,36
2	Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sesuai target nasional	55	25
3	Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum sesuai target nasional	14	5,36
4	Indikator TPB tidak dilaksanakan	149	67,73
5	indikator bukan kewenangan kabupaten	2	0,91

Sumber : Olah Data, 2018

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang tidak dilaksanakan oleh Kabupaten Lombok Barat sebanyak 2 tujuan karena bukan merupakan kewenangan dan tidak sesuai dengan kondisi daerah. Tujuan tersebut meliputi :

a. Tujuan 7, Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua
b. Tujuan 14, Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumberdaya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan

Berdasarkan hasil analisa TPB Kabupaten Lombok Barat, capaian dikategorikan dalam 4 kelompok yaitu :

1. Indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah sesuai target nasional (SS)
2. Indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target (SB)
3. Indikator yang belum dilaksanakan (BB)

4. Indikator yang tidak tersedia data (NA)

Kategori ini ditujukan untuk memetakan isu strategis apa saja yang perlu mendapat perhatian dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Lombok Barat pada periode RPJMD Tahun 2019 – 2024. Isu strategis yang menjadi perhatian utama adalah target – terget TPB yang memiliki indikator SB, BB dan NA yang menunjukkan masih banyak indikator yang belum dilaksanakan dan belum sesuai dengan target nasional. Namun demikian, target TPB dengan indikator SS juga perlu terus dilaksanakan untuk mempertahankan dan bahkan berupaya untuk meningkatkan capaian.

Tabel 4. 2 Capaian Jumlah Indikator TPB Terhadap Target Nasional

No	Tujuan TPB	Jumlah Indikator	Capaian Indikator			
			SS	SB	BB	NA
1	Tanpa Kemiskinan	24	8	5	11	0
2	Tanpa Kelaparan	11	2	0	9	0
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	34	5	2	27	0
4	Pendidikan Berkualitas	13	5	1	7	0
5	Kesetaraan Gender	14	5	0	9	0
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	18	2	4	12	0
7	Energi Berkelanjutan	2	0	0	0	2
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	19	5	0	14	0
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	13	3	0	10	0
10	Berkurangnya Kesenjangan	11	2	1	8	0

11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	13	3	1	9	0
12 RESPONSIBLE CONSUMPTION	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	5	2	0	3	0
13 CLIMATE ACTION	Penanganan Perubahan Iklim	2	0	0	2	0
14 LIFE BELOW WATER	Sumberdaya Laut Berkelanjutan	0	0	0	0	0
15 LIFE ON LAND	Ekosistem Daratan	4	0	0	4	0
16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	21	11	0	10	0
17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	16	2	0	14	0
	JUMLAH	220	55	14	149	2

Menindaklanjuti rekomendasi Gubernur agar Program dan kegiatan yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan limbah, perbaikan sanitasi, pengembangan ruang terbuka hijau, menjaga kelestarian hutan, sungai dan laut, telah dimuat dalam dokumen RPJMD ini. Hal ini merupakan upaya pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang merupakan analisis sistematis, menyeluruh dan paritisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.

Lombok Barat melaksanakan 15 (lima belas) tujuan/*goals* dari 17 (tujuh belas) tujuan/*goals SDGs* dimana 2 (dua) diantaranya bukan kewenangan pemerintah Kabupaten. Pengintegrasian indikator *SDG's* terinci dengan 37 indikator TPB tertuang pada level Tujuan Daerah, Sasaran Daerah dan Sasaran OPD.

Berikut adalah indikator TPB yang tertuang dalam Tujuan Daerah, Sasaran Daerah dan Sasaran OPD Tahun 2019 – 2024 :

Tabel 4. 3 Indikator TPB Kabupaten Lombok Barat
Tahun 2019 - 2024

No	Indikator Tujuan Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Indikator Sasaran OPD
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Opini BPK	Zona Integritas
2	Indeks Gini	Nilai AKIP Daerah	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni
3	Angka Kemiskinan	Rasio Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
4	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Persentase Rumah Tangga Sanitasi Layak	Persentase Penduduk berkases air minum
5		Persentase Rumah Tangga dengan Akses air minum Layak	Kunjungan wisatawan
6		Persentase Pertumbuhan Ekonomi	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial
7		Nilai PDRB Perkapita	Persentase Penduduk Umur 0 - 18 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran
8		Persentase Angka Kemiskinan	Skor PPH
9		Indeks Risiko Bencana	Persentase Tenaga Kerja Formal
10			Angka Kematian Bayi
11			Angka Kematian Ibu
12			Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan
13			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.
14			Angka Partisipasi Kasar
15			Angka Partisipasi Murni
16			Angka Kelulusan SD dan SMP
17			Pelestarian Cagar Budaya
18			Laju Pertumbuhan Penduduk
19			Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon II).
20			Kualitas Air Sungai
21			Perlindungan Mata Air
22			Persentase Pengelolaan Sampah
23			Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan
24			Cakupan mitigasi penanggulangan bencana dan pemulihan sarpras terdampak bencana

4.2.2. Analisis Isu Strategis Nasional

Dalam RPJMN tahun 2015 – 2019 yang merupakan periode ketiga dari perjalanan RPJPN , bangsa Indonesia di hadapkan pada tiga masalah pokok, yakni (1) merosotnya kewibawaan negara; (2) melemahnya sendi- sendi perekonomian nasional; dan (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut dirumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut NAWA CITA, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

4.2.3. Analisis Isu Strategis Regional

Kawasan Timur Indonesia yang meliputi Papua, Maluku, Nusa Tenggara dan Sulawesi dikenal sebagai kawasan yang kaya akan sumber daya alam namun menghadapi tantangan pembangunan yang berat, diantaranya aksesibilitas antar kawasan, belum terpadu dan sinkronnya pola pengelolaan potensi SDA, iklim investasi yang kurang kondusif, ketimpangan infrastruktur,

kualitas pelayanan dan penguatan pemerintah yang belum optimal. Rendahnya tingkat aksesibilitas antar kawasan di KTI ditandai dengan masih banyaknya kawasan – kawasan yang terisolasi dari pusat – pusat kegiatan ekonomi seperti daerah perbatasan, pulau-pulau kecil, pesisir dan daerah pedalaman. Sentra – sentra produksi yang terdapat di KTI belum memiliki aksesibitas langsung ke pasar internasional.

Selain itu, mencermati dokumen RPJMD Propinsi NTB Tahun 2019 – 2024, dirumuskan 11 (sebelas) isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan adalah:

1. NTB sebagai daerah rawan bencana
2. Mutu dan daya saing luaran pendidikan yang belum optimal
3. Derajat kesehatan masyarakat relatif rendah
4. Tingkat kemiskinan masih diatas rata – rata nasional
5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik
6. Partisipasi perempuan dalam pembangunan dan ketahanan keluarga belum optimal
7. Pertumbuhan ekonomi relatif stagnan
8. Industrialisasi produk unggulan daerah belum optimal
9. Belum terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan damai secara optimal
10. Kualitas dan daya dukung lingkungan belum optimal
11. Penataan ruang, konektivitas wilayah dan ketersediaan infrastruktur wilayah belum optimal

4.2.4. Analisis Isu Strategis Lokal

Sedangkan aspek yang perlu mendapat perhatian dalam lingkungan strategis lokal adalah :

4.2.4.1 Aspek Kesejahteraan Rakyat

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lombok Barat, sejumlah isu yang ditetapkan masuk aspek kesejahteraan rakyat sebagai berikut :

1. Nilai PDRB Perkapita belum optimal
2. Indeks Gini
3. Angka kemiskinan masih di atas rata-rata nasional
4. IPM
5. Angka Rata – Rata Lama Sekolah

6. Angka Usia Harapan Hidup
7. Persentase Balita Gizi Buruk
8. Tingkat Pengangguran Terbuka
9. Indeks Kepuasan Masyarakat
10. Persentase PAD terhadap Pendapatan masih rendah
11. Opini BPK
12. Skor PPH
13. Kontribusi setiap sektor pembentuk PDRB belum optimal
14. Pertumbuhan Industri kecil masih rendah

4.2.4.2 Aspek Daya Saing

Sebagai ikhtiar pemerintah daerah dalam meningkatkan daya saing, beberapa isu yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

1. Nilai tukar petani masih rendah
2. Konflik SARA masih terjadi
3. Angka Kriminalitas belum tertangani secara optimal

4.2.4.3 Aspek Pelayanan Umum

Dalam rangka berupaya memperbaiki pelayanan umum sebagai tugas utama penyelenggaraan pemerintahan, dapat diuraikan beberapa isu dibawah ini :

1. Angka partisipasi murni masih dibawah 100%
2. Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah menurun akibat terjadinya bencana
3. Masih adanya kasus kematian bayi
4. Masih adanya kasus kematian ibu
5. Masih terdapatnya prevalensi kurang gizi
6. Tingginya kasus stunting
7. Belum tercapainya Imunisasi Dasar Lengkap
8. Masih tingginya kasus TBC
9. Persentase jalan mantap masih terbatas
10. Akses terhadap sanitasi layak belum mencapai 100%
11. Akses terhadap air minum layak belum mencapai 100%
12. Masih terbatasnya ruang tebuka hijau
13. Rasio rumah layak huni masih cukup rendah
14. Indeks Risiko Bencana masih rendah
15. Cakupan mitigasi penanggulangan dan pemulihan sarana dan prasarana terdampak bencana belum otpimal

16. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten masih rendah
17. Penegakkan perda belum optimal
18. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial belum optimal
19. Tingkat partisipasi angkatan kerja masih rendah
20. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan masih rendah
21. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi
22. Luas lahan bersertifikat masih rendah
23. Kualitas air sungai masih rendah
24. Mata air mulai berkurang
25. Pengelolaan sampah belum optimal
26. Kepemilikan dokumen kependudukan belum optumal
27. Jumlah LPM aktif rendah
28. Total Fertility Rate tinggi
29. Pelayanan moda transportasi belum lancar

Secara umum, isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Lombok Barat ke depan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Isu Reformasi Birokrasi
2. Isu Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan
3. Isu Penanggulangan Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pendapatan
4. Isu Pembangunan Manusia
5. Isu Kelestarian Lingkungan Hidup dan Daerah Rawan Bencana

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5. 1. Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Visi menggambarkan arah pembangunan yang akan dicapai pada masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama lima tahun. Visi akan dicapai melalui misi, tujuan dan sasaran. Visi pembangunan Kabupaten Lombok Barat adalah **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BERPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU".**

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Lombok Barat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat Lombok Barat adalah seluruh warga masyarakat Kabupaten Lombok Barat;
2. Amanah, artinya memiliki birokrasi yang profesional, melayanai serta berbasis transparansi, akuntabilitas yang efisien dan memiliki integritas;
3. Sejahtera, artinya memiliki kemandirian untuk memenuhi kebutuhan hidup layak yang meliputi seluruh kebutuhan pada bidang sosial, budaya, ekonomi dan infrastuktur secara berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Berprestasi, artinya memiliki kemampuan untuk berinovasi dan daya saing di tingkat regional maupun nasional.

5. 2. Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan serta tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, melayani serta berbasis transparansi , akuntabilitas yang efisien dan memiliki Integritas;

2. Meningkatkan dan memantapkan akses infrastruktur wilayah dan pemenuhan layanan dasar secara berkeadilan.
3. Mewujudkan konektivitas perekonomian antar pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi yang kondusif dan keberpihakan pada masyarakat
4. Meningkatkan dan memantapkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya serta berdaya saing.
5. Meningkatkan dan memperkuat sinkronisasi dan sinergi pembangunan daerah untuk mempercepat capaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kelima misi tersebut akan dicapai berlandaskan nilai – nilai agama dan budaya lokal serta semangat kolektif masyarakat Lombok Barat yang tertuang dalam moto daerah ***"Patut Patuh Patju".***

5. 3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 – 2024 yang selanjutnya akan menjadi acuan dan dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah akan dicapai dalam jangka 5 (lima) tahun atau selama periode kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu – isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara "***SMART" Spesific, Measureble, Achievable, Realistic*** dan ***Time Bound.***

Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Lombok Barat

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																
MISI		TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR		SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET					KONDISI AKHIR
										2020	2021	2022	2023	2024	
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, melayani serta berbasis transparansi, akuntabilitas yang efisien dan memiliki integritas		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	INDEKS REFORMASI BIROKRASI				Indeks	64,00	68,00	72,00	76,00	80,00	84,00	84,00
				1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	79,02	82,89	85,27	87,65	90,03	91,81	91,81
				1.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1.2.1	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				1.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1.3.1	Nilai AKIP Daerah	Nilai	B (62,60)	BB (71,00)	BB (73,00)	BB (75,00)	A (81,00)	A (83,5)	A (83,5)
2	Meningkatkan dan memantapkan akses infrastruktur wilayah dan		Meningkatnya Konektivitas antar wilayah dan akses infrastruktur dasar	INDEKS KEBERMANFAATAN INFRASTRUKTUR				Persen	77,39	79,29	81,79	84,30	86,83	88,69	88,69
				2.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah	2.1.1	Persentase Wilayah Terhubung Dengan Pusat Perekonomian	Persen	69,56	76,55	80,62	86,24	91,86	97,47	97,47

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 2019

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																
MISI		TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR		SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET					KONDISI AKHIR
										2020	2021	2022	2023	2024	
	pemenuhan layanan dasar secara berkeadilan			2.2	Meningkatnya akses infrastruktur dasar	2.1.3	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	80,19	97,72	97,97	98,22	98,46	98,69	98,69
						2.2.2	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum	Persen	78,65	79,76	80,32	80,88	81,44	82,00	82,00
3	Mewujudkan konektivitas perekonomian antar pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi yang kondusif dan keberpihakan pada masyarakat		Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	PERTUMBUHAN EKONOMI				Persen	6,58	5,50	5,65	5,75	5,85	6,00	6,00
				3.1	Meningkatnya daya saing sektor ekonomi unggulan	3.1.1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	13,15	13,18	13,45	13,64	14,02	14,45	14,45
						3.1.2	Nilai PDRB Perkapita (ADHK)	Juta Rupiah	17,30	17,83	18,69	19,60	20,55	21,23	21,23
						3.1.3	Nilai Realisasi Investasi								
							PMA	Juta US $	79,00	121,39	133,53	146,88	161,57	177,73	177,73

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)															
MISI		TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR		SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET					KONDISI AKHIR
										2020	2021	2022	2023	2024	
							PMDN (Fasilitas)	Rp. Milyar	288,09	536,12	589,73	648,70	713,57	784,93	784,93
				3.2	Meningkatnya kemandirian ekonomi masyarakat	3.2.1	Indeks Gini	Indeks	0,324	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3
						3.2.2	Persentase Angka Kemiskinan	Persen	15,2	15,00	14,50	14,00	13,00	10,75	10,75
						3.2.3	TPT	Persen	3,28	3,20	3,00	2,90	2,80	2,75	2,75
4	Meningkatkan dan memantapkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya serta berdaya saing		Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA				Persen	67,18	67,78	68,38	68,98	69,58	70,10	70,10
				4.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	4.1.1	UHH	Tahun	66,16	66,84	67,20	67,56	67,92	68,18	68,18
				4.2	Meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan	4.2.1	RLS	Tahun	6,16	6,25	6,50	6,70	7,00	7,19	7,19
						4.2.2	HLS	Tahun	13,36	13,20	13,50	13,70	13,90	14,08	14,08
				4.3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan	4.3.1	Kabupaten Layak Anak	Skor (Persen)	10,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	70,00
						4.3.2	IPG	Persen	88,93	89,00	90,00	90,30	91,00	91,50	91,50

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																
MISI		TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR		SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET					KONDISI AKHIR
										2020	2021	2022	2023	2024	
					perlindungan anak										
5	Meningkatkan dan memperkuat sinkronisasi dan sinergi pembangunan daerah untuk mempercepat capaian tujuan pembangunan		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP				Indeks	54,67	55,41	56,17	57,01	57,76	58,57	58,57
				5.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	5.1.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persen	54,67	55,41	56,17	57,01	57,76	58,57	58,57
				INDEK RISIKO BENCANA DAERAH				Indeks	158,30	150,39	142,87	135,72	128,94	123,58	123,58
				5.2	Menurunnya Risiko Bencana	5.3.1	Indeks Risiko Bencana Daerah	Indeks	158,30	150,39	142,87	135,72	128,94	123,58	123,58

Dari lima misi yang telah ditetapkan, dirumuskan beberapa tujuan yang akan dicapai dalam 5 (Lima) tahun kedepan sebagaimana tercantum dalam tabel diatas. Tujuan yang telah dirumuskan dilengkapi dengan ukuran keberhasilan dan disertai target. Berikut adalah tujuan tersebut beserta ukuran keberhasilan dan target capaiannya :

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih dengan Indeks Reformasi Birokrasi sebagai ukuran keberhasilan dan target pada akhir periode RPJMD sebesar 84,00 persen;
2. Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan akses infrastruktur dasar dengan ukuran keberhasilan Indeks Kebermanfaatan Infrastruktur dengan target pada akhir periode RPJMD sebesar 88,69 persen;
3. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi dengan target 6,80 persen pada akhir periode RPJMD;
4. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang tergambar dalam pencapaian Indeks Pembangunan Manusia dengan target 70,10 persen pada akhir periode RPJMD;
5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Menurunnya Risiko Bencana Daerah dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Risiko Bencana Daerah sebagai ukuran keberhasilannya dengan target masing – masing sebesar 58,57 untuk IKLH dan 123,58 untuk IRBD pada akhir periode RPJMD.

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Upaya mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Lombok Barat dengan jargon LOBAR MANTAP memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran – sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Rumusan strategi dan arah kebijakan dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lombok Barat pada tabel berikut :

Tabel 6. 1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 – 2024

VISI TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BERPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU			
MISI I : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, MELAYANI SERTA BERBASIS TRANSPARANSI, AKUNTABILTAS YANG EFISIEN DAN MEMILIKI INTEGRITAS			
TUJUAN	**SASARAN STRATEGIS**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	1.1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.1.1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi	1.1.1.1 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur serta kualitas sarana dan prasarana publik
			1.1.1.2 Meningkatkan Pemahaman Masyarakat melalui Sosialisasi dan edukasi
			1.1.1.3 Meningkatkan peran dan koordinasi seluruh stakeholder (Toga, Toma, Aparat Penegak Hukum) dalam penyelesaian konflik
			1.1.1.4 Pemutakhiran data/Inventarisasi tanah negara
			1.1.1.5 Meningkatkan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik
			1.1.1.6 Meningkatkan akuasi dan penyediaan data sektoral
			1.1.1.7 Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan literasi masyarakat
			1.1.1.8 Meningkatkan pengelolaan arsip secara baku
			1.1.1.9 Meningkatkan kapasitas ASN melalui pendidikan dan pelatihan
	1.2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah		1.1.2.1 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah
	1.3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja		1.1.3.1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			1.1.3.2 Menerapkan penggunaaan Sistem Informasi Perencanaan berbasis elektronik (e-planning)
			1.1.3.3 Meningkatkan pengembangan inovasi daerah
			1.1.3.4 Meningkatkan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
MISI II			
MENINGKATKAN DAN MEMANTAPKAN AKSES INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR SECARA BERKEADILAN			
2. Meningkatnya Konektivitas antar wilayah dan akses infrastruktur dasar	2.1. Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah	2.2.1 Meningkatkan Konektivitas antar wilayah dan akses infrastruktur dasar melalui penyediaan sarana dan prasarana jalan, moda transportasi, rumah layak huni, air minum layak dan sanitasi layak	2.1.1.1 Meningkatkan jalan mantap
			2.1.1.2 Meningkatkan ketersediaan moda transportasi
			2.1.1.3 Meningkatkan kerjasama pemerintah dengan badan usaha
	2.2 Meningkatnya akses infrastruktur dasar		2.2.1.1 Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni
			2.2.1.2 Meningkatkan akses rumah tangga dengan sanitasi layak
			2.2.1.3 Meningkatkan akses rumah tangga dengan air minum layak
MISI III			
MEWUJUDKAN KONEKTIFITAS PEREKONOMIAN ANTARA PELAKU USAHA DAN MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INVESTASI YANG KONDUSIF DAN KEBERPIHAKAN PADA MASYARAKAT			
3. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	3.1 Meningkatnya daya saing sektor ekonomi unggulan	3.1.1 Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui kemitraan usaha dan iklim investasi yang kondusif	3.1.1.1 Mengoptimalkan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			3.1.1.2 Meningkatkan kemitraan antar pelaku usaha, pemberdayaan masyarakat dan menciptakan Wirausaha baru, serta menyediakan sarana prasarana perekonomian kreatif
			3.1.1.3 Keberpihakan terhadap pengembangan dan penggunaan produk lokal
			3.1.1.4 Meningkatkan produksi pertanian, peternakan, perikanan dan kunjungan wisatawan
			3.1.1.5 Meningkatkan produksi perikanan melalui diversifikasi usaha perikanan kelautan
			3.1.1.6 Mendorong pengembangan industri olahan, industri kreatif dan industri permesinan
			3.1.1.7 Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Destinasi Wisata, promosi dan pemasaran pariwisata serta mendorong pertumbuhan desa wisata
			3.1.1.8 Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan penyederhanaan proses perijinan serta penggunaan IT dalam pelaksanaan proses perijinan
			3.1.1.9 Meningkatkan kerjasama pemerintah dengan badan usaha
			3.1.1.10 Meningkatkan penyediaan air baku
	3.2 Meningkatnya kemandirian ekonomi masyarakat		3.2.1.1 Menyediakan sarana prasarana perekonomian kreatif secara proporsional
			3.2.1.2 Meningkatkan kapasitas dan pemanfaatan potensi desa dalam mengembangkan perekonomian masyarakat

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
						3.2.1.3	Meningkatkan sinergitas program penanggulangan kemiskinan
						3.2.1.4	Meningkatkan jangkauan pelayanan dengan peningkatan sarana prasarana pendukung
						3.2.1.5	Meningkatkan keberagaman pola konsumsi masyarakat serta meningkatkan kewaspadaan pangan
						3.2.1.6	Meningkatkan pelatihan produktivitas dan pengembangan penempatan tenaga kerja
						3.2.1.7	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya transmigrasi swakarsa
						3.2.1.8	Meningkatkan pembinaan pemuda dan olah raga
MISI IV							
MENINGKATKAN DAN MEMANTAPKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG SEHAT, CERDAS DAN BERBUDAYA SERTA BERDAYA SAING							
4.	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat	4.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	4.1.1	Meningkatkan Usia Harapan Hidup	4.1.1.1	Meningkatan kualitas pelayanan bagi ibu hamil dan melahirkan, bayi, balita, anak sekolah, remaja, dan lansia
						4.1.1.2	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan gizi masyarakat
						4.1.1.3	Meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan
						4.1.1.4	Meningkatkan kerjasama pemerintah dengan badan usaha
		4.2.	Meningkatnya kualitas pendidikan	4.2.1	Meningkatkan Rata - Rata Lama Sekolah	4.2.1.1	Meningkatkan kualitas pendidikan
						4.2.1.2	Meningkatkan akses pendidikan yang berkeadilan dan terjangkau
						4.2.1.3	Menjaga kelestarian Cagar Budaya

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
		4.3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	4.3.1	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender	4.3.1.1	Meningkatkan upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak
						4.3.1.2	Meningkatkan pengendalian kelahiran penduduk
						4.3.1.3	Meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga eksekutif
MISI V							
MENINGKATKAN DAN MEMPERKUAN SINKRONISASI DAN SINERGI PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK MEMPERCEPAT CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN							
5.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah	5.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	5.1.1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya alam melalui pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran air, udara dan tanah serta pengendalian pemanfaatan tata ruang	5.1.1.1	Menurunkan pencemaran air sungai
						5.1.1.2	Meningkatkan perlindungan mata air
						5.1.1.3	Meningkatkan pengelolaan sampah
						5.1.1.4	Meningkatkan kerjasama pemerintah dengan badan usaha
						5.1.1.5	Meningkatkan Pengendalian pemanfataan ruang
		5.3	Menurunnya Risiko Bencana	5.3.1	Meningkatkan Upaya Mitigasi Bencana	5.3.1.1	Peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan risiko bencana

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2005-2025, menetapkan sasaran pokok dalam 5 (lima) misi pembangunan jangka panjang dan ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas pada masing-masing misi dipersempit sebagai prioritas utama 5 (lima) tahun perencanaan. RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 – 2024 sebagai pelaksanaan tahapan ke 4 RPJPD.

6.1. RPJMD Kabupaten Lombok Barat ke-4 (2019 – 2024)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke 3, RPJMD ke 4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Lombok Barat yang religius, sejahtera dan mandiri melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang, struktur perekonomian yang kokoh, didukung SDM berkualitas, meningkatknya kemampuan IPTEK, semakin tinggi dan meratanya pendapatan masyarakat, infrastruktur yang berkelanjutan dan terpadu, pemeliharaan keragaman hayati dan sumber daya alam.

Sumber Daya Manusia yang berkualtias ditandai dengan meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajeman pendidikan yang efisien dan efektif. Selain itu kesejahteraan masyarakat juga membaik dengan meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender serta kejahteraan dan perlindungan anak serta kemampuan daya beli masyarakat yang meningkat.

Semakin tinggi dan meratanya pendapatan masyarakat melalui terpadunya agro industri, kelautan dan sumberdaya alam lainnya secara berkelanjutan, terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerjasama pemerintah dengan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan pertanian diarahkan pada penataan pariwisata, optimalisasi penerapan industri manufaktur dan pemanfaatan teknologi informasi serta meningkatkan inovasi daerah.

Semakin baiknya daya dukung lingkungan sebagai salah satu indikasi keberhasilan daripada pengendalian penduduk dan semakin serasinya pemanfaatan ruang yang konsisten akan memberikan arah

bagi pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Lombok Barat. Di sisi lain, upaya pelestarian dan rehabilitasi sumberdaya alam yang terbarukan seperti hutan, lahan pertanian dan perikanan semakin intensif. Serta meningkatkan ketahanan daerah terhadap penanganan bencana. Hal tersebut akan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang.

Pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada pemulihan pasca bencana, pemenuhan SPM dan pemantapan sarana prasarana publik yang berorientasi pada pelayanan investasi. Selain itu juga diupayakan kemitraan dengan pihak swasta untuk penyediaan jaringan komunikasi dan informasi, transportasi darat dan laut, penyediaan energi listrik dan penyediaan air minum bagi masyarakat.

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan

Strategi yang dilaksanakan untuk mendukung kebijakan, sebagai arah dalam merumuskan program dan kegiatan untuk mempercepat pencapaian sasaran misi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tahun 2019 – 2024 adalah dengan menetapkan prioritas pembangunan tahunan. Adapun secara umum arah kebijakaan prioritas pembangunan tahunan Kabupaten Lombok sebagai berikut :

Tabel 6. 2 Arah Kebijakan Tahunan

Arah Kebijakan				
Tahun 1	**Tahun 2**	**Tahun 3**	**Tahun 4**	**Tahun 5**
Pembangunan ekonomi dalam rangka pemulihan pasca bencana dan pemenuhan SPM yang berwawasan lingkungan	Pembangunan pariwisata berbasis desa, dan pemenuhan SPM yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Peningkatan daya saing daerah disegala bidang dengan meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi	Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi penerapan industri manufaktur dan pemanfaatan informasi teknologi	Pemantapan perumbuhan ekonomi, pertumbuhan industri manufaktur dan reformasi birokrasi

Selanjutnya dirumuskan program pembangunan daerah dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. Kabupaten Lombok Barat merumuskan program pembangunan daerah dengan mekanisme program besar yang memayungi beberapa program perangkat daerah yang mendukung

ketercapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Berikut adalah rumusan program pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat.

Tabel 6. 3 Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Lombok Barat

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																	
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
MISI I	**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, melayani serta berbasis transparansi, akuntabilitas yang efisien dan memiliki integritas**																
T.1.1	**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**64,00**	**68,00**		**72,00**		**76,00**		**80,00**		**84,00**		**84,00**		
S.1.1.1	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**																
P1.1.1.1	**Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**	**IKM**	**Persen**	**79,02**	**82,89**	**284.730,24**	**85,27**	**157.506,62**	**87,65**	**177.186,60**	**90,03**	**190.618,04**	**91,81**	**210.551,79**	**91,81**	**1.020.593,29**	
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	12.935,65	100	13.107,59	100	13.508,44	100	13.913,12	100	14.330,56	100	67.795,36	DIKBUD
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100	2.134,74	100	1.292,00	100	1.356,10	100	1.424,56	100	1.497,53	100	7.704,92	
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase pelayanan pendidikan	Persen	100	100	1.266,86	100	1.241,00	100	1.303,05	100	1.368,20	100	1.436,61	100	6.615,72	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya disilpin aparatur	Persen	100	100	300,00	100	200,00	100	250,00	100	300,00	100	350,00	100	1.400,00	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100	100	350,00	100	300,00	100	350,00	100	400,00	100	450,00	100	1.850,00	

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																		
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
	Dinas Kesehatan																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	3.801,58	100	4.039,22	100	4.216,44	100	4.342,94	100	4.473,22	100	20.873,40	DIKES
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	1.789,70	100	2.404,74	100	1.415,98	100	4.190,28	100	4.315,99	100	14.116,69	
	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur	Persen	100	100	69,00	100	36,05	100	109,13	100	38,25	100	39,39	100	291,82	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100	100	60,69	100	62,51	100	64,38	100	66,31	100	68,30	100	322,19	
	RSUD Patut Patuh Patju																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	90	100	2.450,00	100	2.849,36	100	2.949,08	100	3.052,30	100	3.159,13	100	14.459,87	RSUD TRIPAT
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persen	90	100	765,00	100	853,88	100	883,76	100	914,69	100	946,71	100	4.364,03	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin apratur	Persen	100	100	30,00	100	31,05	100	32,14	100	33,26	100	34,43	100	160,87	
	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas	Persen	80	100	100,00	100,00	103,50	100	107,12	100	110,87	100	114,75	100	536,25	

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																	
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
		sumber daya aparatur															
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase sumber daya aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas	Persen	100	100	30,00	100	31,05	100	32,14	100	33,26	100	34,43	100	160,87	
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase standar pelayanan kesehatan yang disusun selama 1 tahun	Persen	100,00	100	35,00	100	36,23	100	37,49	100	38,81	100	40,16	100	187,69	
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	90,00	100,00	1.828,56	100,00	1.846,84	100	1.865,31	100	1.883,96	100	1.902,80	100	9.327,48	DPUTR
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	90,00	100,00	133.182,40	100,00	10.562,07	100	15.867,69	100	21.176,37	100	21.488,13	100	202.276,66	
	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	Persen	100,00	100,00	31,63	100,00	31,94	100	32,26	100	32,58	100	32,91	100	161,32	
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	Persentase kenaikan SDM penyediaan jasa konstruksi yang kompeten	Persen	50,00	52,00	538,22	54,00	543,60	56	549,04	57	554,53	59	560,07	59	2.745,47	

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																		
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
	Dinas Perumahan dan Permukiman																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	0,75	1	330,15	1	333,45	1	336,79	1	340,16	1	343,56	0,75	1.684,11	DISPERKIM
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	75,00	75	627,49	75	633,76	75	640,10	75	646,50	75	652,97	75	3.200,82	
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Penanganan kejadian terkait konflik sosial	Persen	100,00	100	1.493,53	100,00	1.538,33	100	1.584,48	100	1.632,02	100	1.680,98	100	7.929,33	BAKESBANGPOL
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan Wasbang	Persen	100,00	100	333,49	100,00	512,40	100	512,40	100	512,40	100	512,40	100	2.383,08	
	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase masyarakat yang paham terhadap aspek-aspek politik	Persen	100,00	100	141,25	100,00	145,49	100	149,85	100	154,35	100	158,98	100	749,91	
	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS	Persentase masyarakat yang paham terhadap pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran	Persen	100,00	100	131,11	100,00	135,04	100	139,09	100	143,27	100	147,56	100	696,07	

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																	
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
		gelap narkoba (P4GN)															
	Program Ketahanan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase anggota organisasi kemasyarakatan yang paham tentang keormasan	Persen	100,00	100	41,59	100,00	42,84	100	44,12	100	45,45	100	46,81	100	220,82	
	Program Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya	Persentase ketahanan ekonomi sosial budaya	Persen	100	100	19,37	100	19,95	100	20,54	100	21,16	100	21,80	100	102,81	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administasi perkantoran	Persen	100,00	100	453,23	100,00	466,83	100	480,84	100	495,26	100	510,12	100	2.406,29	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	100	172,64	100,00	562,77	100	183,52	100	174,40	100	179,92	100	1.273,26	
	Satuan Polisi Pamong Praja																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	100,00	1.004,40	100,00	1.054,62	100	1.107,35	100	1.162,72	100	1.220,85	100	5.549,94	SATPOL PP
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	90,00	90,00	745,00	90,00	782,25	90	821,36	90	862,43	90	905,55	90	4.116,60	
	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur	Persen	95,00	95,00	206,00	95,00	216,30	95	227,12	95	238,47	95	250,39	95	1.138,28	

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																	
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100,00	100,00	120,00	100,00	126,00	100	132,30	100	138,92	100	145,86	100	663,08	
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibmas dan Konflik Sosial	Persen	90,00	80,00	398,00	82,00	417,90	85	438,80	87	460,73	90	483,77	90	2.199,20	
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Cakupan Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100,00	90,00	1.212,00	90,00	1.272,60	90	1.336,23	90	1.403,04	90	1.473,19	90	6.697,07	
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat per 10.000 Penduduk	Persen	98	16,4930837	115,00	19,48575703	120,75	22,381977	126,79	25,184042	133,13	27,894109	139,78	0,72	635,45	
	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persentase Pelaksanaan Penertiban / Operasi Pekat	Persen	80,00	100,00	150,00	100,00	157,50	100,00	165,38	100,00	173,64	100,00	182,33	100,00	828,84	
	Program Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati	Persentase pelanggaran PERDA yang ditangani	Persen	6,00	98,00	677,80	98,00	711,69	98	747,27	98	784,64	98	823,87	98	3.745,27	
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	90,00	100,00	442,70	100,00	442,70	100	442,70	100	442,70	100	442,70	100	2.213,50	BPBD

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																		
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	90,00	100,00	600,00	100,00	700,00	100	900,00	100	550,00	100	550,00	100	3.300,00	
	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur	Paket	90,00	100,00	120,00	100,00	80,00	100	120,00	100	80,00	100	80,00	100	480,00	
	Dinas Pemadam Kebakaran																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	100,00	254,77	100,00	269,00	100	411,58	100	429,16	100	509,32	100	1.873,83	DISDAMKAR
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	211,82	100,00	221,10	100	312,05	100	366,96	100	476,78	100	1.588,71	
	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	102,00	100	124,05	100	147,20	100	171,51	100	644,77	
	Dinas Sosial																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	100,00	402,73	100,00	406,71	100	407,41	100	407,51	100	408,51	100	2.032,86	DINSOS
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	396,50	100,00	403,50	100	374,50	100	365,00	100	325,50	100	1.865,00	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Disiplin Aparatur	Persen	100,00	100,00	25,00	100,00	12,00	100	28,00	100	15,00	100	37,50	100	117,50	

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																	
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
	Dinas Tenaga Kerja																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung tugas dan fungsi OPD	Persen	100,00	100,00	438,40	100,00	453,19	100	467,37	100	481,94	100	497,92	100	2.338,82	DISNAKER
	Program Peningkatan Sarana dan Prarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	880,00	100,00	1.275,85	100	1.316,88	100	1.326,68	100	1.336,78	100	6.136,19	
	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	Persen	100,00	100,00	15,00	100,00	5,00	100	5,00	100	5,00	100	5,00	100	35,00	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100,00	100,00	50,00	100,00	50,00	100	50,00	100	50,00	100	50,00	100	250,00	
	Dinas Ketahanan Pangan																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	90,00	100,00	327,81	100,00	339,28	100	351,15	100	363,45	100	376,17	100	1.757,85	DIKPANGAN
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	90,00	100,00	197,98	100,00	204,91	100	212,08	100	219,50	100	227,19	100	1.061,66	

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																		
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
	Dinas Lingkungan Hidup																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	100,00	341,00	100,00	352,94	100	365,29	100	378,07	100	391,31	100	1.828,60	DLH
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	195,70	100,00	202,55	100	209,64	100	216,98	100	224,57	100	1.049,43	
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	555,92	100,00	559,05	100	564,10	100	567,90	100	570,60	100	2.817,57	DISDUKCAPIL
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	977,00	100,00	908,00	100	985,60	100	875,50	100	697,70	100	4.443,80	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	100,00	253,34	100,00	260,94	100	268,77	100	276,83	100	285,14	100	1.345,02	DPMD
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	275,41	100,00	283,67	100	292,18	100	300,95	100	309,98	100	1.462,19	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur	Persen	100,00	100,00	10,00	100,00	10,30	100	10,61	100	10,93	100	11,26	100	53,09	

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																		
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas aparatur	Persen	100,00	100,00	20,00	100,00	20,60	100	21,22	100	21,85	100	22,51	100	106,18	
	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	90,00	100,00	318,92	100,00	330,08	100	341,63	100	353,59	100	365,97	100	1.710,19	DP2KBP3A
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	90,00	100,00	324,56	100,00	335,92	100	347,68	100	359,85	100	372,44	100	1.740,44	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	90,00	100,00	107,18	100,00	110,93	100	114,81	100	118,83	100	122,99	100	574,75	
	Dinas Perhubungan																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	100,00	545,54	100,00	564,64	100	584,40	100	604,85	100	626,02	100	2.925,45	DISHUB
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	65,00	100,00	280,17	100,00	289,97	100	300,12	100	310,63	100	321,50	100	1.502,39	
	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur	Persen	0,00	100,00	130,00	100,00	134,55	100	139,26	100	144,13	100	149,18	100	697,12	

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																		
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
	Dinas Komunikasi dan Informatika																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	90,00	100,00	463,24	100,00	479,46	100	496,24	100	513,61	100	531,58	100	2.484,13	DISKOMINFO
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Bulan	95,00	100,00	216,46	100,00	224,04	100	231,88	100	240,00	100	248,40	100	1.160,77	
	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur	Persen	80,00	100,00	68,71	100,00	71,12	100	73,61	100	76,18	100	78,85	100	368,47	
	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Persentase tingkat keamanan jaringan komunikasi dan informasi	Persen	100,00	100,00	67,89	100,00	70,27	100,00	72,73	100,00	75,27	100,00	77,91	100	364,06	
	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Jumlah SDM yang mengikuti diklat profesi	Orang	100,00	3,00	167,35	3,00	173,21	5,00	179,27	5,00	185,54	2,00	192,04	2	897,41	
	Program kerjasama informasi dengan mas media	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat di wilayah kabupaten lombok barat	Kelompok	100,00	25,00	280,07	30,00	289,88	35	300,02	40	310,52	45	321,39	45	1.501,89	
	Program Peningkatan Pelayanan dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah Kecamatan di wilayah kabupaten Lombok Barat	Persen	100,00	2,00	2.182,87	2,00	2.259,27	2	2.338,34	2	2.420,18	2	2.504,89	2	11.705,54	

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																	
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
		yang terlayani Informasi															
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase wilayah kabupaten lombok barat yang dijangkau oleh layanan komunikasi dan informasi	Persen	80,00	90,00	781,79	98,00	809,15	99	837,47	100	866,79	100	897,12	100	4.192,32	
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase Jenis Data Sektoral yang dipublikasikan	Persen	60,00	80,00	322,49	85,00	333,77	90	345,46	95	357,55	100	370,06	100	1.729,33	
	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	100,00	512,00	100,00	508,65	100	527,87	100	552,00	100	569,00	100	2.669,52	DISKOP UKM
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	349,70	100,00	385,00	100	389,00	100	394,00	100	397,00	100	1.914,70	
	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur	Persen	100,00	100,00	70,00	100,00	65,00	100	67,00	100	74,00	100	78,00	100	354,00	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persen	100,00	100,00	35,00	100,00	25,00	100	30,00	100	32,00	100	35,00	100	157,00	

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																		
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	80,00	100,00	505,04	100,00	522,72	100	541,01	100	559,95	100	579,55	100	2.708,28	DPMPTSP
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	80,00	100,00	205,84	100,00	213,04	100	220,50	100	228,22	100	236,21	100	1.103,81	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur	Persen	80,00	100,00	0,00	100,00	50,00	100	51,50	100	53,05	100	54,64	100	209,18	
	Program Pendataan, Advokasi, Informasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Meningkatkan pemahaman masyarakat & Dunia Usaha tentang Perijinan	Persen	80,00	100,00	115,75	100,00	119,80	100	123,99	100	128,33	100	132,82	100	620,68	
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan Non Usaha	Nilai PAD Meningkat	PAD	75,00	80,00	59,83	83,00	61,92	85,00	64,09	87,00	66,33	90,00	68,65	90	320,83	
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan Usaha	Penerbitan Ijin Usaha	Jumlah Ijin	75,00	80,00	155,32	85,00	160,75	85	166,38	90	172,20	90	178,23	90	832,88	
	Dinas Pemuda dan Olahraga																
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Pelayanan administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	485,09	100,00	499,64	100	514,63	100	530,07	100	545,97	100	2.575,41	DISPORA
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Ketersediaan sarana dan	Persen	100,00	100,00	325,71	100,00	335,48	100	521,73	100	355,20	100	365,85	100	1.903,98	

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																	
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
		prasarana aparatur															
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase disiplin aparatur	Persen	100,00	100,00	15,00	100,00	15,45	100	15,91	100	16,39	100	16,88	100	79,64	
	Peningkatan Kapasitas Sumbef Daya Aparatur	Presentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100,00	100,00	6,00	100,00	6,18	100	6,37	100	6,56	100	6,75	100	31,85	
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan																
	Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Persentase tingkat minat baca masyarakat	Persen	8,48	8,48	1.080,81	8,52	1.113,24	8,58	1.146,63	8,63	1.181,03	8,67	1.216,47	8,67	5.738,19	DISARPUS
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	100,00	499,99	100,00	670,98	100	691,11	100	711,84	100	733,20	100	3.307,11	
	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	674,61	100,00	540,34	100	1.291,33	100	300,07	100	309,07	100	3.115,42	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur	Persen	100,00	100,00	22,48	100,00	24,77	100	25,51	100	26,28	100	27,07	100	126,11	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100,00	100,00	106,86	100,00	127,18	100	130,99	100	134,92	100	138,97	100	638,92	
	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Persentase sistem database administrasi kearsipan	Persen	100,00	100,00	14,90	100,00	15,35	100,00	15,81	100,00	16,28	100,00	16,77	100	79,11	

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																	
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
	Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Prosentase dokumen/arsip daerah yang terselamatkan dan terlestarikan	Persen	100,00	100,00	152,43	100,00	157,00	100	161,71	100	166,56	100	171,56	100	809,27	
	Program Pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana kearsipan	Jumlah Perangkat Daerah (OPD) yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	OPD	27,00	30,00	139,20	34,00	143,38	38,00	147,68	41,00	152,11	43,00	156,67	43	739,03	
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase OPD yang mengikuti sosialisasi /penyuluhan kearsipan	Persen	100,00	100,00	73,50	100,00	75,71	100,00	77,98	100,00	80,32	100,00	82,73	100	390,23	
	Dinas Kelautan dan Perikanan																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	100,00	550,47	100,00	577,99	100	606,89	100	637,24	100	669,10	100	3.041,70	DISLUTKAN
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	65,00	70,00	330,52	75,00	346,55	80	423,88	100	382,07	100	463,67	100	1.946,70	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur	Persen	100,00	100,00	30,00	0	0	100	31,50	0	0	100	33,08	100	94,58	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100,00	100,00	20,00	100,00	21,00	100	22,05	100	23,15	100	24,31	100	110,51	

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																		
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
	Dinas Pariwisata																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	90,00	100,00	559,50	100,00	590,63	100	623,88	100	657,75	100	691,50	100	3.123,25	DISPAR
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	100,00	100,00	247,00	100,00	897,10	100	307,20	100	342,30	100	277,40	100	2.071,00	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur	Persen	100,00	100,00	2,50	100,00	32,60	100	2,70	100	2,80	100	2,90	100	43,50	
	Dinas Pertanian																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	100,00	1.204,49	100,00	1.213,84	100	1.225,98	100	1.238,24	100	1.250,62	100	6.133,17	DIPERTA
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	661,42	100,00	669,30	100	675,99	100	682,75	100	689,58	100	3.379,05	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100,00	100,00	10,12	100,00	10,30	100	10,40	100	10,51	100	10,61	100	51,94	
	Program Pengembangan Perencanaan dan Statistik Pertanian	Persentase ketersediaan data perencanaan	Persen	100,00	100,00	56,31	100,00	58,00	100	58,58	100	59,17	100	59,76	100	291,82	

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																		
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
		dan statistik pertanian															
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	100,00	621,46	100,00	684,06	100	684,06	100	684,06	100	684,06	100	3.357,71	DISPERINDAG
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	1.710,00	100,00	580,41	100	580,41	100	580,41	100	580,41	100	4.031,64	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur	Persen	100,00	100,00	25,00	100,00	31,46	100	31,46	100	31,46	100	31,46	100	150,83	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100,00	100,00	20,00	100,00	45,34	100	45,34	100	45,34	100	45,34	100	201,36	
	Program Pelayanan Kemetrologian	Persentase kepuasan terhadap Pelayanan Kemetrologian	Persen	76,00	77,00	370,00	78,00	365,00	79	365,00	80	365,00	81	365,00	81	1.830,00	
	Sekretariat Daerah																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	100,00	5.885,68	100,00	6.372,25	100	6.372,25	100	6.372,25	100	6.372,25	100	31.374,68	SETDA
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil	Persen	100,00	100,00	2.462,00	100,00	2.882,82	100	2.882,82	100	2.882,82	100	2.882,82	100	13.993,30	

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																	
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
		yang terlaksana baik															
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	5.326,60	100,00	5.201,60	100	5.201,60	100	5.201,60	100	5.201,60	100	26.133,01	
	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur	Persen	100,00	100,00	250,00	100,00	250,00	100	250,00	100	250,00	100	250,00	100	1.250,00	
	Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi Serta Penggunaan Media Massa	Persentase Kebijakan Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	Persen	100,00	100,00	1.350,00	100,00	1.600,00	100	1.600,00	100	1.600,00	100	1.600,00	100	7.750,00	
	Program Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Persentase pelaksanaan PATEN	Persen	100,00	100,00	75,00	100,00	75,00	100	75,00	100	75,00	100	75,00	100	375,00	
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase perangkat daerah yang meningkat	OPD	10,00	10,00	266,80	10,00	296,80	10	296,80	10	296,80	10	296,80	10	1.453,99	
	Program Pengendalian Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan	Persen	100,00	100,00	840,00	100,00	950,00	100	950,00	100	950,00	100	950,00	100	4.640,00	
	Program Fasilitasi Pengadaan Barang Jasa	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang akuntabel, efektif dan efisien	Persen	100,00	100,00	830,00	100,00	900,00	100	900,00	100	900,00	100	900,00	100	4.430,00	

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																	
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kecamatan dan Kelurahan Berkinerja baik	Persen	100,00	100,00	185,00	100,00	250,00	100	250,00	100	250,00	100	250,00	100	1.185,00	
	Program Fasilitasi Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan administrasi kesejahteraan rakyat yang terfasilitasi	Persen	100,00	100,00	502,00	100,00	575,00	100	575,00	100	575,00	100	575,00	100	2.802,00	
	Program Fasilitasi keagamaan dan kemasyarakatan	Persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang terfasilitasi	Persen	100,00	100,00	750,00	100,00	450,00	100	450,00	100	450,00	100	450,00	100	2.550,00	
	Program pengembangan dan pengendalian perekonomian daerah	Persentase pelaksanaan pengembangan dan pengendalian perekonomian daerah	Persen	100,00	100,00	550,00	100,00	550,00	100	550,00	100	550,00	100	550,00	100	2.750,00	
	Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Persentase kecamatan dan kelurahan berkinerja baik	Persen	100,00	100,00	260,00	100,00	260,00	100	260,00	100	260,00	100	260,00	100	1.300,00	
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase Penyelesaian administrasi pemerintahan tepat waktu	Persen	100,00	100,00	350,00	100,00	350,00	100	350,00	100	350,00	100	350,00	100	1.750,00	
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	persentase pelaksanaan kerjasama antar daerah	Persen	100,00	100,00	298,24	100,00	298,24	100	298,24	100	298,24	100	298,24	100	1.491,18	

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																	
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
	Sekretariat DPRD																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	100,00	3.278,85	100,00	3.389,79	100	3.376,01	100	3.473,28	100	3.552,49	100	17.070,43	SETWAN
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	1.235,21	100,00	1.457,67	100	1.176,98	100	1.379,69	100	1.828,79	100	7.078,33	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur	Persen	100,00	100,00	473,81	100,00	473,81	100	473,81	100	473,81	100	473,81	100	2.369,04	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100,00	100,00	148,30	100,00	148,30	100	148,30	100	148,30	100	148,30	100	741,50	
	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat	Persen	84,00	84,00	20.740,71	84,00	21.403,68	84	21.394,05	84	21.249,33	84	21.379,65	84	106.167,42	
	Kantor Camat Sekotong																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	100,00	273,39	100,00	273,39	100	273,39	100	273,39	100	273,39	100	1.366,97	KANTOR CAMAT SEKOTONG
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	247,74	100,00	247,74	100	247,74	100	247,74	100	247,74	100	1.238,70	

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																		
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur	Persen	0,00	100,00	21,50	100,00	21,50	100	21,50	100	21,50	100	21,50	100	107,50	
	Program Perencanaan Kecamatan	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang diakomodir di APBD tahun n	Persen	50,00	50,00	17,50	50,00	17,50	50	17,50	50	17,50	50	17,50	50	87,50	
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan tugas kecamatan yang difasilitasi	Persen	0,00	100,00	65,00	100,00	65,00	100	65,00	100	65,00	100	65,00	100	325,00	
	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu	Persen	100,00	100,00	207,00	100,00	207,00	100	207,00	100	207,00	100	207,00	100	1.035,00	
	Kantor Camat Lembar																
	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu	Persen	100,00	100,00	23,42	100,00	27,65	100	27,65	100	27,65	100	27,65	100	134,02	KANTOR CAMAT LEMBAR
	Program Perencanaan Kecamatan	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang diakomodir di APBD tahun n	Persen	50,00	50,00	22,75	50,00	24,76	50	24,76	50	24,76	50	24,76	50	121,80	
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraa	Persen	0,00	100,00	158,48	100,00	157,54	100	157,54	100	157,54	100	157,54	100	788,62	

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																	
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
		n tugas kecamatan yang difasilitasi															
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	100,00	348,19	100,00	357,00	100	357,00	100	357,00	100	357,00	100	1.776,19	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	121,00	100,00	282,43	100	282,43	100	282,43	100	282,43	100	1.250,71	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	0,00	100,00	54,50	100,00	46,50	100	46,50	100	46,50	100	46,50	100	240,50	
	Kantor Camat Gerung																
	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu	Persen	100,00	100,00	75,00	100,00	75,00	100	75,00	100	75,00	100	75,00	100	375,00	KANTOR CAMAT GERUNG
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	286,20	100,00	212,57	100	212,57	100	212,57	100	212,57	100	1.136,48	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	114,79	100,00	275,28	100	275,28	100	275,28	100	275,28	100	1.215,91	
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas	Persen	0,00	100,00	106,30	100,00	95,35	100	95,35	100	95,35	100	95,35	100	487,70	

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																	
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
		Kecamatan Yang Terfasiitasi															
	Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan	Persentase pelayanan kelurahan	Persen	100,00	100,00	3.450,00	3,00	3.518,99	3	3.518,99	3	3.518,99	3	3.518,99	3	17.525,98	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Disiplin Aparatur	Persen	0,00	100,00	9,79	100,00	19,00	100	19,00	100	19,00	100	19,00	100	85,79	
	Program Perencanaan Kecamatan	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang diakomodir di APBD tahun n	Persen	50,00	50,00	11,00	50,00	16,50	50	16,50	50	16,50	50	16,50	50	77,00	
	Kantor Camat Labuapi																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	308,80	100,00	318,82	100	327,12	100	336,69	100	346,55	100	1.637,99	KANTOR CAMAT LABUAPI
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	126,00	100,00	110,70	100	115,44	100	120,22	100	123,53	100	595,88	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Disiplin Aparatur	Persen	0,00	100,00	24,00	100,00	24,72	100	25,46	100	26,23	100	27,01	100	127,42	
	Program Perencanaan Kecamatan	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang diakomodir di APBD tahun n	Persen	50,00	50,00	14,00	50,00	14,84	50	15,73	50	16,67	50	17,67	50	78,92	

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																	
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Kecamatan Yang Terfasiitasi	Persen	0,00	100,00	214,23	100,00	222,89	100	231,93	100	241,39	100	251,29	100	1.161,73	
	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu	Persen	100,00	100,00	40,00	100,00	41,20	100	42,44	100	43,71	100	45,02	100	212,37	
	Kantor Camat Kediri																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	351,13	100,00	361,66	100	372,51	100	383,69	100	395,20	100	1.864,18	KANTOR CAMAT KEDIRI
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	193,53	100,00	199,33	100	205,31	100	211,47	100	217,82	100	1.027,46	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Disiplin Aparatur	Persen	0,00	100,00	13,59	100,00	14,00	100	14,42	100	14,90	100	15,41	100	72,33	
	Program Perencanaan Kecamatan	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang diakomodir di APBD tahun n	Persen	50,00	50,00	24,76	50,00	25,50	50	26,27	50	27,06	50	27,87	50	131,46	
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Kecamatan Yang Terfasiitasi	Persen	0,00	100,00	250,99	100,00	258,51	100	266,27	100	274,26	100	282,49	100	1.332,51	

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																	
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu	Persen	100,00	100,00	25,00	100,00	25,75	100	26,52	100	27,32	100	28,14	100	132,73	
	Kantor Camat Kuripan																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Pelayanan administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	313,13	100,00	323,79	100	334,77	100	345,91	100	357,36	100	1.674,95	KANTOR CAMAT KURIPAN
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana	Persen	100,00	100,00	190,48	100,00	118,61	100	158,17	100	136,42	100	114,10	100	717,79	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peresntase meningkatnya dispilin aparatur	Persen	0,00	100,00	34,38	100,00	36,29	100	44,92	100	47,00	100	49,16	100	211,75	
	Program Perencanaan Kecamatan	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan Yang Diakomodir di APBD Tahun n	Persen	50,00	50,00	10,00	50,00	11,01	50	12,05	50	13,09	50	14,17	50	60,33	
	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu	Persen	100,00	100,00	109,20	100,00	110,21	100	111,25	100	112,30	100	113,38	100	556,35	
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	persentase kinerja penyelenggaraan tugas kecamatan yang difasilitasi	Persen	0,00	100,00	180,00	100,00	182,03	100	186,15	100	189,27	100	192,52	100	929,98	

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																		
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
	Kantor Camat Narmada																
	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu	Persen	100,00	100,00	75,00	100,00	77,25	100	79,57	100	81,95	100	84,41	100	398,19	KANTOR CAMAT NARMADA
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	100,00	282,88	100,00	291,36	100	300,10	100	309,11	100	318,38	100	1.501,83	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana apratur	Persen	100,00	100,00	163,88	100,00	168,79	100	173,85	100	179,07	100	184,44	100	870,03	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur	Persen	0,00	100,00	10,00	100,00	10,30	100	10,61	100	16,39	100	16,88	100	64,18	
	Program Perencanaan Kecamatan	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan Yang Diakomodir di APBD Tahun n	Persen	50,00	50,00	30,00	50,00	30,90	50	31,83	50	32,78	50	33,77	50	159,27	
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	persentase kinerja penyelenggaraan tugas kecamatan yang difasilitasi	Persen	0,00	100,00	285,00	100,00	293,55	100	302,36	100	311,43	100	320,77	100	1.513,10	
	Kantor Camat Lingsar																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	343,94	100,00	351,13	100	359,97	100	369,16	100	378,71	100	1.802,91	KANTOR CAMAT LINGSAR

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																	
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNGJAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	149,50	100,00	153,99	100	158,60	100	163,36	100	188,26	100	813,72	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Disiplin Aparatur	Persen	0,00	100,00	11,55	100,00	11,90	100	12,26	100	12,63	100	13,00	100	61,34	
	Program Perencanaan Kecamatan	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang diakomodir di APBD tahun n	Persen	50,00	50,00	17,50	50,00	18,03	50	18,57	50	19,12	50	19,70	50	92,91	
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Kecamatan Yang Terfasiitasi	Persen	0,00	100,00	198,23	100,00	204,18	100	210,30	100	216,61	100	223,11	100	1.052,44	
	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu	Persen	100,00	100,00	39,00	100,00	40,17	100	41,38	100	42,62	100	43,89	100	207,06	
	Kantor Camat Gunungsari																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	248,63	100,00	261,24	100	265,24	100	278,82	100	283,06	100	1.336,99	KANTOR CAMAT GUNUNGSARI
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	114,54	100,00	104,02	100	110,58	100	107,79	100	113,60	100	550,53	

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																	
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Disiplin Aparatur	Persen	0,00	100,00	1,55	100,00	9,98	100	10,28	100	10,59	100	10,91	100	43,31	
	Program Perencanaan Kecamatan	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang diakomodir di APBD tahun n	Persen	0,00	50,00	20,59	50,00	16,05	50	16,53	50	17,03	50	17,54	50	87,74	
	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu	Persen	100,00	100,00	61,83	100,00	53,38	100	54,98	100	56,63	100	58,33	100	285,15	
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Kecamatan Yang Terfasiitasi	Persen	0,00	100,00	177,67	100,00	183,37	100	189,25	100	195,34	100	201,63	100	947,26	
	Kantor Camat Batu Layar																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	219,84	100,00	227,92	100	236,33	100	245,09	100	254,21	100	1.183,40	KANTOR CAMAT BATULAYAR
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	130,20	100,00	102,66	100	105,74	100	138,91	100	155,05	100	632,55	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Disiplin Aparatur	Persen	0,00	100,00	31,55	100,00	32,50	100	33,48	100	34,48	100	35,51	100	167,53	

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																		
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
	Program Perencanaan Kecamatan	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang diakomodir di APBD tahun n	Persen	50,00	50,00	18,51	50,00	19,07	50	19,64	50	20,23	50	20,83	50	98,27	
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Kecamatan Yang Terfasiitasi	Persen	0,00	100,00	162,84	100,00	167,73	100	172,76	100	177,94	100	183,28	100	864,54	
	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu	Persen	100,00	100,00	49,39	100,00	50,87	100	52,39	100	53,96	100	55,58	100	262,19	
	Inspektorat Kabupaten																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	100,00	592,28	100,00	684,76	100	708,73	100	733,53	100	713,31	100	3.432,61	INSPEKTORAT
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	87,00	100,00	1.093,52	100,00	800,06	100	828,06	100	857,04	100	887,04	100	4.465,71	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Disiplin Aparatur	Persen	90,00	100,00	28,00	100,00	28,98	100	29,99	100	31,04	100	32,13	100	150,15	
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	100,00	573,40	100,00	590,60	100	608,32	100	626,57	100	645,37	100	3.044,26	BAPPEDA

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																	
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	523,07	100,00	372,76	100	342,74	100	353,03	100	363,62	100	1.955,22	
	Program peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur	Persen	100,00	100,00	55,00	100,00	56,65	100	58,35	100	60,10	100	61,90	100	292,00	
	Badan Pendapatan Daerah																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	100,00	2.414,56	100,00	2.656,02	100	2.921,62	100	3.213,78	100	3.535,16	100	14.741,14	BAPENDA
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase ketersedian sarana dan prasaran aparatur	Persen	65,00	70,00	856,00	75,00	975,60	80	1.073,16	85	1.229,04	90	1.351,94	90	5.485,74	
	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase displin aparatur	Persen	100,00	100,00	50,00	100,00	55,00	100	60,50	100	66,55	100	73,21	100	305,26	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas aparatur pengelola pajak yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM bidang perpajakan.	Persen	60,00	65,00	35,00	70,00	38,50	75	42,35	80	46,59	85	51,24	85	213,68	
	Program Pelayanan Pengaduan dan Informasi Pajak/Retribusi Daerah	Persentase masyarakat atas pelayanan pajak dan Retribusi Daerah	Persen	80,00	85,00	290,99	87,00	320,00	89	352,09	91	387,31	93	426,04	93	1.776,43	

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																	
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah																
	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah Konflik pertanahan yang terfasilitasi penyelesaiannya melalui jalur non Litigasi (Mediasi)	Kasus	3,00	3,00	770,38	3,00	808,90	3	849,34	3	891,81	3	936,40	18	4.256,82	BPKAD
	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah sertifikat tanah aset Pemda yang terbit	Sertifikat	60,00	62,00	20.865,51	100,00	10.855,02	100,00	23.133,74	100,00	27.206,01	100,00	41.028,06	100,00	123.088,34	
	Program pengembangan sistem informasi pertanahan	Tersedianya data base aset dalam Simda BMD	Persen	95,00	100,00	196,51	100,00	248,49	100	255,95	100	263,62	100	271,53	100	1.236,11	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelayanan Adm. Perkantoran	Persen	100	100	1.100,70	100	1.133,72	100	1.167,74	100	1.202,78	100	1.238,86	100	5.843,80	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100	1.760,34	100	2.545,65	100	2.622,02	100	2.700,68	100	4.764,40	100	14.393,09	
	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase displin aparatur	Persen	100,00	100,00	76,25	100,00	38,78	100	41,84	100	45,17	100	90,84	100	292,88	
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Tersedianya sistem informasi berbasis TI	Persen	100,00	100,00	140,29	100,00	147,30	100	154,67	100	162,40	100	170,52	100	775,18	
	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumberdaya Manusia																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	522,74	100,00	535,58	100	548,81	100	562,44	100	579,31	100	2.748,88	BKDPSDM

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																		
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	238,90	100,00	265,64	100	265,61	100	299,23	100	386,26	100	1.455,64	
	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase Penerbitan SK Pensiun	Persen	100,00	100,00	35,00	100,00	36,05	100	37,13	100	38,25	100	39,39	100	185,82	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persnetase Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100,00	100,00	130,00	100,00	133,90	100	137,92	100	142,05	100	146,32	100	690,19	
S.1.1.2	**Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah**																
P.1.1.2.1	**Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah**	**OPINI BPK**	**OPINI**	**WTP**	**WTP**	**7.062,18**	**WTP**	**7.097,67**	**WTP**	**7.133,33**	**WTP**	**7.169,18**	**WTP**	**7.205,20**	**WTP**	**35.667,56**	
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah																
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persen	100,00	100,00	7.062,18	100,00	7.097,67	100	7.133,33	100	7.169,18	100	7.205,20	100	35.667,56	BPKAD
S.1.1.3	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja**																
P.1.1.3.1	**Program Peningkatan AKIP Daerah**	**NILAI AKIP DAERAH**	**Nilai**	**B (60,24)**	**BB (71,00)**	**15.500,68**	**BB (73,00)**	**16.384,69**	**BB (75,00)**	**16.922,56**	**A (81,00)**	**18.005,67**	**A (83,5)**	**19.026,02**	**A (83,5)**	**85.339,62**	
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100,00	100,00	425,00	100,00	375,00	100	400,00	100	450,00	100	500,00	100	2.150,00	DIKBUD

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																		
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
	Dinas Kesehatan																
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100,00	100,00	361,49	100,00	384,83	100	396,38	100	408,27	100	420,51	100	1.971,48	DIKES
	Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patut Patju																
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	80,00	100,00	20,92	100,00	21,65	100	22,41	100	23,20	100	24,01	100	112,19	RSUD TRIPAT
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang																
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	dokumen	30,00	36,00	328,23	36,00	331,51	36	334,83	36	338,18	36	341,56	36	1.674,31	DPUTR
	Dinas Perumahan Dan Permukiman																
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	0,55	0,55	202,49	0,55	204,52	0,55	206,56	0,55	208,63	0,55	210,71	0,55	1.032,92	DISPERKIM
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100,00	100,00	66,83	100,00	68,84	100	70,90	100	73,03	100	75,22	100	354,83	BAKESBANGPOL
	Satuan Polisi Pamong Praja																
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	86,00	100,00	145,00	100,00	152,25	100	159,86	100	167,86	100	176,25	100	801,22	SATPOL PP

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																		
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah																
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	95,00	100,00	134,50	100,00	134,50	100	134,50	100	134,50	100	134,50	100	672,50	BPBD
	Dinas Pemadam Kebakaran																
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100,00	100,00	24,69	100,00	33,37	100	97,00	100	103,91	100	111,17	100	370,14	DISDAMKAR
	Dinas Sosial																
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100,00	100,00	163,03	100,00	166,45	100	171,55	100	176,65	100	176,65	100	854,33	DINSOS
	Dinas Tenaga Kerja																
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100,00	100,00	129,20	100,00	133,73	100	135,21	100	136,73	100	142,30	100	677,18	DISNAKER
	Dinas Ketahanan Pangan																
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	90,00	100,00	70,77	100,00	73,25	100	75,81	100	78,46	100	81,21	100	379,50	DIKPANGAN
	Dinas Lingkungan Hidup																
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100,00	100,00	92,30	100,00	95,53	100	98,87	100	102,33	100	105,92	100	494,96	DLH

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																		
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persen	100,00	100,00	57,97	100,00	58,95	100	69,50	100	60,10	100	60,65	100	307,17	DISDUKCAPIL
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100,00	100,00	47,28	100,00	48,69	100	50,15	100	51,66	100	53,21	100	250,99	DPMD
	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	90,00	100,00	139,33	100,00	144,21	100	149,26	100	154,48	100	159,89	100	747,17	DP2KBP3A
	Dinas Perhubungan																
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	90,00	100,00	88,20	100,00	91,29	100	94,48	100	97,79	100	101,21	100	472,96	DISHUB
	Dinas Komunikasi dan Informatika																
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100,00	100,00	116,70	100,00	120,78	100	125,01	100	129,39	100	133,92	100	625,80	DISKOMINFO
	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah																
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100,00	100,00	190,00	100,00	195,00	100	212,00	100	235,00	100	254,00	100	1.086,00	DISKOP UKM

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																		
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR			
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta		
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	80,00	100,00	87,56	100,00	90,63	100	93,80	100	97,08	100	100,48	100	469,55	DPMPTSP
	Dinas Pemuda dan Olahraga																	
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100,00	100,00	36,64	100,00	33,34	100	34,34	100	40,03	100	41,24	100	185,58	DISPORA
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan																	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100,00	100,00	88,27	100,00	89,37	100	92,05	100	94,81	100	97,66	100	462,17	DISARPUS
	Dinas Kelautan dan Perikanan																	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100,00	100,00	182,56	100,00	191,69	100	201,27	100	211,33	100	221,90	100	1.008,75	DKP
	Dinas Pariwisata																	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100,00	100,00	107,83	100,00	120,71	100	133,92	100	145,36	100	157,37	100	665,18	DISPAR
	Dinas Pertanian																	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100,00	100,00	107,34	100,00	110,30	100	111,40	100	112,52	100	113,64	100	555,20	DIPERTA

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																	
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan																
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100,00	100,00	145,00	100,00	330,00	100	330,00	100	330,00	100	330,00	100	1.465,00	DISPERINDAG
	Sekretariat Daerah																
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase pengawasan internal kebijakan KDH	Persen	100,00	100,00	25,00	100,00	50,00	100	50,00	100	50,00	100	50,00	100	225,00	SETDA
	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Kabupaten komponen pelaporan kinerja	Persen	70,00	71,00	100,00	73,00	150,00	81	150,00	81	150,00	90	150,00	90	700,00	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100,00	100,00	210,00	100,00	350,00	100	350,00	100	350,00	100	350,00	100	1.610,00	
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase produk hukum yang terbentuk	Persen	90,00	100,00	980,00	90,00	1.080,00	90	1.080,00	90	1.080,00	90	1.080,00	90	5.300,00	
	Program Manajemen Perubahan	Jumlah sosialisasi prorgam manajemen perubahan	Orang	5,00	5 org	50,00	5,00	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	250,00	
	Program Pendayagunaan Aparatur Negara Menuju Pemerintahan Yang Bersih	Persentase Pelaksanaan Program RB	Persen	100,00	100,00	166,24	100,00	241,24	100	241,24	100	241,24	100	241,24	100	1.131,19	

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																	
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
	Program Penataan dan Penguatan Organisasi	Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat sasaran	Persen	100,00	100,00	350,00	100,00	475,00	100	475,00	100	475,00	100	475,00	100	2.250,00	
	Program Penataan Ketatalaksanaan	Persentase OPD yang memiliki prosedur kerja yang jelas, efisien, efektif dan terukur	Persen	100,00	100,00	0,00	100,00	72,10	100	74,26	100	76,49	100	78,78	100	301,63	
	Sekretariat DPRD																
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	84,00	84,00	153,48	84,00	153,48	84	168,78	84	178,50	84	178,50	84	832,75	SETWAN
	Kantor Camat Sekotong																
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100,00	100,00	57,66	100,00	57,66	100	57,66	100	57,66	100	57,66	100	288,30	KANTOR CAMAT SEKOTONG
	Kantor Camat Lembar																
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persen	100,00	100,00	33,11	100,00	65,38	100	65,38	100	65,38	100	65,38	100	294,65	KANTOR CAMAT LEMBAR
	Kantor Camat Gerung																
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem	Persen	100,00	100,00	75,36	100,00	40,66	100	40,66	100	40,66	100	40,66	100	238,00	KANTOR CAMAT GERUNG

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																		
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
		Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan															
	Kantor Camat Labuapi																
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persen	100,00	100,00	139,00	100,00	140,40	100	141,80	100	143,20	100	145,60	100	710,00	KANTOR CAMAT LABUAPI
	Kantor Camat Kediri																
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persen	100,00	100,00	46,31	100,00	47,70	100	49,13	100	50,60	100	52,12	100	245,85	KANTOR CAMAT KEDIRI
	Kantor Camat Kuripan																
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100,00	100,00	10,50	100,00	10,81	100	11,14	100	11,47	100	11,82	100	55,74	KANTOR CAMAT KURIPAN
	Kantor Camat Narmada																
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100,00	100,00	61,80	100,00	63,65	100	65,56	100	67,53	100	69,56	100	328,10	KANTOR CAMAT NARMADA
	Kantor Camat Lingsar																
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100,00	100,00	9,06	100,00	9,33	100	9,61	100	9,90	100	10,20	100	48,12	KANTOR CAMAT LINGSAR

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																		
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR			
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta		
	Kantor Camat Gunungsari																	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persen	100,00	100,00	53,22	100,00	54,88	100	56,55	100	58,32	100	61,19	100	284,16	KANTOR CAMAT GUNUNGSARI
	Kantor Camat Batu Layar																	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persen	100,00	100,00	55,93	100,00	57,61	100	59,34	100	61,12	100	62,95	100	296,95	KANTOR CAMAT BATULAYAR
	Inspektorat Kabupaten																	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100,00	100,00	142,07	100,00	164,57	100	170,32	100	176,29	100	182,46	100	835,71	INSPEKTORAT
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan pengawasan meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lain	Persen	17,00	100,00	3.103,38	100,00	3.372,42	100	3.490,45	100	3.612,62	100	3.739,06	100	17.317,93	
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa	Persentase peningkatan sumber daya aparatur pengawasan daerah	Persen	5,00	100,00	112,72	100,00	198,72	100	205,68	100	212,87	100	220,32	100	950,31	

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																		
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah																
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100,00	100,00	153,50	100,00	158,11	100	162,85	100	207,73	100	213,97	100	896,15	BAPPEDA
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur perencana	Persen	100,00	100,00	712,50	100,00	733,88	100	755,89	100	778,57	100	801,93	100	3.782,76	
	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta ketapatan waktu dalam penyelesaiannya	Persen	100,00	100,00	1.093,50	100,00	1.126,31	100	1.160,09	100	1.594,90	100	2.265,74	100	7.240,54	
	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase Ketersediaan data/informasi untuk perencanaan	Persen	100,00	100,00	1.203,00	100,00	733,84	100	765,61	100	798,32	100	832,02	100	3.832,79	
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan perangkat daerah koordinasi bidang ekonomi	Persen	100,00	100,00	550,00	100,00	422,30	100	434,97	100	598,02	100	461,46	100	2.466,75	

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																	
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan perangkat daerah koordinasi bidang sosial budaya	Persen	100,00	100,00	620,00	100,00	638,60	100	657,76	100	677,49	100	697,82	100	3.291,66	
	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan perangkat daerah koordinasi bidang sarpras wilayah	Persen	100,00	100,00	690,00	100,00	710,70	100	732,02	100	753,98	100	776,60	100	3.663,30	
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase dokumen hasil kajian/rekomendasi kajian yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan daerah	Persen	100,00	95,00	533,20	96,00	680,77	97	680,77	98	680,77	100	680,77	100	3.256,28	
	Badan Pendapatan Daerah																
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100,00	100,00	125,95	100,00	138,55	100	152,40	100	167,64	100	184,40	100	768,94	BAPENDA

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																	
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah																
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100,00	100,00	207,83	100,00	214,90	100	222,20	100	229,70	100	271,10	100	1.145,73	BPKAD
	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumberdaya Manusia																
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100,00	100,00	117,22	100,00	120,74	100	134,36	100	138,39	100	142,54	100	653,26	BKDPSDM
MISI II	**Meningkatkan dan memantapkan akses infrastruktur wilayah dan pemenuhan layanan dasar secara berkeadilan**																
T.2.1	**Meningkatnya Konektivitas antar wilayah dan akses infrastruktur dasar**	**Indeks Kebermanfaatan Infrastuktur**	**Persen**	**77,39**	**79,29**		**81,79**		**84,30**		**86,83**		**88,69**		**88,69**		
S.2.1.1	**Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah**																
P.2.1.1.1	**Program Peningkatan Konektivitas Wilayah**	**Persentase Wilayah Terhubung dengan Pusat - Pusat Perekonomian**	**Persen**	**80,50**	**82,74**	**134.492,35**	**85,57**	**136.168,84**	**89,70**	**137.873,69**	**94,76**	**139.607,61**	**100,00**	**141.371,29**	**100,00**	**689.513,78**	
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kebinamargaan	Persentase Penyediaan peralatan berat dan laporan mutu hasil pengujian	Persen	100,00	100,00	1.405,15	100,00	1.419,20	100	1.433,39	100	1.447,73	100	1.462,21	100	7.167,68	DPUTR
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan/Jembatan yang terbangun	Persen	100,00	100,00	86.681,22	100,00	82.548,03	100	83.423,51	100	89.307,75	100	90.200,82	100	432.161,33	

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																		
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
	Program Rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan mantap yang terpelihara	km	191,00	191,28	33.143,55	193,45	30.474,99	196,7	30.809,74	201,51	34.147,84	203,89	34.489,31	204	163.065,43	
	Dinas Perhubungan																
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase jumlah pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Persen	25,00	50	609,82	75	631,17	88	653,26	88	676,12	88	699,78	87,5	3.270,15	
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan yang terpelihara	Persen	85,00	100,00	484,19	100,00	501,13	100,00	518,67	100,00	536,83	100,00	555,62	100,00	2.596,44	
	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Persentase peningkatan pelayanan angkutan yang layak dan memadai	Persen	85,00	100,00	2.210,54	100,00	2.287,91	100	2.367,99	100	2.450,87	100	2.536,65	100	11.853,96	
	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	jumlah pembangunan dan pengembangan dermaga	Lokasi	1,00	1,00	8.305,50	1,00	8.596,20	1	8.897,06	1	9.208,46	1	9.530,76	1	44.537,97	
	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	prosentase ketersediaan rambu lalu lintas	Persen	30,00	57,97	1.421,51	65,56	1.471,26	73,15	1.522,76	80,75	1.576,06	88,35	1.631,22	88,35	7.622,81	
	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	prosentase angkutan yang yang diuji	Persen	95,00	95,00	230,86	95,00	238,94	95	247,31	95	255,96	95	264,92	95	1.238,00	

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																	
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
S.2.1.2	**Meningkatnya akses infrastruktur dasar**																
P.2.1.2.1	**Program Peningkatan Rumah Layak Huni**	**Persentase Rumah Layak Huni**	**Persen**	**80,19**	**83,98**	**59.759,62**	**85,84**	**60.357,22**	**87,70**	**60.960,79**	**89,57**	**61.570,40**	**90,97**	**62.186,10**	**90,97**	**304.834,12**	
	Dinas Perumahan Dan Permukiman																
	Program Pengembangan Perumahan	Prosentase Rumah Layak Huni (RLH)	Persen	90	97,72	1.594,32	97,97	1.610,26	98,22	1.626,37	98,46	1.642,63	98,69	1.659,06	98,69	8.132,63	DISPERKIM
	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Prosentase Sarana dan Prasarana PSU	Persen	3,5	4	475,00	6	479,75	8	484,55	10	489,39	12	494,29	12	2.422,98	
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Prosentase permukiman yang tertata	Persen	47,31	47,51	5.869,75	47,69	5.928,45	47,87	5.987,74	48,07	6.047,61	48,27	6.108,09	48,27	29.941,64	
	Program Penataan Kawasan Perkotaan	Prosentase luasan permukiman di kawasan perkotaan yang tertata	Persen	0,5	0,5	25.838,73	0,65	26.097,12	0,68	26.358,09	0,7	26.621,67	0,73	26.887,89	0,73	131.803,50	
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase Tersed. data dan pengembangan pembangunan disetiap wilayah	Persen	100,00	100,00	17.381,82	3,00	7.555,63	100,00	7.731,19	100,00	7.908,50	100,00	8.087,59	100,00	48.664,73	DPUTR
	Program Pengelolaan Sanitasi Layak	Persentase Rumah tangga dengan akses sanitasi layak	Persen	85,93	86,28	8.600,00	86,46	8.686,00	86,64	8.772,86	86,82	8.860,59	87,00	8.949,19	87,00	43.868,64	

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																	
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
P.2.1.2.2	**Program Peningkatan Akses Air Minum Layak**	**Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Minum**	**Persen**	**78,65**	**79,76**	**9.460,44**	**80,32**	**9.555,04**	**80,88**	**9.650,59**	**81,44**	**9.747,10**	**82,00**	**9.844,57**	**95,92**	**48.257,75**	
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaaan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Persen	30,86	31,41	9.460,44	31,69	9.555,04	31,97	9.650,59	32,25	9.747,10	32,53	9.844,57	32,53	48.257,75	DPUTR
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi	Persen	47,79	48,35		48,63		48,91		49,19		49,47		49,47		

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																	
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
MISI III	**Mewujudkan konektivitas perekonomian antar pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi yang kondusif dan keberpihakan pada masyarakat**																
T.3.1	**Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat**	**Persentase Pertumbuhan Ekonomi**	**Persen**	**6,58**	**6,50**		**6,60**		**6,65**		**6,70**		**6,8**		**6,8**		
S.3.1.1	**Meningkatnya daya saing sektor ekonomi unggulan**																
P.3.1.1.1	**Program Peningkatan Pembangunan Ekonomi**	**Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah**	**Persen**	**13,15**	**13,18**	**12.330,17**	**13,45**	**11.391,83**	**13,64**	**11.551,52**	**14,02**	**11.710,89**	**14,45**	**11.886,96**	**14,45**	**41.401,37**	
	Badan Pendapatan Daerah																
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	prosentase realisasi penerimaan PAD	Persen	96,1	100	2.751,78	100	2.772,62	100	2.786,89	100	2.801,38	100	2.817,21	100	13.929,88	BAPENDA
	Program Penetapan Kebijakan Pajak/Retribusi Daerah	Persentase peningkatan dokumen kebijakan pajak dan retribusi yang di terbitkan.	Persen	2	2	657,99	2	723,79	2	796,16	2	875,78	2	963,34	2	4.017,06	
	Program Pendataan Subjek dan Objek Pajak/Retribusi Daerah	prosentase peningkatan data potensi wajib pajak dan wajib retribusi daerah.	Persen	2	2	594,37	2	653,81	2	685,19	2	713,71	2	744,58	2	3.391,66	

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																		
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana PAD	Persentase sarana penunjang peningkatan PAD yang diadakan	Persen	50,000	60	501,03	65	657,03	70	657,03	80	657,03	90	657,03	90	3.129,15	
	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah																
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Peningkatan akses fasilitasi pembiayaan KUMK	KUMK	500,00	500,00	345,00	500,00	357,08	500,00	360,65	500,00	364,25	500,00	367,89	3000	1.794,87	DISKOP UKM
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Peningkatan kualitas dan kapasitas koperasi	Koperasi	150,00	200,00	445,00	270,00	469,00	340,00	489,00	410,00	508,00	502,00	525,00	1872	2.436,00	
	Program Pengawasan Koperasi	Pengawasan terhadap koperasi	KSP/USP Kop	150,00	200,00	300,00	275,00	310,50	350,00	313,61	400,00	316,74	500,00	319,91	1875	1.560,75	
	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	Peningkatan kualias usaha mikro	UMK	500,00	500,00	1.100,00	500,00	1.103,00	500	1.106,00	500	1.107,00	500	1.109,00	3000	5.525,00	
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Peningkatan jumlah UM-WUP dan UM-WUB	WUP dan WUB	500,00	500,00	285,00	500,00	305,00	500,00	317,00	500,00	327,00	500,00	343,00	3000	1.577,00	
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan																
	Program Pengembangan Perdagangan	Jumlah pedagang yang mendapatkan	Orang	200,00	200,00	5.350,00	200,00	4.040,00	200	4.040,00	200	4.040,00	200	4.040,00	1200	21.510,00	DISPERINDAG

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																	
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
		bantuan pembinaan															
P.3.1.1.2	**Program Peningkatan PDRB Sektor - Sektor Unggulan**	**Nilai PDRB Perkapita (ADHK)**	**Juta Rupiah**	**17,30**	**17,83**	**113.125,81**	**18,69**	**107.821,28**	**19,60**	**108.805,75**	**20,55**	**110.397,29**	**21,23**	**112.406,07**	**21,23**	**552.556,19**	
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
	Program Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi:Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Prosentase panjang Jaringan Irigasi kondisi baik	Persen	56,16	57,44	49.672,95	58,08	50.169,68	58,73	50.671,37	59,37	51.178,09	60	51.689,87	60	253.381,95	DPUTR
	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	Persentase fungsi sungai, waduk, embung, dan sumber daya air lainnya untuk multi sektor	Persen	100,00	100,00	13.324,02	100,00	13.457,26	100,00	13.591,83	100,00	13.727,75	100,00	13.865,02	100,00	67.965,87	
	Program Pengendalian Banjir	Persentase pengendalian daya rusak air sungai	Persen	2,00	2,31	253,00	2,45	255,53	2,59	258,09	2,73	260,67	2,87	263,27	2,87	1.290,55	
	Dinas Kelautan dan Perikanan																
	Program Pengembangan Statistik Kelautan dan Perikanan	Konsumsi ikan (Kg/kapita/th)	Kg/kapita/th	38,23	40,00	90,93	41,00	95,48	42	100,26	43	105,27	44	110,53	44	502,47	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat	Produksi Garam (Ton)	Ton	304,34	310,43	536,13	316,64	562,94	322,97	591,09	329,43	620,64	336,02	651,67	336,02	2.962,48	
	Program pengembangan perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Ton	11.498,60	12.030,94	1.450,52	12.271,56	1.523,05	12516,99	1.599,20	12767,33	1.673,56	13022,68	1.802,24	13022,68	8.048,58	

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																		
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
	Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Ton	91.106,83	94.071,97	2.163,88	95.953,41	2.272,08	97872,48	2.385,68	99829,93	2.504,97	101826,52	2.630,22	101826,52	11.956,83	
	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Produksi Pengolahan Perikanan (Ton)	Ton	3.650,76	3.819,94	752,82	3.896,34	790,46	3974,27	829,98	4053,75	871,48	4134,83	915,06	4134,83	4.159,80	
	Dinas Pariwisata																
	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah kunjungan wisata	orang	391.282	645.000	2.435,00	690.000	2.735,70	735000	2.917,40	780.000	3.080,30	825.000	3.259,00	825.000	14.427,40	DISPAR
	Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah destinasi wisata yang ditata/direvitalisasi	obyek wisata	46,00	10,00	14.895,00	8,00	9.003,53	7	8.423,30	7	8.767,60	7	9.082,50	39	50.171,93	
	Program pengembangan Kemitraan	Jumlah desa wisata yang dikembangkan	desa wisata	31,00	35,00	375,00	39,00	1.348,69	43	1.356,50	47	1.367,00	50	1.378,00	50	5.825,19	
	Dinas Pertanian																
	Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Olahan Pertanian	Jumlah Pertumbuhan UPH Pertanian	UPH	5,00	5,00	250,00	5,00	285,50	5,00	288,36	5,00	291,24	5,00	652,63	30,00	1.767,73	DINAS PERTANIAN
	Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Olahan Perkebunan	Jumlah Pertumbuhan UPH Perkebunan	UPH	5,00	5,00	500,00	5,00	515,00	5,00	520,15	5,00	525,35	5,00	530,61	30,00	2.591,11	
	Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Olahan Peternakan	Jumlah Pertumbuhan UPH Peternakan	UPH	5,00	5,00	125,00	5,00	196,34	5,00	198,30	5,00	200,28	5,00	202,29	30,00	922,20	
	Program peningkatan produksi pertanian	Persentase kelompok tani Tanaman Pangan yang	Persen	3,00	3,00	10.194,59	3,00	7.627,50	3,00	7.703,78	3,00	7.780,81	3,00	7.858,62	18,00	41.165,30	

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																	
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
		menggunakan bibit unggul															
		Persentase Kelompok Tani Tanaman Pangan yang menggunakan pupuk berimbang	Persen	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		18,00		
		Persentase Kelompok Tani Tanaman Pangan yang menerapkan TTG	Persen	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		18,00		
		Persentasi kelompok tani Tanaman Pangan yang menerapkan penanggulangan hama terpadu (PHT)	Persen	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		18,00		
		Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Pertanian Tanaman Pangan	Persen	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		18,00		
		Persentase kelompok tani Hortikultura yang menggunakan bibit unggul	Persen	3,00	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		23,00		

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																	
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
		Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Pertanian Tanaman Hortikultura	Persen	3,00	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		23,00		
	Program peningkatan produksi perkebunan	Persentase Kelompok Tani perkebunan yang menggunakanbibit unggul	Persen	2,00	2,00	636,16	2,00	646,00	2,00	782,46	2,00	790,28	2,00	798,19	12,00	3.653,09	
		Persentase kelompok tani perkebunan yang menerapkan penanggulangan hama terpadu (PHT)	Persen	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		12,00		
	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Persentase Peningkatan Angka Kelahiran Ternak Ruminansia	Persen	5,00	5,00	5.905,51	5,00	3.020,75	5,00	3.050,96	5,00	3.081,47	5,00	3.112,28	30,00	18.170,96	
		Persentase Peningkatan Kapasitas Penetasan Ternak Unggas	Persen	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		30,00		
		Persentase Angka Kelahiran Ternak Melalui IB	Persen	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		30,00		

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																	
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
		Persentase Penurunan Serangan Penyakit Hewan	Persen	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00				
		Persentase Ketersediaan Pakan Ternak	Persen	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00				
		Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Peternakan	Persen	5,00	5,00		5,00		5		5		5		30		
	Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pertanian	Persemtase SDM Penyuluh yang bersertifikat	Persen	5,00	5,00	2.705,29	5,00	2.158,80	5	2.240,39	5	2.262,79	5	2.285,16	30	11.652,43	
		Persemtase SDM Petani yang bersertifikat	Persen	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		30		
		Persentase Kelembagaan Penyuluhan yang Meningkat Kelasnya	Persen	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		30		
		Persentase Kelembagaan Kelompok Tani yang Meningkat Kelas Kemampuannya	Persen	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		30		

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																		
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	Persentase Kelompok tani Perkebunan yang menerapkan TTG	Persen	2,00	2,00	910,00	2,00	967,00	2,00	1.106,67	2,00	1.117,74	2,00	1.128,91	12	5.230,32	
		Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Perkebunan	Persen	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		12		
		Persemtase SDM petani Perkebunan yang bersertifikat	Persen	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		30		
		Persentase kelembagaan Kelompok Tani Perkebunan yang meningkat kelasnya	Persen	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		30		
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan																
	Program penumbuhan dan pengembangan Industri Logam, Mesin, Elektronik, Aneka dan Tekstil (ILMEAT)	Jumlah Pertumbuhan IKM ILMEAT	Unit	200,00	200,00	1.800,00	200,00	2.070,00	200,00	2.070,00	200,00	2.070,00	200,00	2.070,00	1.200,00	10.080,00	DISPERINDAG
	Program penumbuhan dan pengembangan Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH)	Jumlah Pertumbuhan IKM IKAHH	Unit	115,00	115,00	4.150,00	115,00	8.120,00	115,00	8.120,00	115,00	8.120,00	115,00	8.120,00	690,00	36.630,00	

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																		
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
P.3.1.1.3	**Program Peningkatan Investasi**	**Nilai Investasi**				**388,11**		**401,70**		**415,76**		**430,31**		**445,37**		**2.081,25**	
		PMA	**Juta US $**	**79,00**	**121,39**		**133,53**		**146,88**		**161,57**		**177,73**		**177,73**		
		PMDN (Fasilitas)	**Rp. Milyar**	**288,09**	**536,12**		**589,73**		**648,70**		**713,57**		**784,93**		**784,93**		
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Nilai Realisasi Investasi sektor Investasi PMA & PMDN	Persen	75,00	80,00	337,24	85,00	349,05	85	361,26	90	373,91	90	386,99	90	1.808,45	DPMPTSP
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Fasilitasi kerjasama Investasi	Persen	75,00	80,00	50,87	80,00	52,65	85	54,50	85	56,40	90	58,38	90	272,80	
S.3.1.2	**Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat**																
P.3.1.2.1	**Program Pemerataan Pembangunan**	**Indeks Gini**	**Indeks**	**0,32**	**< 0,3**	**1.901,40**	**< 0,3**	**1.958,45**	**< 0,3**	**2.017,20**	**< 0,3**	**2.077,72**	**< 0,3**	**2.140,05**	**< 0,3**	**10.094,81**	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Pendapatan Asli Desa (PAD) terhadap APBDes	Persen	0,58	1,00	750,89	1,25	773,41	1,5	796,62	1,75	820,52	2	845,13	2	3.986,56	DPMD
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase APBDes yang dialokasikan untuk pengembangan BUMDes	Persen	3,03	5,00	21,00	6,00	21,63	7	22,28	8	22,95	9	23,64	9	111,49	

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																	
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNGJAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
	Prog. Peningkatan Partisipasi Masy. dalam Membangun Desa	Persentase swadaya masyarakat terhadap pembangunan	Persen	6,08	7,00	429,89	8,00	442,79	9	456,07	10	469,76	11	483,85	11	2.282,37	
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase desa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBDes tepat waktu	Persen	39,50	50,00	699,62	55,00	720,61	60	742,23	65	764,50	70	787,43	70	3.714,39	
P.3.1.2.2	**Program Penanggulangan Kemiskinan**	**Persentase Angka Kemiskinan**	**Persen**	**15,20**	**15,00**	**10.245,18**	**14,50**	**11.699,25**	**14,00**	**11.724,63**	**13,00**	**11.966,50**	**10,75**	**12.247,56**	**10,75**	**57.883,12**	
	Dinas Sosial																
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Persen	60,00	60,00	640,32	70,00	693,00	80	716,00	85	740,00	90	774,00	90	3.563,32	DINSOS
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	Persentase warga miskin/PMKS tergabung dalam KUBe yang mendapatkan bantuan sosial guna meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	60,00	60,00	2.021,00	70,00	2.038,00	80	2.046,00	85	2.053,00	90	2.060,00	90	10.218,00	

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																	
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase kelembagaan sosial atau PSKS skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial dan mendukung penanganan PMKS	Persen	35,25	35.72	1.616,83	39.70	1.855,00	43.68	1.870,00	47.66	1.886,00	51.64	1.893,00	51.64	9.120,83	
	Program Perlindungan Jaminan Sosial	Persentase masyarakat miskin/PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Persen	75,00	80,00	324,94	85,00	1.260,00	90	1.271,00	93	1.281,50	95	1.289,00	95	5.426,44	
	Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat	Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani pada saat dan setelah tanggap darurat	Persen	75,00	80,00	380,39	85,00	455,00	90	459,00	93	465,00	95	469,00	95	2.228,39	
	Program Pengembangan Sistem Informasi Sosial Dasar Terpadu	Persentase data Warga miskin/PMKS yang terverifikasi dan tervalidasi	Persen	59,00	60,00	733,49	70,00	772,16	80	793,54	85	820,00	90	828,00	90	3.947,19	
	Dinas Ketahanan Pangan																
	Program Peningkatan Ketahan Pangan	Peningkatan PPH	Persen	79,00	80,00	949,75	81,50	982,99	83	1.017,39	84,5	1.053,00	86	1.089,86	86	5.092,99	DIKPANGAN

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																		
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Penataan Administrasi Kependudukan	Persen	90	92	1.714,88	93	1.771,60	94	1.675,20	95	1.786,00	96	1.958,50	96	8.906,18	DISDUKCAPIL
	Program Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Layanan Administrasi Kependudukan	Persen	95	96	1.863,58	97	1.871,50	98	1.876,50	99	1.882,00	100	1.886,20	100	9.379,78	
P.3.1.2.3	**Program Penurunan Angka Pengangguran**	**TPT**	**Persen**	**3,28**	**3,20**	**7.503,86**	**3,00**	**8.308,19**	**2,90**	**8.552,65**	**2,80**	**8.814,47**	**2,75**	**9.073,87**	**2,75**	**42.253,03**	
	Dinas Tenaga Kerja																
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lulusan pelatihan kerja yang memiliki keterampilan/kompetensi	Persen	100,00	100,00	801,90	100,00	1.185,97	100	1.219,00	100	1.253,02	100	1.288,06	100	5.747,94	DISNAKER
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase peningkatan kesempatan kerja	Persen	90,00	95,00	1.280,00	96,00	1.532,30	96	1.575,87	97	1.630,75	97	1.676,97	97	7.695,88	
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang diberikan pembinaan	Persen	27,00	30,00	380,00	35,00	396,10	35	407,53	40	419,31	40	431,44	40	2.034,38	
	Program Transmigrasi Regional	Persentase transmigran yang diberangkatkan	Persen	20,00	25,00	119,50	25,00	123,68	30	128,01	30	132,49	35	137,13	35	640,81	

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																	
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
	Dinas Pemuda dan Olah Raga																
	Program Pengembangan dan Keserasian kebijakan pemuda	Persentase Organisasi pemuda yang aktif	Persen	100,00	100,00	241,56	100,00	248,81	100	256,27	100	263,96	100	271,88	100	1.282,47	DISPORA
	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Persentase meningkatnya keikutsertaan pemuda dalam kegiatan kepemudan	Persen	100,00	100,00	809,25	100,00	833,53	100	858,53	100	884,29	100	910,82	100	4.296,42	
	Peningkatan Upaya penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Bagi Pemuda	Persentase Wirausaha Muda Berprestasi	Persen	100,00	100,00	72,70	100,00	74,88	100	77,13	100	79,44	100	81,83	100	385,98	
	Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Persentase Peningkatan Pencegahan penyalahgunaan narkoba	Persen	0,00	10,00	33,52	12,00	34,53	15	35,56	17	36,63	19	37,73	19	177,96	
	Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	Persen	100,00	100,00	527,45	100,00	543,27	100	559,57	100	576,36	100	593,65	100	2.800,30	
	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah Prestasi Pemuda di Tingkat Propinsi dan Nasional	orang	35,00	40,00	341,99	45,00	352,25	50	362,82	55	373,70	60	384,91	60	1.815,68	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase peningkatan sarana prasarana olahraga	Persen	50,00	100,00	2.895,99	100,00	2.982,87	100	3.072,36	100	3.164,53	100	3.259,46	100	15.375,20	

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																	
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
MISI IV	**Meningkatkan dan memantapkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya serta berdaya saing**																
T.4.1	**Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat**	**IPM**	**Persen**	**67,18**	**67,78**		**68,38**		**68,98**		**69,58**		**70,10**		**70,10**		
S.4.1.1	**Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat**																
P.4.1.1.1	**Program Peningkatan Usia Harapan Hidup**	**UHH**	**Tahun**	**66,16**	**66,84**	**283.871,05**	**67,20**	**244.381,43**	**67,56**	**252.888,19**	**67,92**	**257.908,62**	**68,18**	**267.267,51**	**68,18**	**1.306.316,81**	
	Dinas Kesehatan																
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Obat Memenuhi Standar yang Tersedia di Puskesmas	Persen	100,00	100,00	6.192,56	100,00	5.842,27	100,00	6.406,67	100,00	6.598,88	100,00	6.796,84	100,00	31.837,23	DINAS KESEHATAN
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yg tersertifikasi akreditasi	Persen	100,00	100,00	19.943,75	100,00	18.697,11	100,00	20.341,38	100,00	20.951,62	100,00	21.580,17	100,00	101.514,04	
		Persentase kabupaten yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																	
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan Skrining kesehatan sesuai standar	Persen	15,00	20,00		40,00		60,00		80,00		100,00		100,00		
		Persentase penderita Hipertansi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	1,45	1,42		1,40		1,37		1,35		1,33		1,33		
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	22,98	22,98		22,98		22,98		22,98		22,98		22,98		
		Persentase pendrita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	29,84	34,82		37,79		41,04		44,59		48,45		48,45		
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Presentase Temuan Obat dan Makanan yang Memenuhi Standar	Persen	98,00	100,00	60,00	100,00	61,80	100,00	63,65	100,00	65,56	100,00	67,53	100,00	318,55	

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																		
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Persen	71,58	74,00	707,48	76,00	381,56	78,00	393,01	80,00	404,80	82,00	461,48	82,00	2.348,34	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	-	30,00		40,00		50,00		60,00		70,00		70,00		
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun (Balita)	Persen	28,96	24,00	293,59	22,50	2.238,63	21,00	2.449,90	20,00	2.523,39	19,00	2.599,10	19,00	10.104,61	
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase masyarakat mengakses jamban yang memenuhi syarat kesehatan	Persen	75,03	80,00	1.978,75	85,00	2.007,21	90,00	2.200,25	95,00	2.266,26	100,00	2.334,25	100,00	10.786,72	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima Imunisasi Dasar Lengkap (Lanjutan DPT-Hb-Hib3 dan MR)	Persen	100,80	93,00	4.550,07	93,50	4.380,40	94,00	4.780,76	94,50	4.924,18	95,00	5.071,91	95,00	23.707,32	

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																	
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
		Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar	Persen	94,78	95,00		96,00		97,00		98,00		100,00		100,00		
		Persentase Orang dengan resiko Terinfeksi HIV mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai standar	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas Yang Terakreditasi	Persen	100,00	100,00	3.023,20	100,00	2.820,86	100,00	3.047,83	100,00	3.139,26	100,00	3.233,44	100,00	15.264,59	
	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	Persentase Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	Persen	90,00	92,00	63.116,36	94,00	82.702,18	96,00	68.038,85	98,00	70.080,02	100,00	72.182,42	100,00	356.119,83	
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase sarana, prasarana dan alat kesehatan RS tercukupi da;am pemenuhan sesuai dengan ASPAK	Persen	0	50,00	49.025,00	52,00	41.833,70	55,00	44.409,24	59,00	43.009,52	65,00	45.699,80	65,00	223.977,26	
		Persentase Penggunaan Tempat Tidur (BOR)	Persen	0	51,00		55,00		60,00		63,00		66,00		66,00		

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																	
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
		Angka Perputaran Tempat Tidur (BTO)	Kali	-	57,00		59,00		61,00		63,00		65,00		65,00		
		Masa Tenggang Perputaran Tempat Tidur (TOI)	Hari	-	3,00		3,00		3,00		2,00		2,00		2,00		
		Rata-rata Lamanya Pasien Dirawat (ALOS)	Hari	-	4,00		4,00		5,00		6,00		6,00		6,00		
		Angka Kematian secara umum (GDR)	Per Mil	-	45,00		45,00		45,00		45,00		45,00		45,00		
		Angka Kematian lebih dari 48 Jam setelah dirawat setiap 1000 pasien keluar (NDR)	Per Mil	-	25,00		25,00		25,00		25,00		25,00		25,00		
	Program pemeliharaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persen	100,00	100,00	6.385,00	100,00	4.451,85	100,00	4.869,28	100,00	5.015,36	100,00	5.165,82	100,00	25.887,30	
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	70,10	100,00	8.121,04	100,00	7.457,94	100,00	13.598,42	100,00	14.006,37	100,00	14.426,56	100,00	57.610,32	
	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	98,93	97,73	282,56	97,94	291,04	96,77	299,77	96,99	308,76	95,85	318,02	95,85	1.500,14	

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																	
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase Pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Persen	18,91	18,77	86,26	18,89	88,85	19,01	91,52	19,13	94,26	19,26	97,09	19,26	457,98	
	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Persentase Rumah makan dan restauran yang mendapatkan sertifikat laik ijin sanitasi rumah makan/restaurant	Persen	87,89	88,89	82,60	89,73	54,18	90,46	55,80	91,09	57,48	91,64	59,20	91,64	309,26	
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	92,33	92,34	2.114,34	92,36	2.177,77	92,37	2.385,56	92,38	2.457,12	92,39	2.530,84	92,39	11.665,62	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persen	95,39	95,66		95,80		96,07		96,21		96,48		96,48		
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase Realisasi PAD Dinas Kesehatan (BLUD)	Persen	79,90	80,00	55.667,85	82,00	52.125,36	84,00	62.029,17	86,00	63.890,05	88,00	65.806,75	88,00	299.519,18	
	RSUD TRIPAT																
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan Rumah Sakit	Persen	60,00	80,00	46.698,77	82,00	45.931,50	84	45.964,10	86	50.997,85	88	66.032,77	88	255.624,99	RSUD TRIPAT
	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase peningkatan kualitas dokter	Persen	100,00	100,00	445,00	100,00	146,97	100	152,11	100	157,44	100	162,95	100	1.064,47	

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																	
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
		dan paramedis selama 1 tahun															
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	Jumlah Gedung Rumah Sakit yang sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit Tipe B	Unit	1,00	1,00	14.096,87	1,00	14.590,26	1	15.100,92	1	15.629,45	1	16.176,48	5	75.593,96	
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	Presentase Gedung Rumah Sakit yang dipelihara selama 1 tahun	Persen	100,00	100,00	1.000,00	100,00	1.100,00	100	1.210,00	100	1.331,00	100	1.464,10	100	6.105,10	
S.4.1.2	**Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pendidikan**																
P.4.1.2.1	**Program Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah**	**RLS**	**Tahun**	**6,16**	**6,25**	**113.078,61**	**6,50**	**121.779,17**	**6,70**	**123.839,17**	**7,00**	**126.889,17**	**14,19**	**126.889,17**	**7,19**	**612.475,29**	
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																
	Program Pendidikan Non Formal	Persentase pelaksanaan pendidikan non formal	Persen	100,00	100,00	2.050,00	100,00	2.890,00	100,00	2.950,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	13.890,00	DIKBUD
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD Paket A	Persen	100,00	100,00	111.028,61	100,00	118.889,17	100,00	120.889,17	100,00	123.889,17	100,00	123.889,17	100,00	598.585,29	
		APK SMP Paket B	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		APM SD Paket A	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		APM SMP Paket B	Persen	99,00	99,00		99,00		99,00		100,00		100,00		100,00		

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																	
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
P.4.1.2.2	**Program Peningkatan Harapan Lama Sekolah**	**HLS**	**Tahun**	**13,36**	**13,20**	**18.222,74**	**13,50**	**17.123,85**	**13,70**	**18.685,50**	**13,90**	**20.253,00**	**14,08**	**20.572,76**	**14,08**	**94.857,85**	
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah sanggar seni sekolah	sanggar	42,00	42,00	10.359,43	42,00	12.032,25	42	13.261,10	42	14.501,65	42	14.765,58	42	64.920,01	DIKBUD
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Angka Putus Sekolah SD	Persen	100,00	100,00	5.677,90	100,00	2.650,00	100,00	2.950,00	100,00	3.275,00	100,00	3.400,00	100,00	17.952,90	
		Angka Putus sekolah SMP	Persen		1												
		Angka Melanjutkan jenjang SD ke SMP	Persen		100												
		Angka Melanjutkan SMP ke SMA	Persen		96												
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase Pengembangan Nilai Budaya	Persen	100	100,00	842,47	100,00	671,14	100	601,66	100	512,98	100	349,64	100	2.977,88	
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan kondisi baik	buah	1	1,00	485,89	2,00	850,00	2	920,00	2	960,00	100	1.000,00	100	4.215,89	
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase kelompok kesenian masyarakat terbina	Persen	100	100,00	857,05	100,00	920,46	100	952,74	100	1.003,38	100	1.057,54	100	4.791,17	

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																	
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
S.4.1.3	**Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**																
P.4.1.3.1	**Program Pengarusutamaan Gender**	**KLA**	**Persen**	**10,00**	**30,00**	**12.114,71**	**40,00**	**15.050,21**	**50,00**	**15.319,90**	**60,00**	**15.750,82**	**70**	**16.170,68**	**70,00**	**74.406,32**	
		IPG	**Persen**	**88,93**	**89,00**		**90,00**		**90,30**		**91,00**		**91,5**		**91,50**		
	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Persen	100,00	100,00	50,52	100,00	52,28	100	54,11	100	56,01	100	57,97	100	270,89	DP2KBP3A
	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan	Persentase perempuan Caleg peserta pemilu	Persen	15,56	16,34	150	17,15	155,25	18,01	160,68375	18,91	166,3076813	19,86	172,1284501	19,86	804,3698813	
		Persentase perempuan pejabat struktural di lembaga eksekutif	Persen	28,00	29,40		31,11		32,91		34,82		36,84				
	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Persentase kelembagaan PUG aktif	Persen	0,00	89,00	175,00	90,00	181,13	90,5	187,46	91	194,03	91,5	200,82	91,5	938,43	

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																	
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
	Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan dan eksploitasi yang mendapat penanganan pengaduan oleh tenaga terlatih di UPT	Persen	100,00	100,00	125,00	100,00	129,38	100	133,90	100	138,59	100	143,44	100	670,31	
	Program Keluarga Berencana	Persentase Unmeetneed	Persen	10,30	10,09	6.266,44	9,89	6.485,77	9,69	6.712,77	9,5	6.947,72	9,31	7.190,89	9,31	33.603,59	
		Persentase Cakupan Peserta KB Aktif	Persen	70,00	72,00		72,58		73,16		73,34		74,33		74,33		
		Persentase cakupan peserta KB MKJP	Persen	35,00	37,00		39,00		41		43		45		45		
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase PUS usia menikah di bawah usia 20 tahun	Persen	26,00	24,00	150,00	22,00	155,25	20	160,68	18	166,31	16	172,13	16	804,37	
	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase anggota UPPKS yang mandiri	Persen	91,00	92,00	120,00	93,00	124,20	94	128,55	95	133,05	96	137,70	96	643,50	
	Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	Persentase anggota kelompok tribina keluarga yang ber-KB	Persen	80,00	81,00	324,88	82,00	336,25	84	348,02	86	360,20	88	372,80	88	1.742,14	

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																	
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumberdaya Manusia																
	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan diklat	Persen	100,00	100,00	3.189,54	100,00	5.504,68	100,00	5.520,10	100,00	5.535,97	100,00	5.702,05	100,00	25.452,35	BKDPSDM
	Program Pembinaan Jabatan Fungsional	Persentase penyelenggaraan pembinaan jabatan fungsional	Persen	100,00	0,00	0	100,00	5,50	100,00	70,50	100,00	72,00	100,00	79,20	100,00	227,20	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan aparatur	Persen	100,00	100,00	1.563,33	100,00	1.920,53	100,00	1.843,12	100,00	1.980,64	100,00	1.941,55	100,00	9.249,17	
MISI V	**Meningkatkan dan memperkuat sinkronisasi dan sinergi pembangunan daerah untuk mempercepat capaian tujuan pembangunan**																
T.5.1	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah**	**IKLH**	**Persen**	**67,66**	**70,74**		**71,76**		**72,79**		**73,81**		**74,58**		**74,58**		
S.5.1.1	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**																
P.5.1.1.1	**Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**	**Persen**	**67,66**	**70,74**	**11.430,36**	**71,76**	**11.722,62**	**72,79**	**12.023,02**	**73,81**	**12.331,77**	**74,58**	**12.648,18**	**74,58**	**60.155,96**	
	Dinas Lingkungan Hidup																
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	Persen	60,83	61,00	6.436,32	61,10	6.616,09	61,2	6.800,99	61,3	6.991,17	61,4	7.185,82	61,4	34.030,39	DLH

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																		
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR			
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta		
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Indeks	22,75	25,10	1.552,50	27,60	1.599,08	30,2	1.647,05	32,5	1.696,46	35	1.747,35	35	8.242,43		
	Program peningkatan pengendalian polusi	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Indeks	91,04	91,15	250,00	91,20	257,50	91,4	265,23	91,6	273,18	91,6	281,38	91,6	1.327,28		
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Prosentase konservasi sumber mata air	Persen	29,84	33,72	1.190,00	37,60	1.225,70	41,47	1.262,47	45,35	1.300,35	49,22	1.339,36	49,22	6.317,87		
	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Persentase lahan eks tambang bahan galian Non Logam yang direklamasi	Persen	63,87	67,10	60,00	70,32	61,80	73,55	63,65	76,77	65,56	80	67,53	80	318,55		
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase permintaan data informasi lingkungan yang dilayani sesuai UU keterbukaan Informasi Publik	Persen	100,00	100,00	75,00	100,00	77,25	100	79,57	100	81,95	100	84,41	100	398,19		
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase dokumen perencanaan teknis tata ruang	Persen	100,00	100,00	1.718,75	100,00	1.735,94	100,00	1.753,30	100,00	1.770,83	100,00	1.788,54	100,00	8.767,35	DPUTR	
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	Persen	50,22	53,48	147,79	55,11	149,27	56,74	150,76	58,37	152,27	60	153,80	60	753,90		

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP)																	
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		
					Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	
S.5.1.2	**Menurunnya Risiko Bencana**	**Indeks Risiko Bencana Daerah**	**Indeks**	**158,30**	**150,39**		**142,87**		**135,72**		**128,94**		**123,58**		**123,58**		
P.5.1.2.1	**Program Penanggulangan Bencana**	**Indeks Risiko Bencana Daerah**	**Indeks**	**158,30**	**150,39**	**2.482,94**	**142,87**	**2.590,00**	**135,72**	**2.660,66**	**128,94**	**2.722,77**	**123,58**	**2.869,69**	**123,58**	**13.326,06**	
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah																
	Program pencegahan dini dan kesiapsiagaan	Jumlah Lokasi Penguatan Pengurangan Risiko Bencana	Lokasi	90,00	90,00	150,00	90,00	150,00	90	150,00	90	150,00	90	150,00	90	750,00	BPBD
	Program Penanganan Kedaruratan dan Logistik	Persentase Korban Bencana Yang Mendapat Bantuan	Persen	90,00	100,00	700,00	100,00	700,00	100	700,00	100	700,00	100	700,00	100	3.500,00	
	Program Pemulihan Pasca Bencana	Persentase sarana prasarana yang direhabilitasi dan direkonstruksi pascabencana	Persen	90,00	100,00	650,00	100,00	650,00	100	650,00	100	650,00	100	650,00	100	3.250,00	
	Dinas Pemadam Kebakaran																
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persen	60,00	65,00	982,94	70,00	1.090,00	75	1.160,66	80	1.222,77	85	1.369,69	85	5.826,06	DISDAMKAR

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Lombok Barat berisi program – program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yag telah tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program – program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai bahan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan renstra perangkat daerah.

Pencapaian target kinerja program (outcome) di masing – masing urusan tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Barat saja, namun juga bersumber pendanaan lainnya seperti APBN dan sumber – sumber pendanaan lain. Kerangka pendanaan pembangunan daerah serta indikasi kebutuhan pendanaan untuk program prioritas Kabupaten Lombok Barat pada bab ini hanya akan mencantumkan pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Barat saja. Pada bab ini akan ditampilkan program prioritas dalam rangka pencapaian indikator kinerja daerah serta seluruh program dan pagu indikatif pada setiap urusan pemerintahan.

Tabel 7. 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Lombok Barat

KAPASITAS RIIL / BELANJA	PROYEKSI				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Rp. Milyar	Rp. Milyar	Rp. Milyar	Rp. Milyar	Rp. Milyar
KAPASITAS RIIL KEUANGAN					
BELANJA	**1.988,21**	**2.088,29**	**2.236,14**	**2.341,79**	**2.396,46**
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**1.016,40**	**1.088,23**	**1.197,31**	**1.265,43**	**1.288,20**
Belanja Pegawai	689,65	743,44	758,31	797,81	800,81
Belanja Bunga	-	3,00	3,00	3,00	3,00
Belanja Hibah	44,55	53,46	64,15	64,15	64,15
Belanja Bantuan Sosial	6,83	6,83	51,08	51,08	48,53
Belanja Bagi Hasil	14,78	17,74	31,05	31,05	46,57
Belanja Bantuan Keuangan	257,63	260,21	286,23	314,85	321,15
Belanja Tidak Terduga	2,96	3,55	3,50	3,50	4,00
BELANJA LANGSUNG	**971,81**	**1.000,06**	**1.038,83**	**1.076,36**	**1.108,26**
Belanja Pegawai	27,53	31,23	35,69	38,54	39,31
Belanja Modal	440,67	445,08	458,43	476,77	491,07
Belanja Barang dan Jasa	503,61	523,76	544,71	561,05	577,88

Selanjutnya tersaji dalam tabel berikut adalah Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Bidang Urusan masing-masing.

Tabel 7. 2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Lombok Barat

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR	
				Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta
TOTAL BELANJA LANGSUNG					**1.098.155,47**		**933.499,79**		**973.669,80**		**1.018.213,99**		**1.069.332,68**		**5.031.146,19**
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					**851.250,18**		**723.961,18**		**747.696,20**		**784.137,84**		**813.776,67**		**3.920.822,08**
PENDIDIKAN					**1.098.155,47**		**933.499,79**		**973.669,80**		**1.018.213,99**		**1.069.332,68**		**5.031.146,19**
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					**146.528,18**		**152.977,01**		**157.217,86**		**162.521,69**		**163.619,46**		**782.864,21**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	100,00	12.935,65	100,00	13.107,59	100,00	13.508,44	100,00	13.913,12	100,00	14.330,56	100,00	67.795,36
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	2.134,74	100,00	1.292,00	100,00	1.356,10	100,00	1.424,56	100,00	1.497,53	100,00	7.704,92
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase pelayanan pendidikan	Persen	100,00	100,00	1.266,86	100,00	1.241,00	100,00	1.303,05	100,00	1.368,20	100,00	1.436,61	100,00	6.615,72
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya disilpin aparatur	Persen	100,00	0,00	300,00	100,00	200,00	100,00	250,00	100,00	300,00	100,00	350,00	100,00	1.400,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100,00	100,00	350,00	100,00	300,00	100,00	350,00	100,00	400,00	100,00	450,00	100,00	1.850,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100,00	100,00	425,00	100,00	375,00	100,00	400,00	100,00	450,00	100,00	500,00	100,00	2.150,00
Program Pendidikan Non Formal	Persentase pelaksanaan pendidikan non formal	Persen	100,00	100,00	2.050,00	100,00	2.890,00	100,00	2.950,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	13.890,00
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah sanggar seni sekolah	sanggar	42,00	42,00	10.359,43	42,00	12.032,25	42,00	13.261,10	42,00	14.501,65	42,00	14.765,58	42,00	64.920,01
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD Paket A	Persen	100,00	100,00	111.028,61	100,00	118.889,17	100,00	120.889,17	100,00	123.889,17	100,00	123.889,17	100,00	598.585,29
	APK SMP Paket B	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	0
	APM SD Paket A	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	0
	APM SMP Paket B	Persen	99,00	99,00		99,00		99,00		100,00		100,00		100,00	0

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR	
				Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Angka Putus Sekolah SD	Persen	100,00	100,00	5.677,90	100,00	2.650,00	100,00	2.950,00	100,00	3.275,00	100,00	3.400,00	100,00	17.952,90
	Angka Putus sekolah SMP	Persen		1,00											
	Angka Melanjutkan jenjang SD ke SMP	Persen		100,00											
	Angka Melanjutkan SMP ke SMA	Persen		96,00											
KESEHATAN					**293.384,43**		**300.235,49**		**308.154,65**		**321.161,05**		**345.938,54**		**1.568.874,17**
DINAS KESEHATAN					**227.712,87**		**234.540,06**		**241.663,37**		**248.838,93**		**257.748,63**		**1.210.503,87**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	100,00	3.801,58	100,00	4.039,22	100,00	4.216,44	100,00	4.342,94	100,00	4.473,22	100,00	20.873,40
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	1.789,70	100,00	2.404,74	100,00	1.415,98	100,00	4.190,28	100,00	4.315,99	100,00	14.116,69
Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur	Persen	100,00	100,00	69,00	100,00	36,05	100,00	109,13	100,00	38,25	100,00	39,39	100,00	291,82
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100,00	100,00	60,69	100,00	62,51	100,00	64,38	100,00	66,31	100,00	68,30	100,00	322,19
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100,00	100,00	361,49	100,00	384,83	100,00	396,38	100,00	408,27	100,00	420,51	100,00	1.971,48
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Obat Memenuhi Standar yang Tersedia di Puskesmas	Persen	100,00	100,00	6.192,56	100,00	5.842,27	100,00	6.406,67	100,00	6.598,88	100,00	6.796,84	100,00	31.837,23
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yg tersertifikasi akreditasi	Persen	100,00	100,00	19.943,75	100,00	18.697,11	100,00	20.341,38	100,00	20.951,62	100,00	21.580,17	100,00	101.514,04
	Persentase kabupaten yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR	
				Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan Skrining kesehatan sesuai standar	Persen	15,00	20,00		40,00		60,00		80,00		100,00		100,00	
	Persentase penderita Hipertansi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	1,45	1,42		1,40		1,37		1,35		1,33		1,33	
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	22,98	22,98		22,98		22,98		22,98		22,98		22,98	
	Persentase pendrita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	29,84	34,82		37,79		41,04		44,59		48,45		48,45	
Program Pengawasan Obat dan Makanan	Presentase Temuan Obat dan Makanan yang Memenuhi Standar	Persen	98,00	100,00	60,00	100,00	61,80	100,00	63,65	100,00	65,56	100,00	67,53	100,00	318,55
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Persen	71,58	74,00	707,48	76,00	381,56	78,00	393,01	80,00	404,80	82,00	461,48	82,00	2.348,34
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	-	30,00		40,00		50,00		60,00		70,00		70,00	
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun (Balita)	Persen	28,96	24,00	293,59	22,50	2.238,63	21,00	2.449,90	20,00	2.523,39	19,00	2.599,10	19,00	10.104,61

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR	
				Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase masyarakat mengakses jamban yang memenuhi syarat kesehatan	Persen	75,03	80,00	1.978,75	85,00	2.007,21	90,00	2.200,25	95,00	2.266,26	100,00	2.334,25	100,00	10.786,72
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima Imunisasi Dasar Lengkap (Lanjutan DPT-Hb-Hib3 dan MR)	Persen	100,80	93,00	4.550,07	93,50	4.380,40	94,00	4.780,76	94,50	4.924,18	95,00	5.071,91	95,00	23.707,32
	Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar	Persen	94,78	95,00		96,00		97,00		98,00		100,00		100,00	
	Persentase Orang dengan resiko Terinfeksi HIV mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai standar	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas Yang Terakreditasi	Persen	100,00	100,00	3.023,20	100,00	2.820,86	100,00	3.047,83	100,00	3.139,26	100,00	3.233,44	100,00	15.264,59
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	Persentase Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	Persen	90,00	92,00	63.116,36	94,00	82.702,18	96,00	68.038,85	98,00	70.080,02	100,00	72.182,42	100,00	356.119,83
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase sarana, prasarana dan alat kesehatan RS tercukupi da;am pemenuhan sesuai dengan ASPAK	Persen	-	50,00	49.025,00	52,00	41.833,70	55,00	44.409,24	59,00	43.009,52	65,00	45.699,80	65,00	223.977,26
	Persentase Penggunaan Tempat Tidur (BOR)	Persen	-	51,00		55,00		60,00		63,00		66,00		66,00	
	Angka Perputaran Tempat Tidur (BTO)	Kali	-	57,00		59,00		61,00		63,00		65,00		65,00	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR	
				Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta
	Masa Tenggang Perputaran Tempat Tidur (TOI)	Hari	-	3,00		3,00		3,00		2,00		2,00		2,00	
	Rata-rata Lamanya Pasien Dirawat (ALOS)	Hari	-	4,00		4,00		5,00		6,00		6,00		6,00	
	Angka Kematian secara umum (GDR)	Per Mil	-	45,00		45,00		45,00		45,00		45,00		45,00	
	Angka Kematian lebih dari 48 Jam setelah dirawat setiap 1000 pasien keluar (NDR)	Per Mil	-	25,00		25,00		25,00		25,00		25,00		25,00	
Program pemeliharaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persen	100,00	100,00	6.385,00	100,00	4.451,85	100,00	4.869,28	100,00	5.015,36	100,00	5.165,82	100,00	25.887,30
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	70,10	100,00	8.121,04	100,00	7.457,94	100,00	13.598,42	100,00	14.006,37	100,00	14.426,56	100,00	57.610,32
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	98,93	97,73	282,56	97,94	291,04	96,77	299,77	96,99	308,76	95,85	318,02	95,85	1.500,14
	Cakupan Pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	88,32	88,41		88,51		88,60		88,69		88,78		88,78	
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase Pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Persen	18,91	18,77	86,26	18,89	88,85	19,01	91,52	19,13	94,26	19,26	97,09	19,26	457,98
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Persentase Rumah makan dan restauran yang mendapatkan sertifikat laik ijin sanitasi rumah makan/restauran	Persen	87,89	88,89	82,60	89,73	54,18	90,46	55,80	91,09	57,48	91,64	59,20	91,64	309,26
Program Peningkatan Keselamatan Ibu dan Melahirkan dan Anak	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	92,33	92,34	2.114,34	92,36	2.177,77	92,37	2.385,56	92,38	2.457,12	92,39	2.530,84	92,39	11.665,62

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR	
				Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta
	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persen	95,39	95,66		95,80		96,07		96,21		96,48		96,48	
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase Realisasi PAD Dinas Kesehatan (BLUD)	Persen	79,90	80,00	55.667,85	82,00	52.125,36	84,00	62.029,17	86,00	63.890,05	88,00	65.806,75	88,00	299.519,18
RSUD PATUT PATUH PATJU					**65.671,56**		**65.695,44**		**66.491,28**		**72.322,12**		**88.189,91**		**358.370,30**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	90,00	100,00	2.450,00	100,00	2.849,36	100,00	2.949,08	100,00	3.052,30	100,00	3.159,13	100,00	14.459,87
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persen	90,00	100,00	765,00	100,00	853,88	100,00	883,76	100,00	914,69	100,00	946,71	100,00	4.364,03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin apratur	Persen	100,00	100,00	30,00	100,00	31,05	100,00	32,14	100,00	33,26	100,00	34,43	100,00	160,87
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	80,00	100,00	100,00	100,00	103,50	100,00	107,12	100,00	110,87	100,00	114,75	100,00	536,25
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	80,00	100,00	20,92	100,00	21,65	100,00	22,41	100,00	23,20	100,00	24,01	100,00	112,19
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan Rumah Sakit	Persen	60,00	80,00	46.698,77	82,00	45.931,50	84,00	45.964,10	86,00	50.997,85	88,00	66.032,77	88,00	255.624,99
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase sumber daya aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas	Persen	100,00	100,00	30,00	100,00	31,05	100,00	32,14	100,00	33,26	100,00	34,43	100,00	160,87
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase standar pelayanan kesehatan yang disusun selama 1 tahun	Persen	100,00	100,00	35,00	100,00	36,23	100,00	37,49	100,00	38,81	100,00	40,16	100,00	187,69
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase peningkatan kualitas dokter dan paramedis selama 1 tahun	Persen	100,00	100,00	445,00	100,00	146,97	100,00	152,11	100,00	157,44	100,00	162,95	100,00	1.064,47

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR	
				Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	Jumlah Gedung Rumah Sakit yang sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit Tipe B	Unit	1,00	1,00	14.096,87	1,00	14.590,26	1,00	15.100,92	1,00	15.629,45	1,00	16.176,48	5,00	75.593,96
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	Presentase Gedung Rumah Sakit yang dipelihara selama 1 tahun	Persen	100,00	100,00	1.000,00	100,00	1.100,00	100,00	1.210,00	100,00	1.331,00	100,00	1.464,10	100,00	6.105,10
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					**357.697,73**		**214.322,53**		**224.895,76**		**242.494,74**		**245.119,66**		**1.284.530,43**
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					**357.697,73**		**214.322,53**		**224.895,76**		**242.494,74**		**245.119,66**		**1.284.530,43**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	90,00	100	1.828,56	100	1.846,84	100	1.865,31	100	1.883,96	100	1.902,80	100	9.327,48
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	90,00	100	133.182,40	100	10.562,07	100	15.867,69	100	21.176,37	100	21.488,13	100	202.276,66
Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	Persen	100	100	31,63	100	31,94	100	32,26	100	32,58	100	32,91	100	161,32
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	Persentase kenaikan SDM penyediaan jasa konstruksi yang kompeten	Persen	50,00	52,00	538,22	54,00	543,60	56,00	549,04	57,00	554,53	59,00	560,07	59	2.745,47
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100,00	100,00	328,23	100,00	331,51	100,00	334,83	100,00	338,18	100,00	341,56	100	1.674,31
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase Tersedianya data dan pengembangan pembangunan disetiap wilayah	Persen	100,00	100,00	17.381,82	100,00	7.555,63	100,00	7.731,19	100,00	7.908,50	100,00	8.087,59	100	48.664,73
Program Peningkatan Sarana Prasarana Kebinamargaan	Persentase Penyediaan peralatan berat dan laporan mutu hasil pengujian	Persen	100,00	100,00	1.405,15	100,00	1.419,20	100,00	1.433,39	100,00	1.447,73	100,00	1.462,21	100	7.167,68

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR	
				Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan/Jembatan yang terbangun	Persen	100,00	100,00	86.681,22	100,00	82.548,03	100,00	83.423,51	100,00	89.307,75	100,00	90.200,82	100	432.161,33
Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan mantap yang terpelihara	km	191,00	191,28	33.143,55	193,45	30.474,99	196,70	30.809,74	201,51	34.147,84	203,89	34.489,31	204	163.065,43
Program Pengelolaan Sanitasi Layak	Persentase Rumah tangga dengan akses sanitasi layak	Persen	85,93	86,28	8.600,00	86,46	8.686,00	86,64	8.772,86	86,82	8.860,59	87,00	8.949,19	87	43.868,64
Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaaan	Persentase jumlah RT yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Persen	30,86	31,41	9.460,44	31,69	9.555,04	31,97	9.650,59	32,25	9.747,10	32,53	9.844,57	33	48.257,75
	Persentase jumlah RT yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi	Persen	47,79	48,35		48,63		48,91		49,19		49,47		49	
Program Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi:Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Prosentase panjang Jaringan Irigasi kondisi baik	Persen	56,16	57,44	49.672,95	58,08	50.169,68	58,73	50.671,37	59,37	51.178,09	60,00	51.689,87	60	253.381,95
Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	Persentase fungsi sungai, waduk, embung, dan sumber daya air lainnya untuk multi sektor	Persen	23,00	23,00	13.324,02	100,00	13.457,26	100,00	13.591,83	100,00	13.727,75	100,00	13.865,02	100	67.965,87
Program Pengendalian Banjir	Persentase pengendalian daya rusak air sungai	Persen	4,00	4,00	253,00	2,45	255,53	2,59	258,09	2,73	260,67	2,87	263,27	3	1.290,55
Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase dokumen perencanaan teknis tata ruang	Persen	2,00	2,00	1.718,75	100,00	1.735,94	100,00	1.753,30	100,00	1.770,83	100,00	1.788,54	100	8.767,35
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	Persen	50,22	53,48	147,79	55,11	149,27	56,74	150,76	58,37	152,27	60,00	153,80	60	753,90

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR	
				Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN					**34.937,94**		**35.287,32**		**35.640,19**		**35.996,59**		**36.356,56**		**178.218,59**
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN					**34.937,94**		**35.287,32**		**35.640,19**		**35.996,59**		**36.356,56**		**178.218,59**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	0,75	0,75	330,15	0,75	333,45	0,75	336,79	0,75	340,16	0,75	343,56	1	1.684,11
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	75,00	75,00	627,49	75,00	633,76	75,00	640,10	75,00	646,50	75,00	652,97	75	3.200,82
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	0,55	0,55	202,49	0,55	204,52	0,55	206,56	0,55	208,63	0,55	210,71	1	1.032,92
Program Pengembangan Perumahan	Prosentase Rumah Layak Huni (RLH)	Persen	90,00	97,72	1.594,32	97,97	1.610,26	98,22	1.626,37	98,46	1.642,63	98,69	1.659,06	99	8.132,63
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Prosentase Sarana dan Prasarana PSU	Persen	3,50	4,00	475,00	6,00	479,75	8,00	484,55	10,00	489,39	12,00	494,29	12	2.422,98
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Prosentase permukiman yang tertata	Persen	47,31	47,51	5.869,75	47,69	5.928,45	47,87	5.987,74	48,07	6.047,61	48,27	6.108,09	48,27	29.941,64
Program Penataan Kawasan Perkotaan	Prosentase luasan permukiman di kawasan perkotaan yang tertata	Persen	0,50	0,50	25.838,73	0,65	26.097,12	0,68	26.358,09	0,70	26.621,67	0,73	26.887,89	1	131.803,50
KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARKAT					**11.997,67**		**13.077,01**		**13.650,74**		**13.754,11**		**14.481,30**		**66.960,83**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					**2.853,04**		**3.492,48**		**3.185,76**		**3.251,33**		**3.333,78**		**16.116,39**
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Penanganan kejadian terkait konflik sosial	Persen	100,00	100,00	1.493,53	100,00	1.538,33	100,00	1.584,48	100,00	1.632,02	100,00	1.680,98	100,00	7.929,33
Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan Wasbang	Persen	100,00	100,00	333,49	100,00	512,40	100,00	512,40	100,00	512,40	100,00	512,40	100,00	2.383,08

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR	
				Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta
Program pendidikan politik masyarakat	Persentase masyarakat yang paham terhadap aspek-aspek politik	Persen	100,00	100,00	141,25	100,00	145,49	100,00	149,85	100,00	154,35	100,00	158,98	100,00	749,91
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS	Persentase masyarakat yang paham terhadap pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN)	Persen	100,00	100,00	131,11	100,00	135,04	100,00	139,09	100,00	143,27	100,00	147,56	100,00	696,07
Program Ketahanan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase anggota organisasi kemasyarakatan yang paham tentang keormasan	Persen	100,00	100,00	41,59	100,00	42,84	100,00	44,12	100,00	45,45	100,00	46,81	100,00	220,82
Program Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya	Persentase ketahanan ekonomi sosial budaya	Persen	100,00	100,00	19,37	100,00	19,95	100,00	20,54	100,00	21,16	100,00	21,80	100,00	102,81
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administasi perkantoran	Persen	100,00	100,00	453,23	100,00	466,83	100,00	480,84	100,00	495,26	100,00	510,12	100,00	2.406,29
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	172,64	100,00	562,77	100,00	183,52	100,00	174,40	100,00	179,92	100,00	1.273,26
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100,00	100,00	66,83	100,00	68,84	100,00	70,90	100,00	73,03	100,00	75,22	100,00	354,83
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					**4.773,20**		**5.011,86**		**5.262,45**		**5.525,58**		**5.801,85**		**26.374,94**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	1.004,40	100	1.054,62	100,00	1.107,35	100	1.162,72	100	1.220,85	100	5.549,94
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	90,00	90,00	745,00	90,00	782,25	90,00	821,36	90,00	862,43	90,00	905,55	90	4.116,60
Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur	Persen	95,00	95,00	206,00	95,00	216,30	95,00	227,12	95,00	238,47	95,00	250,39	95	1.138,28

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR	
				Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100	100	120,00	100	126,00	100	132,30	100	138,92	100	145,86	100	663,08
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	86,00	100	145,00	100	152,25	100	159,86	100	167,86	100	176,25	100	801,22
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibmas dan Konflik Sosial	Persen	90,00	80,00	398,00	82,00	417,90	85,00	438,80	87,00	460,73	90,00	483,77	90	2.199,20
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Cakupan Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	90,00	1.212,00	90,00	1.272,60	90,00	1.336,23	90,00	1.403,04	90,00	1.473,19	90	6.697,07
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat per 10.000 Penduduk	Persen	98,00	16,49	115,00	19,49	120,75	22,38	126,79	25,18	133,13	27,89	139,78	1	635,45
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persentase Pelaksanaan Penertiban / Operasi Pekat	Persen	80,00	100	150,00	100	157,50	100	165,38	100	173,64	100	182,33	100	828,84
Program Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati	Persentase pelanggaran PERDA yang ditangani	Persen	6,00	98,00	677,80	98,00	711,69	98,00	747,27	98,00	784,64	98,00	823,87	98	3.745,27
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					**2.797,20**		**2.857,20**		**3.097,20**		**2.707,20**		**2.707,20**		**14.166,00**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	90,00	100	442,70	100	442,70	100	442,70	100	442,70	100	442,70	100	2.213,50
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	90,00	100	600,00	100	700,00	100	900,00	100	550,00	100	550,00	100	3.300,00
Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur	Paket	90,00	100	120,00	100	80,00	100	120,00	100	80,00	100	80,00	100	480,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	95,00	100	134,50	100	134,50	100	134,50	100	134,50	100	134,50	100	672,50

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR	
				Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta
Program pencegahan dini dan kesiapsiagaan	Jumlah Lokasi Penguatan Pengurangan Risiko Bencana	Lokasi	90,00	90,00	150,00	90,00	150,00	90,00	150,00	90,00	150,00	90,00	150,00	90	750,00
Program Penanganan Kedaruratan dan Logistik	Persentase Korban Bencana Yang Mendapat Bantuan	Persen	90,00	100	700,00	100	700,00	100	700,00	100	700,00	100	700,00	100	3.500,00
Program Pemulihan Pasca Bencana	Persentase sarana prasarana yang direhabilitasi dan direkonstruksi pascabencana	Persen	90,00	100	650,00	100	650,00	100	650,00	100	650,00	100	650,00	100	3.250,00
DINAS PEMADAM KEBAKARAN					**1.574,23**		**1.715,47**		**2.105,33**		**2.270,00**		**2.638,47**		**10.303,50**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	254,77	100	269,00	100	411,58	100	429,16	100	509,32	100	1.873,83
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100	211,82	100	221,10	100	312,05	100	366,96	100	476,78	100	1.588,71
Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur	Persen	100	100	100,00	100	102,00	100	124,05	100	147,20	100	171,51	100	644,77
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100	100	24,69	100	33,37	100	97,00	100	103,91	100	111,17	100	370,14
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persen	60,00	65,00	982,94	70,00	1.090,00	75,00	1.160,66	80,00	1.222,77	85,00	1.369,69	85	5.826,06
SOSIAL					**6.704,22**		**8.061,82**		**8.137,00**		**8.209,66**		**8.261,16**		**39.373,85**
DINAS SOSIAL					**6.704,22**		**8.061,82**		**8.137,00**		**8.209,66**		**8.261,16**		**39.373,85**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	100,00	402,73	100,00	406,71	100,00	407,41	100,00	407,51	100,00	408,51	100,00	2.032,86
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	396,50	100,00	403,50	100,00	374,50	100,00	365,00	100,00	325,50	100,00	1.865,00

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR	
				Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Disiplin Aparatur	Persen	100,00	100,00	25,00	100,00	12,00	100,00	28,00	100,00	15,00	100,00	37,50	100,00	117,50
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100,00	100,00	163,03	100,00	166,45	100,00	171,55	100,00	176,65	100,00	176,65	100,00	854,33
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Persen	60,00	60,00	640,32	70,00	693,00	80,00	716,00	85,00	740,00	90,00	774,00	90,00	3.563,32
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	Persentase warga miskin/PMKS tergabung dalam KUBe yang mendapatkan bantuan sosial guna meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	60,00	60,00	2.021,00	70,00	2.038,00	80,00	2.046,00	85,00	2.053,00	90,00	2.060,00	90,00	10.218,00
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase kelembagaan sosial atau PSKS skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial dan mendukung penanganan PMKS	Persen	35,25	35.72	1.616,83	39.70	1.855,00	43.68	1.870,00	47.66	1.886,00	51.64	1.893,00	51.64	9.120,83
Program Perlindungan Jaminan Sosial	Persentase masyarakat miskin/PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Persen	75,00	80,00	324,94	85,00	1.260,00	90,00	1.271,00	93,00	1.281,50	95,00	1.289,00	95,00	5.426,44
Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat	Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani pada saat dan setelah tanggap darurat	Persen	75,00	80,00	380,39	85,00	455,00	90,00	459,00	93,00	465,00	95,00	469,00	95,00	2.228,39

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR	
				Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta
Program Pengembangan Sistem Informasi Sosial Dasar Terpadu	Persentase data Warga miskin/PMKS yang terverifikasi dan tervalidasi	Persen	59,00	60,00	733,49	70,00	772,16	80,00	793,54	85,00	820,00	90,00	828,00	90,00	3.947,19
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR					**88.427,03**		**80.746,26**		**95.967,84**		**100.892,27**		**116.714,98**		**481.891,33**
TENAGA KERJA					**3.974,50**		**5.032,14**		**5.176,85**		**5.303,42**		**5.428,46**		**24.915,38**
DINAS TENAGA KERJA					**3.974,50**		**5.032,14**		**5.176,85**		**5.303,42**		**5.428,46**		**24.915,38**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung tugas dan fungsi OPD	Persen	100,00	100,00	438,40	100,00	453,19	100,00	467,37	100,00	481,94	100,00	497,92	100,00	2.338,82
Program Peningkatan Sarana dan Prarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	880,00	100,00	1.275,85	100,00	1.316,88	100,00	1.326,68	100,00	1.336,78	100,00	6.136,19
Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	Persen	100,00	100,00	15,00	100,00	5,00	100,00	5,00	100,00	5,00	100,00	5,00	100,00	35,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100,00	100,00	50,00	100,00	50,00	100,00	50,00	100,00	50,00	100,00	50,00	100,00	250,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100,00	100,00	129,20	100,00	133,73	100,00	135,21	100,00	136,73	100,00	142,30	100,00	677,18
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lulusan pelatihan kerja yang memiliki keterampilan/kompetensi	Persen	100,00	100,00	801,90	100,00	1.185,97	100,00	1.219,00	100,00	1.253,02	100,00	1.288,06	100,00	5.747,94
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase peningkatan kesempatan kerja	Persen	90,00	95,00	1.280,00	96,00	1.532,30	96,00	1.575,87	97,00	1.630,75	97,00	1.676,97	97,00	7.695,88
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang diberikan pembinaan	Persen	27,00	30,00	380,00	35,00	396,10	35,00	407,53	40,00	419,31	40,00	431,44	40,00	2.034,38

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR	
				Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK					**500,52**		**518,03**		**536,16**		**554,93**		**574,35**		**2.684,00**
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK					**500,52**		**518,03**		**536,16**		**554,93**		**574,35**		**2.684,00**
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Persen	100	100	50,52	100	52,28	100	54,11	100	56,01	100	57,97	100	270,89
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan	Persentase perempuan Caleg peserta pemilu	Persen	15,56	16,34	150,00	17,15	155,25	18,01	160,68	18,91	166,31	19,86	172,13	20	804,37
	Persentase perempuan pejabat struktural di lembaga eksekutif	Persen	28,00	29,40		31,11		32,91		34,82		36,84			
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Persentase kelembagaan PUG aktif	Persen	0,00	89,00	175,00	90,00	181,13	90,50	187,46	91,00	194,03	91,50	200,82	92	938,43
Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan dan eksploitasi yang mendapat penanganan pengaduan oleh tenaga terlatih di UPT	Persen	100	100	125,00	100	129,38	100	133,90	100	138,59	100	143,44	100	670,31
PANGAN					**1.546,30**		**1.600,42**		**1.656,44**		**1.714,42**		**1.774,42**		**8.292,00**
DINAS KETAHANAN PANGAN					**1.546,30**		**1.600,42**		**1.656,44**		**1.714,42**		**1.774,42**		**8.292,00**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	90,00	100	327,81	100	339,28	100	351,15	100	363,45	100	376,17	100	1.757,85
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	90,00	100	197,98	100	204,91	100	212,08	100	219,50	100	227,19	100	1.061,66

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR	
				Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	90,00	100	70,77	100	73,25	100	75,81	100	78,46	100	81,21	100	379,50
Program Peningkatan Ketahan Pangan	Peningkatan PPH	Persen	79,00	80,00	949,75	81,50	982,99	83,00	1.017,39	84,50	1.053,00	86,00	1.089,86	86	5.092,99
PERTANAHAN					**21.832,40**		**11.912,41**		**24.239,03**		**28.361,44**		**42.235,99**		**128.581,27**
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					**21.832,40**		**11.912,41**		**24.239,03**		**28.361,44**		**42.235,99**		**128.581,27**
Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah Konflik pertanahan yang terfasilitasi penyelesaiannya melalui jalur non Litigasi (Mediasi)	Kasus	3,00	3,00	770,38	3,00	808,90	3,00	849,34	3,00	891,81	3,00	936,40	18,00	4.256,82
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah sertifikat tanah aset Pemda yang terbit	Sertifikat	991,00	100,00	20.865,51	100,00	10.855,02	100,00	23.133,74	100,00	27.206,01	100,00	41.028,06	100,00	123.088,34
Program pengembangan sistem informasi pertanahan	Tersedianya data base aset dalam Simda BMD	Persen	95,00	100,00	196,51	100,00	248,49	100,00	255,95	100,00	263,62	100,00	271,53	100,00	1.236,11
LINGKUNGAN HIDUP					**10.192,82**		**10.488,43**		**10.792,76**		**11.106,06**		**11.427,64**		**54.007,70**
DINAS LINGKUNGAN HIDUP					**10.192,82**		**10.488,43**		**10.792,76**		**11.106,06**		**11.427,64**		**54.007,70**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	341,00	100	352,94	100	365,29	100	378,07	100	391,31	100	1.828,60
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100	195,70	100	202,55	100	209,64	100	216,98	100	224,57	100	1.049,43
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100	100	92,30	100	95,53	100	98,87	100	102,33	100	105,92	100	494,96
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	Persen	60,83	61,00	6.436,32	61,10	6.616,09	61,20	6.800,99	61,30	6.991,17	61,40	7.185,82	61	34.030,39

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR	
				Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Indeks	22,75	25,10	1.552,50	27,60	1.599,08	30,20	1.647,05	32,50	1.696,46	35,00	1.747,35	35	8.242,43
Program peningkatan pengendalian polusi	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Indeks	91,04	91,15	250,00	91,20	257,50	91,40	265,23	91,60	273,18	91,60	281,38	92	1.327,28
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Prosentase konservasi sumber mata air	Persen	29,84	33,72	1.190,00	37,60	1.225,70	41,47	1.262,47	45,35	1.300,35	49,22	1.339,36	49	6.317,87
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Persentase lahan eks tambang bahan galian Non Logam yang direklamasi	Persen	63,87	67,10	60,00	70,32	61,80	73,55	63,65	76,77	65,56	80,00	67,53	80	318,55
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase permintaan data informasi lingkungan yang dilayani sesuai UU keterbukaan Informasi Publik	Persen	100,00	100	75,00	100	77,25	100	79,57	100	81,95	100	84,41	100	398,19
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					**5.169,35**		**5.169,10**		**5.170,90**		**5.171,50**		**5.173,65**		**25.854,50**
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					**5.169,35**		**5.169,10**		**5.170,90**		**5.171,50**		**5.173,65**		**25.854,50**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	555,92	100,00	559,05	100,00	564,10	100,00	567,90	100,00	570,60	100,00	2.817,57
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	977,00	100,00	908,00	100,00	985,60	100,00	875,50	100,00	697,70	100,00	4.443,80
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persen	100,00	100,00	57,97	100,00	58,95	100,00	69,50	100,00	60,10	100,00	60,65	100,00	307,17
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Penataan Administrasi Kependudukan	Persen	90,00	92,00	1714,88	93,00	1.771,60	94,00	1.675,20	95,00	1.786,00	96,00	1.958,50	96,00	8.906,18
Program Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Layanan Administrasi Kependudukan	Persen	95,00	96,00	1.863,58	97,00	1.871,50	98,00	1.876,50	99,00	1.882,00	100,00	1.886,20	100,00	9.379,78

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR	
				Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					**2.507,43**		**2.582,65**		**2.660,13**		**2.739,94**		**2.822,14**		**13.312,28**
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					**2.507,43**		**2.582,65**		**2.660,13**		**2.739,94**		**2.822,14**		**13.312,28**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	100,00	253,34	100,00	260,94	100,00	268,77	100,00	276,83	100,00	285,14	100,00	1.345,02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	275,41	100,00	283,67	100,00	292,18	100,00	300,95	100,00	309,98	100,00	1.462,19
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur	Persen	100,00	100,00	10,00	100,00	10,30	100,00	10,61	100,00	10,93	100,00	11,26	100,00	53,09
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas aparatur	Persen	100,00	100,00	20,00	100,00	20,60	100,00	21,22	100,00	21,85	100,00	22,51	100,00	106,18
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100,00	100,00	47,28	100,00	48,69	100,00	50,15	100,00	51,66	100,00	53,21	100,00	250,99
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Pendapatan Asli Desa (PAD) terhadap APBDes	Persen	0,58	1,00	750,89	1,25	773,41	1,50	796,62	1,75	820,52	2,00	845,13	2,00	3.986,56
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase APBDes yang dialokasikan untuk pengembangan BUMDes	Persen	3,03	5,00	21,00	6,00	21,63	7,00	22,28	8,00	22,95	9,00	23,64	9,00	111,49
Prog. Peningkatan Partisipasi Masy. dalam Membangun Desa	Persentase swadaya masyarakat terhadap pembangunan	Persen	6,08	7,00	429,89	8,00	442,79	9,00	456,07	10,00	469,76	11,00	483,85	11,00	2.282,37
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase desa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBDes tepat waktu	Persen	39,50	50,00	699,62	55,00	720,61	60,00	742,23	65,00	764,50	70,00	787,43	70,00	3.714,39
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					**7.751,31**		**8.022,61**		**8.303,40**		**8.594,02**		**8.894,81**		**41.566,14**
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN					**7.751,31**		**8.022,61**		**8.303,40**		**8.594,02**		**8.894,81**		**41.566,14**

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR	
				Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta
PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK															
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	90,00	100	318,92	100	330,08	100	341,63	100	353,59	100	365,97	100	1.710,19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	90,00	100	324,56	100	335,92	100	347,68	100	359,85	100	372,44	100	1.740,44
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	90,00	100	107,18	100	110,93	100	114,81	100	118,83	100	122,99	100	574,75
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	90,00	100	139,33	100	144,21	100	149,26	100	154,48	100	159,89	100	747,17
Program Keluarga Berencana	Persentase Unmeetneed	Persen	10,30	10,09	6.266,44	9,89	6.485,77	9,69	6.712,77	9,50	6.947,72	9,31	7.190,89	9,31	33.603,59
	Persentase Cakupan Peserta KB Aktif	Persen	70,00	72,00		72,58		73,16		73,34		74,33		74,33	
	Persentase cakupan peserta KB MKJP	Persen	35,00	37,00		39,00		41,00		43,00		45,00		45,00	
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase PUS usia menikah di bawah usia 20 tahun	Persen	26,00	24,00	150,00	22,00	155,25	20,00	160,68	18,00	166,31	16,00	172,13	16,00	804,37
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase anggota UPPKS yang mandiri	Persen	91,00	92,00	120,00	93,00	124,20	94,00	128,55	95,00	133,05	96,00	137,70	96,00	643,50
Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	Persentase anggota kelompok tribina keluarga yang ber-KB	Persen	80,00	81,00	324,88	82,00	336,25	84,00	348,02	86,00	360,20	88,00	372,80	88,00	1.742,14
PERHUBUNGAN					**14.306,34**		**14.807,06**		**15.325,31**		**15.861,69**		**16.416,85**		**76.717,25**
DINAS PERHUBUNGAN					**14.306,34**		**14.807,06**		**15.325,31**		**15.861,69**		**16.416,85**		**76.717,25**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	545,54	100	564,64	100	584,40	100	604,85	100	626,02	100	2.925,45

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR	
				Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	65,00	100	280,17	100	289,97	100	300,12	100	310,63	100	321,50	100	1.502,39
Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur	Persen	0,00	100	130,00	100	134,55	100	139,26	100	144,13	100	149,18	100	697,12
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	90,00	100	88,20	100	91,29	100	94,48	100	97,79	100	101,21	100	472,96
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase jumlah pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Persen	25,00	50,00	609,82	75,00	631,17	87,50	653,26	87,50	676,12	87,50	699,78	88	3.270,15
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan yang terpelihara	Persen	85,00	100	484,19	100	501,13	100	518,67	100	536,83	100	555,62	100	2.596,44
Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Persentase peningkatan pelayanan angkutan yang layak dan memadai	Persen	85,00	100	2.210,54	100	2.287,91	100	2.367,99	100	2.450,87	100	2.536,65	100	11.853,96
Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	jumlah pembangunan dan pengembangan dermaga	Lokasi	1,00	1,00	8.305,50	1,00	8.596,20	1,00	8.897,06	1,00	9.208,46	1,00	9.530,76	1	44.537,97
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	prosentase ketersediaan rambu lalu lintas	Persen	30,00	57,97	1.421,51	65,56	1.471,26	73,16	1.522,76	80,75	1.576,06	88,35	1.631,22	88	7.622,81
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	prosentase angkutan yang yang diuji	Persen	95,00	95,00	230,86	95,00	238,94	95,00	247,31	95,00	255,96	95,00	264,92	95	1.238,00
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					**4.345,09**		**4.497,17**		**4.654,57**		**4.817,48**		**4.986,09**		**23.300,39**
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK					**4.345,09**		**4.497,17**		**4.654,57**		**4.817,48**		**4.986,09**		**23.300,39**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	90,00	100	463,24	100	479,46	100	496,24	100	513,61	100	531,58	100	2.484,13

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR	
				Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Bulan	95,00	100	216,46	100	224,04	100	231,88	100	240,00	100	248,40	100	1.160,77
Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur	Persen	80,00	100	68,71	100	71,12	100	73,61	100	76,18	100	78,85	100	368,47
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100	100	116,70	100	120,78	100	125,01	100	129,39	100	133,92	100	625,80
Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Persentase tingkat keamanan jaringan komunikasi dan informasi	Persen	100	100	67,89	100	70,27	100	72,73	100	75,27	100	77,91	100	364,06
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Jumlah SDM yang mengikuti diklat profesi	Orang	100	3,00	167,35	3,00	173,21	5,00	179,27	5,00	185,54	2,00	192,04	2	897,41
Program kerjasama informasi dengan mas media	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat di wilayah kabupaten lombok barat	Kelompok	100	25,00	280,07	30,00	289,88	35,00	300,02	40,00	310,52	45,00	321,39	45	1.501,89
Program Peningkatan Pelayanan dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah Kecamatan di wilayah kabupaten Lombok Barat yang terlayani Informasi	Persen	100	2,00	2.182,87	2,00	2.259,27	2,00	2.338,34	2,00	2.420,18	2,00	2.504,89	2	11.705,54
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase wilayah kabupaten lombok barat yang dijangkau oleh layanan komunikasi dan informasi	Persen	80,00	90,00	781,79	98,00	809,15	99,00	837,47	100	866,79	100	897,12	100	4.192,32
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH					**3.631,70**		**3.723,23**		**3.812,12**		**3.909,99**		**3.997,80**		**19.074,84**
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH					**3.631,70**		**3.723,23**		**3.812,12**		**3.909,99**		**3.997,80**		**19.074,84**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	100	512,00	100	508,65	100	527,87	100	552,00	100	569,00	100	2.669,52
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	100	349,70	100	385,00	100	389,00	100	394,00	100	397,00	100	1.914,70

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR	
				Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta
Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur	Persen	100,00	100	70,00	100	65,00	100	67,00	100	74,00	100	78,00	100	354,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persen	100,00	100	35,00	100	25,00	100	30,00	100	32,00	100	35,00	100	157,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100,00	100	190,00	100	195,00	100	212,00	100	235,00	100	254,00	100	1.086,00
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Peningkatan akses fasilitasi pembiayaan KUMK	KUMK	500	500	345,00	500	357,08	500	360,65	500	364,25	500	367,89	3000	1.794,87
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Peningkatan kualitas dan kapasitas koperasi	Koperasi	150	200	445,00	270	469,00	340	489,00	410	508,00	502	525,00	1872	2.436,00
Program Pengawasan Koperasi	Pengawasan terhadap koperasi	KSP/USP Kop	150	200	300,00	275	310,50	350,00	313,61	400,00	316,74	500,00	319,91	1875	1.560,75
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	Peningkatan kualias usaha mikro	UMK	500	500	1.100,00	500	1.103,00	500	1.106,00	500	1.107,00	500	1.109,00	3000	5.525,00
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Peningkatan jumlah UM-WUP dan UM-WUB	WUP dan WUB	500	500	285,00	500	305,00	500	317,00	500	327,00	500	343,00	3000	1.577,00
PENANAMAN MODAL					**1.517,45**		**1.620,56**		**1.677,03**		**1.735,47**		**1.795,94**		**8.346,44**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					**1.517,45**		**1.620,56**		**1.677,03**		**1.735,47**		**1.795,94**		**8.346,44**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	80,00	100,00	505,04	100,00	522,72	100,00	541,01	100,00	559,95	100,00	579,55	100	2.708,28
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	80,00	100,00	205,84	100,00	213,04	100,00	220,50	100,00	228,22	100,00	236,21	100	1.103,81

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR	
				Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur	Persen	80,00	100,00	-	100,00	50,00	100,00	51,50	100,00	53,05	100,00	54,64	100	209,18
Program Pendataan, Advokasi, Informasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Meningkatkan pemahaman masyarakat & Dunia Usaha tentang Perijinan	Persen	80,00	100,00	115,75	100,00	119,80	100,00	123,99	100,00	128,33	100,00	132,82	100	620,68
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	80,00	100,00	87,56	100,00	90,63	100,00	93,80	100,00	97,08	100,00	100,48	100	469,55
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan Non Usaha	Nilai PAD Meningkat	PAD	75,00	80,00	59,83	83,00	61,92	85,00	64,09	87,00	66,33	90,00	68,65	90	320,83
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan Usaha	Penerbitan Ijin Usaha	Jumlah Ijin	75,00	80,00	155,32	85,00	160,75	85,00	166,38	90,00	172,20	90,00	178,23	90	832,88
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Nilai Realisasi Investasi sektor Investasi PMA & PMDN	Persen	75,00	80,00	337,24	85,00	349,05	85,00	361,26	90,00	373,91	90,00	386,99	90	1.808,45
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Fasilitasi kerjasama Investasi	Persen	75,00	80,00	50,87	80,00	52,65	85,00	54,50	85,00	56,40	90,00	58,38	90	272,80
PEMUDA DAN OLAH RAGA					**5.790,90**		**5.960,23**		**6.315,22**		**6.327,16**		**6.516,97**		**30.910,48**
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA					**5.790,90**		**5.960,23**		**6.315,22**		**6.327,16**		**6.516,97**		**30.910,48**
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Pelayanan administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	485,09	100,00	499,64	100,00	514,63	100,00	530,07	100,00	545,97	100,00	2.575,41
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	325,71	100,00	335,48	100,00	521,73	100,00	355,20	100,00	365,85	100,00	1.903,98
Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase disiplin aparatur	Persen	100,00	100,00	15,00	100,00	15,45	100,00	15,91	100,00	16,39	100,00	16,88	100,00	79,64
Peningkatan Kapasitas Sumbef Daya Aparatur	Presentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100,00	100,00	6,00	100,00	6,18	100,00	6,37	100,00	6,56	100,00	6,75	100,00	31,85

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR	
				Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100,00	100,00	36,64	100,00	33,34	100,00	34,34	100,00	40,03	100,00	41,24	100,00	185,58
Program Pengembangan dan Keserasian kebijakan pemuda	Persentase Organisasi pemuda yang aktif	Persen	100,00	100,00	241,56	100,00	248,81	100,00	256,27	100,00	263,96	100,00	271,88	100,00	1.282,47
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Persentase meningkatnya keikutsertaaan pemuda dalam kegiatan kepemudan	Persen	100,00	100,00	809,25	100,00	833,53	100,00	858,53	100,00	884,29	100,00	910,82	100,00	4.296,42
Peningkatan Upaya penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Bagi Pemuda	Persentase Wirausaha Muda Berprestasi	Persen	100,00	100,00	72,70	100,00	74,88	100,00	77,13	100,00	79,44	100,00	81,83	100,00	385,98
Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Persentase Peningkatan Pencegahan penyalahgunaan narkoba	Persen	0,00	10,00	33,52	12,00	34,53	15,00	35,56	17,00	36,63	19,00	37,73	19,00	177,96
Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	Persen	100,00	100,00	527,45	100,00	543,27	100,00	559,57	100,00	576,36	100,00	593,65	100,00	2.800,30
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah Prestasi Pemuda di Tingkat Propinsi dan Nasional	orang	35,00	40,00	341,99	45,00	352,25	50,00	362,82	55,00	373,70	60,00	384,91	60,00	1.815,68
Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase peningkatan sarana prasarana olahraga	Persen	50,00	100,00	2.895,99	100,00	2.982,87	100,00	3.072,36	100,00	3.164,53	100,00	3.259,46	100,00	15.375,20
STATISTIK					**322,49**		**333,77**		**345,46**		**357,55**		**370,06**		**1.729,33**
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK					**322,49**		**333,77**		**345,46**		**357,55**		**370,06**		**1.729,33**
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase Jenis Data Sektoral yang dipublikasikan	Persen	60,00	80,00	322,49	85,00	333,77	90,00	345,46	95,00	357,55	100,00	370,06	100	1.729,33
KEBUDAYAAN					**2.185,41**		**1.521,14**		**1.521,66**		**1.472,98**		**1.349,64**		**7.193,77**
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					**2.185,41**		**1.521,14**		**1.521,66**		**1.472,98**		**1.349,64**		**7.193,77**

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR	
				Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta
Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase Pengembangan Nilai Budaya	Persen	100,00	100,00	842,47	100,00	671,14	100,00	601,66	100,00	512,98	100,00	349,64	100,00	2.977,88
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan kondisi baik	buah	1,00	1,00	485,89	2,00	850,00	2,00	920,00	2,00	960,00	100,00	1.000,00	100,00	4.215,89
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase kelompok kesenian masyarakat terbina	Persen	100,00	100,00	857,05	100,00	920,46	100,00	952,74	100,00	1.003,38	100,00	1.057,54	100,00	4.791,17
PERPUSTAKAAN					**1.080,81**		**1.113,24**		**1.146,63**		**1.181,03**		**1.216,47**		**5.738,19**
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN					**1.080,81**		**1.113,24**		**1.146,63**		**1.181,03**		**1.216,47**		**5.738,19**
Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Persentase tingkat minat baca masyarakat	Persen	8,48	8,48	1.080,81	8,52	1.113,24	8,58	1.146,63	8,63	1.181,03	8,67	1.216,47	8,67	5.738,19
KEARSIPAN					**1.772,23**		**1.844,08**		**2.634,17**		**1.683,20**		**1.733,70**		**9.667,37**
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN					**1.772,23**		**1.844,08**		**2.634,17**		**1.683,20**		**1.733,70**		**9.667,37**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	100,00	499,99	100,00	670,98	100,00	691,11	100,00	711,84	100,00	733,20	100,00	3.307,11
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	674,61	100,00	540,34	100,00	1.291,33	100,00	300,07	100,00	309,07	100,00	3.115,42
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur	Persen	100,00	100,00	22,48	100,00	24,77	100,00	25,51	100,00	26,28	100,00	27,07	100,00	126,11
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100,00	100,00	106,86	100,00	127,18	100,00	130,99	100,00	134,92	100,00	138,97	100,00	638,92
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Persentase sistem database administrasi kearsipan	Persen	100,00	100,00	14,90	100,00	15,35	100,00	15,81	100,00	16,28	100,00	16,77	100,00	79,11
Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Prosentase dokumen/arsip daerah yang terselamatkan dan terlestarikan	Persen	100,00	100,00	152,43	100,00	157,00	100,00	161,71	100,00	166,56	100,00	171,56	100,00	809,27

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR	
				Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta
Program Pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana kearsipan	Jumlah Perangkat Daerah (OPD) yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	OPD	27,00	30,00	139,20	34,00	143,38	38,00	147,68	41,00	152,11	43,00	156,67	43,00	739,03
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase OPD yang mengikuti sosialisasi /penyuluhan kearsipan	Persen	100,00	100,00	73,50	100,00	75,71	100,00	77,98	100,00	80,32	100,00	82,73	100,00	390,23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100,00	100,00	88,27	100,00	89,37	100,00	92,05	100,00	94,81	100,00	97,66	100,00	462,17
URUSAN PILIHAN					**62.306,86**		**54.978,77**		**54.924,39**		**55.944,73**		**57.466,75**		**221.441,51**
KELAUTAN DAN PERIKANAN					**6.107,85**		**6.381,24**		**6.791,80**		**7.029,72**		**7.521,78**		**33.832,40**
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					**6.107,85**		**6.381,24**		**6.791,80**		**7.029,72**		**7.521,78**		**33.832,40**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	100	550,47	100	577,99	100	606,89	100	637,24	100	669,10	100	3.041,70
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	65,00	70	330,52	75	346,55	80	423,88	100	382,07	100	463,67		1.946,70
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur	Persen	100,00	100	30,00	100	-	100	31,50	100	-	100	33,08		94,58
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100,00	100	20,00	100	21,00	100	22,05	100	23,15	100	24,31	100	110,51
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100,00	100	182,56	100	191,69	100	201,27	100	211,33	100	221,90	100	1.008,75
Program Pengembangan Statistik Kelautan dan Perikanan	Konsumsi ikan (Kg/kapita/th)	Kg/kapita/th	38,23	40,00	90,93	41,00	95,48	42,00	100,26	43,00	105,27	44,00	110,53	44	502,47
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat	Produksi Garam (Ton)	Ton	304,34	310,43	536,13	316,64	562,94	322,97	591,09	329,43	620,64	336,02	651,67	336	2.962,48

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR	
				Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta
Program pengembangan perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Ton	11498,60	12030,94	1.450,52	12271,56	1.523,05	12516,99	1.599,20	12767,33	1.673,56	13.022,68	1.802,24	13023	8.048,58
Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Ton	91106,83	94071,97	2.163,88	95953,41	2.272,08	97872,48	2.385,68	99829,93	2.504,97	101.826,52	2.630,22	101827	11.956,83
Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Produksi Pengolahan Perikanan (Ton)	Ton	3650,76	3819,94	752,82	3896,34	790,46	3974,27	829,98	4053,75	871,48	4.134,83	915,06	4135	4.159,80
PARIWISATA					**18.621,83**		**14.728,95**		**13.764,89**		**14.363,11**		**14.848,67**		**76.327,45**
DINAS PARIWISATA					**18.621,83**		**14.728,95**		**13.764,89**		**14.363,11**		**14.848,67**		**76.327,45**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	90,00	100	559,50	100	590,63	100	623,88	100	657,75	100	691,50	100	3.123,25
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	100	100	247,00	100	897,10	100	307,20	100	342,30	100	277,40	100	2.071,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur	Persen	100	100	2,50	100	32,60	100	2,70	100	2,80	100	2,90	100	43,50
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100	100	107,83	100	120,71	100	133,92	100	145,36	100	157,37	100	665,18
Program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah kunjungan wisata	orang	391.282	645.000	2.435,00	690.000	2.735,70	735.000	2.917,40	780.000	3.080,30	825.000	3.259,00	825000	14.427,40
Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah destinasi wisata yang ditata/direvitalisasi	obyek wisata	46,00	10	14.895,00	8	9.003,53	7	8.423,30	7	8.767,60	7	9.082,50	39	50.171,93
Program pengembangan Kemitraan	Jumlah desa wisata yang dikembangkan	desa wisata	31,00	35,00	375,00	39,00	1.348,69	43,00	1.356,50	47,00	1.367,00	50,00	1.378,00	50	5.825,19
PERTANIAN					**23.266,23**		**17.478,62**		**17.973,41**		**18.153,14**		**18.692,90**		**95.564,30**
DINAS PERTANIAN					**23.266,23**		**17.478,62**		**17.973,41**		**18.153,14**		**18.692,90**		**95.564,30**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	100	1.204,49	100	1.213,84	100	1.225,98	100	1.238,24	100	1.250,62	100	6.133,17

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR	
				Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	100	661,42	100	669,30	100	675,99	100	682,75	100	689,58	100	3.379,05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100,00	100	10,12	100	10,30	100	10,40	100	10,51	100	10,61	100	51,94
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100,00	100	107,34	100	110,30	100	111,40	100	112,52	100	113,64	100	555,20
Program Pengembangan Perencanaan dan Statistik Pertanian	Persentase ketersediaan data perencanaan dan statistik pertanian	Persen	100,00	100	56,31	100	58,00	100	58,58	100	59,17	100	59,76	100	291,82
Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Olahan Pertanian	Jumlah Pertumbuhan UPH Pertanian	UPH	5,00	5,00	250,00	5,00	285,50	5,00	288,36	5,00	291,24	5,00	652,63	30	1.767,73
Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Olahan Perkebunan	Jumlah Pertumbuhan UPH Perkebunan	UPH	5,00	5,00	500,00	5,00	515,00	5,00	520,15	5,00	525,35	5,00	530,61	30	2.591,11
Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Olahan Peternakan	Jumlah Pertumbuhan UPH Peternakan	UPH	5,00	5,00	125,00	5,00	196,34	5,00	198,30	5,00	200,28	5,00	202,29	30	922,20
Program peningkatan produksi pertanian	Persentase kelompok tani Tanaman Pangan yang menggunakan bibit unggul	Persen	3,00	3,00	10.194,59	3,00	7627,50	3,00	7703,78	3,00	7780,81	3,00	7.858,62	18	41.165,30
	Persentase Kelompok Tani Tanaman Pangan yang menggunakan pupuk berimbang	Persen	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		18	
	Persentase Kelompok Tani Tanaman Pangan yang menerapkan TTG	Persen	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		18	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR	
				Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta
	Persentasi kelompok tani Tanaman Pangan yang menerapkan penanggulangan hama terpadu (PHT)	Persen	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		18	
	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Pertanian Tanaman Pangan	Persen	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		18	
	Persentase kelompok tani Hortikultura yang menggunakan bibit unggul	Persen	3,00	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		23	
	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Pertanian Tanaman Hortikultura	Persen	3,00	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		23	
Program peningkatan produksi perkebunan	Persentase Kelompok Tani perkebunan yang menggunakanbibit unggul	Persen	2,00	2,00	636,16	2,00	646	2,00	782,46	2,00	790,28	2,00	798,19	12	3.653,09
	Persentase kelompok tani perkebunan yang menerapkan penanggulangan hama terpadu (PHT)	Persen	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		12	
Program peningkatan produksi hasil peternakan	Persentase Peningkatan Angka Kelahiran Ternak Ruminansia	Persen	5,00	5,00	5905,51	5,00	3020,75	5,00	3050,96	5,00	3081,47	5,00	3.112,28	30	18.170,96
	Persentase Peningkatan Kapasitas Penetasan Ternak Unggas	Persen	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		30	
	Persentase Angka Kelahiran Ternak Melalui IB	Persen	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		30	
	Persentase Penurunan Serangan Penyakit Hewan	Persen	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00			

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR	
				Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta
	Persentase Ketersediaan Pakan Ternak	Persen	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00			
	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Peternakan	Persen	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		30	
Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pertanian	Persemtase SDM Penyuluh yang bersertifikat	Persen	5,00	5,00	2705,29	5,00	2158,80	5,00	2240,39	5,00	2262,79	5,00	2285,16	30	11.652,43
	Persemtase SDM Petani yang bersertifikat	Persen	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		30	
	Persentase Kelembagaan Penyuluhan yang Meningkat Kelasnya	Persen	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		30	
	Persentase Kelembagaan Kelompok Tani yang Meningkat Kelas Kemampuannya	Persen	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		30	
Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	Persentase Kelompok tani Perkebunan yang menerapkan TTG	Persen	2,00	2,00	910,00	2,00	967,00	2,00	1.106,67	2,00	1.117,74	2,00	1.128,91	12	5.230,32
	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Perkebunan	Persen	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		12	
	Persemtase SDM petani Perkebunan yang bersertifikat	Persen	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		30	
	Persentase kelembagaan Kelompok Tani Perkebunan yang meningkat kelasnya	Persen	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		30	
PERDAGANGAN					**8.241,46**		**6.076,27**		**6.076,27**		**6.076,27**		**6.076,27**		**15.076,55**
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					**8.241,46**		**6.076,27**		**6.076,27**		**6.076,27**		**6.076,27**		**15.076,55**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	100,00	621,46	100,00	684,06	100,00	684,06	100,00	684,06	100,00	684,06	100,00	3.357,71

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR	
				Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	1.710,00	100,00	580,41	100,00	580,41	100,00	580,41	100,00	580,41	100,00	4.031,64
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur	Persen	100,00	100,00	25,00	100,00	31,46	100,00	31,46	100,00	31,46	100,00	31,46	100,00	150,83
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100,00	100,00	20,00	100,00	45,34	100,00	45,34	100,00	45,34	100,00	45,34	100,00	201,36
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100,00	100,00	145,00	100,00	330,00	100,00	330,00	100,00	330,00	100,00	330,00	100,00	1.465,00
Program Pelayanan Kemetrologian	Persentase kepuasan terhadap Pelayanan Kemetrologian	Persen	76,00	77,00	370,00	78,00	365,00	79,00	365,00	80,00	365,00	81,00	365,00	81,00	1.830,00
Program Pengembangan Perdagangan	Jumlah pedagang yang mendapatkan bantuan pembinaan	Orang	200,00	200,00	5.350,00	200,00	4.040,00	200,00	4.040,00	200,00	4.040,00	200,00	4.040,00	1200,00	21.510,00
PERINDUSTRIAN					**5.950,00**		**10.190,00**		**10.190,00**		**10.190,00**		**10.190,00**		
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					**5.950,00**		**10.190,00**		**10.190,00**		**10.190,00**		**10.190,00**		
Program penumbuhan dan pengembangan Industri Logam, Mesin, Elektronik, Aneka dan Tekstil (ILMEAT)	Jumlah Pertumbuhan IKM ILMEAT	Unit	200,00	200,00	1.800,00	200,00	2.070,00	200,00	2.070,00	200,00	2.070,00	200,00	2.070,00	1200,00	10.080,00
Program penumbuhan dan pengembangan Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH)	Jumlah Pertumbuhan IKM IKAHH	Unit	115,00	115,00	4.150,00	115,00	8.120,00	115,00	8.120,00	115,00	8.120,00	115,00	8.120,00	690,00	36.630,00
TRANSMIGRASI					**119,50**		**123,68**		**128,01**		**132,49**		**137,13**		**640,81**
DINAS TENAGA KERJA					**119,50**		**123,68**		**128,01**		**132,49**		**137,13**		**640,81**
Program Transmigrasi Regional	Persentase transmigran yang diberangkatkan	Persen	20,00	25,00	119,50	25,00	123,68	30,00	128,01	30,00	132,49	35,00	137,13	35	640,81

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR	
				Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta
URUSAN PENUNJANG					**96.171,40**		**73.813,58**		**75.081,37**		**77.239,14**		**81.374,28**		**375.498,17**
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN					**59.970,25**		**33.648,01**		**33.862,02**		**34.048,57**		**34.237,08**		**168.084,34**
SEKRETARIAT DAERAH					**22.517,55**		**23.730,05**		**23.732,21**		**23.734,44**		**23.736,73**		**117.450,98**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	100,00	5.885,68	100,00	6.372,25	100,00	6.372,25	100,00	6.372,25	100,00	6.372,25	100,00	31.374,68
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil yang terlaksana baik	Persen	100,00	100,00	2.462,00	100,00	2.882,82	100,00	2.882,82	100,00	2.882,82	100,00	2.882,82	100,00	13.993,30
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	5.326,60	100,00	5.201,60	100,00	5.201,60	100,00	5.201,60	100,00	5.201,60	100,00	26.133,01
Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur	Persen	100,00	100,00	250,00	100,00	250,00	100,00	250,00	100,00	250,00	100,00	250,00	100,00	1.250,00
Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi Serta Penggunaan Media Massa	Persentase Kebijakan Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	Persen	100,00	100,00	1.350,00	100,00	1.600,00	100,00	1.600,00	100,00	1.600,00	100,00	1.600,00	100,00	7.750,00
Program Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Persentase pelaksanaan PATEN	Persen	100,00	100,00	75,00	100,00	75,00	100,00	75,00	100,00	75,00	100,00	75,00	100,00	375,00
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase perangkat daerah yang meningkat	OPD	10,00	10,00	266,80	10,00	296,80	10,00	296,80	10,00	296,80	10,00	296,80	10,00	1.453,99
Program Pengendalian Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan	Persen	100,00	100,00	840,00	100,00	950,00	100,00	950,00	100,00	950,00	100,00	950,00	100,00	4.640,00
Program Fasilitasi Pengadaan Barang Jasa	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang akuntabel, efektif dan efisien	Persen	100,00	100,00	830,00	100,00	900,00	100,00	900,00	100,00	900,00	100,00	900,00	100,00	4.430,00
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kecamatan dan Kelurahan Berkinerja baik	Persen	100,00	100,00	185,00	100,00	250,00	100,00	250,00	100,00	250,00	100,00	250,00	100,00	1.185,00

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR	
				Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta
Program Fasilitasi Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan administrasi kesejahteraan rakyat yang terfasilitasi	Persen	100,00	100,00	502,00	100,00	575,00	100,00	575,00	100,00	575,00	100,00	575,00	100,00	2.802,00
Program Fasilitasi keagamaan dan kemasyarakatan	Persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang terfasilitasi	Persen	100,00	100,00	750,00	100,00	450,00	100,00	450,00	100,00	450,00	100,00	450,00	100,00	2.550,00
Program pengembangan dan pengendalian perekonomian daerah	Persentase pelaksanaan pengembangan dan pengendalian perekonomian daerah	Persen	100,00	100,00	550,00	100,00	550,00	100,00	550,00	100,00	550,00	100,00	550,00	100,00	2.750,00
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase pengawasan internal kebijakan KDH	Persen	100,00	100,00	50,00	100,00	50,00	100,00	50,00	100,00	50,00	100,00	50,00	100,00	250,00
Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Kabupaten komponen pelaporan kinerja	Persen	70,00	71,00	150,00	73,00	150,00	81,00	150,00	81,00	150,00	90,00	150,00	90,00	750,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100,00	100,00	295,00	100,00	350,00	100,00	350,00	100,00	350,00	100,00	350,00	100,00	1.695,00
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase produk hukum yang terbentuk	Persen	90,00	100,00	1.080,00	90,00	1.080,00	90,00	1.080,00	90,00	1.080,00	90,00	1.080,00	90,00	5.400,00
Program Manajemen Perubahan	Jumlah sosialisasi prorgam manajemen perubahan	Orang	5,00	5 org	50,00	5,00	50,00	5,00	50,00	5,00	50,00	5,00	50,00	5,00	250,00
Program Pendayagunaan Aparatur Negara Menuju Pemerintahan Yang Bersih	Persentase Pelaksanaan Program RB	Persen	100,00	100,00	166,24	100,00	241,24	100,00	241,24	100,00	241,24	100,00	241,24	100,00	1.131,19
Program Penataan dan Penguatan Organisasi	Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat sasaran	Persen	100,00	100,00	475,00	100,00	475,00	100,00	475,00	100,00	475,00	100,00	475,00	100,00	2.375,00

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR	
				Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta
Program Penataan Ketatalaksanaan	Persentase OPD yang memiliki prosedur kerja yang jelas, efisien, efektif dan terukur	Persen	100,00	100,00	70,00	100,00	72,10	100,00	74,26	100,00	76,49	100,00	78,78	100,00	371,63
Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Persentase kecamatan dan kelurahan berkinerja baik	Persen	100,00	100,00	260,00	100,00	260,00	100,00	260,00	100,00	260,00	100,00	260,00	100,00	1.300,00
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase Penyelesaian administrasi pemerintahan tepat waktu	Persen	100,00	100,00	350,00	100,00	350,00	100,00	350,00	100,00	350,00	100,00	350,00	100,00	1.750,00
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	persentase pelaksanaan kerjasama antar daerah	Persen	100,00	100,00	298,24	100,00	298,24	100,00	298,24	100,00	298,24	100,00	298,24	100,00	1.491,18
SEKRETARIAT DPRD					**26.030,35**		**27.026,73**		**26.737,92**		**26.902,92**		**27.561,54**		**134.259,46**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	100,00	3.278,85	100,00	3.389,79	100,00	3.376,01	100,00	3.473,28	100,00	3.552,49	100,00	17.070,43
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	1.235,21	100,00	1.457,67	100,00	1.176,98	100,00	1.379,69	100,00	1.828,79	100,00	7.078,33
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur	Persen	100,00	100,00	473,81	100,00	473,81	100,00	473,81	100,00	473,81	100,00	473,81	100,00	2.369,04
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100,00	100,00	148,30	100,00	148,30	100,00	148,30	100,00	148,30	100,00	148,30	100,00	741,50
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	84,00	84,00	153,48	84,00	153,48	84,00	168,78	84,00	178,50	84,00	178,50	84,00	832,75
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat	Persen	84,00	84,00	20.740,71	84,00	21.403,68	84,00	21.394,05	84,00	21.249,33	84,00	21.379,65	84,00	106.167,42
KECAMATAN SEKOTONG					**889,79**		**889,79**		**889,79**		**889,79**		**889,79**		**4.448,97**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	100,00	273,39	100,00	273,39	100,00	273,39	100,00	273,39	100,00	273,39	100,00	1.366,97

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR	
				Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	247,74	100,00	247,74	100,00	247,74	100,00	247,74	100,00	247,74	100,00	1.238,70
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur	Persen	0,00	100,00	21,50	100,00	21,50	100,00	21,50	100,00	21,50	100,00	21,50	100,00	107,50
Program Perencanaan Kecamatan	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang diakomodir di APBD tahun n	Persen	50,00	50,00	17,50	50,00	17,50	50,00	17,50	50,00	17,50	50,00	17,50	50,00	87,50
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan tugas kecamatan yang difasilitasi	Persen	0,00	100,00	65,00	100,00	65,00	100,00	65,00	100,00	65,00	100,00	65,00	100,00	325,00
Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu	Persen	100,00	100,00	207,00	100,00	207,00	100,00	207,00	100,00	207,00	100,00	207,00	100,00	1.035,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100,00	100,00	57,66	100,00	57,66	100,00	57,66	100,00	57,66	100,00	57,66	100,00	288,30
KECAMATAN LEMBAR					**761,45**		**961,26**		**961,26**		**961,26**		**961,26**		**4.606,49**
Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu	Persen	100,00	100,00	23,42	100,00	27,65	100,00	27,65	100,00	27,65	100,00	27,65	100,00	134,02
Program Perencanaan Kecamatan	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang diakomodir di APBD tahun n	Persen	50,00	50,00	22,75	50,00	24,76	50,00	24,76	50,00	24,76	50,00	24,76	50,00	121,80
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan tugas kecamatan yang difasilitasi	Persen	0,00	100,00	158,48	100,00	157,54	100,00	157,54	100,00	157,54	100,00	157,54	100,00	788,62
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	100,00	348,19	100,00	357,00	100,00	357,00	100,00	357,00	100,00	357,00	100,00	1.776,19

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR	
				Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	121,00	100,00	282,43	100,00	282,43	100,00	282,43	100,00	282,43	100,00	1.250,71
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	0,00	100,00	54,50	100,00	46,50	100,00	46,50	100,00	46,50	100,00	46,50	100,00	240,50
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persen	100,00	100,00	33,11	100,00	65,38	100,00	65,38	100,00	65,38	100,00	65,38	100,00	294,65
KECAMATAN GERUNG					**4.128,44**		**4.253,35**		**4.253,35**		**4.253,35**		**4.253,35**		**21.141,86**
Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu	Persen	100,00	100,00	75,00	100,00	75,00	100,00	75,00	100,00	75,00	100,00	75,00	100,00	375,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	286,20	100,00	212,57	100,00	212,57	100,00	212,57	100,00	212,57	100,00	1.136,48
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	114,79	100,00	275,28	100,00	275,28	100,00	275,28	100,00	275,28	100,00	1.215,91
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Kecamatan Yang Terfasiitasi	Persen	0,00	100,00	106,30	100,00	95,35	100,00	95,35	100,00	95,35	100,00	95,35	100,00	487,70
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persen	100,00	100,00	75,36	100,00	40,66	100,00	40,66	100,00	40,66	100,00	40,66	100,00	238,00
Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan	Persentase pelayanan kelurahan	Persen	100,00	100,00	3.450,00	3,00	3.518,99	3,00	3.518,99	3,00	3.518,99	3,00	3.518,99	3,00	17.525,98
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Disiplin Aparatur	Persen	0,00	100,00	9,79	100,00	19,00	100,00	19,00	100,00	19,00	100,00	19,00	100,00	85,79
Program Perencanaan Kecamatan	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang diakomodir di APBD tahun n	Persen	50,00	50,00	11,00	50,00	16,50	50,00	16,50	50,00	16,50	50,00	16,50	50,00	77,00

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR	
				Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta
KECAMATANLABUAPI					**866,03**		**873,57**		**899,92**		**928,11**		**956,68**		**4.524,31**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	308,80	100,00	318,82	100,00	327,12	100,00	336,69	100,00	346,55	100,00	1.637,99
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	126,00	100,00	110,70	100,00	115,44	100,00	120,22	100,00	123,53	100,00	595,88
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Disiplin Aparatur	Persen	0,00	100,00	24,00	100,00	24,72	100,00	25,46	100,00	26,23	100,00	27,01	100,00	127,42
Program Perencanaan Kecamatan	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang diakomodir di APBD tahun n	Persen	50,00	50,00	14,00	50,00	14,84	50,00	15,73	50,00	16,67	50,00	17,67	50,00	78,92
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Kecamatan Yang Terfasiitasi	Persen	0,00	100,00	214,23	100,00	222,89	100,00	231,93	100,00	241,39	100,00	251,29	100,00	1.161,73
Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu	Persen	100,00	100,00	40,00	100,00	41,20	100,00	42,44	100,00	43,71	100,00	45,02	100,00	212,37
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persen	100,00	100,00	139,00	100,00	140,40	100,00	141,80	100,00	143,20	100,00	145,60	100,00	710,00
KECAMATAN KEDIRI					**905,30**		**932,46**		**960,44**		**989,30**		**1.019,03**		**4.806,53**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	351,13	100,00	361,66	100,00	372,51	100,00	383,69	100,00	395,20	100,00	1.864,18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	193,53	100,00	199,33	100,00	205,31	100,00	211,47	100,00	217,82	100,00	1.027,46
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Disiplin Aparatur	Persen	0,00	100,00	13,59	100,00	14,00	100,00	14,42	100,00	14,90	100,00	15,41	100,00	72,33
Program Perencanaan Kecamatan	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang diakomodir di APBD tahun n	Persen	50,00	50,00	24,76	50,00	25,50	50,00	26,27	50,00	27,06	50,00	27,87	50,00	131,46

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR	
				Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Kecamatan Yang Terfasiitasi	Persen	0,00	100,00	250,99	100,00	258,51	100,00	266,27	100,00	274,26	100,00	282,49	100,00	1.332,51
Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu	Persen	100,00	100,00	25,00	100,00	25,75	100,00	26,52	100,00	27,32	100,00	28,14	100,00	132,73
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persen	100,00	100,00	46,31	100,00	47,70	100,00	49,13	100,00	50,60	100,00	52,12	100,00	245,85
KECAMATAN KURIPAN					**847,70**		**792,77**		**858,45**		**855,46**		**852,52**		**4.206,89**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Pelayanan administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	313,13	100,00	323,79	100,00	334,77	100,00	345,91	100,00	357,36	100,00	1.674,95
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana	Persen	100,00	100,00	190,48	100,00	118,61	100,00	158,17	100,00	136,42	100,00	114,10	100,00	717,79
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peresntase meningkatnya dispilin aparatur	Persen	0,00	100,00	34,38	100,00	36,29	100,00	44,92	100,00	47,00	100,00	49,16	100,00	211,75
Program Perencanaan Kecamatan	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang diakomodir di APBD tahun n	Persen	50,00	50,00	10,00	50,00	11,01	50,00	12,05	50,00	13,09	50,00	14,17	50,00	60,33
Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu	Persen	100,00	100,00	109,20	100,00	110,21	100,00	111,25	100,00	112,30	100,00	113,38	100,00	556,35
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100,00	100,00	10,50	100,00	10,81	100,00	11,14	100,00	11,47	100,00	11,82	100,00	55,74
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	persentase kinerja penyelenggaraan tugas kecamatan yang difasilitasi	Persen	0,00	100,00	180,00	100,00	182,03	100,00	186,15	100,00	189,27	100,00	192,52	100,00	929,98

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR	
				Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta
KECAMATAN NARMADA					**908,55**		**935,81**		**963,88**		**998,26**		**1.028,21**		**4.834,71**
Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu	Persen	100,00	100,00	75,00	100,00	77,25	100,00	79,57	100,00	81,95	100,00	84,41	100,00	398,19
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	100,00	282,88	100,00	291,36	100,00	300,10	100,00	309,11	100,00	318,38	100,00	1.501,83
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana apratur	Persen	100,00	100,00	163,88	100,00	168,79	100,00	173,85	100,00	179,07	100,00	184,44	100,00	870,03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur	Persen	0,00	100,00	10,00	100,00	10,30	100,00	10,61	100,00	16,39	100,00	16,88	100,00	64,18
Program Perencanaan Kecamatan	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang diakomodir di APBD tahun n	Persen	50,00	50,00	30,00	50,00	30,90	50,00	31,83	50,00	32,78	50,00	33,77	50,00	159,27
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100,00	100,00	61,80	100,00	63,65	100,00	65,56	100,00	67,53	100,00	69,56	100,00	328,10
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	persentase kinerja penyelenggaraan tugas kecamatan yang difasilitasi	Persen	0,00	100,00	285,00	100,00	293,55	100,00	302,36	100,00	311,43	100,00	320,77	100,00	1.513,10
KECAMATAN LINGSAR					**768,79**		**788,72**		**810,69**		**833,40**		**876,89**		**4.078,49**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	343,94	100,00	351,13	100,00	359,97	100,00	369,16	100,00	378,71	100,00	1.802,91
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	149,50	100,00	153,99	100,00	158,60	100,00	163,36	100,00	188,26	100,00	813,72
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Disiplin Aparatur	Persen	0,00	100,00	11,55	100,00	11,90	100,00	12,26	100,00	12,63	100,00	13,00	100,00	61,34
Program Perencanaan Kecamatan	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang diakomodir di APBD tahun n	Persen	50,00	50,00	17,50	50,00	18,03	50,00	18,57	50,00	19,12	50,00	19,70	50,00	92,91

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR	
				Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Kecamatan Yang Terfasiitasi	Persen	0,00	100,00	198,23	100,00	204,18	100,00	210,30	100,00	216,61	100,00	223,11	100,00	1.052,44
Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu	Persen	100,00	100,00	39,00	100,00	40,17	100,00	41,38	100,00	42,62	100,00	43,89	100,00	207,06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100,00	100,00	9,06	100,00	9,33	100,00	9,61	100,00	9,90	100,00	10,20	100,00	48,12
KECAMATAN GUNUNGSARI					**678,03**		**682,92**		**703,41**		**724,51**		**746,25**		**3.535,13**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	248,63	100,00	261,24	100,00	265,24	100,00	278,82	100,00	283,06	100,00	1.336,99
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	114,54	100,00	104,02	100,00	110,58	100,00	107,79	100,00	113,60	100,00	550,53
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Disiplin Aparatur	Persen	0,00	100,00	1,55	100,00	9,98	100,00	10,28	100,00	10,59	100,00	10,91	100,00	43,31
Program Perencanaan Kecamatan	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang diakomodir di APBD tahun n	Persen	0,00	50,00	20,59	50,00	16,05	50,00	16,53	50,00	17,03	50,00	17,54	50,00	87,74
Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu	Persen	100,00	100,00	61,83	100,00	53,38	100,00	54,98	100,00	56,63	100,00	58,33	100,00	285,15
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Kecamatan Yang Terfasiitasi	Persen	0,00	100,00	177,67	100,00	183,37	100,00	189,25	100,00	195,34	100,00	201,63	100,00	947,26
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persen	100,00	100,00	53,22	100,00	54,88	100,00	56,55	100,00	58,32	100,00	61,19	100,00	284,16

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR	
				Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta
KECAMATAN BATULAYAR					**668,26**		**658,35**		**679,67**		**731,73**		**767,42**		**3.505,43**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	219,84	100,00	227,92	100,00	236,33	100,00	245,09	100,00	254,21	100,00	1.183,40
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	130,20	100,00	102,66	100,00	105,74	100,00	138,91	100,00	155,05	100,00	632,55
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Disiplin Aparatur	Persen	0,00	100,00	31,55	100,00	32,50	100,00	33,48	100,00	34,48	100,00	35,51	100,00	167,53
Program Perencanaan Kecamatan	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang diakomodir di APBD tahun n	Persen	50,00	50,00	18,51	50,00	19,07	50,00	19,64	50,00	20,23	50,00	20,83	50,00	98,27
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Kecamatan Yang Terfasiitasi	Persen	0,00	100,00	162,84	100,00	167,73	100,00	172,76	100,00	177,94	100,00	183,28	100,00	864,54
Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu	Persen	100,00	100,00	49,39	100,00	50,87	100,00	52,39	100,00	53,96	100,00	55,58	100,00	262,19
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persen	100,00	100,00	55,93	100,00	57,61	100,00	59,34	100,00	61,12	100,00	62,95	100,00	296,95
PENGAWASAN					**5.071,98**		**5.249,50**		**5.433,23**		**5.623,39**		**5.774,31**		**27.152,42**
INSPEKTORAT					**5.071,98**		**5.249,50**		**5.433,23**		**5.623,39**		**5.774,31**		**27.152,42**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	100,00	592,28	100,00	684,76	100,00	708,73	100,00	733,53	100,00	713,31	100,00	3.432,61
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	87,00	100,00	1.093,52	100,00	800,06	100,00	828,06	100,00	857,04	100,00	887,04	100,00	4.465,71
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Disiplin Aparatur	Persen	90,00	100,00	28,00	100,00	28,98	100,00	29,99	100,00	31,04	100,00	32,13	100,00	150,15

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR	
				Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100,00	100,00	142,07	100,00	164,57	100,00	170,32	100,00	176,29	100,00	182,46	100,00	835,71
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan pengawasan meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lain	Persen	17,00	100,00	3.103,38	100,00	3.372,42	100,00	3.490,45	100,00	3.612,62	100,00	3.739,06	100,00	17.317,93
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa	Persentase peningkatan sumber daya aparatur pengawasan daerah	Persen	5,00	100,00	112,72	100,00	198,72	100,00	205,68	100,00	212,87	100,00	220,32	100,00	950,31
PERENCANAAN PEMBANGUNAN					**6.173,97**		**5.543,74**		**5.678,60**		**6.448,71**		**7.120,42**		**30.465,44**
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					**6.173,97**		**5.543,74**		**5.678,60**		**6.448,71**		**7.120,42**		**30.465,44**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	573,40	100	590,60	100	608,32	100	626,57	100	645,37	100	3.044,26
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100	523,07	100	372,76	100	342,74	100	353,03	100	363,62	100	1.955,22
Program peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur	Persen	100	100	55,00	100	56,65	100	58,35	100	60,10	100	61,90	100	292,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100	100	153,50	100	158,11	100	162,85	100	207,73	100	213,97	100	896,15
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur perencana	Persen	100	100	712,50	100	733,88	100	755,89	100	778,57	100	801,93	100	3.782,76

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR	
				Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta
Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta ketapatan waktu dalam penyelesaiannya	Persen	100	100	1.093,50	100	1.126,31	100	1.160,09	100	1.594,90	100	2.265,74	100	7.240,54
Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase Ketersediaan data/informasi untuk perencanaan	Persen	100	100	1.203,00	100	733,84	100	765,61	100	798,32	100	832,02	100	3.832,79
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan perangkat daerah koordinasi bidang ekonomi	Persen	100	100	550,00	100	422,30	100	434,97	100	598,02	100	461,46	100	2.466,75
Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan perangkat daerah koordinasi bidang sosial budaya	Persen	100	100	620,00	100	638,60	100	657,76	100	677,49	100	697,82	100	3.291,66
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan perangkat daerah koordinasi bidang sarpras wilayah	Persen	100	100	690,00	100	710,70	100	732,02	100	753,98	100	776,60	100	3.663,30
KEUANGAN					**18.625,26**		**20.168,94**		**20.869,19**		**21.668,72**		**24.545,07**		**105.877,18**
BADAN PENDAPATAN DAERAH					**8.277,67**		**8.990,92**		**9.527,39**		**10.158,81**		**10.804,15**		**47.758,94**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	100,00	2.414,56	100,00	2.656,02	100,00	2.921,62	100,00	3.213,78	100,00	3.535,16	100,00	14.741,14
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase ketersedian sarana dan prasaran aparatur	Persen	65,00	70,00	856,00	75,00	975,60	80,00	1.073,16	85,00	1.229,04	90,00	1.351,94	90,00	5.485,74
Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase displin aparatur	Persen	100,00	100,00	50,00	100,00	55,00	100,00	60,50	100,00	66,55	100,00	73,21	100,00	305,26

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR	
				Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas aparatur pengelola pajak yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM bidang perpajakan.	Persen	60,00	65,00	35,00	70,00	38,50	75,00	42,35	80,00	46,59	85,00	51,24	85,00	213,68
Program Pelayanan Pengaduan dan Informasi Pajak/Retribusi Daerah	Persentase masyarakat atas pelayanan pajak dan Retrebusi Daerah	Persen	80,00	85,00	290,99	87,00	320,00	89,00	352,09	91,00	387,31	93,00	426,04	93,00	1.776,43
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100,00	100,00	125,95	100,00	138,55	100,00	152,40	100,00	167,64	100,00	184,40	100,00	768,94
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	prosentase realisasi penerimaan PAD	Persen	96,10	100,00	2.751,78	100,00	2.772,62	100,00	2.786,89	100,00	2.801,38	100,00	2.817,21	100,00	13.929,88
Program Penetapan Kebijakan Pajak/Retribusi Daerah	Persentase peningkatan dokumen kebijakan pajak dan retrebusi yang di terbitkan.	Persen	2,00	2,00	657,99	2,00	723,79	2,00	796,16	2,00	875,78	2,00	963,34	2,00	4.017,06
Program Pendataan Subjek dan Objek Pajak/Retribusi Daerah	prosentase peningkatan data potensi wajib pajak dan wajib retribusi daerah.	Persen	2,00	2,00	594,37	2,00	653,81	2,00	685,19	2,00	713,71	2,00	744,58	2,00	3.391,66
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana PAD	Persentase sarana penunjang peningkatan PAD yang diadakan	Persen	50,00	60,00	501,03	65,00	657,03	70,00	657,03	80,00	657,03	90,00	657,03	90,00	3.129,15
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					**10.347,59**		**11.178,02**		**11.341,80**		**11.509,91**		**13.740,92**		**58.118,24**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelayanan Adm. Perkantoran	Persen	100,00	100,00	1.100,70	100,00	1.133,72	100,00	1.167,74	100,00	1.202,78	100,00	1.238,86	100,00	5.843,80
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	1.760,34	100,00	2.545,65	100,00	2.622,02	100,00	2.700,68	100,00	4.764,40	100,00	14.393,09

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR	
				Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta
Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase displin aparatur	Persen	100,00	100,00	76,25	100,00	38,78	100,00	41,84	100,00	45,17	100,00	90,84	100,00	292,88
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100,00	100,00	207,83	100,00	214,90	100,00	222,20	100,00	229,70	100,00	271,10	100,00	1.145,73
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persen	100,00	100,00	7.062,18	100,00	7.097,67	100,00	7.133,33	100,00	7.169,18	100,00	7.205,20	100,00	35.667,56
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Tersedianya sistem informasi berbasis TI	Persen	100,00	100,00	140,29	100,00	147,30	100,00	154,67	100,00	162,40	100,00	170,52	100,00	775,18
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					**5.796,74**		**8.522,63**		**8.557,55**		**8.768,98**		**9.016,63**		**40.662,52**
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA					**5.796,74**		**8.522,63**		**8.557,55**		**8.768,98**		**9.016,63**		**40.662,52**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	522,74	100,00	535,58	100,00	548,81	100,00	562,44	100,00	579,31	100,00	2.748,88
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	238,90	100,00	265,64	100,00	265,61	100,00	299,23	100,00	386,26	100,00	1.455,64
Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase Penerbitan SK Pensiun	Persen	100,00	100,00	35,00	100,00	36,05	100,00	37,13	100,00	38,25	100,00	39,39	100,00	185,82
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persnetase Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100,00	100,00	130,00	100,00	133,90	100,00	137,92	100,00	142,05	100,00	146,32	100,00	690,19
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan diklat	Persen	100,00	100,00	3.189,54	100,00	5.504,68	100,00	5.520,10	100,00	5.535,97	100,00	5.702,05	100,00	25.452,35
Program Pembinaan Jabatan Fungsional	Persentase penyelenggaraan pembinaan jabatan fungsional	Persen	100,00	0,00	-	100,00	5,50	100,00	70,50	100,00	72,00	100,00	79,20	100,00	227,20

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR	
				Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta	Target Indikator	Pagu Anggaran (Rp) Juta
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100,00	100,00	117,22	100,00	120,74	100,00	134,36	100,00	138,39	100,00	142,54	100,00	653,26
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan aparatur	Persen	100,00	100,00	1.563,33	100,00	1.920,53	100,00	1.843,12	100,00	1.980,64	100,00	1.941,55	100,00	9.249,17
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					**533,20**		**680,77**		**680,77**		**680,77**		**680,77**		**3.256,28**
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					**533,20**		**680,77**		**680,77**		**680,77**		**680,77**		**3.256,28**
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase dokumen hasil kajian/rekomendasi kajian yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	533,20	100	680,77	100	680,77	100	680,77	100	680,77	100	3.256,28

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

8.1. Indikator Kinerja Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat pada akhir periode masa jabatan. Penetapan IKU Kabupaten Lombok Barat tahun 2019 – 2024 sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 8. 1 Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,89	85,27	87,65	90,03	91,81
2	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Nilai AKIP Daerah	Nilai	BB (71,00)	BB (73,00)	BB (75,00)	A (81,00)	A (83,5)
4	Persentase wilayah terhubung dengan pusat perekonomian	Persen	76,55	80,62	86,24	91,86	97,47
5	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	83,98	85,84	87,70	89,57	90,97
6	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum	Persen	79,76	80,32	80,88	81,44	82,00
7	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	13,18	13,45	13,64	14,02	14,45
8	Nilai PDRB Perkapita (ADHK)	Juta Rupiah	17,83	18,69	19,60	20,55	21,23
9	Nilai Realisasi Investasi						
	PMA	Juta US $	121,39	133,53	146,88	161,57	177,73
	PMDN (Fasilitas)	MIlyar Rupiah	536,12	589,73	648,70	713,57	784,93
10	Indeks Gini	Indeks	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3
11	Persentase Angka Kemiskinan	Persen	15,00	14,50	14,00	13,00	10,75
12	TPT	Persen	3,20	3,00	2,90	2,80	2,75
13	UHH	Tahun	66,84	67,20	67,56	67,92	68,18
14	RLS	Tahun	6,25	6,50	6,70	7,00	7,19
15	HLS	Tahun	13,20	13,50	13,70	13,90	14,08
16	Kabupaten Layak Anak	Skor	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00
17	IPG	Skor	89,00	90,00	90,30	91,00	91,50
18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	55,41	56,17	57,01	57,76	58,57
19	Indeks Risiko Bencana Daerah	Indeks	150,39	142,87	135,72	128,94	123,58

Sedangkan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2019 – 2024 ditunjukkan pada tabel berikut

Tabel 8. 2 Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

NO	ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Nilai PDRB Perkapita	Juta Rupiah	15,46	17,83	18,69	19,6	20,55	21,23	21,23
2	Indeks Gini	Indeks	0,320	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3
3	Angka Kemiskinan	Persen	15,2	15,00	14,50	14,00	13,00	10,75	10,75
4	IPM	Indeks	67,18	67,87	68,38	68,98	69,58	70,1	70,1
5	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,58	5,50	5,65	5,75	5,85	6,00	6,00
6	RLS	Tahun	6,16	6,25	6,5	6,7	7,00	7,19	7,19
7	HLS	Tahun	13,36	13,2	13,5	13,7	13,9	14,08	14,08
8	UHH	Tahun	66,16	66,84	67,20	67,56	67,92	68,18	68,18
9	Pengeluaran Perkapita	Rp.(000)	11.367,00	11.490,67	11.648,67	11.806,67	11.964,67	11.964,67	11964,67
10	TPT	Persen	3,34	3,2	3	2,9	2,8	2,75	2,75
11	IKM	Nilai	79,02	82,89	85,27	87,65	90,03	91,81	91,8095
12	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	13,15	13,18	13,45	13,64	14,02	14,45	14,45
13	OPINI BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Nilai AKIP Daerah	Nilai	B (62,60)	BB (71,00)	BB (73,00)	BB (75,00)	A (81,00)	A (83,5)	A (83,5)
15	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	64	68	72	76	80	84	84
16	Indeks Kebermanfaatan Infrastruktur	Indeks	77,39	79,29	81,79	84,3	86,83	88,69	88,69
17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	54,67	55,41	56,17	57,01	57,76	58,57	58,57
18	Persentase Wilayah Terhubung dengan Pusat Perekonomian	Persen	69,56	76,55	80,62	86,24	91,86	97,47	97,47
19	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	80,19	83,98	85,84	87,70	89,57	90,97	90,97

NO	ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
20	Persentase Kasus Konflik SARA yang tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100
21	Skor Kabupaten/Kota Layak Anak	Skor	10	30	40	50	60	70	
22	IPG	Skor	88,93	89	90	90,3	91	91,5	91,5
	ASPEK PELAYANAN UMUM								
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
PENDIDIKAN									
23	APK								
	Angka Partisipasi Kasar TK/PAUD	Persen	86.88	88,5	90	90,25	90,5	90,75	90,75
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Persen	108.8	100	100	100	100	100	100
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Persen	104.75	100	100	100	100	100	100
24	Angka Partisipasi Murni								
	Angka Partisipasi Murni TK/PAUD	Persen	49.07	50,00	55,25	60,00	65,50	70,00	70
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Persen	99.88	99,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Persen	98.16	98,5	98,75	99,25	99,5	99,9	99,9
25	Angka Putus Sekolah								
	Angka Putus Sekolah SD	Persen	0.05	0,04	0,03	0,02	0,01	0	0
	Angka Putus Sekolah SMP	Persen	0.66	0,66	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1
26	Angka Kelulusan								
	Angka Lulusan SD	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Angka Lulusan SMP	Persen	100	100	100	100	100	100	100

NO	ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
KESEHATAN									
27	Angka Kematian Bayi	Per 1000 KH	2,65	2,30	2,25	2,20	2,15	2,10	2,10
28	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	35,50	35,00	34,75	34,50	34,25	34,00	34,00
29	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	IKS	0,17	0,20	0,30	0,40	0,40	0,40	0,40
30	Persentase stunting	Persen	28,96	27,00	26,00	25,00	24,00	23,00	23,00
31	Pemenuhan Indikator SPM RSUD	Indikator	63	65	70	75	80	99	99
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG									
32	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	Persen	62,86	66,25	67,50	68,75	70,00	71,25	71,25
33	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	Persen	50,22	53,48	55,11	56,74	58,37	60	60
34	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak	Persen	85,93	86,28	86,46	86,64	86,82	87,00	87,00
35	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum	Persen	78,65	79,76	80,32	80,88	81,44	82,00	82,00
36	Persentase Saluran Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Persen	56,16	57,44	58,08	58,73	59,37	60,00	60,00
PERUMAHAN PERMUKIMAN									
37	Persentase Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh	Persen	47,31	47,51	47,69	47,87	48,07	48,27	48,27
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
38	Persentase Pelanggaran PERDA yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100
39	Indeks Risiko Bencana	Indeks	158,3	150,39	142,87	135,72	128,94	123,58	123,58

NO	ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
40	Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65	0,66	0,66
41	Layanan Response Time Penanggulangan kejadian kebakaran 15 menit	Persen	62	65	70	75	80	85	85
SOSIAL									
42	Persentase PMKS Yang Tertangani	Persen	66	66,46	66,7	66,95	67,2	67,5	67,5
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
TENAGA KERJA									
43	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	70,44	71,7	73,03	74,43	75,43	76	76
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
44	Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	Persen	80	85	90	95	100	100	100
PANGAN									
45	Peningkatan Skor PPH	Poin	79,00	80,00	81,50	83,00	84,50	86,00	86,00
PERTANAHAN									
46	Persentase Bidang Lahan Pemda yang Bersertifikat	Persen	48,32	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80
47	Konflik pertanahan yang Terfasilitasi penyelesaiannya melalui jalur non litigasi (Mediasi)	Kasus	n/a	3	3	3	3	3	3
LINGKUNGAN HIDUP									
48	Persentase Pengelolaan sampah	Persen	60,83	61	61,1	61,2	61,3	61,4	61,4
49	Kualitas Air Sungai	Indeks	22,75	25,1	27,6	30,2	32,5	35	35
50	Kualitas Udara	Indeks	91,04	91,15	91,2	91,4	91,6	91,8	91,8

NO	ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
51	Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	51,328	51,328	51,328	51,328	51,328	51,328	51,328
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
52	Persentase Penduduk Umur 0 - 18 tahun dalam kepemilikan akta kelahiran	Persen	94,46	96	97	98	99	100	100
53	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	Persen	89,02	92	93	94	95	96	96
54	Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	Persen	95	96	97	98	99	100	100
55	Cakupan Penerbitan Akta Kematian	Persen	39	43	45	47	49	50	50
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
56	Persentase Desa Dengan Kategori "Cepat Berkembang"	Persen	47,9	64,7	73,1	81,5	85,7	89,9	89,9
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
57	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,52	1,56	1,55	1,54	1,53	1,52	1,52
PERHUBUNGAN									
58	Persentase Wilayah Terhubung dengan Moda Transportasi	Persen	45,16	48,39	51,61	54,84	58,06	61,29	61,29
59	Persentase Jalur Trayek Aktif Menuju Pusat Perekonomian (Pasar)	Persen	75,00	78,13	81,15	87,50	93,75	100,00	100,00
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
60	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Predikat	INFORMATIF	INFORMATIF	INFORMATIF	INFORMATIF	INFORMATIF	INFORMATIF	INFORMATIF
KOPERASI DAN UKM									
61	Persentase koperasi yang aktif	Persen	59,8	59,85	59,87	59,89	60	60,2	60,2
62	Persentase UMK	Persen	21,7	22,5	23	25	27	29	29

NO	ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
PENANAMAN MODAL									
63	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)								
	PMA	Juta US $	108,55	121,39	133,53	146,88	161,57	177,73	177,73
	PMDN (Fasilitas)	MIlyar Rupiah	288,09	536,12	589,73	648,7	713,57	784,93	784,93
PEMUDA DAN OLAH RAGA									
64	Presentase wirausaha muda	Persen	10	10	12	15	17	19	19
65	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	Persen	45	50	55	69	65	70	70
66	Persentase Prestasi Cabor Unggulan	Persen	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
STATISTIK									
67	Ketersediaan data penyelenggaraan pemerintah	Persen	31,94	70	80	85	90	95	95
KEBUDAYAAN									
68	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Kondisi Baik	Persen	63	82	83	84	85	85,5	85,5
69	Persentase Sanggar Seni Aktif	Persen	81,07	82,00	82,50	83,00	84,00	85,00	85,00
PERPUSTAKAAN									
70	Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	46.495	46.500	46.700	47.000	47.300	47.500	47500
KEARSIPAN									
71	Persentase OPD Yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persen	62,79	69,77	79,07	88,37	95,35	100,00	100

NO	ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
URUSAN PILIHAN									
PARIWISATA									
72	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	391.282	645.000	690.000	735.000	780.000	825.000	825.000
73	Lama tinggal wisatawan *(Length OF Stay)*	Hari	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,8
74	Jumlah desa wisata	Desa	31	35	39	43	47	50	50
PERTANIAN									
75	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	Persen	2,5	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	18,8
76	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Olahan Pertanian	Persen	2,5	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	17,5
PERDAGANGAN									
77	Jumlah Nilai Eksport Perdagangan	US $	277.000	277.000	287.000	297.000	307.000	317.000	317.000
PERINDUSTRIAN									
78	Pertumbuhan industri	Persen	2,35	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	2,90
TRANSMIGRASI									
79	Persentase transmigran yang diberangkatkan	Persen	19	20	22	24	25	27	27
KELAUTAN DAN PERIKANAN									
80	Produksi Perikanan	Ton	102.605,43	106.102,91	108.224,97	110.389,47	112.597,26	114.849,20	114.849,20
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG									
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN									
81	Nilai LPPD	Persen	3,1345	3,1346	3,1347	3,1348	3,1349	3,135	3,1350

NO	ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
82	Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Persen	100	100	100	100	100	100	100
83	Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
84	Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Bidang Administrasi Umum dan Kesra	Persen	100	100	100	100	100	100	100
85	Cakupan Perda Inisiatif DPRD	Persen	40	40	44	44	44	40	40
KEUANGAN									
PERENCANAAN PEMBANGUNAN									
86	Persentase RKPD yang Selaras dengan RPJMD	Persen	100	90	93	95	98	100	100
87	Persentase Renstra OPD yang Selaras dengan RPJMD	Persen	100	90	93	95	98	100	100
88	Persentase Renja OPD yang selaras dengan RKPD	Persen	100	90	93	95	98	100	100
KEUANGAN									
89	Nilai Realisasi PAD	Rp. Milyar	217,07	250,32	267,82	286,7	307,1	329,15	329,15
90	Penetapan APBD dan Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu	Status	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
91	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (Struktural)	Persen	34,81	39	40	50	55	60	60
92	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil	Persen	5,26	7,89	10,53	13,16	15,79	18,42	18,42

NO	ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
	keputusan di lembaga eksekutif (eselon II)								
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
93	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
PENGAWASAN									
94	Persentase Unit Layanan Yang ditetapkan sebagai Zona Integritas	Persen	0	6,06	12,12	18,18	24,24	30,30	30,30
95	Persentase OPD mencapai Maturitas SPIP Level 3	Persen	51,16	60,47	69,77	79,07	88,37	100,00	100,00
96	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaanyang telah ditindaklanjuti	Persen	90,00	91,00	91,49	92,01	92,53	93,55	93,55
97	Persentase OPD dengan nilai AKIP A	Persen	23,26	34,88	51,16	67,44	83,72	100,00	100,00
98	Persentase OPD memiliki nilai/indeks Reformasi Birokrasi 83,85	Persen	23,26	37,21	51,16	65,12	81,40	100,00	100,00
99	Persentase APIP yang memiliki sertifikasi standar kompetensi	Persen	100	100	100	100	100	100	100,00

8.2. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kabupaten Lombok Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten termasuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal untuk Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, yang terdiri atas :

8.2.1. Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Kabupaten Lombok Barat sesuai kewenangannya melaksanakan jenis pelayanan pada SPM Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan. Secara lebih teknis, SPM Pendidikan dijabarkan pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dan dapat dipastikan seluruh upaya pemenuhan SPM Pendidikan adalah dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah yaitu Peningkatan Rata – Rata Lama Sekolah dan Peningkatan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Lombok Barat.

Berikut adalah target pencapaian SPM Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat :

Tabel 8. 3 Indikator SPM Pendidikan

No	INDIKATOR KINERJA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN	SATUAN	KONDISI TAHUN 2018	INDIKATOR CAPAIAN KINERJA RENSTRA 2019-2023 (TAHUN)					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	**SPM Pendidikan Anak Usia Dini**								
1.1	6 Buah Buku Gambar Dalam Kondisi Baru Per Peserta Didik Per semester	%	100	100	100	100	100	100	100
1.2	1 Set Alat mewarnai paling sedikit 12 warna dalam kondisi baru per peserta didik per semester	%	100	100	100	100	100	100	100
1.3	Guru Pendidikan Anak Usia Dini Paling rendah memiliki ijazah diploma IV (DIV) atau sarjana S1 Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Kependidikan Lain Atau psikologi	%	43,89	50,00	55,00	65,00	70,00	80,00	80,00

NO	ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
KESEHATAN									
27	Angka Kematian Bayi	Per 1000 KH	2,65	2,30	2,25	2,20	2,15	2,10	2,10
28	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	35,50	35,00	34,75	34,50	34,25	34,00	34,00
29	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	IKS	0,17	0,20	0,30	0,40	0,40	0,40	0,40
30	Persentase stunting	Persen	28,96	27,00	26,00	25,00	24,00	23,00	23,00
31	Pemenuhan Indikator SPM RSUD	Indikator	63	65	70	75	80	99	99
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG									
32	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	Persen	62,86	66,25	67,50	68,75	70,00	71,25	71,25
33	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	Persen	50,22	53,48	55,11	56,74	58,37	60	60
34	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak	Persen	85,93	86,28	86,46	86,64	86,82	87,00	87,00
35	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum	Persen	78,65	79,76	80,32	80,88	81,44	82,00	82,00
36	Persentase Saluran Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Persen	56,16	57,44	58,08	58,73	59,37	60,00	60,00
PERUMAHAN PERMUKIMAN									
37	Persentase Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh	Persen	47,31	47,51	47,69	47,87	48,07	48,27	48,27
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
38	Persentase Pelanggaran PERDA yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100
39	Indeks Risiko Bencana	Indeks	158,3	150,39	142,87	135,72	128,94	123,58	123,58

No	INDIKATOR KINERJA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN	SATUAN	KONDISI TAHUN 2018	INDIKATOR CAPAIAN KINERJA RENSTRA 2019-2023 (TAHUN)					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
2.10	Satuan Pendidikan SD memiliki Tenaga Penunjang dan memiliki Ijazah SMA / sederajat	%	30,60	32,00	35,00	37,00	40,00	45,00	45,00
2.11	Guru Mapel pada jenjang SMP memiliki ijazah paling rendah diploma IV atau Sarjana S 1	%	82,19	85,00	87,50	90,00	92,50	95,00	95,00
2.12	Guru Mapel pada jenjang SMP memiliki sertfikat pendidik	%	36,97	40,25	40,50	40,75	4,85	50,00	50,00
2.13	Kepala Sekolah SMP pada Jenjang SMP memiliki Ijazah Paling Rendah Diploma IV atau Sarjana S1	%	100	100	100	100	100	100	100
2.14	Kepala Sekolah Pada Jenjang SMP memiliki sertfikat pendidik	%	100	100	100	100	100	100	100
2.15	Kepala Sekolah pada jenjang SMP memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah	%	0,00	5,00	10,00	13,50	15,00	20,00	20,00
2.16	Satuan Pendidikan SMP memiliki tenaga penunjang dan memiliki ijazah SMA / sederajat	%	56,88	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00
2.17	Jumlah Anak Usia 7s.d 12 Tahun Pada kabupaten Kota	Jumlah	76.629	77,40	78,17	78,95	79,74	80,54	80,54
2.18	Jumlah Anak Usia 7-12 Tahun Pada Kabupaten Kota yang sudah tamat	Jumlah	12.238	12,36	12,48	12,61	12,73	12,86	12,86
2.19	Jumlah Anak Usia 7 -12 Tahun pada kabupaten / kota yang sedang dibelajarkan	Jumlah	76.493	77,26	78,03	78,81	79,60	80,39	80,39
2.20	Jumlah Anak Usia 13 -15 Tahun Pada Kabupaten / Kota	Jumlah	38.319	38,70	39,09	39,48	39,87	40,27	40,27
2.21	Jumlah Anak Usia 13 -15 Tahun pada Kabupaten / kota yang sudah tamat	Jumlah	11.083	11,19	11,31	11,42	11,53	11,65	11,65
2.22	Jumlah Anak Usia 13 – 15 Tahun pada Kabupaten / Kota yang sedang dibelajarkan	Jumlah	37.373	37,75	38,12	38,51	38,89	39,28	39,28
3	**SPM KESETARAAN**								
3.1	1 (SET) Paket Modul Belajar sesuai denga kurikulum per peserta didik per tahun	%	100	59,00	60,25	60,75	70,00	75,20	75,20
3.2	1 Set Perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per peserta didik per semester	%	100	100	100	100	100	100	100
3.3	Tutor Pendidikan kesetaraan paling rendah memiliki ijazah diploma IV (DIV) atau Sarjana S1	%	71,25	74,50	77,75	77,80	88,25	95,00	95,00
3.4	Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan memiliki ijazah paling rendah Ijazah diploma IV atau sarjana S1	%	79,30	83,25	85,50	88,25	89,00	90,00	90,00
3.5	Satuan Pendidikan Kesetaraan memiliki Tenaga Penunjang Paling Rendah Berijazah SMA / Sederajat	%	40,25	40,70	50,50	60,00	60,30	70,00	70,00
3.6	Jumlah Anak usia 7 -18 Tahun pada Kabupaten / Kota	Jumlah							
3.7	Jumlah Anak Usia 7 -18 Tahun pada Kabupaten / Kota yang sudah tamat pendidikan kesetaraan	Jumlah							

No	INDIKATOR KINERJA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN	SATUAN	KONDISI TAHUN 2018	INDIKATOR CAPAIAN KINERJA RENSTRA 2019-2023 (TAHUN)					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
3.8	Jumlah Anak Usia 7 – 18 Tahun pada Kabupaten / kota yang sedang dibelajarkan	Jumlah							

8.2.2. Kesehatan

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menerapkan SPM Bidang Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan sesuai kewenangan Kabupaten/Kota yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif terdiri atas :

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
4. Pelayanan kesehatan balita
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melits
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinveksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia *(Human Immunodeficiency Virus)*

Indikator SPM pada Dinas Kesehatan berjumlah 12 indikator yang merupakan *outcome* dari program yang dilaksanakan Dinas Kesehatan. Berikut adalah target pencapaian SPM Pendidikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat :

Tabel 8. 4 Indikator SPM Kesehatan

No	INDIKATOR KINERJA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN	SATUAN	KONDISI TAHUN 2018	INDIKATOR CAPAIAN KINERJA RENSTRA 2019-2023 (TAHUN)					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	%	15,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00
2	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	1,45	1,42	1,40	1,37	1,35	1,33	1,33
3	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	22,98	22,98	22,98	22,98	22,98	22,98	22,98
4	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	29,84	34,82	37,79	41,04	44,59	48,45	48,45
5	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	%	0,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	70,00
6	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	94,78	95,00	96,00	97,00	98,00	100,00	100,00
7	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	98,93	97,73	97,94	96,77	96,99	95,85	95,85
9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	%	88,32	88,41	88,51	88,60	88,69	88,78	88,78
10	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	%	18,91	18,77	18,89	19,01	19,13	19,26	19,26
11	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	92,33	92,34	92,36	92,37	92,38	92,39	92,39
12	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	95,39	95,66	95,80	96,07	96,21	96,48	96,48

8.2.3. Pekerjaan umum

Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Repulbik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jenis pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari – hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Tabel 8. 5 Indikator SPM Pekerjaan Umum

No	INDIKATOR KINERJA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM	SATUAN	KONDISI TAHUN 2018	INDIKATOR CAPAIAN KINERJA RENSTRA 2019-2023 (TAHUN)					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase Jumlah Rumah Tangga Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui	Persen	78,65	79,76	80,32	80,88	81,44	82,00	82,00

No	INDIKATOR KINERJA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM	SATUAN	KONDISI TAHUN 2018	INDIKATOR CAPAIAN KINERJA RENSTRA 2019-2023 (TAHUN)					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
	SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Perpipaan Terlindungi								
2	Proporsi Rumah Tangga Dengan Sanitasi Layak	Persen	85,93	86,28	86,46	86,64	86,82	87,00	87,00

8.2.4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Repulbik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

Tabel 8. 6 Indikator SPM Perumahan dan Permukiman

No	INDIKATOR KINERJA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN PERMUKIMAN	SATUAN	KONDISI TAHUN 2018	INDIKATOR CAPAIAN KINERJA RENSTRA 2019-2023 (TAHUN)					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase Rumah Korban Bencana Yang ditangani	Persen	-	100	100	-	-	-	100

8.2.5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Sub Bidang Urusan Bencana Daerah

Standar Pelayanan Minimal Sub Bidang Urusan Bencana Daerah dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

1. Pelayanan informasi rawan bencana
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat

melaksanakan kegiatan pelayanan informasi rawan bencana melalui penyusunan kajian risiko bencana dan komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana. Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dilaksanakan melalui penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontinjensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana dan penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Sedangkan untuk kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dilaksanakan melalui respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana dan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana serta pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

Seluruh aktivitas terkait pemenuhan SPM kebencanaan ini dilaksankan oleh BPBD dan menjadi indikator kegiatan yang secara lebih teknis dituangkan dalam Renstra BPBD.

8.2.6. Sosial

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Stant. Jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

1. Rehabilitasi Sisual dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti sosial
2. Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlanter di luar panti sosial
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Tabel 8. 7 Indikator SPM Sosial

No	INDIKATOR KINERJA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL	SATUAN	KONDISI TAHUN 2018	INDIKATOR CAPAIAN KINERJA RENSTRA 2019-2023 (TAHUN)					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah Gepeng diluar panti yang mendapatkan rehabilitasi dan bantuan sosial/pemenuhan kebutuhan dasarnya (SPM)	Org	25	Org	5	5	5	5	25
2	Jumlah ODK diluar panti yang mendapatkan rehabilitasi dan bantuan sosial/pemenuhan kebutuhan dasarnya (SPM)	Org	40	Org	8	8	8	8	40
3	Jumlah Anak Terlantar diluar panti yang mendapatkan rehabilitasi dan bantuan sosial/pemenuhan kebutuhan dasarnya (SPM)	Org	25	Org	5	5	5	5	25
4	Jumlah Lanjut Usia Terlantar diluar panti yang mendapatkan rehabilitasi dan bantuan sosial/pemenuhan kebutuhan dasarnya (SPM)	Org	30	Org	6	6	6	6	30
5	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasarnya serta mendapatkan dukungan Layanan Psiko Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat (SPM)	jiwa	15.250	jiwa	3.050	3.050	3.050	3.050	15.250
6	Jumlah eks Korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan program pemulihan sosial (SPM)	jiwa	15.250	jiwa	3.050	3.050	3.050	3.050	15.250

BAB IX

PENUTUP

BAB IX
PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 – 2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati – Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2019 – 2024 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005 – 2025 serta memperhatikan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 – 2023. Penyusunan RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 – 2024 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan perencanaan teknokratik, partisipatif, politis dan *top – down* serta *bottom up.* Dimulai dengan penyusunan RPJMD teknokratik sebelum terpilihnya Bupati – Wakil Bupati secara definitif, kemudian pendekatan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan pada proses penyusunan RPJMD, dilanjutkan proses pendekatan politis yang dilaksanakan dengan melibatkan DPRD dalam pembahasannya serta melalui pendekatan *top – down* serta *bottom up* yang dilakukan melalui proses musrenbang dan konsultasi publik RPJMD.

9.1. Pedoman Transisi

Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024 – 2029, maka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005 – 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 – 2024 merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati – Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program – program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif yang dijadikan pedoman oleh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, RKPD dan perencanaan penganggaran Tahun 2020 – 2024. RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 – 2024 ditetapkan dengan kaidah – kaidah sebagai berikut :

1. Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Barat melalui Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat, berkewajiban melaksanakan program – program dalam RPJMD Tahun 2019 – 2024 dengan sebaik – baiknya.
2. Bupati berkewajiban mendorong partisipasi masyarakat dan pelaku dunia usaha untuk turut serta mewujudkan pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Lombok Barat.
3. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 – 2024 dijabarkan dalam RKPD mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagai landasan penyusunan KUA – PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang memuat Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 – 2024.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 – 2024 dengan Renstra Perangkat Daerah masing – masing.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 – 2024.
7. Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 – 2024 kepada masyarakat.
8. Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah yang dinilai tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 – 2024.

9. DPRD berkewajiban membahas KUA – PPAS yang diajukan Bupati dalam rangka penyusunan RAPBD dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD untuk menjamin kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 – 2024.

BUPATI LOMBOK BARAT,

Ttd

H. FAUZAN KHALID

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Soekarno Hatta Giri Menang – Gerung Kab. Lombok Barat
Tlp. 681442 - Provinsi Nusa Tenggara Barat